



RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)
KABUPATEN ALOR
TAHUN 2025-2029

Dengan Spirit
ALOR BERKEMAS
Menuju
ALOR EMAS
2045



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN :

8

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah Dokumen perencanaan perangkat daerah priode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program prangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah focus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemangku ...

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Alor.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Alor.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Alor.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini untuk:
 - a. menyediakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan;
 - b. sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi Bupati serta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; dan
 - c. memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten agar tercipta kebijakan yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, termasuk tantangan perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi global.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. menjabarkan Visi, Misi, dan program Bupati terpilih dalam bentuk kebijakan, strategi, dan arah pembangunan daerah yang konkret dan terukur selama 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. menjadi pedoman perencanaan bagi PD dalam menyusun Renstra sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan makro Daerah dan implementasi sektoral;
 - c. mengintegrasikan kebijakan Pembangunan Daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga program-program yang disusun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
 - e. mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta isu strategis daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi; dan
 - f. menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;

g. memastikan ...

J

- g. memastikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan; dan
- h. mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan lingkungan guna menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial ekonomi.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. BAB VI Penutup
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI ALOR,

ISKANDAR LAKAMAU

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 25 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI O. ALELANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOREG 02/2025...

PENJELASAN

PENJELASAN ...

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat dan daerah.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan arah kebijakan daerah pada masa mendatang melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah dan bawah atas. Secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial.

PJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, isu strategis, serta tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi yang semakin nyata. Perubahan iklim yang berdampak kerusakan lingkungan, polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari *The Triple Planetary Crisis* telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi. Fenomena global ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Kabupaten Alor sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan, banjir, dan badai tropis, juga mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak lingkungan. Oleh karena itu, dokumen rancangan awal RPJMD ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman lingkungan global.

Dengan ...

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata di wilayah Kabupaten Alor, maka penyusunan

rancangan awal RPJMD ini mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ketahanan lingkungan dan adaptasi terhadap resiko bencana. Melalui perencanaan yang matang dan berbasis data, Kabupaten Alor berupaya memastikan pembangunan yang inklusif dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan global. Penyusunan rancangan awal RPJMD ini juga mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 619

LAMPIRAN...



Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan tuntunan-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini menjadi arah kebijakan strategis pembangunan daerah untuk periode lima tahun mendatang, sekaligus menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja, mengelola sumber daya, dan menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah.

RPJMD ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik yang mengedepankan data dan analisis empiris, serta selaras dengan pendekatan partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam dokumen ini tergambar dengan jelas keterkaitan antara isu strategis daerah, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan, hingga penjabaran indikator kinerja utama yang terukur dan terarah.

Penyusunan RPJMD ini juga mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan regional, termasuk proyeksi makro ekonomi, demografi, geopolitik, serta ancaman perubahan iklim. Dengan demikian, arah pembangunan Kabupaten Alor ke depan dirancang untuk tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan.

Visi pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan dirumuskan secara aspiratif dan strategis, mencerminkan semangat transformasi menuju peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, dan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif. Melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, kami berkomitmen menghadirkan perubahan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Alor.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini hingga selesai dengan baik. Dokumen RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan kesepakatan kolektif arah pembangunan Kabupaten Alor yang harus dijaga, diwujudkan, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Akhirnya, besar harapan kami agar RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengakselerasi pembangunan dan memperkuat sinergi lintas sektor serta kolaborasi multipihak dalam mewujudkan Alor yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Kalabahi, 16 Agustus 2025
Bupati Alor

Iskandar Lakamau, SH.MSi



Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.	9
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	9
1. Maksud	9
2. Tujuan.....	10
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
BAB II.....	1
GAMBARAN UMUM DAERAH	1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah.....	1
2.1.1.1. Letak Geografis.....	1
2.1.1.2. Administratif	2
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	4
2.1.2.1. Pertanian	4
2.1.2.2. Perkebunan.....	5
2.1.2.3. Peternakan	6
2.1.2.4. Bidang Kelautan dan Perikanan	7
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	8
2.1.3.1. Status Air	8
2.1.3.2. Status Pangan	11
2.1.3.3. Tutupan Lahan	12
2.1.3.4. Bentang Alam.....	13
2.1.3.5. Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	15
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	16
2.1.4.1. Ketahanan Energi.....	16
2.1.4.2. Air Minum	17
2.1.4.3. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19
2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan	20
2.1.4.5. Ketidacukupan Konsumsi Pangan	23
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	24
2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	24
2.1.5.2. Persampahan	25
2.1.5.3. Rumah Menurut Akses Sanitasi	27
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	29
2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana	29
2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah	32
2.1.6.3. Kondisi Iklim dan Cuaca	33
2.1.6.4. Curah Hujan	35



2.1.7. Demografi	38
2.1.7.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk	38
2.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk	40
2.1.7.3. Rasio Ketergantungan	41
2.1.7.4. Kepadatan Penduduk	42
2.1.7.5. Proyeksi Demografi	43
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	44
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	44
2.2.1.1. Struktur Perekonomian	44
2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	50
2.2.1.3. Mata Pencapaian, Sensitivitas dan Resiliensi Mata Pencapaian Penduduk	50
2.2.1.4. Kemiskinan	53
2.2.1.5. Kemiskinan Ekstrem	54
2.2.1.6. Ketimpangan	55
2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia	56
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua	58
2.2.2.1. Usia Harapan Hidup	58
2.2.2.2. Prevalensi Stunting	58
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata	60
2.2.3.1. Rata Rata Lama Sekolah	60
2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah	60
2.2.3.3. Literasi/ Numerasi	60
2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	62
2.2.3.5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	62
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif	63
2.2.4.1. Program Keluarga Harapan	63
2.2.4.2. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	65
2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	65
2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	67
2.2.6. Ke Penduduk 50luarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	69
2.2.6.1. Indeks Pembangunan Gender	69
2.2.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender	70
2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender	71
2.2.6.4. Indeks Perlindungan Anak	72
2.2.6.5. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73
2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda	73
2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH	74
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia	74
2.3.1.1. Angka Ketergantungan	75
2.3.1.2. Daya Saing Ekonomi Daerah	75
2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	77
2.3.2.1. Indeks Inovasi Daerah	77
2.3.2.2. Nilai AKIP	77
2.3.2.3. Indeks Reformasi Birokrasi	78
2.3.2.4. Rasio PDRB	79
2.3.2.5. Rasio Kewirausahaan	80
2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	81



2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	82
2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau	82
2.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru	827
2.3.4. Transformasi Digital	83
2.3.5. Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global	84
2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	85
2.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	85
2.3.6.2. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak	85
2.3.6.3. Persentase Desa Mandiri	86
2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro	87
2.3.7.1. Gambaran Ekonomi Makro	87
2.3.7.2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	88
2.3.7.3. Tingkat Inflasi	89
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	91
2.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif	91
2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum	91
2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	91
2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik	92
2.4.1.4. Indeks Kepuasan Masyarakat	92
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	92
2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda	93
2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM	94
2.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia	94
2.4.2.4. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	95
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan	96
2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah	96
2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	97
2.4.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	97
1) Urusan Pendidikan	97
2) Urusan Kesehatan	106
3) Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	115
4) Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	119
5) Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	121
6) Urusan Sosial	122
2.4.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	125
1) Urusan Tenaga Kerja	125
2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	126
3) Urusan Pangan	128
4) Urusan Pertanahan	129
5) Urusan Lingkungan Hidup	129
6) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	130
7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	132
8) Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	134
9) Urusan Perhubungan	136
10) Urusan Komunikasi Dan Informatika	139
11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	139
12) Urusan Penanaman Modal	141
13) Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	142
14) Urusan Statistik	143



15) Urusan Persandian	144
16) Urusan Kebudayaan	144
17) Urusan Perpustakaan	146
18) Urusan Kearsipan	146
2.4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	147
1) Urusan Kelautan Dan Perikanan.....	147
2) Urusan Pariwisata.....	148
3) Urusan Pertanian.....	152
4) Urusan Kehutanan	152
5) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral.....	153
6) Urusan Perdagangan.....	154
7) Urusan Perindustrian	155
8) Urusan Transmigrasi	155
2.4.4.4. Pendukung Urusan Pemerintahan	156
1) Sekretariat Daerah.....	156
2) Sekretariat DPRD.....	157
2.4.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	157
1) Urusan Perencanaan.....	157
2) Urusan Keuangan	158
3) Urusan Kepegawaian	159
4) Urusan Penelitian dan Pengembangan	162
5) Urusan Pengelolaan Perbatasan	163
2.4.4.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah	163
1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	165
2.4.5. Standar Pelayanan Minimal	166
2.4.5.1. SPM Bidang Pendidikan	166
2.4.5.2. SPM Bidang Kesehatan.....	167
2.4.5.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	168
2.4.5.4. SPM Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	168
2.4.5.5. SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	169
2.4.5.6. SPM Bidang Sosial.....	171
2.4.6. Evaluasi RPJMD Periode 2020-2025	172
2.4.6.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	172
2.4.6.2. Persentase Penduduk Miskin.....	174
2.4.6.3. Pertumbuhan PDRB ADHK.....	174
2.4.6.4. Pengeluaran Perkapita.....	175
2.4.6.5. Persentase penduduk yang bekerja.....	176
2.4.6.6. Harapan Lama sekolah.....	177
2.4.6.7. Rata-rata lama sekolah.....	177
2.4.6.8. Angka melek huruf usia 15 tahun keatas	178
2.4.6.9. Penurunan Prevalensi Stunting	179
2.4.6.10. Usia Harapan Hidup.....	180
2.4.6.11. Cakupan peserta KB aktif.....	181
2.4.6.12. Indeks Kualitas Lingkungan	182
2.4.6.13. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.....	183
2.4.6.14. Rasio PAD	184
2.4.6.15. Nilai SAKIP	185
2.4.6.16. Opini BPK Terhadap LKPD	187



2.5. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	188
2.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	189
2.5.1.1. Pendapatan	189
2.5.1.2. Belanja	194
2.5.1.3. Pembiayaan	196
2.5.1.4. Neraca Daerah	198
2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024	200
2.5.2.1. Proporsi Anggaran	200
2.5.2.2. Analisis Fiskal Daerah	202
2.5.2.3. Ruang Fiskal	206
2.5.2.4. Kemandirian Daerah	207
2.5.2.5. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah	207
2.5.2.6. Kerangka Pendanaan	208
2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030	208
2.5.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah	212
2.5.3.2. Proyeksi Belanja Daerah	212
2.5.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah	212
2.5.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran	212
2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	214
2.6.1. Identifikasi Permasalahan	214
2.6.1.1. Transformasi Sosial	214
2.6.1.2. Transformasi Ekonomi	222
2.6.1.3. Transformasi Tata Kelola	229
2.6.1.4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	231
2.6.1.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	233
2.6.1.6. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	236
2.6.1.7. Daya Saing Daerah	241
2.6.2. Isu Strategis Daerah	245
2.6.2.1. Isu Global	245
2.6.2.2. Isu Strategis Nasional	248
2.6.2.3. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur	252
2.6.2.4. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Alor	257
2.6.2.5. Keterkaitan Isu Strategis daerah dengan Permasalahan Daerah	269
BAB III	1
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	1
3.1.1. Visi	1
3.1.1.1. Latar Belakang Perumusan Visi Daerah	1
3.1.1.2. Tinjauan Visi RPJPD, RPJMN dan RPJPD Provinsi NTT	1
3.1.1.3. Visi Kabupaten Alor 2025-2029	6
3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2029	8
3.2.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berkualitas	9
3.2.2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Alam	10
3.2.3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah Berwawasan Lingkungan	11
3.2.4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	11
3.2.5. Memperkuat stabilitas keamanan gatra wilayah, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memperkuat tatanan kehidupan kemasyarakatan	11



3.3.	TUJUAN DAN SASARAN.....	14
3.3.1.	Tujuan	14
3.3.2.	Sasaran.....	15
3.4.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD	23
3.4.1.	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	23
3.4.1.1.	Strategi Pembangunan Daerah.....	23
3.4.1.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	29
3.5.	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	31
	TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD	40
BAB IV		1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		1
4.1.	RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	1
4.2.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	30
3.5.1.1.	Indikator Kinerja Utama.....	30
3.5.1.2.	Indikator Kinerja Daerah.....	31
BAB V.....		1
PENUTUP.....		1
5.1.	KAIDAH PELAKSANAAN	2
5.2.	PEDOMAN TRANSISI.....	2
5.3.	PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	3

Tabel 2 1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa.....	3
Tabel 2 2 Produktivitas Perkebunan Tahun 2020-2024	5
Tabel 2 3 Perkembangan Populasi Peternakan Tahun 2020 – 2024	6
Tabel 2 4 Status Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Alor.....	10
Tabel 2 5 Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Alor.....	11
Tabel 2 6 Jenis Tutupan Lahan Kabupaten Alor.....	12
Tabel 2 7 Konsumsi Energi Listrik Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	17
Tabel 2 8 Persentase Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum	17
Tabel 2 9 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Oleh Perumda Air Minum Nusa Kenari Tahun 2023	18
Tabel 2 10 Ketersediaan Pangan untuk Konsumsi PerKapita/Hari	21
Tabel 2 11 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	22
Tabel 2 12 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Alor	24
Tabel 2 13 Sarana dan Prasarana Persampahan	25
Tabel 2 14 Timbulan Sampah dan Penanganan Sampah	26
Tabel 2 15 Data Pengangkutan Sampah Kab. Alor Tahun 2020-2024	27
Tabel 2 16 Data Akses Sanitasi Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	28
Tabel 2 17 Keadaan Iklim dan Cuaca di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2 18 Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm) dan Jumlah Hari Hujan Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2 19 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan	39
Tabel 2 20 Komposisi Penduduk Kabupaten Alor Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024	39
Tabel 2 21 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan	40
Tabel 2 22 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	41
Tabel 2 23 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Alor Per Kecamatan	42
Tabel 2 24 Proyeksi penduduk Kabupaten Alor 2025-2030.....	43
Tabel 2 25 Proyeksi penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	44
Tabel 2 26 PDRB ADHK, PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	44
Tabel 2 27 Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha	45
Tabel 2 28 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Alor dan Provinsi NTT	46
Tabel 2 29 Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	47
Tabel 2 30 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	48
Tabel 2 31 Potensi Investasi di Kabupaten Alor	48
Tabel 2 32 Jenis Layanan dan Waktu Proses Perizinan di Kabupaten Alor.....	49
Tabel 2 33 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin.....	50
Tabel 2 34 Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2020 – 2024	53
Tabel 2 35 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	53
Tabel 2 36 Data kemiskinan ekstrem kabupaten Alor tahun 2021-2024.....	54
Tabel 2 37 Jumlah Balita Stunting Tahun 2020-2024 hasil e-PPBGM	58
Tabel 2 38 Data Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD-SMA Kab. Alor	61
Tabel 2 39 Jumlah Penerima dan Realisasi Program PKH Tahun 2020–2024.....	63
Tabel 2 40 Jumlah Panti dan Penghuni Panti Asuhan Tahun 2020-2024	64
Tabel 2 41 Data Kepesertaan Jamsostek Kab. Alor Tahun 2024	64
Tabel 2 42 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Alor	66
Tabel 2 43 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	66
Tabel 2 44 Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Alor.....	68
Tabel 2 45 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Alor	72
Tabel 2 46 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Alor dan Provinsi NTT	77
Tabel 2 47 Data SAKIP Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	78
Tabel 2 48 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama	81
Tabel 2 49 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kab. Alor	82
Tabel 2 50 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kab. Alor Tahun 2022-2024.....	83
Tabel 2 51 IDM Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	87



Tabel 2 52 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Alor Tahun 2022-2024	97
Tabel 2 53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020-2024	98
Tabel 2 54 Kondisi APK Kab. Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024	99
Tabel 2 55 Kondisi APM Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024	99
Tabel 2 56 Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024	100
Tabel 2 57 Persentase Kelulusan Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 – 2023/2024	101
Tabel 2 58 Jumlah Guru di Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	101
Tabel 2 59 Rasio Sekolah, Kelas, Guru Terhadap Murid Tahun 2020-2024	103
Tabel 2 60 Jumlah dan Kondisi ruang Belajar SD dan SMP Tahun 2020-2024	104
Tabel 2 61 Perkembangan PAUD/TK/RA Tahun 2020-2024	105
Tabel 2 62 Jumlah Kelahiran, Kematian dan Status Gizi Bayi dan Balita	106
Tabel 2 63 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Alor	108
Tabel 2 64 Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran	110
Tabel 2 65 Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2024	111
Tabel 2 66 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kondisi Tahun 2020-2024	112
Tabel 2 67 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020-2024	113
Tabel 2 68 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk	113
Tabel 2 69 Angka Kesaktian dan Kondisi Pelayanan Kesehatan	114
Tabel 2 70 Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2024	117
Tabel 2 71 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024	118
Tabel 2 72 Perkembangan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020 – 2024	120
Tabel 2 73 Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2020 - 2024	121
Tabel 2 74 Jumlah Penerima dan Realisasi Program PKH Tahun 2020-2024	123
Tabel 2 75 Jumlah Panti dan Penghuni Panti Asuhan Tahun 2020-2023	123
Tabel 2 76 Jumlah Sarana Peribadatan Penduduk di Kabupaten Alor Tahun 2024	124
Tabel 2 77 Data Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	125
Tabel 2 78 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama	125
Tabel 2 79 Jenis dan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	127
Tabel 2 80 Ketersediaan Pangan Untuk Konsumsi Perkapita/Hari	128
Tabel 2 81 Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	130
Tabel 2 82 Penduduk Yang Memiliki Administrasi Kependudukan di Kabupaten Alor	131
Tabel 2 83 Data BUMDes Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	133
Tabel 2 84 Jumlah Peserta KB Aktif Perbandingan Kab. Dan NTT Tahun 2020-2024	134
Tabel 2 85 Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2020 – 2024	136
Tabel 2 86 Sarana dan Prasarana Transportasi Bantuan Pemerintah	137
Tabel 2 87 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Alor	139
Tabel 2 88 Jumlah dan Jenis Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024	140
Tabel 2 89 Nilai Investasi di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	141
Tabel 2 90 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Alor Tahun 2024	143
Tabel 2 91 Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	146
Tabel 2 92 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	147
Tabel 2 93 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Alor	148
Tabel 2 94 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	149
Tabel 2 95 Potensi Wisata di Kabupaten Alor	149
Tabel 2 96 Potensi Sumber Daya Energi Listrik	153
Tabel 2 97 Potensi Bahan Galian Mineral dan Batuan	154
Tabel 2 98 Produk Regulasi Daerah yang Ditetapkan Tahun 2020-2024	156
Tabel 2 99 Capaian Sasaran Jangka Menengah Kab. Alor Tahun 2020-2024	157
Tabel 2 100 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Alor	158
Tabel 2 101 Kondisi PNS di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	159
Tabel 2 102 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur PNS Kabupaten Alor	159
Tabel 2 103 Indeks Profesionalitas ASN Kab. Alor Tahun 2021-2024	160
Tabel 2 104 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Peneliti	162



Tabel 2 105 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah	165
Tabel 2 106 Lembaga Non Pemerintah Yang Beraktifitas di Kabupaten Alor	166
Tabel 2 107 Target dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024	166
Tabel 2 108 Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	167
Tabel 2 109 Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	168
Tabel 2 110 Target dan Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	169
Tabel 2 111 Target dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	170
Tabel 2 112 Target dan Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024	171
Tabel 2 113 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	189
Tabel 2 114 Neraca Kabupaten Alor tahun 2020-2023	198
Tabel 2 115 Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	199
Tabel 2 116 Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	201
Tabel 2 117 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Kabupaten Alor	202
Tabel 2 118 Proporsi Belanja Operasi dan Komponen Belanja Kabupaten Alor,Tahun 2020-2024.....	203
Tabel 2 119 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	204
Tabel 2 120 Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Alor.....	204
Tabel 2 121 Proporsi Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Daerah	205
Tabel 2 122 Proporsi Transfer terhadap Total Belanja Daerah	205
Tabel 2 123 Ruang Fiskal Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	206
Tabel 2 124 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	193
Tabel 2 125 Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Alor	194
Tabel 2 126 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.....	195
Tabel 2 127 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah	199
Tabel 2 128 Masalah Pokok: Transformasi Sosial	206
Tabel 2 129 Masalah Pokok Daerah: Transformasi Ekonomi.....	214
Tabel 2 130 Masalah Pokok Daerah: Transformasi Tata Kelola	216
Tabel 2 131 Masalah Pokok: Supremasi Hukum, Stabilitas Dan Diplomasi	219
Tabel 2 132 Permasalahan Pokok: Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi.....	222
Tabel 2 133 Permasalahan: Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	226
Tabel 2 134 Permasalahan Pembangunan: mewujudkan kesinambungan pembangunan	230
Tabel 2 135 Gambaran Isu Strategis Global, Nasional, Regional dan Kabupaten Alor	252
Tabel 2 136 Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Alor Tahun 2025-2029	254
Tabel 3. 1 Keselarasan Visi, Misi Daerah dengan Visi, Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029.....	13
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Alor	16
Tabel 3. 3 Lokasi Prioritas Pengembangan Strategi Tri Palawa dan Lokasi Prioritas Lainnya sesuai RPJMN 2025-202	26
Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah 2025-2029	29
Tabel 3. 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	33
Tabel 3. 6 Tahapan dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029.....	40
Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	2
Tabel 4. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	5
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama.....	30
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah.....	32



Daftar Grafik

Grafik 2. 1 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak Tahun 2020-2024.....	18
Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan FSVA Kabupaten Alor Tahun 2020 – 2024.....	19
Grafik 2. 3 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	17
Grafik 2. 4 Perkembangan PoU Kabupaten Alor dan Prov. NTT Tahun 2020-2024.....	23
Grafik 2. 5 Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2020 – 2024	30
Grafik 2. 6 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024.....	41
Grafik 2. 7 Grafik Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Gini Kab. Alor dan Prov. NTT Tahun 2020- 2024	55
Grafik 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	57
Grafik 2. 9 Data Prevalensi Stunting SKI Kab. Alor Tahun 2021-2024.....	59
Grafik 2. 10 Indeks Pembangunan Gender Kab. Alor, NTT dan Nasional Tahun 2020- 2024...	70
Grafik 2. 11 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT	71
Grafik 2. 12 Grafik Indeks ketimpangan gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT.....	71
Grafik 2. 13 Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Alor dan Provinsi NTT	75
Grafik 2. 14 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Alor Tahun 2021-2024	78
Grafik 2. 15 Status IDM Kabupaten Alor Tahun 2020-2024	86
Grafik 2. 16 Tren Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kab. Alor Tahun 2020-2024.....	89
Grafik 2. 17 Perkembangan IHK dan Laju Inflasi Kab. Alor Tahun 2020-2024	90
Grafik 2. 18 Persentase Penegakan Perda di Kab. Alor Tahun 2020-2024	93
Grafik 2. 19 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2020-2023	95
Grafik 2. 20 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Alor Tahun 2020-2024.	96
Grafik 2. 21 Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024	100
Grafik 2. 22 Akreditasi Sekolah SD/ SMP Tahun 2025	102
Grafik 2. 23 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024	127
Grafik 2. 24 Nilai Matruitas SPIP Kab. Alor Tahun 2022-2024	164
Grafik 2. 25 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.	190
Grafik 2. 26 Persentase Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kab. Alor	190
Grafik 2. 27 Realisasi PAD Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	191
Grafik 2. 28 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	192
Grafik 2. 29 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	193
Grafik 2. 30 Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.....	195
Grafik 2. 31 Prosentase Realisasi Komponen Belanja Daerah	195
Grafik 2. 32 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	196
Grafik 2. 33 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020- 2024	196



Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Alor.....4

Gambar 2. 2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Alor 12

Gambar 2. 3 Dampak Kerusakan Akibat Kenaikan Muka Air Laut dan Banjir Pasang 35

Gambar 2. 4 Proyeksi Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005
(Skenario RCP8.5) 37

Gambar 2. 5 Laju Perubahan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2023
(°C/30 Tahun) 37

Gambar 2. 6 Proyeksi Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 2020-2049
Terhadap 1976-2005 (°C) 38

Gambar 2. 7 Sebaran Mata Pencanharian Penduduk di Kabupaten Alor Tahun 2024 51

Gambar 2. 8 Tingkat Sensitivitas Mata Pencanharian Penduduk di Kabupaten Alor 52

Gambar 2. 9 Tingkat Resiliensi Mata Pencanharian Penduduk 52

Gambar 2. 10 Ilustrasi Permasalahan Pemerintah Kabupaten Alor.....214

Gambar 3. 1 Visi, Misi RPJMN 2025-2029 4

Gambar 3. 2 Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Kabupaten Alor.....24

Gambar 3. 3 Tema dan Tahapan Pembangunan RPJMD 2025-2029.....40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat dan daerah.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan arah kebijakan daerah pada masa mendatang melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan pendekatan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029.

Perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan dua kelompok pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Proses Perencanaan, yang berorientasi pada mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan, meliputi:

1. Pendekatan Teknokratik

Perencanaan disusun berdasarkan metode ilmiah dan kerangka berpikir rasional, berbasis data, informasi, dan analisis teknis untuk menjamin akurasi perumusan tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pendekatan Partisipatif

Melibatkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok rentan, dalam proses formulasi kebijakan perencanaan secara inklusif dan deliberatif.

3. Pendekatan Politis

Perumusan visi dan misi pembangunan daerah dilakukan bersama DPRD, sebagai bagian dari mandat demokratis kepala daerah terpilih, yang kemudian menjadi dasar penyusunan RPJMD.

4. Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up

Memadukan kebijakan dari tingkat pusat (atas) dan aspirasi dari masyarakat di tingkat bawah (desa/kelurahan), melalui forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) lintas jenjang.

b. Pendekatan Substansi Perencanaan, yaitu pendekatan menyangkut dimensi konten atau isi dari perencanaan pembangunan, meliputi:

1. Pendekatan Holistik-Tematik

Memperhatikan keterkaitan antara berbagai sektor, isu strategis, dan wilayah pembangunan sebagai suatu sistem yang utuh, terkoordinasi, dan bertema prioritas.

2. Pendekatan Integratif

Mendorong sinergi lintas sektor dan antar level pemerintahan, dengan menyatukan program, kegiatan, dan kewenangan ke dalam satu kerangka kerja yang terpadu dan fokus pada pencapaian sasaran pembangunan.

3. Pendekatan Spasial

Memperhatikan dimensi kewilayahan atau keruangan dalam perencanaan, termasuk pemetaan potensi wilayah, sebaran sumber daya, serta konektivitas antar kawasan sebagai dasar perencanaan berbasis lokasi (place-based development).

Dengan menerapkan kombinasi pendekatan proses dan substansi secara konsisten, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih komprehensif, kontekstual, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Alor, Iskandar Lakamau, SH. M.Si dan Rocky Winaryo, SH. MH, yang telah resmi dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Sesuai dengan

amanat undang-undang, Bupati dan Wakil Bupati terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen tersebut harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan dalam bentuk Peraturan Daerah oleh DPRD. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis regulasi, dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang strategis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 mencerminkan prinsip-prinsip good governance dan pendekatan teknokratik berbasis kinerja, serta dilaksanakan secara berurutan melalui tahapan berikut:

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
3. Forum Konsultasi Publik
4. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama DPRD
5. Konsultasi Rancangan Awal dengan Pemerintah Provinsi
6. Penyusunan Rancangan RPJMD
7. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD
8. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
9. Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
10. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RPJMD kepada DPRD
11. Pembahasan Ranperda RPJMD bersama DPRD
12. Evaluasi Ranperda oleh Pemerintah Provinsi
13. Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah

Dengan mengikuti tahapan tersebut secara konsisten dan berbasis regulasi, penyusunan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas tinggi, terukur, serta sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat daerah secara nyata.

Rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan

sebelumnya, isu strategis, serta tantangan yang dihadapi daerah, termasuk dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi yang semakin nyata. Perubahan iklim yang berdampak pada kerusakan lingkungan, polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari The Triple Planetary Crisis telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologi. Fenomena global ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Kabupaten Alor sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan, banjir, dan badai tropis, juga mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak lingkungan. Oleh karena itu, dokumen rancangan RPJMD ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman lingkungan global.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata di wilayah Kabupaten Alor, maka penyusunan rancangan RPJMD ini mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ketahanan lingkungan dan adaptasi terhadap risiko bencana. Melalui perencanaan yang matang dan berbasis data, Kabupaten Alor berupaya memastikan pembangunan yang inklusif dan berdaya tahan terhadap perubahan lingkungan global. Penyusunan rancangan RPJMD ini juga mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial agar pembangunan yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
19. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

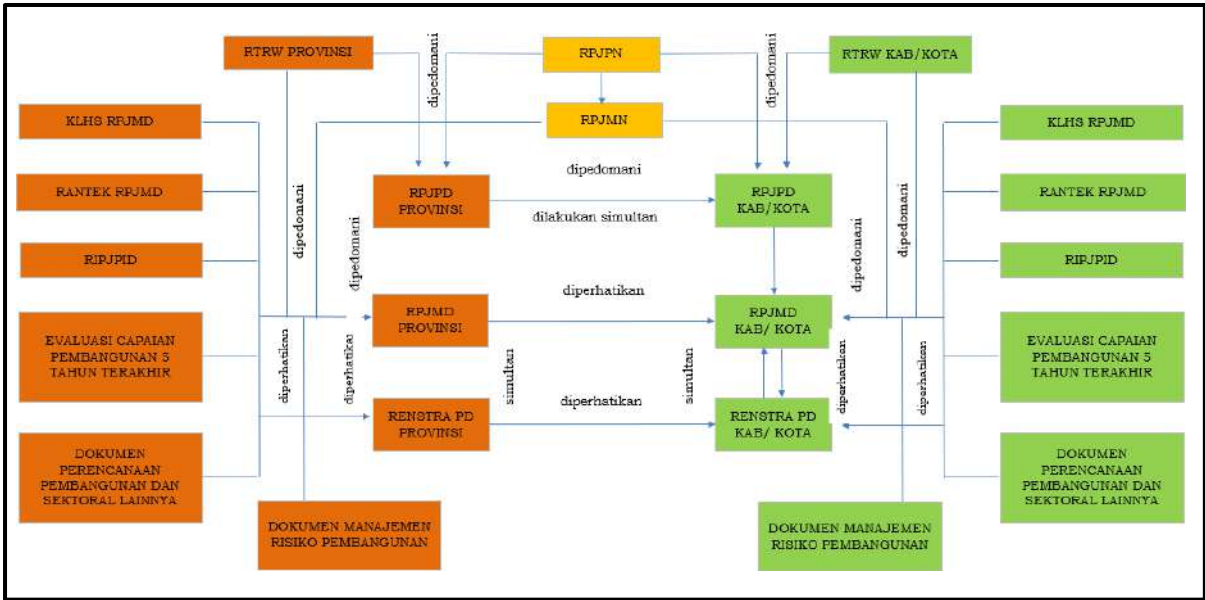
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534).
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 500);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 599);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 601);

38. Perda Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabuaten Alor Nomor 616);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.

Rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan vertikal dan horisontal dengan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional, sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Nasional, RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, RPJPD Kabupaten Alor Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Alor Tahun 2013-2033.

Alur hubungan rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025- 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya terlihat sebagaimana gambar berikut. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Alor, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Alor dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025- 2029 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.

2. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3. Memastikan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten agar tercipta kebijakan yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, termasuk tantangan perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan daya saing daerah dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi global.

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025- 2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih dalam bentuk kebijakan, strategi, dan arah pembangunan daerah yang konkret dan terukur selama lima tahun ke depan;
2. Menjadi pedoman perencanaan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan makro daerah dan implementasi sektoral;
3. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi guna menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga program-program yang disusun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat;
5. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta isu strategis daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk tantangan perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi;
6. Menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya;
7. Memastikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan;

8. Mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan lingkungan guna menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial ekonomi.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan landasan konseptual dan yuridis penyusunan RPJMD 2025–2029, menguraikan pentingnya RPJMD sebagai dokumen strategis pembangunan lima tahunan yang harus selaras dengan RPJPD, RPJMN, serta visi dan misi kepala daerah terpilih, menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, menyampaikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan yang menjadi peta isi dari keseluruhan dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menyajikan profil menyeluruh kondisi daerah yang melandasi perumusan visi dan arah kebijakan pembangunan. Terdiri dari tiga bagian utama yaitu Gambaran Umum Kondisi Daerah; meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan aspek pelayanan publik, termasuk analisis terhadap isu ketahanan pangan, air, energi, perubahan iklim, dan bencana. Selanjutnya Gambaran Keuangan Daerah; berisi data realisasi APBD tahun 2020–2024 dan proyeksi anggaran tahun 2025–2029 yang digunakan sebagai dasar estimasi kapasitas fiskal dalam membiayai pembangunan, serta Permasalahan dan Isu Strategis; berupa identifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi daerah serta isu-isu strategis yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang. Disusun dari hasil evaluasi pembangunan, kajian KLHS, penjaringan aspirasi, serta dinamika global dan nasional.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini merupakan fondasi arah pembangunan yang dituangkan dalam visi dan misi kepala daerah terpilih. Tujuan dan sasaran pembangunan diturunkan secara sistematis dari misi melalui pendekatan manajemen strategik dan logic model. Bab ini juga menyajikan strategi pembangunan dan arah kebijakan daerah, termasuk program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN) dan Asta Cita Presiden. Setiap strategi

dikaitkan dengan tantangan dan peluang pembangunan serta diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini merinci program kerja seluruh perangkat daerah yang menjadi pelaksana pembangunan. Disajikan dalam bentuk daftar program, indikator capaian, target output dan outcome, serta alokasi anggaran indikatif. Disusun dengan prinsip cascading dari sasaran RPJMD ke strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Pada bagian ini memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) untuk menilai sejauh mana RPJMD dapat mendorong perbaikan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

BAB V PENUTUP

Menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan RPJMD sebagai acuan utama pembangunan selama lima tahun ke depan. Disampaikan ringkasan substansi penting dari dokumen RPJMD, serta kaidah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara berkala. Penutupan ini juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, transparansi, dan integritas dalam mencapai visi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Alor ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian Timur Laut, memiliki Luas Wilayah 13.702,50 Km², terdiri dari luas daratan mencapai 2.928,88 Km² dan perairan seluas 10.773,62 Km². Kabupaten Alor termasuk dalam wilayah yang secara astronomis terletak pada posisi 8°6' - 8°36' Lintang Selatan dan 123°48' - 125°48' Bujur Timur. Kabupaten Alor memiliki 15 pulau yang 10 pulau diantaranya berpenduduk, sedangkan 5 pulau lainnya termasuk kategori pulau kosong. Pulau-pulau berpenduduk meliputi Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Pura, Pulau Ternate, Pulau Buaya, Pulau Tereweng, Pulau Kepa, Pulau Kura, Pulau Kangge dan Pulau Lapang; serta 5 pulau tidak berpenduduk, yakni Pulau Sika, Pulau Kapas, Pulau Batang, Pulau Kambing dan Pulau Rusa.

Karakteristik wilayah Alor yang terdiri atas pulau-pulau besar seperti Pulau Alor dan Pulau Pantar serta pulau-pulau kecil lainnya, menjadikan tantangan tersendiri dalam aspek konektivitas dan pelayanan publik, tetapi sekaligus memberikan keunggulan komparatif sebagai simpul maritim di kawasan timur Indonesia.

Dalam konteks pembangunan regional, Kabupaten Alor memiliki kontribusi yang signifikan terhadap wilayah sekitarnya maupun dalam kerangka pembangunan nasional. Kontribusi tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi lokal yang tumbuh berbasis potensi kelautan dan perikanan, pertanian lahan kering, hingga sektor pariwisata berbasis budaya dan ekowisata laut. Keindahan alam bawah laut Alor yang diakui secara internasional serta keberadaan tenun ikat sebagai warisan budaya lokal telah menjadi penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat identitas daerah. Kabupaten Alor juga aktif mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi NTT dalam pengembangan produk unggulan desa melalui program “*One Village One Product*” yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal secara inklusif dan berkelanjutan.



Dari sisi konektivitas, keberadaan Pelabuhan Kalabahi sebagai pintu utama arus barang dan orang, serta Bandara Mali yang menghubungkan Alor dengan pusat-pusat ekonomi regional seperti Kupang dan Lembata, menjadikan daerah ini sebagai simpul penting dalam jaringan logistik dan mobilitas antarwilayah. Peran strategis ini didukung oleh upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dan transportasi antarpulau, yang tidak hanya menunjang aktivitas ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan kesetaraan akses layanan publik.

Selain itu, posisi Alor yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memberikan kontribusi penting dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan dan memperkuat ketahanan nasional. Kabupaten Alor menjadi bagian dari garda terdepan NKRI yang memiliki fungsi geopolitik dan geostrategis, sekaligus menjadi lokasi pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi prioritas nasional. Peran ini diperkuat melalui kehadiran pos pengamanan perbatasan, pelayanan dasar di wilayah terluar, dan penguatan kohesi sosial masyarakat lintas pulau.

Kabupaten Alor juga memberikan kontribusi signifikan dalam pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, terutama melalui perlindungan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati perairan tropisnya. Penetapan perairan Alor sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah terhadap konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan global. Dengan kebijakan berbasis masyarakat seperti pengelolaan zona larang tangkap, ekowisata bahari, dan konservasi spesies langka, Alor tampil sebagai model pembangunan berwawasan lingkungan di kawasan timur Indonesia.

Dengan demikian, letak geografis, karakteristik wilayah, serta kontribusi lintas sektor Kabupaten Alor menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks pembangunan daerah, tetapi juga dalam mendukung agenda pembangunan provinsi, kawasan perbatasan, dan nasional secara keseluruhan. Alor tidak hanya menjadi simpul integrasi wilayah kepulauan, tetapi juga menjadi titik tumbuh ekonomi baru, penjaga batas negara, dan penjaga ekosistem global yang strategis.

2.1.1.2. Administratif

Dari aspek Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Alor memiliki 18 Kecamatan yang terdiri dari 175 Desa/Kelurahan (158 Desa dan 17 Kelurahan). Dari 175 Desa/Kelurahan tersebut, saat ini dalam proses pemekaran Desa sebanyak 23 Desa. Luas wilayah setiap Kecamatan dan jumlah



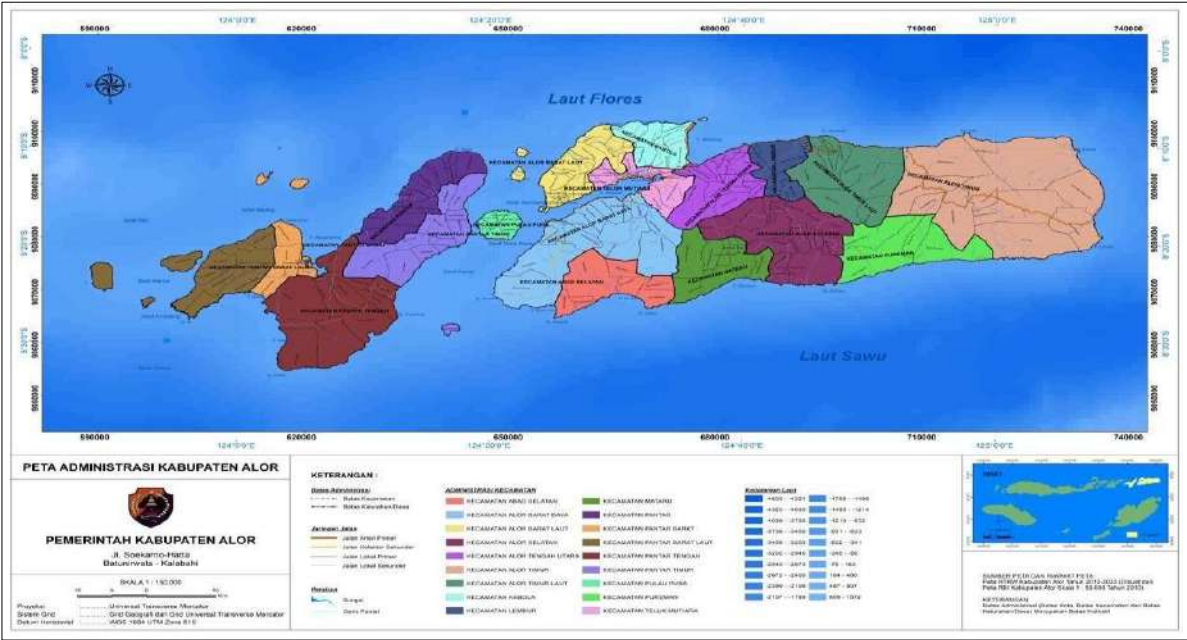
desa/kelurahan serta persentase luasan wilayah terhadap luas total Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 1 Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Administrasi	
			Km ²	%
1	Pantar	11	119,82	4,09
2	Pantar Barat	7	58,71	2
3	Pantar Timur	11	141,44	4,83
4	Pantar Tengah	10	306,02	10,45
5	Pantar Barat Laut	7	150,13	5,13
6	Alor Barat Daya	13	265,59	9,07
7	Mataru	7	102,78	3,51
8	Alor Selatan	14	192,97	6,59
9	Alor Timur	10	562,76	19,21
10	Alor Timur Laut	8	208,49	7,12
11	Pureman	4	147,88	5,05
12	Teluk Mutiara	16	80,18	2,74
13	Kabola	5	73,01	2,49
14	Alor Barat Laut	19	107,96	3,69
15	Alor Tengah Utara	14	125,14	4,27
16	Lembur	6	75,79	2,59
17	Pulau Pura	6	27,83	0,95
18	Abad Selatan	7	182,38	6,22
Alor		175	2.928,88	100

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana Tabel 2.1 menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan terluas adalah Kecamatan Alor Timur 56.276 Ha dengan rasio luas wilayah terhadap luasan wilayah Kabupaten 19,21 persen, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pulau Pura dengan luas 2.783 Ha dengan rasio luas wilayah terhadap luasan wilayah Kabupaten 0,95 persen. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Alor adalah sebelah Utara dengan Laut Flores, sebelah Timur dengan Selat Wetar, sebelah Selatan dengan Selat Ombai dan perairan Negara Republik Demokratik Timor Leste serta sebelah Barat dengan Selat Alor, laut Flores dan Kabupaten Lembata. Batas administrasi wilayah Kabupaten Alor dapat dilihat pada peta administrasi sebagaimana Gambar berikut.



Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Alor

Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Garis pantai dapat berubah karena adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan. Berdasarkan data dari Dokumen RTRW Kabupaten Alor 2013-2033, panjang garis pantai Kabupaten Alor 287,10 Km yang terdapat pada 15 pulau di 18 Kecamatan.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Alor memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat beragam dan bernilai strategis untuk pembangunan berkelanjutan. Potensi ini mencakup sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi terbarukan, pertambangan, serta pariwisata alam dan budaya, yang jika dikelola secara optimal, mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dilakukan secara efisien dengan prinsip keberlanjutan dan kaidah konservasi. Sesungguhnya sumber daya alam yang ada saat ini merupakan titipan bagi generasi mendatang.

2.1.2.1. Pertanian

Mayoritas penduduk di Kabupaten Alor bermata pencaharian sebagai petani sehingga sektor pertanian menjadi salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pertanian merupakan sektor unggulan dan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Alor, dengan rata-rata kontribusi sebesar 32,53 persen pada tahun 2020-2024. Komoditas utama pangan meliputi



jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, serta padi. Selain itu, peternakan seperti babi dan kambing juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dalam PDRB Kabupaten Alor Tahun 2020-2024, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 16 sektor lainnya yakni rata-rata mencapai 32,53 persen. Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor primer yang meliputi bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

Dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB maka dibutuhkan kebijakan pengembangan sub sektor pertanian antara lain peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan.

2.1.2.2. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang dikembangkan di Kabupaten Alor antara lain: kelapa, kopi, jambu mete, cengkeh, kemiri, pinang, kakao dan vanili. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal dan regional. Produksi komoditas utama perkebunan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2 2 Produktivitas Perkebunan Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Uraian	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kemiri	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	6.281	6.026	6.318	7.362,40	7.362
		Produksi (Ton)	3.050	3.050	3.057,60	3.064,95	3.065
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,49	0,51	0,48	0,42	0,43
2	Jambu Mente	Luas areal tanaman mengasihkan (Ha)	12.936	8.539	12.637	12.470,5	12.570
		Produksi (Ton)	3.718,50	3.754,50	3.494,50	3.484,55	3.480
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,29	0,44	0,28	0,28	0,37
3	Kelapa	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	5.681	3.063	5.716	5.473,12	5.501
		Produksi (Ton)	1.419,75	1.419,75	1.690,12	1.691,15	1.691
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,25	0,46	0,30	0,31	0,4
4	Kopi	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	2.128	1.357	2.081,00	2.078,64	2.179
		Produksi (Ton)	300,2	300,2	257,20	254,27	254,27
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,14	0,22	0,12	0,12	0,16
5	Kakao	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	846	696	828,5	759,70	759
		Produksi (Ton)	45,76	49,36	45,71	40,63	40,63
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,05	0,07	0,06	0,05	0,07
6	Pinang	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	1.020	724	1068	1.022,00	1.022
		Produksi (Ton)	225,2	225,2	273,23	259,61	259,61
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,22	0,31	0,26	0,25	0,33
7	Cengkeh	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	860,14	389,14	922,14	864,30	866



No	Komoditi	Uraian	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Vanili	Produksi (Ton)	85,6	85,6	82,67	84,50	84,50
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,10	0,22	0,09	0,10	0,17
		Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	308	273	342,25	363,62	364
		Produksi (Ton)	92,56	102	105,45	100,34	100,34
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,30	0,37	0,31	0,28	0,32
9	Pala	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	165	53	39,25	29,25	29
		Produksi (Ton)	1,38	21,38	4,20	2,25	1,14
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,01	0,40	0,11	0,08	0,25
10	Lada	Luas areal tanaman menghasilkan (Ha)	14	12	12	12,00	12
		Produksi (Ton)	1,14	1,14	0,92	0,92	0,91
		Produktivitas (Ton/Ha)	0,08	0,10	0,08	0,08	0,13

Sumber; Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar komoditi unggulan perkebunan tahun 2024 terus mengalami peningkatan luas areal tanaman dan produksinya dibandingkan tahun 2020. Komoditi yang memiliki tingkat produksi cukup besar dibanding yang lain adalah jambu mente, kemiri dan kelapa. Memperhatikan perkembangan produksi sepuluh jenis komoditi perkebunan maka dibutuhkan kebijakan pengembangan komoditi tertentu berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTT bahwa luas hutan di Kabupaten Alor mencapai 105.073,3704 hektar, terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 61.456,9631 hektar, hutan produksi seluas 19.341,0646 hektar, hutan produksi terbatas seluas 16.571,8156 hektar. Selain itu terdapat juga hutan kemasyarakatan seluas 10.055 hektar dan hutan konservasi (taman wisata alam) seluas 7.073,5271 hektar.

2.1.2.3. **Peternakan**

Perkembangan populasi peternakan di Kabupaten Alor baik untuk ternak besar, ternak sedang dan unggas terus mengalami peningkatan populasi pada setiap tahunnya. Perkembangan populasi peternakan tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 3 Perkembangan Populasi Peternakan Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar (ekor)					
	Sapi	5.403	5.611	5.791	5.994	6.154
	Kuda	110	39	130	115	115
2.	Ternak Kecil (ekor)					
	Babi	112.025	106.218	99.549	103.035	102.078
	Kambing	39.414	49.413	52.451	54.018	55.736
3.	Unggas (ekor)					



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Ayam					
	- Petelur	1.600	1.800	2.800	4.755	10.341
	- Pedaging/ras	205.761	64	814.880	50.622	-
	- Kampung/Buras	249.788	252.901	276.520	281.759	285.824
	- Itik/ bebek	13.775	18.543	27.404	46.870	46.995

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel diatas menunjukkan tingkat populasi jenis peternakan di Kabupaten Alor didominasi oleh ternak babi dan unggas khususnya jenis ternak ayam buras. Untuk ternak besar populasi sapi juga mengalami peningkatan. Orientasi pengembangan peternakan di Kabupaten Alor akan lebih banyak diarahkan pada pengembangan ternak kecil dan ternak unggas sedangkan untuk ternak besar lebih diarahkan pada upaya pembibitan.

2.1.2.4. Bidang Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Alor memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam, mencakup perikanan tangkap (*capture fisheries*), budidaya perikanan (*aquaculture*), serta potensi sumberdaya non hayati lainnya. Perairan Alor kaya akan berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi seperti kerapu, kakap, teri, tenggiri, dan tongkol. Data menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Kabupaten Alor mengalami fluktuasi antara tahun 2016 hingga 2020, dengan total tangkapan mencapai 14.430,49 ton pada tahun 2020. Untuk mendukung praktik perikanan yang berkelanjutan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dalam mengelola potensi yang ada, serta pemberian bantuan fasilitas penangkapan ikan seperti perahu dan peralatan tangkap lainnya.

Kabupaten Alor juga memiliki potensi besar dalam bidang perikanan budidaya, terutama budidaya rumput laut. Data menunjukkan bahwa produksi rumput laut kering mencapai 591,02 ton pada tahun 2024.

Selain itu, potensi luas lahan untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Alor mencapai 53.787 hektar, namun hingga saat ini baru sekitar 28,61 hektar yang dimanfaatkan. Jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah sakol (*Kappaphycus striatum*), yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti pangan, obat-obatan, dan kosmetik.

Kabupaten Alor juga dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Kawasan Konservasi Perairan di wilayah kepulauan Alor merupakan jalur migrasi mamalia laut dan habitat bagi berbagai spesies langka seperti dugong, lumba-lumba, hiu tikus, paus dan ikan mola mola. Pemerintah Kabupaten Alor juga aktif dalam program konservasi, seperti Thresher Shark Conservation Champion, yang melibatkan



pemuda setempat dalam pelatihan dan proyek konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. Sebanyak 24 desa di Kabupaten Alor diusulkan menjadi desa wisata bahari, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengembangan ini difokuskan pada wilayah KKPD, yang mencakup sekitar 80 persen garis pantai Kabupaten Alor.

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, seperti citra satelit, digunakan untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan berdasarkan suhu permukaan laut. Penelitian menunjukkan adanya sekitar 67 titik potensi penangkapan ikan di perairan Kabupaten Alor, yang dapat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan secara efisien dan berkelanjutan.

Dengan potensi perikanan yang melimpah dan beragam, serta dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak, Kabupaten Alor memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan) dan menjaga kelestarian laut.

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Status Air

Daya dukung dan daya tampung air nasional menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 yang ditentukan berdasarkan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat ekoregion, yang meliputi jumlah populasi, potensi dan ketersediaan sumber daya alam, serta bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun. Daya dukung dan daya tampung air nasional ditetapkan berdasarkan (a). Penghitungan ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah pemanfaatan air untuk pertanian, perikanan, perkebunan, dan permukiman/lahan terbangun; (b). Ketersediaan air dapat berasal dari air permukaan dan air tanah tidak tertekan atau air tanah bebas; dan (c). Kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air, periode 1996 sampai dengan 2020.

Sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, berdasarkan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Pulau Bali dan Nusa Tenggara untuk Wilayah Pulau Flores, Lembata dan Pulau Alor, jumlah ketersediaan adalah 6.296.507.961,07 m³/tahun dan pemanfaatan air sebesar 4.471.885.247,73 m³/tahun dengan indikasi status “Belum Terlampaui”.



Status Ketersediaan Air di Kabupaten Alor berdasarkan analisa peta dapat dijabarkan bahwa dari luas lahan 292.887,31 ha, luas wilayah yang belum dimanfaatkan (belum terlampaui) adalah sebesar 207.000,86 ha atau 70,68% dan luas wilayah 29,32% atau 85.886,45 ha yang sudah dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan air. Kecamatan yang termasuk dalam status ketersediaan air belum terlampaui dengan luas lahan terbesar adalah Kecamatan Alor Timur dengan luas 47.721,66 ha, kemudian Kecamatan Alor Barat Daya dengan luas 22.795,70 ha dan Kecamatan Pantar Tengah dengan luas 17.917,41 ha. Kecamatan yang status ketersediaan air telah terlampaui adalah Kecamatan Pantar Tengah dengan luas 9.775,14 ha, Kecamatan Alor Selatan dengan luas 8.694,79 ha serta Alor Timur dengan luas 7.309,53 ha.

Status ketersediaan air per kecamatan dapat dilihat dari data dalam tabel berikut.



Tabel 2 4 Status Kebutuhan dan Ketersediaan Air di Kabupaten Alor

NO	KECAMATAN	KETERSEDIAAN	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
			TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS	TOTAL (m³)	STATUS
1	Kecamatan Abad Selatan	35.903.735,90	13.151.101	Belum Terlampai	13.209.331	Belum Terlampai	13.267.421	Belum Terlampai	13.325.660	Belum Terlampai	13.383.899	Belum Terlampai	13.442.137	Belum Terlampai	13.500.376	Belum Terlampai
2	Kecamatan Alor Barat Daya	66.698.288,57	25.558.496	Belum Terlampai	25.618.890	Belum Terlampai	25.679.259	Belum Terlampai	25.739.641	Belum Terlampai	25.800.022	Belum Terlampai	25.860.404	Belum Terlampai	25.920.785	Belum Terlampai
3	Kecamatan Alor Barat Laut	27.886.043,68	32.307.400	Terlampai	32.374.987	Terlampai	32.442.568	Terlampai	32.510.152	Terlampai	32.577.736	Terlampai	32.645.320	Terlampai	32.712.904	Terlampai
4	Kecamatan Alor Selatan	44.523.575,13	6.714.246,56	Belum Terlampai	6.738.568,91	Belum Terlampai	6.762.847,89	Belum Terlampai	6.787.148,55	Belum Terlampai	6.811.449,22	Belum Terlampai	6.835.853,29	Belum Terlampai	6.860.153,96	Belum Terlampai
5	Kecamatan Alor Tengah Utara	31.686.174,44	24.358.331,63	Belum Terlampai	24.387.359,39	Belum Terlampai	24.416.371,74	Belum Terlampai	24.445.391,79	Belum Terlampai	24.474.411,84	Belum Terlampai	24.503.431,89	Belum Terlampai	24.532.451,94	Belum Terlampai
6	Kecamatan Alor Timur	97.802.299,02	8.627.364,90	Belum Terlampai	8.659.852,00	Belum Terlampai	8.692.290,94	Belum Terlampai	8.724.824,69	Belum Terlampai	8.757.216,98	Belum Terlampai	8.789.750,73	Belum Terlampai	8.822.284,48	Belum Terlampai
7	Kecamatan Alor Timur Laut	41.540.029,73	4.126.799,64	Belum Terlampai	4.139.241,98	Belum Terlampai	4.151.637,43	Belum Terlampai	4.164.094,30	Belum Terlampai	4.176.551,18	Belum Terlampai	4.189.008,05	Belum Terlampai	4.201.388,97	Belum Terlampai
8	Kecamatan Kabola	18.119.486,71	36.636.310,04	Terlampai	36.657.389,99	Terlampai	36.678.390,80	Terlampai	36.699.526,39	Terlampai	36.720.566,77	Terlampai	36.741.702,36	Terlampai	36.762.742,74	Terlampai
9	Kecamatan Lembur	16.339.780,06	8.235.537,53	Belum Terlampai	8.248.097,59	Belum Terlampai	8.260.602,95	Belum Terlampai	8.273.135,65	Belum Terlampai	8.285.668,36	Belum Terlampai	8.298.311,00	Belum Terlampai	8.310.843,71	Belum Terlampai
10	Kecamatan Mataru	27.082.795,32	6.600.567,19	Belum Terlampai	6.575.969,30	Belum Terlampai	6.551.315,47	Belum Terlampai	6.526.755,63	Belum Terlampai	6.502.063,74	Belum Terlampai	6.477.503,90	Belum Terlampai	6.452.944,06	Belum Terlampai
11	Kecamatan Pantar	35.285.354,20	23.938.676,78	Belum Terlampai	23.978.766,10	Belum Terlampai	24.018.709,14	Belum Terlampai	24.058.876,32	Belum Terlampai	24.098.892,50	Belum Terlampai	24.139.059,68	Belum Terlampai	24.179.075,86	Belum Terlampai
12	Kecamatan Pantar Barat	19.225.088,00	19.007.332,16	Belum Terlampai	19.014.127,24	Belum Terlampai	19.020.872,43	Belum Terlampai	19.027.711,65	Belum Terlampai	19.034.481,79	Belum Terlampai	19.041.251,93	Belum Terlampai	19.048.091,15	Belum Terlampai
13	Kecamatan Pantar Barat Laut	33.888.553,41	11.716.953,10	Belum Terlampai	11.739.637,61	Belum Terlampai	11.762.164,59	Belum Terlampai	11.784.936,55	Belum Terlampai	11.807.542,30	Belum Terlampai	11.830.314,26	Belum Terlampai	11.852.920,01	Belum Terlampai
14	Kecamatan Pantar Tengah	69.416.068,90	64.483.713,25	Belum Terlampai	64.517.013,84	Belum Terlampai	64.550.273,46	Belum Terlampai	64.583.451,16	Belum Terlampai	64.616.833,66	Belum Terlampai	64.650.216,17	Belum Terlampai	64.683.393,87	Belum Terlampai
15	Kecamatan Pantar Timur	44.244.358,85	26.396.623,50	Belum Terlampai	26.426.294,21	Belum Terlampai	26.455.825,80	Belum Terlampai	26.485.572,76	Belum Terlampai	26.515.173,91	Belum Terlampai	26.544.920,87	Belum Terlampai	26.574.522,02	Belum Terlampai
16	Kecamatan Pulau Pura	10.764.224,63	593.053,00	Belum Terlampai	604.959,72	Belum Terlampai	616.778,22	Belum Terlampai	628.704,27	Belum Terlampai	640.630,32	Belum Terlampai	652.556,37	Belum Terlampai	664.482,41	Belum Terlampai
17	Kecamatan Pureman	30.500.972,58	359.596,80	Belum Terlampai	364.716,69	Belum Terlampai	369.791,81	Belum Terlampai	374.938,80	Belum Terlampai	379.986,82	Belum Terlampai	385.133,81	Belum Terlampai	390.280,81	Belum Terlampai
18	Kecamatan Teluk Mutiara	22.487.769,62	27.927.622,90	Terlampai	27.952.947,17	Terlampai	27.978.266,81	Terlampai	28.003.578,05	Terlampai	28.028.910,72	Terlampai	28.054.243,39	Terlampai	28.079.554,63	Terlampai
TOTAL		673.394.598,75	340.739.725,82	Belum Terlampai	341.208.150,00	Belum Terlampai	341.675.387,37	Belum Terlampai	342.144.098,70	Belum Terlampai	342.612.036,47	Belum Terlampai	343.081.118,30	Belum Terlampai	343.549.195	Belum Terlampai

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kab. Alor, 202





2.1.3.2. Status Pangan

Ketersediaan pangan di Kabupaten Alor secara luas diartikan sebagai ketahanan pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Alor sebagai konsumen. Ketersediaan pangan dalam Daya Dukung dan Daya Tampung dimaksudkan bahwa luasan wilayah di Kabupaten Alor yang akan dipergunakan untuk memproduksi pangan. Dari data kebutuhan dan ketersediaan pangan untuk 18 kecamatan, bahwa terdapat 3 kecamatan yang memiliki selisih ambang positif (belum terlampaui) yakni Alor Barat Daya, Alor Timur Laut dan Pantar, sedangkan 15 kecamatan lainnya memiliki ambang selisih negatif (terlampaui).

Kecamatan yang belum terlampaui diartikan sebagai status kemampuan lahan untuk ketersediaan pangan yang dihasilkan dari wilayah tersebut belum melebihi kebutuhan pangan, sedangkan kecamatan yang masuk dalam klasifikasi terlampaui diartikan status kemampuan lahan untuk ketersediaan pangan yang dihasilkan dari wilayah tersebut telah melebihi kebutuhan pangan. Dengan demikian status pangan di Kabupaten Alor secara umum telah terlampaui atau kemampuan lahan untuk ketersediaan pangan tidak dapat dikembangkan lagi. Status ketersediaan Pangan tersaji pada tabel berikut.

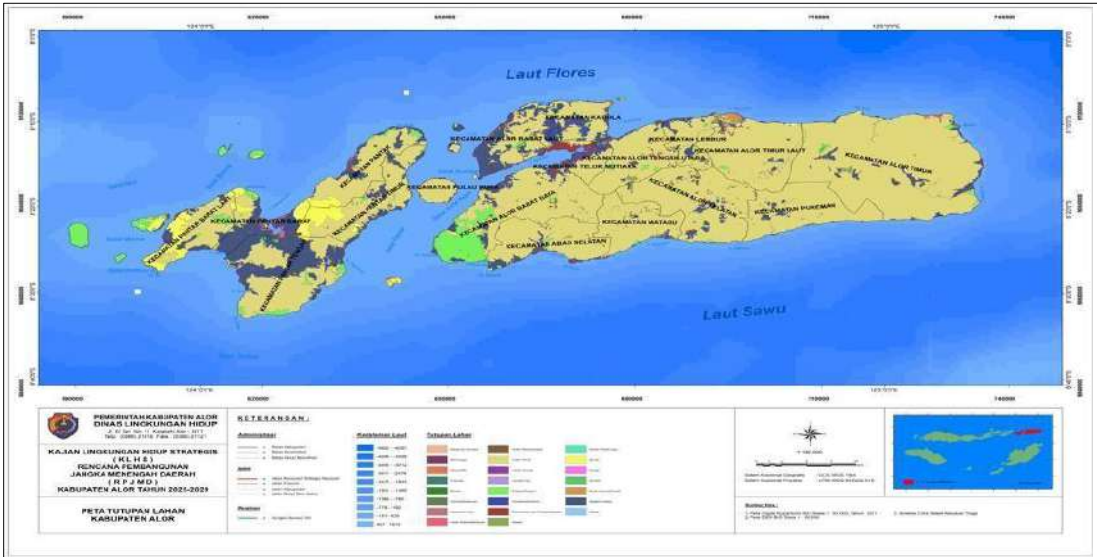
Tabel 2 5 Status Ketersediaan Pangan di Kabupaten Alor

No	Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%
1	Abad Selatan	-	-	14.728,46	100,00
2	Alor Barat Daya	11.630,43	42,04	16.035,46	57,96
3	Alor Barat Laut	-	-	11.067,82	100,00
4	Alor Selatan	-	-	23.001,82	100,00
5	Alor Tengah Utara	-	-	12.496,64	100,00
6	Alor Timur	-	-	55.031,19	100,00
7	Alor Timur Laut	17.773,92	91,18	1.718,97	8,82
8	Kabola	-	-	7.652,21	100,00
9	Lembur	-	-	7.023,92	100,00
10	Mataru	-	-	11.349,58	100,00
11	Pantar	9.300,18	73,81	3.300,03	26,19
12	Pantar Barat	-	-	6.583,97	100,00
13	Pantar Barat Laut	-	-	14.782,23	100,00
14	Pantar Tengah	-	-	27.692,55	100,00
15	Pantar Timur	-	-	15.952,24	100,00
16	Pulau Pura	-	-	2.783,29	100,00
17	Pureman	-	-	15.878,80	100,00
18	Teluk Mutiara	-	-	7.103,37	100,00
Total		38.704,54	13,21	254.182,56	86,79

Sumber: KLHS RPJMD Kab. Alor, 2024

2.1.3.3. Tutupan Lahan

Secara umum kondisi tutupan lahan di Kabupaten Alor didominasi oleh jenis tutupan lahan hutan rimba dengan luas 224.461,63 hektar atau sebesar 76,64 persen dari luas wilayah daratan Kabupaten Alor. Kondisi tutupan lahan yang paling sedikit di wilayah Daratan Kabupaten Alor adalah jenis tutupan lahan waduk dengan luas 0,50 hektar atau sebesar 0,00017 persen dari luas wilayah daratan Kabupaten Alor. Data luasan tutupan lahan tersebut diperoleh dari analisis spasial dari Peta Digital Rupa Bumi Badan Informasi Geospasial (BIG) Skala 1:50.000 Tahun 2021, Peta DEM BIG Skala 1:50.000 dan Analisis Citra Resolusi Tinggi sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Sumber : Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Gambar 2. 2 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Alor

Secara rinci kondisi tutupan lahan di Kabupaten Alor sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2 6 Jenis Tutupan Lahan Kabupaten Alor

No	Tutupan Lahan	Luas	persen
1	Bangunan Bandara	3,42	0,00
2	Bendungan	1,08	0,00
3	Danau/Situ	8,64	0,00
4	Embung	18,11	0,01
5	Estuari	27,94	0,01
6	Gedung/Bangunan	13,74	0,00
7	Hamparan Pasir	255,51	0,09
8	Hutan Bakau/Mangrove	898,47	0,31
9	Hutan Rawa/Gambut	21,07	0,01
10	Hutan Rimba	224.461,63	76,64
11	Lahan Kosong	76,42	0,03
12	Landas Pacu	9,66	0,00
13	Padang Rumput	12.375,56	4,23
14	Perkebunan/Kebun	5.018,95	1,71
15	Permukiman dan Tempat Kegiatan	6.265,48	2,14



No	Tutupan Lahan	Luas	persen
16	Sawah	675,35	0,23
17	Sawah Tadah Hujan	72,19	0,02
18	Semak	10.411,27	3,55
19	Sungai	325,77	0,11
20	Tambak	0,71	0,00
21	Tanah Kosong/Gundul	541,09	0,18
22	Tegalan/Ladang	31.154,94	10,64
23	Waduk	0,50	0,00
	T O T A L	292.887,31	100,00

Sumber: Peta RBI Kabupaten Alor Skala 1:50.000, 2021

2.1.3.4. Bentang Alam

Istilah bentang alam atau bentuk muka bumi merupakan suatu unit dari geomorfologis yang pengelompokannya berdasarkan pada sejumlah karakteristik. Berdasarkan data ekoregion skala 1 : 250.000 yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) jenis bentang alam di wilayah Kabupaten Alor. Secara umum jenis bentang alam yang paling dominan terdapat di wilayah Kabupaten Alor adalah jenis bentang alam Pegunungan Denudasional yang memiliki luas 212.897,27 hektar atau sebesar 72,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor. Jenis bentang alam yang memiliki luas terkecil adalah jenis bentang alam Danau yaitu seluas 19,04 hektar atau 0,01 persen dari luas Wilayah Kabupaten Alor. Jenis-jenis bentang alam tersebut dirinci sebagai berikut.

1. Danau

Danau adalah genangan air permanen pada permukaan lahan. Jenis bentuk lahan Danau terdapat di Kecamatan Alor Timur dan Kecamatan Pantar Tengah. Jenis bentuk lahan Danau ini memiliki luas sebesar 19,04 hektar atau 0,01 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

2. Dataran Fluvial

Dataran ini mempunyai relief relatif rata (flat). Jenis bentuk lahan Dataran Fluvial terdapat di Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur. Jenis bentuk lahan Dataran Fluvial ini memiliki luas sebesar 1.557,59 hektar atau sebesar 0,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

3. Dataran Fluviomarin

Dataran ini mempunyai relief relatif rata (flat). Jenis bentuk lahan Dataran Fluviomarin terdapat di Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan Pantar Barat, dan Kecamatan Pantar Tengah. Jenis bentuk



lahan Dataran Fluviomarin ini memiliki luas 1.200,42 hektar atau 0,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

4. Dataran Fluviovulkanik

Jenis bentuk lahan Dataran Fluviovulkanik terdapat di Kecamatan Alor Barat Daya, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Kabola, dan kecamatan Teluk Mutiara. Jenis bentuk lahan Dataran Fluviovulkanik ini memiliki luas sebesar 4.337,87 hektar atau 1,48 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

5. Dataran Marin berpasir

Jenis bentuk lahan Dataran Marin berpasir terdapat di Kecamatan Alor Timur Laut dan Kecamatan Pantar Tengah. Jenis bentuk lahan Dataran Marin berpasir ini memiliki luas sebesar 417,66 hektar atau 0,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

6. Dataran Organik Koralian

Dataran Organik koralian ini pada umumnya terletak di wilayah pesisir (coastal zone), mempunyai relief datar dan tersusun atas batuan sedimen karbonat koralian. Jenis bentuk lahan Dataran Organik koralian terdapat di Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Lembur, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, dan Kecamatan Teluk Mutiara. Jenis bentuk lahan Dataran Organik koralian ini memiliki luas sebesar 8.901,96 hektar atau 3,04 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

7. Lembah sungai Fluvial

Jenis bentuk lahan Lembah sungai Fluvial terdapat di Kecamatan Abad Selatan, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, dan Kecamatan Lembur. Jenis bentuk lahan ini memiliki luas sebesar 1.133,20 hektar atau 0,39 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

8. Pegunungan Denudasional

Bentuk lahan ini mempunyai relief pegunungan (beda elevasi >200 m) yang tersusun oleh perselingan batuan beku luar (aliran lava) dan piroklastik. Jenis bentuk lahan Pegunungan Denudasional terdapat di Kecamatan Abad Selatan, Alor Barat Daya, Alor Barat Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Alor Timur, Alor Timur Laut, Lembur, Mataru, Pantar, Pantar Barat, Pantar Barat Laut dan Kecamatan Pureman. Jenis bentuk lahan ini memiliki luas sebesar 212.897,27 hektar atau sebesar 72,69 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.



9. Pegunungan Kerucut Vulkanik

Bentuk lahan ini merupakan kerucut vulkanik (volcanic cone) yang mempunyai relief pegunungan dan memiliki lereng bervariasi dari terjal hingga agak miring dan landai. Bentuk lahan ini tersusun secara dominan atas perselingan antara batuan beku luar dari endapan aliran- aliran lava dan piroklastik. Material tersebut sebagai hasil dari aktivitas gunung api hingga aktivitasnya yang terakhir hingga membentuk gunung api stratovulkano. Jenis bentuk lahan ini terdapat di Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pulau Pura. Jenis bentuk lahan Pegunungan Kerucut Vulkanik ini memiliki luas sebesar 10.291,73 hektar atau 3,51 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

10. Pegunungan Lereng Bawah Vulkanik

Jenis bentuk lahan pegunungan lereng bawah vulkanik terdapat di Kecamatan Pantar Barat Laut. Jenis bentuk lahan ini memiliki luas 687,63 hektar atau 0,23 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

11. Perbukitan Denudasional

Jenis bentuk lahan Perbukitan Denudasional terdapat di Kecamatan Abad Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Kabola, Kecamatan Pantar, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar Timur, dan Kecamatan Teluk Mutiara. Jenis bentuk lahan ini memiliki luas sebesar 31.404,53 hektar atau 10,72 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

12. Perbukitan Vulkanik

Jenis bentuk lahan Perbukitan Vulkanik terdapat di Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kecamatan Pantar Tengah dan Kecamatan Pantar Timur. Jenis bentuk lahan ini memiliki luas sebesar 20.038,40 hektar atau 6,84 persen dari luas wilayah Kabupaten Alor.

2.1.3.3. Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan tingkat keragaman atau sifat variasi dalam sistem alam, baik dalam jumlah dan frekuensi. Istilah ini sering dipahami dalam hal keanekaragaman tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang dikandungnya serta ekosistem yang mereka bentuk. Keanekaragaman hayati yang terlihat hari ini adalah hasil evolusi miliaran tahun, yang dibentuk oleh proses alami dan tentu juga ada pengaruh manusia. Ketahanan keanekaragaman hayati suatu wilayah dapat dikaji dari upaya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Dalam rangka melindungi dan



melestarikan keanekaragaman hayati, telah ditetapkan kawasan hutan lindung dan kawasan pelestarian alam atau kawasan hutan konservasi di wilayah Kabupaten Alor. Untuk meningkatkan ketahanan keanekaragaman hayati laut, telah ditetapkan kawasan konservasi perairan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Alor melalui SK Menteri Nomor SK.6615/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTT. Luas kawasan hutan di Kabupaten Alor mencapai 105.073,3704 hektar atau 35,87% dari luas wilayah Kabupaten Alor. Kawasan hutan tersebut terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 61.456,9631 hektar (5,85%), hutan produksi seluas 19.341,0646 hektar (18,41%), hutan produksi terbatas seluas 16.571,8156 hektar (15,77%), hutan kemasyarakatan seluas 10.055 hektar (9,57%) dan hutan konservasi (Taman Wisata Alam) seluas 7.073,5271 hektar (6,73%). Hutan Konservasi (Taman Wisata Alam) di Kabupaten Alor terdapat pada TWA Tuti Adagae seluas 5.706,27 hektar, TWA Pulau Rusa seluas 1.384,65 hektar, TWA Pulau Lapang seluas 239,25 hektar dan TWA Pulau Batang seluas 359,55 hektar.

Pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Alor telah ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Kepulauan Alor. Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Nomor 35/Kepmen-KP/2015 tentang Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan perairan Selat Pantar dan laut sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas keseluruhan 276.693,38 hektar.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Ketahanan Energi

Kabupaten Alor memiliki potensi besar dalam energi terbarukan berupa tenaga surya, mikrohidro, dan panas bumi. Beberapa PLTS telah dibangun di berbagai desa untuk mendukung elektrifikasi daerah. Di sisi lain, potensi bahan galian seperti emas, tembaga, galena, serta pasir dan batu, tersebar di berbagai wilayah dan saat ini masih dalam tahap eksplorasi maupun operasi produksi.

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis pada prinsip ramah lingkungan melalui strategi pengembangan sektoral yang terintegrasi, memperkuat hilirisasi produk, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperluas



infrastruktur pendukung agar potensi tersebut memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Alor.

Konsumsi listrik perkapita kabupaten Alor terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pendekatan konsumsi listrik perkapita kabupaten Alor diperoleh dari data produksi listrik dan listrik terjual dari PT. PLN (Persero) Wilayah Usaha NTT sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2 7 Konsumsi Energi Listrik Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan Listrik (Unit)	37.470	41.421	46.185	51.678	55.453
2	Daya Terpasang (KW)	15.320	19.672	21.573	-	11.940
3	Daya Mampu (KW)	10.152	14.819	20.060	-	11.353
4	Produksi Listrik (KwH)	34.819.385	3.385	41.710	-	3.878.805
5	Listrik Terjual (KwH)	37.116.658	-	40.997	-	3.457.605
6	Jumlah Penduduk	211.872	213.994	216.629	221.536	225.020
7	Konsumsi Energi listrik perkapita (KwH)	175,184	-	0,189	-	15,366

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

2.1.4.2. Air Minum

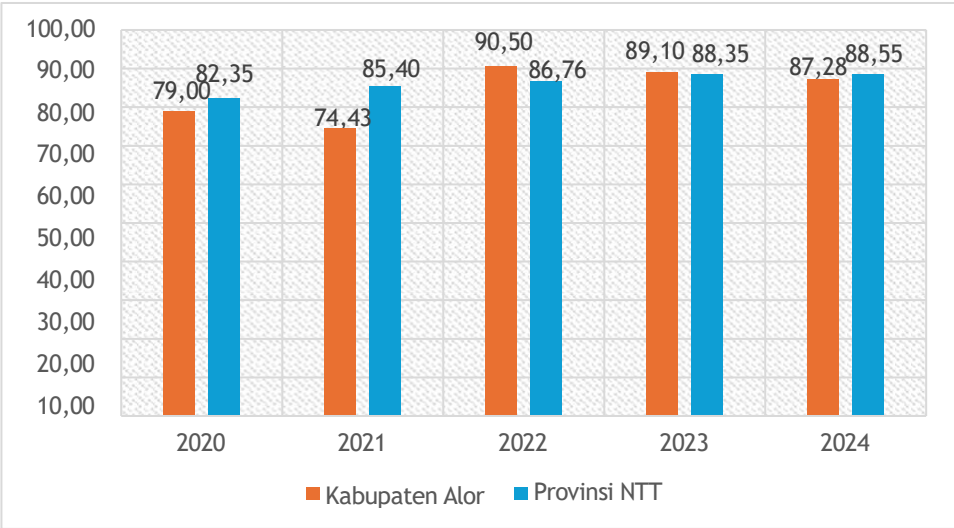
Ketersediaan air minum bagi masyarakat sangat penting untuk menciptakan tingkat kesehatan. Akses air minum masyarakat perkotaan didukung oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Nusa Kenari, sedangkan akses air minum perdesaan didukung oleh layanan sistem Air Minum Perdesaan yang dikelola Pemerintah Desa melalui Badan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM). Persentase masyarakat dalam lingkup rumah tangga terhadap sumber air minum tersaji pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2 8 Persentase Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum

No	Sumber Mata Air	Persentase Rumah Tangga Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Leding	4,71	0,67	3,42	1,95	4,57
2	Air dalam Kemasan	5,14	6,92	6,57	5,5	6,74
3	Sumur bor / Pompa	8,14	13,55	12,52	10,2	13,15
4	Sumur terlindungi	25,79	23,42	22,99	26,64	21,61
5	Sumur tidak terlindungi	6,14	3,55	1,12	0,47	4,52
6	Mata air terlindungi	28,18	24,85	40,75	40,13	37,87
7	Mata air tidak terlindungi	10,17	13,49	5,62	7,05	4,11
8	Air sungai	3,46	7,74	1,89	2,68	4,11
9	Air Hujan	8,26	5,82	4,26	4,68	
10	Lainnya	0	0	0,87	0,7	7,43
	Jumlah	100	100	100	100	104

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Badan Pusat Statisik juga telah mempublikasikan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak. Data akses rumah tangga terhadap air minum layak selama lima tahun terakhir sebagaimana grafik berikut.



Grafik 2. 1 Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Layak Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Alor mengalami fluktuatif pada lima tahun terakhir, sementara untuk provinsi Nusa Tenggara Timur terus bergerak naik dari tahun 2000 hingga 2024. Rata rata akses rumah tangga terhadap air minum layak di kabupaten Alor dibawah rata rata provinsi NTT, hanya di tahun 2022 dan tahun 2023 kabupaten Alor berada di atas Provinsi NTT.

Perkembangan akses air minum juga dapat ditinjau berdasarkan jumlah pelanggan air minum perkotaan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Nusa Kenari meskipun belum semua wilayah perkotaan terlayani air minum dari Permuda Air Minum. Jumlah pelanggan Perumda Air Minum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 9 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Oleh Perumda Air Minum Nusa Kenari Tahun 2023

Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (liter)
Pantar Barat Laut	475	Na
ATL	304	Na
Alor Timur	109	Na
Teluk Mutiara	8.097	819.087
Jumlah	8.975	819.087

Sumber: Perumda Air Minum Nusa Kenari dan BPS Kab. Alor Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah pelanggan air minum perkotaan dari Perusahaan Daerah Air Minum Nusa Kenari terdapat pada 4 kecamatan yakni Kecamatan Pantar Barat Laut, Alor Timur Laut, Alor Timur

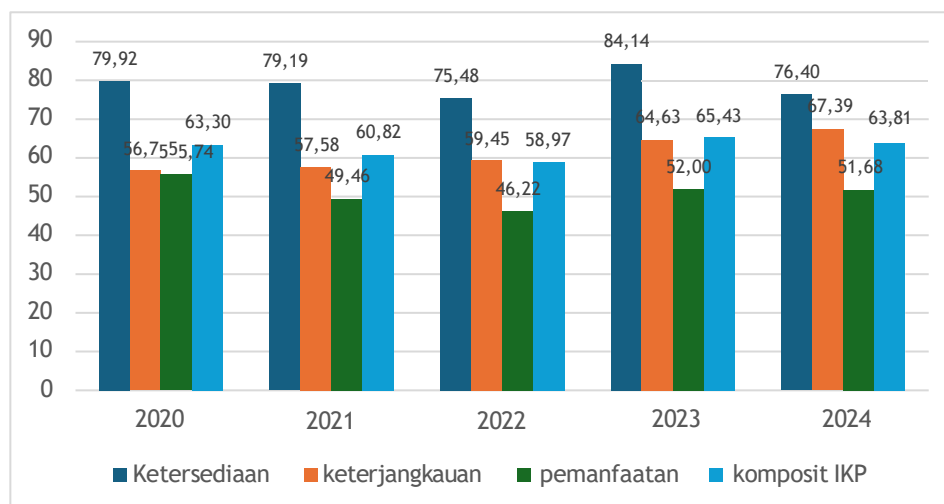


dan Kecamatan Teluk Mutiara dengan jumlah pelanggan sebanyak 8.975 rumah.

Data akses keluarga terhadap air minum juga diperoleh dari Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Jejaring AMPL) Kabupaten Alor. Pada tahun 2024 akses keluarga terhadap air minum layak berdasarkan data Jejaring AMPL Kabupaten Alor bahwa dari 57.596 kepala keluarga, terdapat 50.705 kepala keluarga atau mencapai 88,04 persen yang dapat mengakses air minum layak. Dari keseluruhan jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Alor tersebut, terdapat 34.652 atau 60,16 persen Kepala Keluarga yang mengakses air minum dari jaringan perpipaan sambungan rumah atau memiliki akses air minum layak dan berkelanjutan (aman).

2.1.4.3. Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Alor ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : FSVA Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan FSVA Kabupaten Alor Tahun 2020 – 2024



Grafik diatas menunjukan bahwa Indeks ketahanan dan Kerentanan pangan fluktuatif selama tahun 2020 – 2024 dengan indikasi masih rendahnya aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sebaran tingkat ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Alor dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan pangan, aksesibilitas terhadap sumber pangan, serta stabilitas ekonomi masyarakat. Wilayah dengan kategori rentan dan agak rentan umumnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim, serta infrastruktur yang belum optimal dalam mendukung distribusi pangan. Hasil analisis *Food Security and Vurnerability* (FSVA) Kabupaten Alor tahun 2024 pada indikator rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk dari 175 desa/kelurahan menunjukkan bahwa terdapat 91 desa/kelurahan (52 persen) masih kategori rentan/rawan pangan. Dengan rincian terdapat 27 desa/ kelurahan prioritas I (15,43 persen) 27 desa/kelurahan prioritas II (15,43 persen) dan 37 desa prioritas III (21,14 persen).

2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan. Skor Pola Pangan Harapan sendiri merupakan parameter untuk mengukur seberapa beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat. Skor ini dilihat dari nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Target capaian kualitas konsumsi pangan (skor PPH) dapat terwujud apabila suatu daerah memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Data skor PPH kabupaten Alor tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Pangan Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 3 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Alor Tahun 2020-2024



Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Alor menunjukkan tren peningkatan skor PPH yang konsisten dan positif. Peningkatan skor ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam kualitas konsumsi pangan masyarakat, khususnya dalam hal keberagaman jenis pangan yang dikonsumsi, seperti peningkatan konsumsi sayur, buah, sumber protein hewani dan nabati, serta pengurangan ketergantungan pada sumber karbohidrat tunggal (beras). Capaian pada tahun 2024 dengan skor 81,05 menandakan bahwa pola konsumsi masyarakat Alor semakin mendekati struktur pangan ideal. Hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai program ketahanan pangan dan gizi, seperti pengembangan pangan lokal, edukasi konsumsi pangan beragam, serta pemberdayaan masyarakat melalui pekarangan pangan lestari dan intervensi gizi berbasis keluarga.

Pembangunan ketahanan pangan tidak saja berorientasi pada penguatan struktur pangan. tetapi lebih dari itu diupayakan terciptanya kedaulatan pangan daerah untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga yang sangat tinggi. Gambaran kondisi pangan daerah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2 10 Ketersediaan Pangan untuk Konsumsi PerKapita/Hari

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi (K.Kal)					
	· Hewani	133.90	127.22	83.93	101.01	185,61
	· Nabati	2,380.00	2,979.40	2,823.38	2,384.26	2.235,34
	· Jumlah	2,513.89	3,106.62	2,907.32	2,485.27	2.420,95
2	Protein (gram)					
	· Hewani	19.13	18.15	10.01	10.93	23,24
	· Nabati	49.34	63.26	65.57	55.58	40,16
	· Jumlah	68.48	81.41	75.57	66.52	63,40
3	Lemak (gram)					
	· Hewani	5.86	5.89	4.88	6.35	9,18
	· Nabati	21.76	24.58	29.16	22.71	25,58
	Jumlah	27.63	30.47	34.04	29.05	34,76

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Alor, 2025

Tabel tersebut menunjukkan tingkat konsumsi pangan perkapita perhari penduduk kabupaten Alor yang meningkat dari tahun ke tahun, sehingga ketersediaan pangan utama perlu diupayakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat antara lain berupa rendahnya aksesibilitas antar wilayah sehingga terjadinya disparitas harga pangan. Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui



ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/ perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah). Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2020– 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2 11 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi					
	- Luas tanam (ha)	986	1.013	1.221	912	6.040
	- Luas panen (ha)	947	951	1.188	618	5.763
	- Produksi (ton)	3.324	3.196	3.556	1.958	5.988,6
2	Jagung					
	- Luas tanam (ha)	8.485	8.781	9.223	9.225	8.874
	- Luas panen (ha)	9.131	8.449	9.382	9.016	7.239
	- Produksi (ton)	25.258	23.995	26.916	21.919	28.995,7
3	Ubi Kayu					
	- Luas panen (ha)	2.777	2.463	2.898	2.631	2.492
	- Produksi (ton)	20.629	46.746	35.751	37.892	29.845,6
4	Ubi Jalar					
	- Luas panen (ha)	170	187	255	253	214
	- Produksi (ton)	1.174	2.077	1.885	1.522	1.140
5	Kacang Hijau					
	- Luas panen (ha)	247	181	90	137	187
	- Produksi (ton)	199	147	75,4	109,5	115,7
6	Kacang Tanah					
	- Luas panen (ha)	39	44	60	14	11
	- Produksi (ton)	36	56,95	79,0	15,2	10,23

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Alor dan BPS, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan mengalami peningkatan setiap tahun. Produksi jenis tanaman pangan yang cenderung meningkat adalah padi sawah dan umbi-umbian, sedangkan untuk tanaman hortikultura baik buah-buahan maupun sayuran produksinya setiap tahun cenderung fluktuatif.

Pada tahun 2021, meskipun terjadi peningkatan luas tanam dan panen padi dibanding tahun 2020, produksi justru menurun dari 3.324 ton menjadi 3.196 ton. Penurunan ini disebabkan oleh dampak kekeringan akibat anomali iklim, keterbatasan benih pengganti saat terjadi gagal tanam, serta terganggunya musim tanam karena curah hujan yang datang terlambat. Kondisi ini mendorong sebagian petani untuk beralih menanam jagung yang lebih tahan terhadap kekeringan. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan ketahanan sistem pertanian terhadap perubahan iklim, penyediaan sarana produksi seperti benih secara tepat waktu, serta perbaikan sistem informasi iklim dan kalender tanam guna meminimalisir dampak

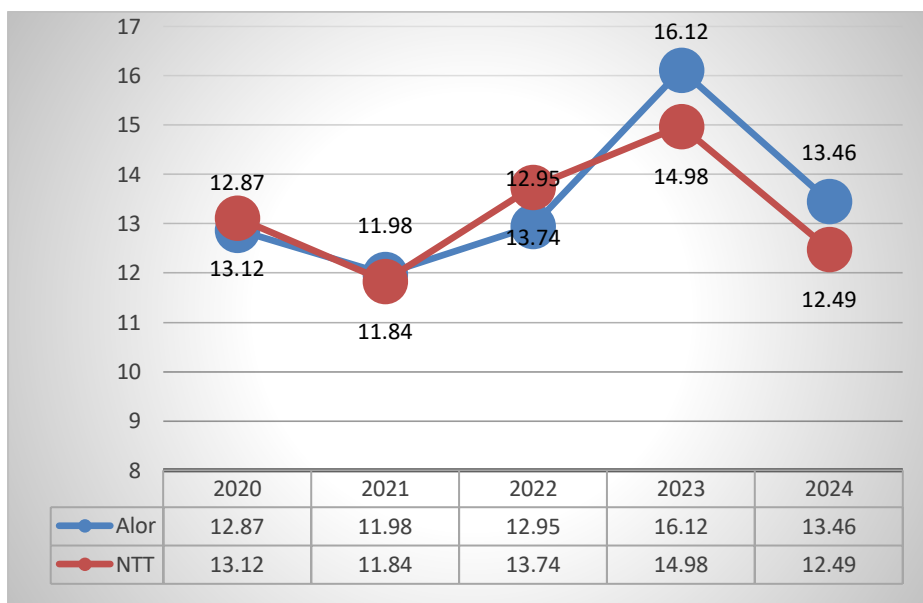


kerugian produksi pada musim-musim rawan. Selain itu dibutuhkan upaya peningkatan produksi yang dapat dilaksanakan antara lain meliputi penerapan teknologi pertanian secara efektif, peningkatan pemahaman petani melalui keterlibatan penyuluh pertanian dan kemudahan akses permodalan bagi para petani.

2.1.4.5. Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah prevalence of undernourishment (PoU) dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.

Berdasarkan hasil publikasi Badan Pangan Nasional dalam kurun waktu tahun 2020-2024, pertumbuhan angka PoU Kabupaten Alor mengalami peningkatan 2,35 persen. Data PoU kabupaten Alor tahun 2020-2024 terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025
Grafik 2. 4 Perkembangan PoU Kabupaten Alor dan Prov. NTT Tahun 2020-2024

Data pada grafik 2.4 menunjukkan bahwa angka prevalensi ketidacukupan pangan kabupaten Alor mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 PoU kabupaten Alor mencapai 13,46 persen, lebih tinggi dari provinsi yang mencapai 12,49 persen. Jumlah penduduk kabupaten Alor yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan pada tahun 2024 sejumlah 28.372 jiwa dari 210.782 jiwa yang membutuhkan kebijakan penanganan lanjutan.



2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut.

Nilai IKLH tahun 2021 hingga 2024 mengalami fluktuatif dengan pertumbuhan rata rata sebesar 2,13 persen. IKLH Tahun 2024 mengalami peningkatan 4,41 dari tahun 2023 karena adanya peningkatan pada indeks kualitas udara sebesar 2,72 dan indeks kualitas lahan sebesar 6,50. Nilai IKLH yang perlu mendapatkan perhatian adalah IKA karena masih pada kategori “sedang”. Beberapa faktor penyebab nilai IKA dalam kategori “sedang” yaitu:

- 1. Masih adanya aktivitas masyarakat berupa mandi dan mencuci di sungai;
- 2. Perilaku masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, ke badan sungai sehingga sungai menjadi kotor dan dangkal;
- 3. Adanya kandang ternak di sekitar sungai;
- 4. Adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri ke badan sungai.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Alor Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 12 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Alor

Ideks Kualitas Lingkungan Hidup	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	50	45	50
Kategori	Sedang	Sedang	Kurang	Sedang
Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,54	86,04	88,38	91,1
Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat baik
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,84	61,84	62,51	69,01
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,58	67,19	66,4	70,81
Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Alor 2025-2029, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10, nilai IKL Tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Alor termasuk dalam kategori sedang. Respon pemerintah Kabupaten Alor dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu dengan melakukan:

- 1. Penanaman pohon-pohon di jalur hijau, di dalam kawasan berupa reboisasi, di luar kawasan berupa penghijauan dan hutan rakyat;
- 2. Menambah jumlah dan luas area Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik di tempat umum, rekreasi, perkantoran dan perumahan.

Respon pemerintah Kabupaten Alor dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu dengan meningkatkan sosialisasi dan publikasi kepada



masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sungai, diantaranya memasang papan himbauan di sekitar sungai, mempublikasikan kegiatan-kegiatan dalam upaya melestarikan lingkungan melalui website dan media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup serta melakukan pembersihan sekitar aliran sungai.

Dengan respon dari pemerintah yang baik dan didukung oleh peran para pihak terutama masyarakat maka diharapkan nilai IKLH kedepan tetap terjaga dengan baik yang ditandai dengan kualitas lingkungan hidup yang baik sehingga mampu memberikan kehidupan bagi manusia sebagai pemanfaat alam terbesar. Demikian pula dengan Nilai IKA, IKU dan IKL sebagai indikator penilaian IKLH yang diharapkan juga meningkat meskipun tantangan peningkatan nilai IKA, IKU dan IKL semakin tinggi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya alih fungsi lahan menjadi wilayah permukiman.

2.1.5.2. Persampahan

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah terutama dengan penyiapan fasilitas pendukung dalam rangka optimalisasi pengangkutan sampah.

Tabel 2 13 Sarana dan Prasarana Persampahan

No.	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Kapasitas (m ³)	Keterangan
1	- TPA Kabola	1	10.000	<i>Open Dumping Sanitary Landfill</i>
	- TPA Lembur	1	50.000	
2	<i>Amrol Truk</i>	3	6	
3	<i>Dump Truk</i>	3	6	
4	Motor Sampah Tiga Roda	6	1,50	
5	<i>Pick Up</i>	1	2,50	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Alor, 2025

Sampai saat ini pelayanan persampahan oleh Pemerintah Kabupaten Alor masih terbatas pada sebagian wilayah Kecamatan Teluk Mutiara. Sampah yang dihasilkan masyarakat saat ini hanya diangkut untuk dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mali dan TPA Lembur. Belum ada proses pemilahan sampah sebelum diangkut ke TPA.

Masalah persampahan di Kota Kalabahi sudah menjadi perhatian berbagai kalangan, salah satunya adalah dari Lembaga Non Pemerintah Yayasan WWF Indonesia bersama jejaring Plastic Free Ocean Network (PFON) Alor. Pada tahun 2023 Yayasan WWF Indonesia dan jejaring PFON Alor melakukan pendataan timbulan sampah pada sampah rumah tangga, non rumah tangga dan TPA Kabola. Kegiatan sampling sampah rumah tangga



dilakukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Mutiara dan Kecamatan Alor Barat Daya dengan variasi tingkat ekonomi KK yaitu tinggi, menengah dan rendah, sedangkan sampling sampah non rumah tangga dilakukan pada hotel/penginapan, rumah makan dan pasar. Timbunan sampah rumah tangga tertinggi terjadi pada Kecamatan Teluk Mutiara dengan nilai 19,58 kg/hari, sedangkan timbunan terendah terjadi pada Kecamatan ABAD dengan nilai 13,93 kg/hari. Timbunan sampah non rumah tangga perunit perhari tertinggi berasal dari sumber sampah pasar dengan nilai 2,49 (kg/unit/hari), sedangkan terendah terjadi pada sumber sampah hotel dengan nilai 0,03 (kg/unit/hari). Rata-rata timbunan sampah pada TPA Kabola yang masuk perharinya yaitu 2.818,24 kg. Data PFON Alor tahun 2023 juga menemukan bahwa rata-rata produksi sampah perorang perhari di Kecamatan Teluk Mutiara sejumlah 0,35 kg, data timbunan sampah dan penanganan sampah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 14 Timbunan Sampah dan Penanganan Sampah

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	30.315,53	30.933,31	31.551,98	32.183,02	32.826,68
2	Target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstrada (%)	75	74	73	72	71
3	Volume penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (M3)	7.497	8.736	8.736	12.480	12.480
	Persentase penanganan sampah (%)	24,73	28,24	27,69	38,78	38,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Alor, 2025

Data pada tabel 2.12 menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya melebihi kemampuan penanganannya sehingga persampahan menjadi masalah penting yang perlu diselesaikan. Sebagian besar produksi sampah belum dapat tertangani dengan baik pada tingkat rumah tangga karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengolahan sampah. Rendahnya volume sampah yang tertangani juga disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah seperti tempat penampungan sementara, armada angkut dan mesin pengolahan sampah. Perlu adanya kebijakan untuk mengurangi timbunan sampah rumah tangga melalui penyediaan peraturan daerah tentang persampahan termasuk penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang representatif.

Penyelesaian permasalahan sampah masih terbatas pada proses pengangkutan ke TPA karena tentunya sumberdaya pengangkutan sampah tidak akan mampu mengimbangi jumlah produksi sampah. Untuk itu perlu



adanya kebijakan dalam pengolahan sampah dari sumber dan kebijakan pengurangan sampah rumah tangga yang dihasilkan. Data pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Alor tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 15 Data Pengangkutan Sampah Kab. Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Jenis Armada	Jumlah	Volume Sampah (M3)	Jumlah Hari	Volume Sampah/ Bln	Jumlah Bulan	Jumlah Sampah Yang Diangkut (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	Dumtruck	2	6	26	312	12	3.744
	Amrol	2	6	26	312	12	3.744
						Jumlah	7.488
2021	Dumtruck	2	6	26	312	12	3.744
	Amrol	2	6	26	312	12	3.744
	Pic Up	1	4	26	104	12	1.248
						Jumlah	8.736
2022	Dumtruck	2	6	26	312	12	3.744
	Amrol	2	6	26	312	12	3.744
	Pic Up	1	4	26	104	12	1.248
						Jumlah	8.736
2023	Dumtruck	3	6	26	648	12	5.616
	Amrol	3	6	26	648	12	5.616
	Pic Up	1	4	26	104	12	1.248
						Jumlah	12.480
2024	Dumtruck	2	6	26	312	12	3.744
	Amrol	4	6	26	624	12	7.488
	Pic Up	1	4	26	104	12	1.248
						Jumlah	12.480

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan volume sampah yang diangkut dari tahun 2020-2024 terus meningkat sesuai dengan volume produksi sampah yang dihasilkan.

2.1.5.3. Rumah Menurut Akses Sanitasi

Pembangunan sanitasi dapat ditinjau dari keberadaan sarana dasar penampungan limbah rumah tangga, persampahan dan drainase, MCK, rumah sehat. Sejak tahun 2017 seluruh keluarga di Kabupaten Alor telah menyatakan memiliki akses terhadap jamban sehat yang ditandai dengan deklarasi “Stop Buang Air Besar Sembarangan” (Open Devecation Free) oleh Menteri Kesehatan RI. Meskipun demikian, data akses sanitasi layak di kabupaten Alor menurut BPS masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Data akses sanitasi layak, penggunaan fasilitas tempat buang air besar dan jenis tempat buang air besar tahun 2020-2024 dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2 16 Data Akses Sanitasi Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Indikator		Persentase Rumah Tangga				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Akses Sanitasi layak		77,32	83,16	81,59	81,57	85,83
2	Penggunaan Fasilitas tempat buang air besar	Sendiri	76,54	72,5	78,28	78,63	86,51
		Bersama/komunal	11,32	21,15	11,07	13,53	8,79
		MCK umum	2,45	3,56	1,42	2,26	1,42
		tidak menggunakan	0,36	0	0,13	0,56	0
		tidak ada	9,33	2,77	9,1	5,05	3,28
3	Jenis tempat buang air besar	Leher angsa	88,92	88,33	90,94	91,31	90,06
		Plengsengan dengan tutup	1,58	1,81	1,99	2,61	3,41
		Plengsengan tanpa tutup	4,91	4,6	4,69	2,9	5,18
		Cemplung	4,59	5,26	2,38	3,18	1,35
		Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

Data tabel 2.14 di atas menunjukkan bahwa akses sanitasi layak untuk kabupaten Alor mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir dengan peningkatan rata rata 2,13 persen pertahun. Akses tersebut juga lebih tinggi dari akses sanitasi layak provinsi NTT yang mencapai 77,66 persen dan rata rata nasional yang mencapai 83,60 persen pada tahun 2024. Meskipun lebih tinggi namun masih terdapat 14,17 persen penduduk kabupaten Alor yang belum menikmati sanitasi layak. Oleh karena itu pada periode 2025-2029 ini perlu diupayakan pemenuhan infrastruktur sanitasi bagi masyarakat kabupaten Alor. Selain itu di kabupaten Alor belum terdapat instalasi pengolahan lumpur tinja secara terpusat yang menyebabkan akses sanitasi aman di kabupaten Alor masih 0 persen.

Pendataan sanitasi di kabupaten Alor juga melibatkan jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Jejaring AMPL) dengan menggunakan sejumlah indikator teknis. Hasil pendataan menunjukkan bahwa Akses sanitasi pada Tahun 2024, dari 57.596 keluarga terdata, terdapat 3.634 keluarga atau 6,35 persen yang memiliki akses sanitasi belum layak, sedangkan 53.962 keluarga atau 93,65 persen memiliki akses sanitasi layak, baik layak sendiri maupun layak bersama. Akses sanitasi layak sendiri dan layak bersama diterjemahkan sebagai keluarga yang memiliki fasilitas buang air besar leher angsa dalam satu rumah atau berbagi dengan rumah lain, sedangkan akses sanitasi belum layak diterjemahkan sebagai keluarga yang memiliki fasilitas buang air besar cemplung/lubang tanah.

Jejaring AMPL Kabupaten Alor juga mempublikasikan data Praktek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Alor. Pelaksanaan STBM di Kabupaten Alor menjadi salah satu kunci dalam capaian kesehatan lingkungan yang baik. Data praktek 5 pilar STBM di Kabupaten Alor tahun 2024 dirangkum sebagai berikut:



- Kepala Keluarga melakukan Buang Air Besar di Jamban (Stop BABS) dengan jumlah seluruh KK yaitu 57.596 KK atau mencapai 100 persen.
- Kepala Keluarga melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan jumlah 35.894 KK atau mencapai 59,69 persen .
- Kepala Keluarga melakukan Pengolahan Air Minum (PAM - RT) dengan jumlah seluruh Kepala Keluarga yaitu 55.350 KK atau mencapai 100 persen.
- Kepala Keluarga melakukan Pengolahan Sampah Rumah Tangga (PS - RT) dengan jumlah 31.698 KK atau 57,27 persen .
- Kepala Keluarga Memiliki Saluran Pembuangan Limbah (SPAL - RT); dengan jumlah 35.250 KK atau 63,69 persen .

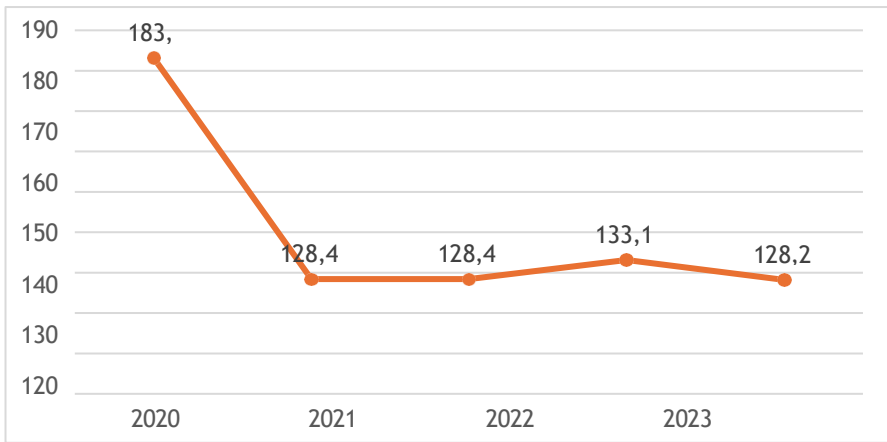
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten/kota di Indonesia dengan risiko bencana sedang dengan skor 128,21 berdasarkan publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Indeks risiko ini sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 yakni 137,78. Berdasarkan data IRBI tahun 2024, ancaman bencana tertinggi adalah gempa bumi kemudian disusul bencana alam lainnya yakni banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim dan tsunami.

BNPB telah mempublikasikan risiko bencana berdasarkan kajian risiko multi bencana dan kajian risiko bencana pada setiap jenis bencana. Untuk kajian risiko multi bencana pada aspek sosial terdapat 197.897 jiwa memiliki risiko tinggi, 20.301 jiwa risiko sedang dan 1.312 jiwa risiko rendah; aspek fisik terdapat 2.604.004 juta rupiah memiliki risiko tinggi dan 74.204 juta rupiah risiko sedang; aspek ekonomi terdapat 811.418 juta jiwa memiliki risiko tinggi dan 84.547 juta jiwa risiko sedang; dan untuk aspek lingkungan terdapat 6.214 hektar risiko tinggi dan 77.453 hektar risiko sedang. Kondisi ini menunjukkan untuk kajian risiko multi ancaman bencana bahwa sebagian besar memiliki risiko tinggi di Kabupaten Alor.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana dari tahun 2020 sampai 2024 digambarkan dalam grafik berikut:



Sumber: BNPB Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 5 Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2020 – 2024

Terdapat 10 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Alor berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Alor Tahun 2017, yaitu sebagai berikut.

1. Gempa Bumi

Letak Kabupaten Alor termasuk dalam jalur Gempa Tektonik di Indonesia sehingga memiliki resiko terjadinya gempa tektonik secara periodik. Wilayah Kabupaten Alor merupakan wilayah rawan gempa bumi yang bersumber dari "Sistem Patahan Naik Busur Belakang Laut Flores membentang di sebelah Utara Pulau Alor ke arah Barat Timur". Dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Alor merupakan kawasan rawan bencana alam gempa bumi.

Kabupaten Alor merupakan bagian dari jalur gempa bumi yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Sebagai wilayah yang terletak di jalur gempa bumi, kondisi fisiografi Kabupaten Alor sangat dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Alor sebagai salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia.

2. Tanah Longsor

Morfologi Kabupaten Alor berupa dataran pantai, dataran alluvial, dataran rambahan bantar gunung api. Morfologi ini tersusun oleh batuan lunak yang bersifat lepas, urai dan belum padat sehingga rentan terhadap goncangan gempa bumi, tingginya curah hujan yang dapat menyebabkan terjadinya longsor. Di samping itu, pemicu longsor juga karena pola penggunaan lahan oleh masyarakat yang kurang memperhatikan kaidahkaidah konsolidasi tanah dan tata ruang. Hampir



seluruh wilayah rawan terjadinya longsor, namun beberapa desa dalam kecamatan yang sangat rawan yakni Mataru, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pulau Pura, Pantar Timur dan Pureman.

3. Banjir

Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, kondisi ini dapat terjadi akibat penggundulan hutan tanpa reboisasi, tebas bakar untuk pembukaan lahan perkebunan, konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terpadu, pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kawasan rawan bencana banjir yang perlu mendapat perhatian serius adalah Kota Kalabahi dan sekitarnya.

4. Tsunami

Sejarah kejadian tsunami di Kabupaten Alor selama ini sudah terjadi 3 kali dimana sebagian masyarakat tidak mengetahuinya namun tercatat dalam Pusat Gempa Nasional. Tsunami terjadi di Kabupaten Alor pada tahun 1991, 1994 dan 2004.

Sesuai Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 2013, bahwa wilayah yang sangat rentan terkena dampak tsunami adalah wilayah pantai di daerah Kecamatan Teluk Mutiara, Kecamatan Alor Timur, Kecamatan Alor Barat Laut, Kecamatan Pantar Barat, Kecamatan Pantar Tengah, Kecamatan Pantar, Kecamatan Kabola dan Kecamatan Lembur. Berdasarkan skenario kejadian tsunami yang dibuat oleh BMKG bersama sektor terkait bahwa sebagian besar pantai bagian utara Kabupaten Alor rawan dan berpotensi terjadi tsunami apabila terjadi patahan pada *Flores Back Arc Thrust* dengan tinggi gelombang sekitar 3- 10 meter pada beberapa lokasi dengan ancaman ketinggian berbeda.

5. Letusan Gunung Api

Kabupaten Alor memiliki Gunung Api Sirung yang terletak di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah yang masih aktif. Gunung Api Sirung merupakan tipe Strato yang memiliki 3 Kawah (A, B dan C) dengan Posisi 80° 30' 36" LS dan 124° 08' 54" BT. Secara administrasi Gunung Api Sirung masuk dalam wilayah Kecamatan Pantar Tengah dengan puncak pada ketinggian 862 MDp. Desa terdekat dari gunung api Sirung adalah Desa Mauta, Aramaba, Tude, Tubbe dan Desa Delaki. Erupsi terakhir Gunung Api Sirung terjadi pada tahun 2012, namun tidak membawa korban.

6. Kekeringan

Kekeringan diakibatkan karena kemarau panjang yang berdampak terhadap menurunnya produktifitas tanaman pertanian dan perkebunan yang berpotensi terjadi rawan pangan di satu wilayah. Dampak lainnya adalah



kesulitan mengakses air minum. Beberapa desa di Kabupaten Alor sangat rawan air minum, dimana rata-rata akses air minum layak masih dibawah 50 persen. Meskipun terpenuhi namun jumlah air yang kurang, berasa dan berasal dari sumber air yang tidak layak.

7. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai

Terjadinya gelombang ekstrim sebagai akibat dari perubahan iklim dan ulah manusia seperti pengambilan pasir yang tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat menjaga ekosistem laut yang rendah, lemahnya penerapan regulasi daerah, serta kurangnya pengembangan kawasan hutan mangrove di pesisir pantai.

8. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Alor sebagian besar disebabkan karena perilaku manusia. Budaya masyarakat lokal yang membuka kebun dengan sistem tebas bakar, sistem lahan berpindah menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan pada beberapa wilayah Kabupaten Alor. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang fungsi hutan dan kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar hutan dalam program hutan rakyat terpadu menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

9. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrim di Kabupaten Alor yang sering terjadi berupa Badai dan angin kencang yang disebabkan karena perubahan iklim khususnya perubahan karakter klimatologi dan meteorologi Indonesia menimbulkan pertukaran musim yang diwarnai depresi tropis. Salah satu wilayah yang menyebabkan angin kencang dan badai adalah NTT termasuk Kabupaten Alor yang terjadi setiap tahun.

10. Banjir Bandang

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Alor berpotensi meningkatkan resiko terjadinya banjir bandang. Apabila pengembangan kawasan permukiman tidak dikendalikan secara baik, maka semakin meningkatkan tingginya ancaman bencana banjir bandang. Curah hujan tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan banjir bandang pada beberapa lokasi rawan dan dalam Kota Kalabahi.

2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks ketahanan daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dilakukan



oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan menggunakan 7 parameter dan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Hasil yang didapat dari proses pengukuran IKD berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input dalam pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana.

Parameter untuk pengukuran IKD meliputi perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sitem informasi; Diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana. Nilai IKD kabupaten Alor tahun 2024 sebesar 0,53.

2.1.6.3. Kondisi Iklim dan Cuaca

Wilayah Kabupaten Alor merupakan bagian dari wilayah Indonesia, yang dilewati oleh garis khatulistiwa serta dikelilingi oleh dua samudera dan dua benua. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai daerah pertemuan sirkulasi meridional (Utara-Selatan) yang dikenal sebagai sirkulasi Hadley dan sirkulasi zonal (Timur-Barat) yang dikenal sebagai sirkulasi Walker, dua sirkulasi yang sangat mempengaruhi keragaman iklim di Indonesia. Pergerakan matahari yang berpindah dari 230 Lintang Utara ke 23,50 Lintang Selatan sepanjang tahun mengakibatkan timbulnya aktivitas monsun yang juga berperan dalam mempengaruhi keragaman iklim. Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap keragaman iklim ialah gangguan siklon tropis. Semua aktivitas atau sistem ini berlangsung secara bersamaan sepanjang tahun dengan besaran pengaruh dari setiap aktivitas atau sistem tersebut tidak sepadan dapat berubah dari tahun ke tahun. Secara umum kondisi iklim dan cuaca di Kabupaten Alor tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2 17 Keadaan Iklim dan Cuaca di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Keadaan Iklim	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Suhu	°C	18,0 - 34,4	20,2 - 35,2	18,4 – 36,0	16,0 – 35,0	18,80-34,90
Kelembaban	persen	41 - 98	49 - 100	44 – 100	35 – 99	48 – 98
Kecepatan Angin	m/det	0 - 14,80	0 - 24	0 – 22	0 – 25	0 – 9,77
Tekanan Udara	Mbar	1003,0 -1015,8	1002,1 -1016,2	1001,8 –1015,7	1001,7 –1017,2	1003,80 –1015,10
Curah Hujan	Mm/thn	0 - 355,7	0 - 321,6	0,8 – 282,2	4,5 – 400,1	0 – 290,20
Jumlah Hari Hujan	Hari	0 - 23	0 - 27	3 – 27	1 - 28	4 – 31
Penyinaran Matahari	Jam	3,2 – 9,3	4,2 – 10,2	4,3 – 10,3	4,4 – 10,5	4,5 – 8,7

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2020-2025

Perubahan iklim akan memiliki dampak luas pada lingkungan dan pada sosial ekonomi dan sektor terkait, termasuk sumber daya air, pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan manusia, ekosistem darat dan keanekaragaman hayati, wilayah pesisir dan bencana meteorologis. Dampak-dampak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima peristiwa yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, yaitu kenaikan suhu daratan dan suhu air laut, kenaikan muka laut (*sea level rise*), perubahan pola angin dan perubahan curah hujan atau presipitasi serta perubahan pola hidrologi.

1. Kenaikan suhu daratan dan suhu air laut

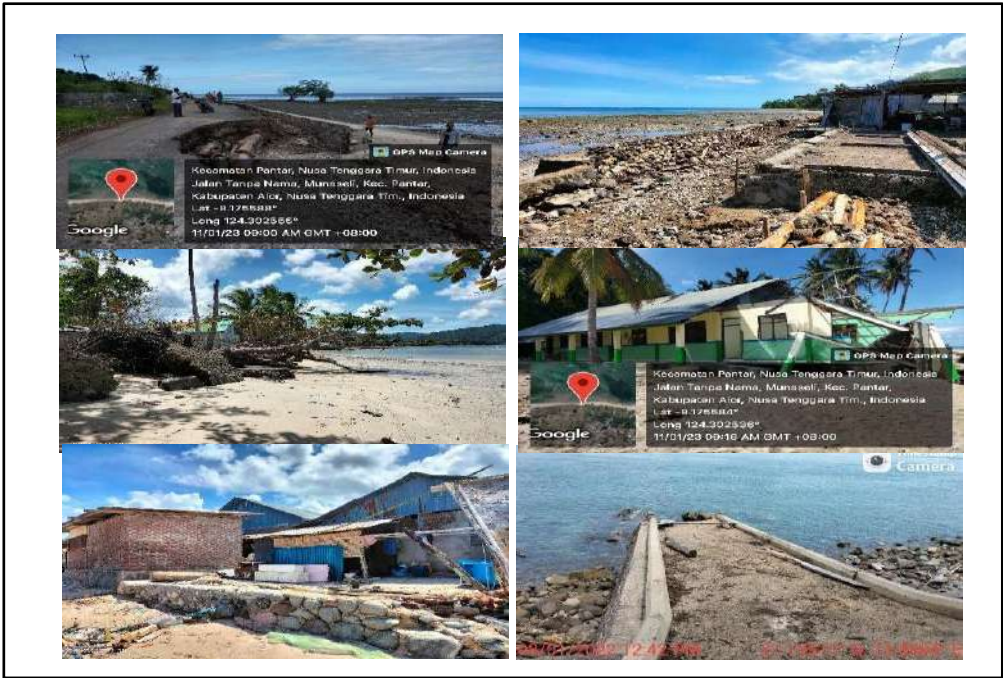
Kenaikan suhu daratan dan suhu air laut akan menyebabkan pergeseran musim tanam tanaman yang mempengaruhi ketahanan pangan dan perubahan dalam distribusi vektor penyakit, menempatkan lebih banyak orang berisiko dari penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem pesisir yang sangat rentan mengalami kerusakan akibat perubahan iklim. Menurut Hoegh-Guldberg (1999), rentannya kerusakan ekosistem terumbu karang terhadap perubahan iklim karena karang dengan cepat dan dramatis memutih sebagai respons terhadap peningkatan Suhu Permukaan Laut (SPL).

2. Kenaikan muka air laut

Kenaikan muka air laut karena pemanasan global berpotensi menimbulkan kerusakan sangat besar terhadap kawasan pesisir. Daerah dataran rendah dekat pantai berpotensi mengalami banjir rob. Kenaikan muka laut akan mengurangi keamanan pantai yang disebabkan perubahan gelombang dan peningkatan overtopping sehingga laju erosi pantai akan meningkat dan menimbulkan genangan ke arah darat. Perubahan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai, merusak pantai. Selain mengganggu dan merusak aset pariwisata yang penting, meningkatnya laju kemunduran garis pantai akibat kenaikan muka air laut juga berdampak terhadap terganggunya dan rusaknya asset-aset ekonomi, sosial budaya, infrastruktur (jalan, jembatan dan pelabuhan), permukiman penduduk di dekat pantai. Ekosistem pesisir yang bernilai penting baik secara ekonomi maupun ekologis seperti terumbu karang dan rumput laut akan mengalami kerusakan.

Kenaikan muka air laut yang menimbulkan banjir pasang atau banjir rob telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah pesisir Kabupaten Alor. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada sejumlah rumah penduduk dan infrastruktur pada pesisir pantai. Kenaikan muka air laut juga berpotensi menimbulkan terjadinya intrusi air asin dan terganggunya air tanah sehingga menjadi masalah dalam hal penyediaan air bersih. Kecamatan yang memiliki

kerawanan tinggi terhadap banjir pasang air laut yaitu Kecamatan Teluk Mutiara, Alor Barat Laut, Pantar, Pantar Timur, Alor Barat Daya dan Alor Timur. Dampak kerusakan rumah penduduk dan infrastruktur akibat banjir pasang dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2. 3 Dampak Kerusakan Akibat Kenaikan Muka Air Laut dan Banjir Pasang

2.1.6.4. Curah Hujan

Iklim Kabupaten Alor relatif sama dengan keadaan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni beriklim tropis dengan variasi suhu dan intensitas penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga maret dan musim kemarau antara bulan April hingga bulan Oktober. Persoalan curah hujan dan pengaruh iklim global terkait fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada sering terjadinya kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius. Rata-rata curah hujan bulanan tahun 2020 sampai 2024 di Kabupaten Alor yang dipantau dari titik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Mali-Alor disajikan pada tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2 18 Curah Hujan Rata-rata Bulanan (mm) dan Jumlah Hari Hujan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Keadaan Hujan	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	2020	Curah Hujan	213,5	171,7	119,7	72,8	132,5	1	TTU	0	TTU	6,7	53,2	355,7
		Hari Hujan	21	23	18	9	15	4	1	0	3	6	8	22
2	2021	Curah Hujan	321,6	275,6	110,3	331	18	18,8	0	7,5	36,8	32,7	103,2	170,9
		Hari Hujan	27	25	16	8	9	10	0	5	5	8	19	23
3	2022	Curah Hujan	282,2	217,5	125,7	30,9	24,2	116,3	10,2	TTU	0,8	80	128,8	23,6
		Hari Hujan	27	21	17	5	9	15	6	3	6	12	17	15
4	2023	Curah Hujan	80,3	400,1	198,2	81,0	7,10	22,9	83,8	4,5	TTU	TTU	123,5	107,8



No	Tahun	Keadaan Hujan	Bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
		Hari Hujan	17	28	15	17	8	8	9	6	1	2	6	16
5	2024	Curah Hujan	257,2	290,2	211,2	150,5	14,4	11,1	13,7	0	4,2	73,9	53,8	156,2
		Hari Hujan	22	23	19	15	6	4	25	31	30	31	30	31

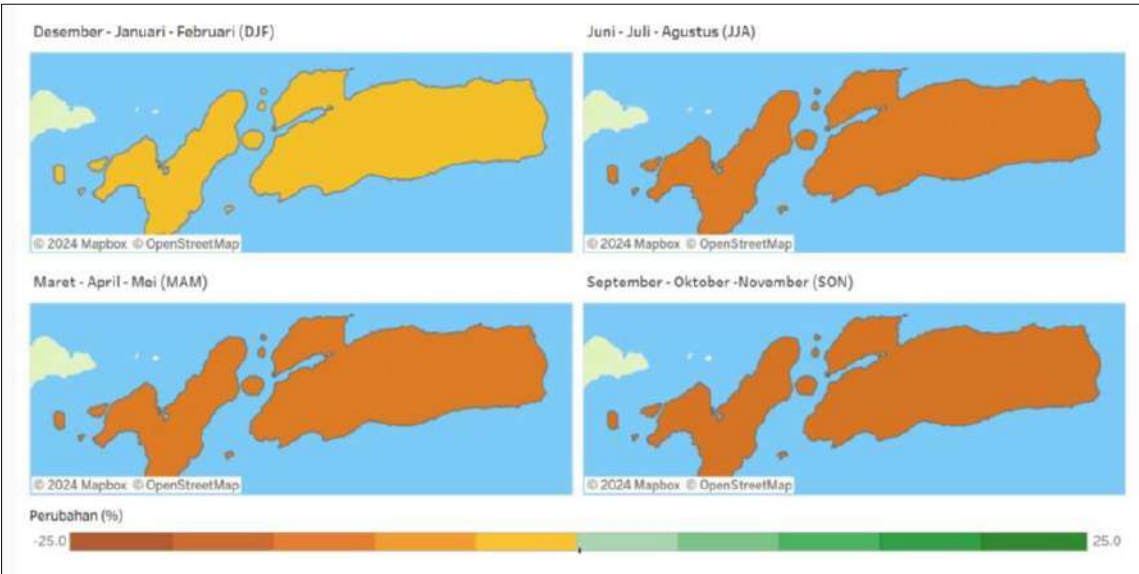
Keterangan: Titik Koordinat: Latitude -8.217°LS; Longitude 124.571°BT

Sumber: BPS Kabupaten Alor 2018-2024

Kabupaten Alor memiliki karakteristik iklim tropis yang dipengaruhi oleh sirkulasi atmosfer global serta fenomena iklim regional seperti El Nino dan La Nina. Pola iklim ini menentukan variasi suhu, kelembaban, dan curah hujan yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pertanian, perikanan, serta ketersediaan air bersih. Perubahan iklim global memiliki dampak dengan cakupan, jenis, dan intensitas yang berbeda-beda di berbagai belahan dunia, termasuk Kabupaten Alor sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim global. Salah satu cara untuk menilai dampak tersebut adalah dengan meninjau perubahan parameter iklim di masa lalu serta proyeksinya di masa yang akan datang.

Secara umum, perubahan iklim di Kabupaten Alor dapat diamati dari beberapa parameter utama, seperti suhu dan curah hujan. Data historis menunjukkan adanya tren peningkatan suhu rata-rata yang dapat berdampak pada peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Selain itu, fluktuasi curah hujan yang semakin tidak menentu meningkatkan risiko kekeringan di musim kemarau serta curah hujan berlebih yang berpotensi menimbulkan banjir di musim hujan.

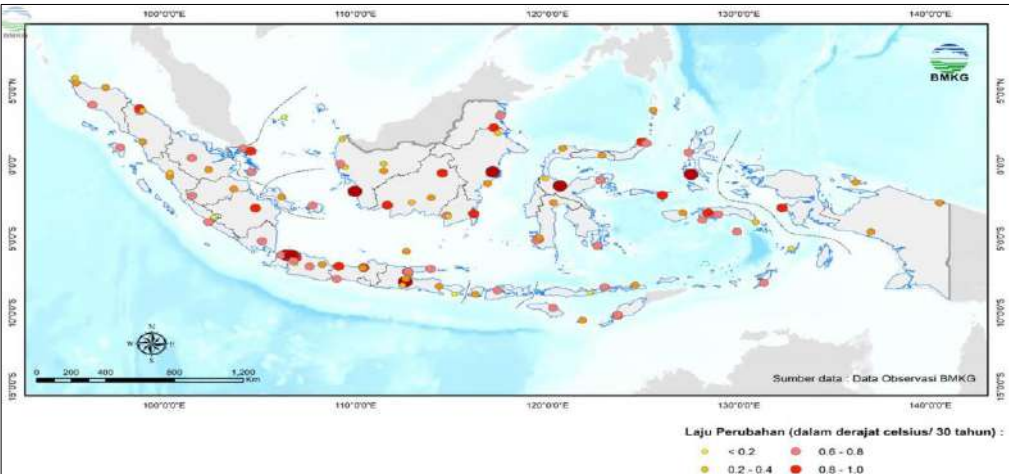
Berdasarkan proyeksi perubahan iklim untuk periode 2020-2049 dibandingkan dengan periode 1976-2005, Kabupaten Alor diperkirakan mengalami penurunan curah hujan tertinggi pada bulan Juli hingga November, yaitu sebesar 25 persen. Penurunan ini dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih, hasil pertanian, dan keseimbangan ekosistem lokal. Sebaliknya, pada musim penghujan, peningkatan curah hujan dapat memperbesar risiko bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan banjir bandang. Untuk rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4:



Sumber: Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Gambar 2. 4 Proyeksi Curah Hujan Musiman Periode 2020-2049 Terhadap 1976-2005 (Skenario RCP8.5)

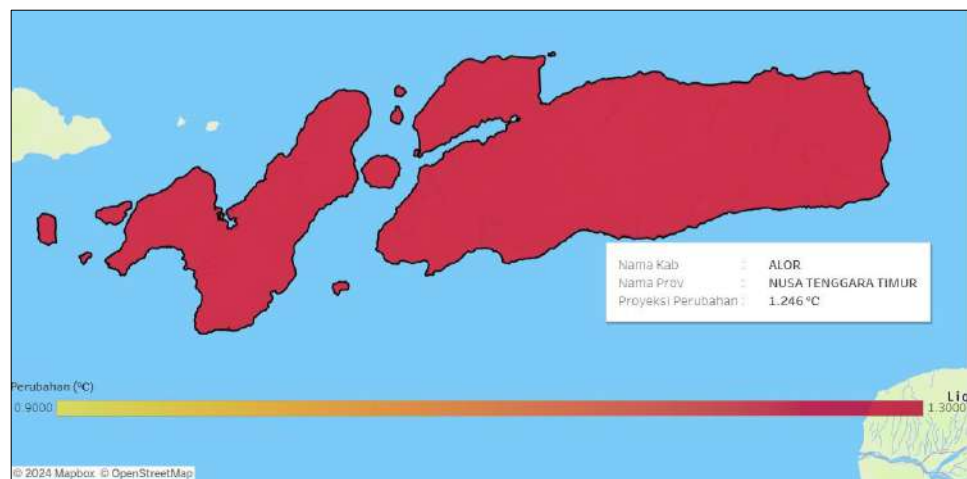
Adanya kecenderungan peningkatan suhu rata-rata tahunan perlu diikuti langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim ini, diperlukan upaya yang lebih adaptif dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk strategi konservasi sumber daya air, penguatan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrem. Langkah-langkah mitigasi ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor pada masa mendatang.

Analisis tren historis suhu udara rata-rata tahunan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa Kabupaten Alor mengalami peningkatan suhu dengan laju perubahan antara 0,4 hingga 0,8°C per 30 tahun dalam periode 1981-2023 sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 5 Laju Perubahan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Periode 1981-2023 (°C/30 Tahun)
Sumber : BMKG, 2024

Selanjutnya proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan untuk periode 2020-2049 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1,246°C dibandingkan dengan periode 1976-2005. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 2.6.



Sumber: BMKG, <https://iklim.bmkg.go.id/>, 2024

Gambar 2. 6 Proyeksi Perubahan Suhu Rata-Rata Tahunan Periode 2020-2049 terhadap 1976-2005 (° C)

Peningkatan suhu ini dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk pertanian yang semakin rentan terhadap kekeringan dan berkurangnya produktivitas tanaman, serta kesehatan masyarakat yang lebih rentan terhadap penyakit yang berkaitan dengan suhu tinggi.

Perubahan iklim dipicu oleh fenomena pemanasan global yaitu kejadian meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang berimplikasi sangat signifikan terhadap suatu wilayah. Pemanasan global ini dipicu oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), termasuk karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan nitrogen dioksida (N2O). Meningkatnya emisi GRK ini disebabkan oleh meningkatnya pembakaran bahan bakar fosil dan perubahan penggunaan lahan. Meningkatnya emisi GRK dari pembakaran bahan bakar fosil dihasilkan dari aktivitas manusia, meliputi transportasi, industri, pertanian, sampah dan limbah. Meningkatnya emisi GRK dari perubahan penggunaan lahan dapat dihasilkan dari kegiatan deforestasi, peningkatan permukaan impermiabel seperti perubahan tutupan lahan, urbanisasi, dan pengembangan permukiman.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2024 berjumlah 225.020 jiwa. Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan berkisar 3.660-56.356 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Alor tertinggi di Kecamatan Teluk Mutiara yaitu 56.356 jiwa dan terendah di Kecamatan Pureman yaitu 3.660 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten Alor menurut Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.17.



Tabel 2 19 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Tahun)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pantar	119,82	10.069	10.194	10.345	10.604	10.796
2	Pantar Barat	58,71	6.878	6.888	6.913	7.010	7.059
3	Pantar Timur	141,44	11.368	11.423	11.504	11.704	11.826
4	Pantar Barat Laut	150,13	4.946	5.013	5.092	5.225	5.325
5	Pantar Tengah	306,02	9.750	9.787	9.846	10.006	10.100
6	Alor Barat Daya	265,59	18.327	18.554	18.824	19.424	19.818
7	Mataru	102,78	6.043	6.360	6.454	6.262	6.341
8	Alor Selatan	192,97	9.929	10.029	10.154	10.384	10.548
9	Alor Timur	562,76	8.609	8.718	8.849	9.073	9.239
10	Alor Timur Laut	208,49	9.117	9.162	9.229	9.390	9.490
11	Pureman	147,88	3.561	3.567	3.582	3.633	3.660
12	Teluk Mutiara	80,18	53.339	53.807	54.399	55.556	56.356
13	Kabola	73,01	8.385	8.490	8.615	8.831	8.991
14	Alor Barat Laut	107,96	22.961	23.398	23.897	24.655	25.265
15	Alor Tengah Utara	125,14	12.322	12.459	12.625	12.924	13.140
17	Lembur	27,83	5.484	5.525	5.578	5.690	5.764
16	Pulau Pura	75,79	4.501	4.535	4.581	4.673	4.735
18	ABAD Selatan	182,38	6.283	6.085	6.142	6.492	6.567
Jumlah		2.928,88	211.872	213.994	216.629	221.536	225.020
Kepadatan Penduduk			72	73	74	76	77

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kategori tertentu. Komposisi penduduk Kabupaten Alor tahun 2023 berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk dengan rentang usia 5- 9 tahun diikuti oleh penduduk 0-4 tahun, sementara jumlah terkecil berada pada kelompok umur 70-74 Tahun. Komposisi penduduk Kabupaten Alor Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penduduk jenis kelamin perempuan. Komposisi Penduduk Kabupaten Alor Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 20 Komposisi Penduduk Kabupaten Alor Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	12.266	11.805	24.071
5 – 9	12.334	11.838	24.172
10 – 14	11.171	10.541	21.712
15 – 19	9.798	9.099	18.897
20 – 24	9.090	8.213	17.303
25 – 29	9.408	9.272	18.680
30 – 34	8.701	9.231	17.932
35 – 39	7.823	8.124	15.947
40 – 44	6.420	7.002	13.422
45 – 49	5.548	6.486	12.034
50 – 54	5.105	5.745	10.850
55 – 59	4.215	4.792	9.007
60 – 64	3.481	3.949	7.430
65 – 69	2.672	3.097	5.769
70 – 74	1.702	2.030	3.732
75+	1.741	2.321	4.062
Jumlah	109.620	111.916	225.020

Sumber : BPS Kab. Alor 2025



2.1.7.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Perkembangan penduduk pada tiap kecamatan berfluktuatif. Laju pertumbuhan berdasarkan hasil sensus penduduk tingkat kecamatan berkisar antara 0,70 persen sampai dengan 2,58 persen. Hasil perhitungan penduduk tahun 2024 juga bervariasi antara pertumbuhan terendah 0,70 persen di Kecamatan Pantar Barat dan yang paling tinggi 2,58 persen di Kecamatan Alor Barat Laut. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Alor menurut Kecamatan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

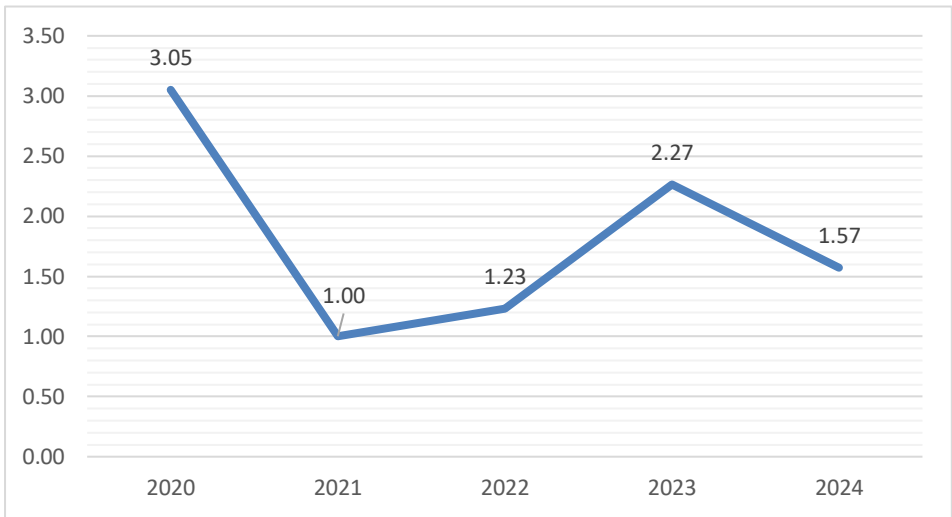
Tabel 2 21 Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk 2020-2024 (persen)
1	Pantar	1,76
2	Pantar Barat	0,65
3	Pantar Timur	0,99
4	Pantar Barat Laut	1,86
5	Pantar Tengah	0,89
6	Alor Barat Daya	1,98
7	Mataru	1,25
8	Abad Selatan	1,16
9	Alor Selatan	1,52
10	Alor Timur	1,78
11	Alor Timur Laut	1,01
12	Pureman	0,69
13	Teluk Mutiara	1,39
14	Kabola	1,76
15	Alor Barat Laut	2,42
16	Alor Tengah Utara	1,62
17	Pulau Pura	1,28
18	Lembur	1,25
ALOR		1,40

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Peningkatan jumlah Penduduk dan laju pertumbuhannya fluktuatif selama empat tahun terakhir. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Alor tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena dilakukan sensus penduduk sehingga pertumbuhan penduduk dihitung secara riil mencapai 3,05 persen, kemudian pertumbuhannya menurun pada tahun 2021 menjadi 1.00 persen, selanjutnya meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,23 persen, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,27 persen dan menurun pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen.

Pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik 2.6 berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025
 Grafik 2. 6 Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024

Dari tampilan grafik 2.6 menunjukkan pertumbuhan penduduk kabupaten Alor selama lima tahun mengalami fluktuasi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2024 mencapai 1,82 persen.

2.1.7.3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ini menunjukkan seberapa besar beban tanggungan yang harus diemban oleh penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk kabupaten Alor tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 22 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	25.588	24.734	24.812	23.871	23.542
5 – 9	21.295	23.031	23.191	24.022	24.282
10 – 14	21.844	19.805	20.084	21.512	22.142
15 – 19	20.736	17.197	17.186	18.285	18.868
20 – 24	18.375	18.030	17.839	17.470	17.300
25 – 29	15.335	18.161	18.402	18.589	18.665
30 – 34	13.109	16.771	17.137	17.558	17.901
35 – 39	12.623	14.139	14.357	15.392	15.905
40 – 44	11.758	12.630	12.843	13.074	13.394
45 – 49	10.526	11.641	11.876	11.849	11.989
50 – 54	10.346	9.974	10.204	10.546	10.796
55 – 59	8.162	8.268	8.482	8.690	8.959
60 – 64	6.279	7.304	7.513	7.280	7.325
65 – 69	4.324	5.032	5.190	5.769	6.041
70 – 74	2.922	3.522	3.632	3.637	3.792
75+	3.584	3.755	3.881	3.992	4.119
Jumlah	206.806	213.994	216.629	221.536	225.020
Usia 0 - 14	68.727	67.570	68.087	69.405	69.966



Kelompok Umur	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia 65+	10.830	12.309	12.703	13.398	13.952
Dependency Ratio (%)	62,52	59,56	59,47	59,69	59,47

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk kabupaten Alor selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan fluktuatif dengan rata rata rasio ketergantungan 60,14 persen. Artinya bahwa terdapat 60 orang tanggungan untuk setiap 100 orang usia kerja. Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari 50%) menunjukkan beban yang besar bagi penduduk usia kerja untuk mendukung penduduk yang tidak produktif.

2.1.7.4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk sering digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Jumlah dan kepadatan penduduk tiap kecamatan Kabupaten Alor tahun 2024 terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 23 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Alor Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Jumlah Penduduk	Persen	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km²)
1	Pantar	119,82	10.796	4,8	90
2	Pantar Barat	58,71	7.059	3,14	120
3	Pantar Timur	141,44	11.826	5,26	84
4	Pantar Barat Laut	150,13	5.325	2,37	35
5	Pantar Tengah	306,02	10.100	4,49	33
6	Alor Barat Daya	265,59	19.818	8,81	75
7	Mataru	102,78	6.341	2,82	62
8	Alor Selatan	192,97	10.548	4,69	55
9	Alor Timur	562,76	9.239	4,11	16
10	Alor Timur Laut	208,49	9.490	4,22	46
11	Pureman	147,88	3.660	1,63	25
12	Teluk Mutiara	80,18	56.356	25,04	703
13	Kabola	73,01	8.991	4	123
14	Alor Barat Laut	107,96	25.265	11,23	234
15	Alor Tengah Utara	125,14	13.140	5,84	105
16	Lembur	75,79	4.735	2,1	170
17	Pulau Pura	27,83	5.764	2,56	76
18	Abad Selatan	182,28	6.567	2,92	36
	Kabupaten	2.928,88	225.020	100	77

Sumber: BPS Kab. Alor 2025

Data pada tabel 2.21 diatas menunjukkan persentase kepadatan penduduk Kabupaten Alor Tahun 2024 mencapai 77 orang/Km2 dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Teluk Mutiara yang mencapai 703 orang/Km2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Alor Timur yakni 16 orang/Km2.



2.1.7.5. Proyeksi Demografi

Berdasarkan analisis BPS Kabupaten Alor terhadap angka pertumbuhan penduduk pada beberapa tahun terakhir, maka proyeksi penduduk Kabupaten Alor tahun 2025-2030 sebagaimana tabel 2.22 berikut:

Tabel 2 24 Proyeksi penduduk Kabupaten Alor 2025-2030

No	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)		Sex Ratio	Total (Jiwa)
			Laki-laki	Perempuan		
1	2025	1,67	113.201	115.303	98,18	228.504
2	2026	1,18	114.559	116.640	98,22	231.199
3	2027	1,39	116.163	118.258	98,23	234.421
4	2028	1,37	117.789	119.853	98,28	237.642
5	2029	1,36	119.438	121.426	98,36	240.864
6	2030	2,01	121.710	123.992	98,16	245.702

Sumber : BPS Kab. Alor 2025

Data sebagaimana tabel diatas menunjukkan proyeksi penduduk Kabupaten Alor Tahun 2030 mencapai 245.702 jiwa atau bertambah 17.198 jiwa dari proyeksi penduduk tahun 2025 sejumlah 228.504 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2025-2029 sebesar 1,50 persen. Jumlah penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 113.201 jiwa dan perempuan sebanyak 115.303 jiwa, sedangkan pada tahun 2030 jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 121.710 jiwa, masih lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebesar 123.992 jiwa. Kondisi ini menunjukkan sex ratio yang cenderung meningkat antar periode. Angka sex ratio pada Tahun 2025 sebesar 98,18 persen kemudian menurun menjadi 98,16 persen pada tahun 2030. pertumbuhan jumlah penduduk laki- laki cenderung meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan.

Meningkatnya proyeksi penduduk Kabupaten Alor tahun 2025-2030 berdampak pula pada proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terbesar tahun 2030 pada kelompok usia 10-14 Tahun yaitu sebesar 24.492 jiwa atau bertambah 1.763 jiwa dari tahun 2025, sedangkan kelompok usia terkecil berada pada kelompok usia 70-74 tahun sejumlah 5.218 jiwa.

Proyeksi penduduk Tahun 2025-2030 berdasarkan kelompok umur sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2 25 Proyeksi penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Umur	2025	2030
0-4	23.131	23.110
5-9	24.540	23.113
10-14	22.729	24.492
15-19	19.478	22.651
20-24	17.287	19.540
25-29	18.630	17.763
30-34	18.237	19.026
35-39	16.370	18.217
40-44	13.775	16.251
45-49	12.161	13.552
50-54	11.011	11.798
55-59	9.229	10.502
60-64	7.429	8.594
65-69	6.251	6.631
70-74	3.985	5.218
75+	4.261	5.244
Total	228.504	245.702

Sumber : BPS Kab. Alor 2025

Rasio ketergantungan di Kabupaten Alor diproyeksikan menurun selama periode 2025-2030. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 59,12 persen, yang artinya bahwa terdapat 59-60 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini menurun pada Tahun 2030 yaitu sebesar 55,61 persen, atau terdapat 55-56 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun kedepan tingkat ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap usia produktif semakin berkurang.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Struktur Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor berdasarkan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dari Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2010 dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Alor terlihat pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2 26 PDRB ADHK, PDRB ADHB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Alor ADHK (Rp Juta)	1.996.040	2.045.990	2.106.330	2.193.098	2.286.020
	Pertumbuhan PDRB (persen)	-0,58	2,50	2,98	4,09	4,24
	PDRB Alor ADHB (Rp Juta)	3.052.780	3.166.850	3.363.477	3.635.599	4.007.680
	Pertumbuhan PDRB (persen)	-0,07	3,74	6,21	8,09	10,23
2	PDRB NTT ADHK (Rp Juta)	6.980.961	7.054.066	7.269.528	7.525.756	7.804.457
	Pertumbuhan PDRB (persen)	0,61	1,05	3,05	3,52	3,70



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	PDRB NTT ADHB (Rp Juta)	10.648.245	11.088.146	11.871.820	12.852.313	13.728.248
	Pertumbuhan PDRB (persen)	-0,23	4,13	7,07	8,26	6,82
3	Kontribusi PDRB Alor terhadap					
	PDRB NTT (persen)	2,85	2,90	2,89	2,91	2,93
	PDRB Nasional (persen)	0,0186	0,0184	0,0180	0,0178	0,0177

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025 dan BPS Prov. NTT, 2025

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan kondisi Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Alor meningkat setiap tahun. Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2024 sebesar 4,24 persen atau meningkat 40,64 persen selama lima tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan PDRB ADHB tahun sebesar 10,23 persen atau meningkat 56,64 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Apabila dilihat dari kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB, sektor pertanian masih mendominasi dengan rata-rata mencapai 32,53 persen atas dasar harga berlaku dan 3,46 persen atas dasar harga konstan, sedangkan kontribusi sektor terendah pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,09 persen atas dasar harga berlaku dan 1,8 dasar harga konstan pada sektor Konstruksi. Kontribusi sektor terhadap PDRB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 27 Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Besar PDRB-ADHB (persen)					Besar PDRB-ADHK (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	32,14	32,90	32,98	32,73	31,91	3,05	4,36	3,84	3,59	2,48
Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,35	1,33	1,31	1,2	1,02	4,31	1,63	4,03	1,38
Industri Pengolahan	1,45	1,40	1,43	1,52	1,56	-3,83	-2,19	6,35	5,32	5,93
Listrik dan Gas	0,10	0,12	0,13	0,14	0,13	19,37	4,57	8,06	11,30	8,64
Pengadaan Limbah, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	4,82	6,50	3,78	2,11	2,01
Konstruksi	9,07	9,87	10,11	10,63	10,00	-8,34	11,44	0,84	9,86	1,06
Perdagangan besar dan eceran	12,29	12,30	12,50	13,17	13,22	-5,19	3,33	5,62	6,35	3,31
Transportasi dan Pergudangan	5,12	4,99	5,17	5,45	5,51	-7,82	1,42	5,02	6,41	5,32
Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,40	0,39	0,42	0,45	0,45	-10,31	2,00	9,67	13,16	15,53
Informasi dan komunikasi	6,07	6,09	5,95	5,75	0,49	9,03	3,32	3,24	4,03	5,28
Jasa keuangan dan Asuransi	6,83	7,16	7,40	7,05	6,72	11,15	3,42	0,95	1,05	3,77
Real Estate	1,76	1,68	1,70	1,7	1,72	-1,08	1,45	2,10	2,54	5,52
Jasa Perusahaan	0,48	0,40	0,40	0,38	0,38	-20,18	-10,35	3,55	2,89	8,57
Administrasi pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial	18,32	16,84	16,09	15,49	15,49 *	-3,28	-5,84	0,93	0,34	0,34*
Jasa Pendidikan	3,33	3,24	3,14	3,01	3,01 *	1,05	0,55	0,32	2,36	2,36*
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,68	0,70	0,60	0,69	0,69 *	2,55	4,95	1,44	2,95	2,95*
Jasa Lainnya	0,48	0,47	0,48	0,45	0,45*	-10,50	2,18	1,92	2,08	2,08*
PDRB	100	100	100	100	100*	-0,55	2,50	2,95	4,09	4,09*

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor utama dalam pembangunan di



Kabupaten Alor. Perkembangan sektor ini juga menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat karena menyerap tenaga kerja terbanyak sehingga perlu diupayakan kebijakan peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Alor.

a. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita sebagai salah satu indikator ekonomi makro dimaksudkan untuk melihat tingkat kemakmuran daerah dan juga menunjukkan rata-rata pendapatan yang dinikmati oleh setiap penduduk. Tingkat pendapatan perkapita sangat tergantung pada kinerja pembangunan yang berimbang antar sektor dalam penyerapan tenaga kerja setiap tahun anggaran berjalan.

Rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Alor atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan Tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Tabel berikut memberikan perkembangan pertumbuhan PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Tabel 2 28 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Alor dan Provinsi NTT

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB Kab. Alor					
a. ADHB (Rp. Milyar)	3.052.780	3.166.850	3.363.477	3.635.599	4.007.680
b. ADHK 2010 (Rp. Milyar)	1.996.040	2.045.990	2.106.330	2.193.098	2.286.020
c. Pertumbuhan PDRB ADHB (persen)	-0,07	3,74	6,17	8,09	10,23
d. Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)	-0,58	2,50	2,95	4,09	4,24
PDRB Perkapita Kab. Alor					
a. ADHB (Rp. Milyar)	14,41	14,80	15,55	16,41	17,81
b. ADHK 2010 (Rp. Milyar)	9,42	9,56	9,74	9,90	10,16
c. Pertumbuhan PDRB perkapita ADHB (persen)	-3,03	2,71	5,06	5,52	8,53
Nilai PDRB NTT					
a. ADHB (Rp. Milyar)	10.648.245	11.088.146	11.871.820	12.852.310	13.728.248
b. ADHK 2010 (Rp. Milyar)	6.980.961	7.054.066	7.269.528	7.525.756	7.804.453
c. Pertumbuhan PDRB ADHB (persen)	-0,23	4,13	7,07	8,26	6,82
d. Pertumbuhan PDRB ADHK (persen)	0,61	1,05	3,05	3,52	3,70
PDRB Perkapita Provinsi NTT					
a. PDRB Perkapita ADHB NTT (Rp. Milyar)	20,26	20,58	21,72	22,72	23,91
b. PDRB Perkapita ADHK NTT (Rp. Milyar)	13,12	13,09	13,30	13,31	13,59
c. Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB	2,45	1,56	5,53	4,63	5,21

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata PDRB perkapita penduduk atas dasar harga berlaku tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yakni Rp. 14,41 Milyar pada Tahun 2020 menjadi Rp. 17,81 Milyar pada Tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun terjadi peningkatan sebesar Rp. 3,40 Milyar atau meningkat rata-



rata 15,80 persen per tahun; sedangkan atas dasar harga konstan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan dari Rp. 9,42 Milyar pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 10,16 Milyar tahun 2024 atau meningkat rata rata 9,76 persen per tahun.

b. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota rumah tangga selama satu bulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun usaha mandiri dibagi banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran perkapita juga menggambarkan ukuran tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Distribusi pengeluaran masyarakat diukur dari kelompok pengeluaran bulanan berdasarkan pendapatan. Data empat tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan daya beli pada kelompok pendapatan Rp. 500.000 - Rp.749.999. Demikian halnya dengan kelompok pendapatan > Rp. 1.000.000. Distribusi pengeluaran rumah tangga yang mencerminkan kemampuan pendapatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 29 Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Besar Pengeluaran (Rp)	2020	2021	2022	2023	2024
≤149.999	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
150.000-199.999	0,00	0,00	00,00	0,00	8,11
200.000-299.999	4,58	4,58	00,49	0,82	1,84
300.000-499.999	41,47	41,47	24,82	12,00	29,66
500.000-749.999	21,19	21,19	38,16	41,66	28,10
750.000-999.999	16,95	16,95	18,79	21,46	18,54
≥1.000.000	15,81	15,81	17,74	15,63	13,75
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2024.

Persentase penduduk berdasarkan pengeluaran kurang dari Rp. 300.000 terus berkurang hingga tahun 2024 dan sebaliknya persentase penduduk berdasarkan pengeluaran lebih dari Rp. 300.000 terus mengalami peningkatan, sekaligus menunjukan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah besarnya pengeluaran konsumsi makanan dan bukan makanan perkapita perbulan. Artinya semakin tinggi pengeluaran terhadap barang bukan makanan menunjukkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan. Secara keseluruhan pengeluaran perkapita/bulan terhadap makanan dan bukan makanan di Kabupaten Alor Tahun 2020 sampai 2024 sebagaimana Tabel berikut.



Tabel 2 30 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

No	Pengeluaran Perkapita	2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan	407.676	437.627	467.787	504.805	450.209
	Persentase (persen)	61,95	61,26	60,18	35,81	57,02
2	Bukan makanan	250.355	276.767	309.508	905.010	339.301
	Persentase (persen)	38,05	38,74	39,82	64,19	42,98
	Total	658.031	714.394	777.295	1.409.815	789.510

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Data sebagaimana tabel diatas, menggambarkan bahwa pengeluaran perkapita masyarakat untuk tahun 2020 sampai 2024 masih didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan, sedangkan tahun 2023 didominasi oleh bukan makanan. Data tahun 2023 masyarakat Kabupaten Alor didominasi oleh kebutuhan makanan sebesar 35,81 persen , sedangkan untuk bukan makanan rata-rata mencapai 64,19 persen . Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat Kabupaten Alor masih cukup tinggi karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk pengeluaran kebutuhan makanan.

c. Investasi

Iklim investasi adalah kondisi dinamis yang memungkinkan terciptanya peluang investasi melalui kebijakan dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi antara lain: 1) kondisi ekonomi makro mencakup stabilitas ekonomi, keterbukaan ekonomi, persaingan pasar dan stabilitas sosial dan politik; 2) Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk di dalamnya kejelasan dan efektifitas aturan perpajakan; 3) Infrastruktur mencakup sarana prasarana, transportasi dan telekomunikasi. Potensi Investasi di Kabupaten Alor mencakup sumber daya unggulan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Potensi tersebut meliputi bidang Pariwisata, Perikanan, Perkebunan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Transportasi yang sebarannya terbaca dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 31 Potensi Investasi di Kabupaten Alor

No	Jenis Potensi	Lokasi
1	Pariwisata	
	Diving	Selat Pantar, Pulau Pura, Pulau Kepa, Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Alor.
	Wisata Pantai	Ling Al, Maimol, Mali, Pigawe, Sebanjar, Pante Deere, Batu Putih, Delaki, Pulau Sika, Alor Kecil, Welolo, Kangge, Beang, Java Toda.
2	Perikanan	
	Garam	Padang Garam (Ds. Mausamang), Ds. Muriabang, Hula (Ds. Alor Besar), Ds. Air Mancur, Ds. Kiraman, Ds. Manatang.
	Rumput Laut	Pantar (Munaseli, Bana, Wailawar, Pandai), Pantar Barat Laut (Kayang, Allumang, Marisa, Kalondama Barat), Pantar Barat (Blangmerang), Kabola (Pante Deere), ABAL (Ds. Aimoli, Ds. Alaang)
	Perikanan Tangkap	ABAL, Pantar, Kabola, Pantar Barat, Alor Timur, ABAD Selatan, Mataru, Pantar Timur, Pantar Tengah, Pulau Pura.



No	Jenis Potensi	Lokasi
	Perikanan Air Tawar	Alor Timur (Desa Tanglapui, Desa Belemana, Desa Padang Panjang), Alor Timur Laut (Desa Air Mancur, Desa Kamot, Desa Waisika, Desa Nailang) Alor selatan (Desa Subo, Malaipea), Alor Tengah Utara (Desa Alimmbung, Desa Welai Sealatan, Desa Tominuku), ABAD (Desa Pailalang) ABAL (Desa Alaang).
	Mutiara	ABAD, ABAD Selatan, Pantar Barat Laut
3	Perkebunan	
	Vanili	Alor Tengah Utara (Ds. Manetwati, Ds. Lakwati, Ds. Fuisama, Ds. Tominuku), Alor Selatan (Kel. Kelaisi Timur, Ds. Kelaisi Tengah, Ds. Kelaisi Barat, Ds. Malaipea), Mataru (Ds.Mataru Barat, Mataru Utara, Lembur (Ds. Luba, Ds. Talwai, Ds. Tasi)
	Kopi	Alor Selatan (Kelaisi Tengah, Kelaisi Barat), Alor Barat Laut
	Kelor	15 Kecamatan
	Porang	15 Kecamatan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Panas Bumi	Ds. Aramaba (Koralau)
	Tenaga Air	Taman Mataru, Tamanapui, Purnama
	Galena	Wakapsir, Wakapsir Timur
	Kaolin	Desa Aramaba
	Emas	Kabir, Wakapsir, Wakapsir Timur
	Minyak Bumi	Desa Aramaba (Beang)
5	Transportasi	
	Darat, Laut, Udara	Kab. Alor

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Salah satu faktor pendukung meningkatnya minat investor untuk berinvestasi adalah kemudahan perizinan untuk berinvestasi. Efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dalam melayani perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 31 Tahun 2017 berjumlah 119 dari total 131 jenis perizinan. Berdasarkan jenis pelayanan dan waktu, proses perizinan dibagi dalam 3 kategori sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 32 Jenis Layanan dan Waktu Proses Perizinan di Kabupaten Alor

No	Bidang Perizinan	Lama Waktu Proses (hari kerja)	Keterangan
1	Bidang Pembangunan		Lama waktu pengurusan izin disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi
	- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	14	
	- Izin Usaha Jasa Konstruksi	10	
2	Bidang Ekonomi		
	- Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	3	
	- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5	
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	3	
	- Tanda Daftar Gudang (TDG)	6	
	- Tanda Daftar Industri (TDI)	6	
	- Izin Praktek Dokter	3	
	- Izin Praktek Bidan	3	
	- Izin Apotik, Toko Obat, Optik	4	
3	Bidang Pemerintahan dan Kesra		
	- Izin Pengusahaan Sarana Pariwisata	3	
	- Izin Penyediaan Makanan dan Minuman	3	
	- Izin Usaha Angkut Wisata	3	
	- Izin Trayek	2	

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Alor, 2025



2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja karena terbatasnya lapangan kerja atau pekerjaan yang tidak sesuai. Pemerintah Daerah berupaya untuk menekan angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja di Kabupaten Alor. Angkatan kerja pada dasarnya menunjuk pada kelompok penduduk usia 15 Tahun atau lebih yang berada pada pangsa pasar kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Data angkatan kerja dan penduduk yang bekerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 33 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Absolut	persen	Absolut	persen	Absolut	persen	Absolut	persen	Absolut	persen
Angkatan Kerja										
Laki-laki	56.864	50,92	56.077	52,12	56.655	50,57	62.320	50,52	63.985	50,69
Perempuan	54.816	49,08	51.519	47,88	55.380	49,43	61.044	49,48	62.237	49,31
Jumlah	111.680	100,00	107.596	100,00	112.035	100,00	123.364	100,00	126.222	100,00
Penduduk Yang Bekerja										
Laki-laki	54.405	50,73	54.312	51,82	55.489	50,68	60.539	50,34	62.840	50,94
Perempuan	52.831	49,27	50.502	48,18	54.006	49,32	59.721	49,66	60.515	49,06
Jumlah	107.236	100,00	104.814	100,00	109.495	100,00	120.260	100,00	123.355	100,00
Pengangguran Terbuka										
Laki-laki	2.459	3,86	1.756	3,13	1.166	2,06	1.781	2,86	1.145	1,79
Perempuan	1.985	2,35	1.017	1,97	1.374	2,48	1.323	2,17	1.722	2,77
Jumlah	4.444	3,11	2.773	2,58	2.540	2,27	3.104	2,52	2.867	2,27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			104.814	78,15	104.814	77,16	119.916	86,44	120.260	85,23

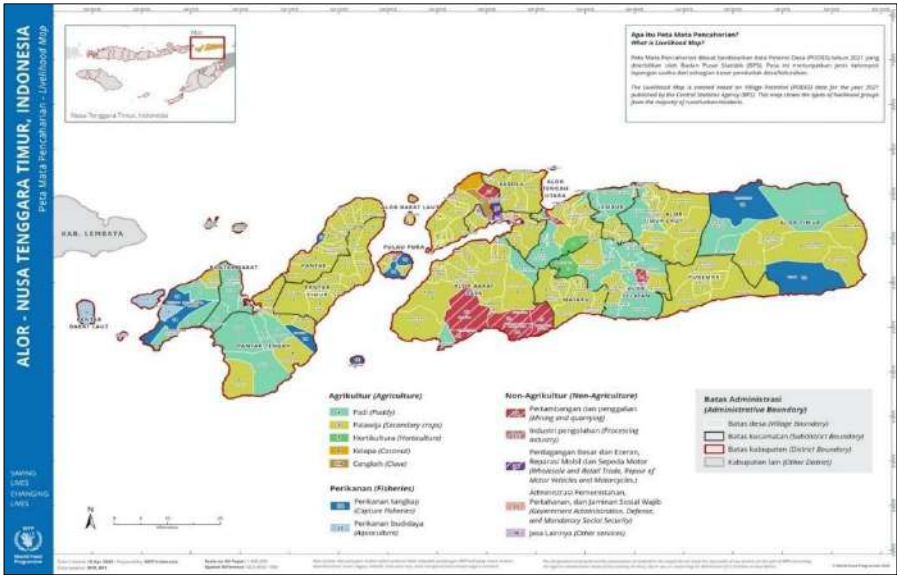
Sumber : BPS Kab. Alor, 2025

Jumlah angkatan kerja mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir, pada tahun 2020 berjumlah 111.680 orang, kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 107.596 orang sebagai dampak dari pandemi covid 19 dan meningkat kembali menjadi 112.035 orang angkatan kerja pada tahun 2022 dan 123.634 orang pada tahun 2023 dan 126.222 pada tahun 2024. Demikian halnya penduduk yang terserap dalam lapangan pekerjaan juga mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Jika ditinjau dari jenis kelamin maka jumlah pengangguran terbuka laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan setiap tahunnya kecuali tahun 2022.

2.2.1.3. Mata Pencaharian, Sensitivitas dan Resiliensi Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan mata pencaharian yang responsif terhadap perubahan iklim, dapat digambarkan bahwa kabupaten Alor memiliki 12 pencaharian dominan yang sebagian besar berada pada sektor pertanian ataupun sektor primer. Sektor pertanian terutama palawija dan sawah/padi merupakan jenis mata pencaharian yang paling banyak ditemui jika diamati menurut sebaran di setiap desa/kelurahan.

Data mata pencaharian penduduk Kabupaten Alor selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

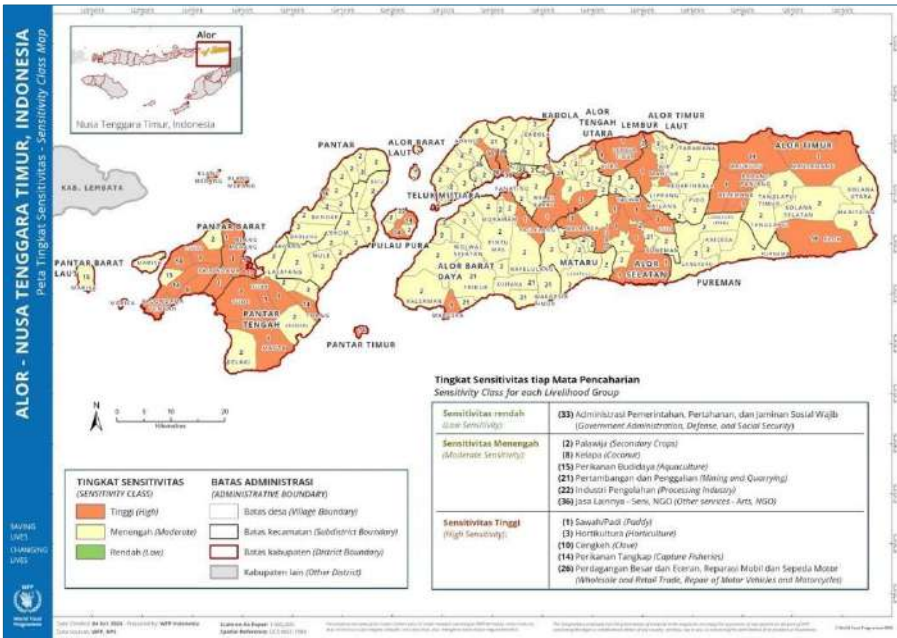


Sumber: WFP Indonesia, 2024

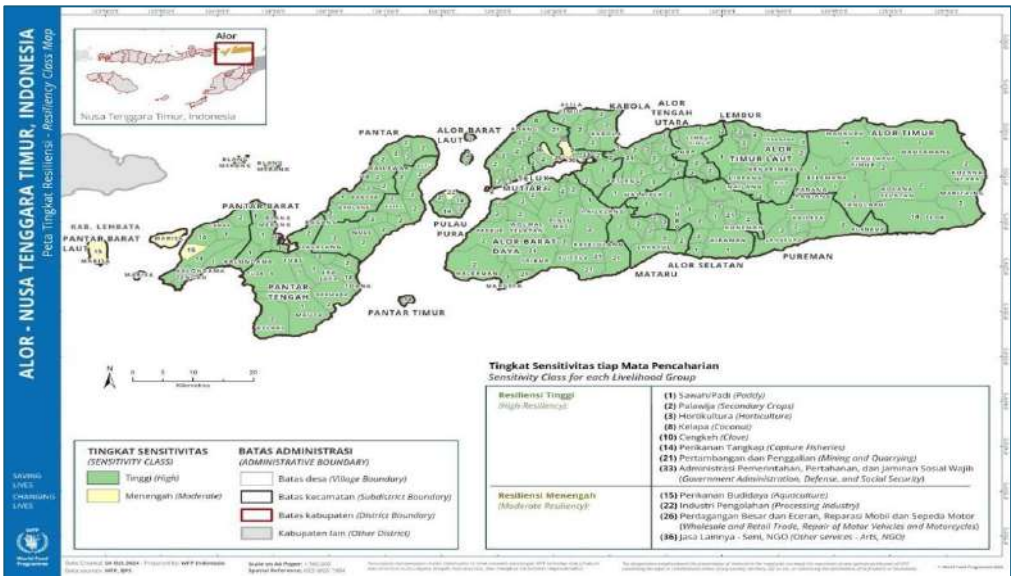
Gambar 2. 7 Sebaran Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Alor Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis ketahanan pangan melalui pendekatan sensitifitas mata pencaharian terhadap dampak perubahan iklim, Alor memiliki 5 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Tinggi (High Sensitivity) yaitu (1) sawah/padi, (3) hortikultura, (10) cengkeh, (14) perikanan tangkap, dan (26) perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Apabila dilihat dari tingkat resiliensi, seluruh jenis mata pencaharian di Alor memiliki tingkat resilien yang menengah hingga tinggi, atau dapat dikatakan cukup tahan terhadap perubahan iklim karena didukung oleh berbagai sumber daya dan sistem yang dapat mendukung peningkatan ketahanan dana keamanan pangan. Namun demikian, melihat konteks perubahan iklim jangka panjang maka berbagai jenis adaptasi perlu dipersiapkan, khususnya untuk lima mata pencaharian dengan kategori sesitivitas tinggi. Selain itu, beberapa mata pencaharian yang masuk dalam kategori resiliensi menengah perlu tetap mendapat perhatian untuk menjaga tren ketahanannya ataupun ditingkatkan. Mata pencaharian tersebut ialah (15) perikanan budidaya, (22) industri pengolahan, (26) perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan (36) jasa lainnya. Rincian dan sebaran tingkat sensitivitas dan resiliensi mata pencaharian penduduk di Alor selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.8 dan 2.9 berikut.



Gambar 2. 8 Tingkat Sensitivitas Mata Pencarian Penduduk di Kabupaten Alor



Sumber: WFP Indonesia, 2024
Gambar 2. 9 Tingkat Resiliensi Mata Pencarian Penduduk

Untuk meningkatkan resiliensi sektor-sektor ini, diperlukan strategi adaptasi yang lebih baik, seperti pengembangan teknologi pertanian yang lebih ramah iklim, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan dan ekonomi.

Dalam konteks perubahan iklim jangka panjang, langkah-langkah adaptasi harus terus dikembangkan untuk mengurangi risiko pada sektor-sektor yang rentan serta meningkatkan ketahanan keseluruhan sistem ekonomi di Kabupaten Alor. Dengan demikian, ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dapat tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

2.2.1.4. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Alor pada Tahun 2020 berjumlah 43.550 orang atau 21,09 persen dari total penduduk Kabupaten Alor. Perkembangan jumlah penduduk miskin cenderung menurun, hingga September 2024 menjadi sejumlah 41.890 orang atau 19,87 persen. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Alor dan Provinsi NTT tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2 34 Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah penduduk	Penduduk Miskin		Garis Kemiskinan Alor	Penduduk Miskin NTT	
		Jumlah	persen		Jumlah	persen
2020	211.872	43.550	21,09	336.402	1.153.760	20,90
2021	213.994	43.830	21,09	400.858	1.169.310	20,45
2022	216.629	42.300	20,25	438.013	1.131.620	20,05
2023	221.536	41.910	19,97	453.764	1.141.110	19,96
2024	225.020	41.890	19,87	472.516	1.127.570	19,48

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data pada Tabel 2.32 di atas menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Alor masih lebih tinggi jika dibandingkan persentase penduduk miskin NTT. Persentase penduduk miskin Kabupaten Alor pada bulan September 2024 sebesar 19,87 persen, sedangkan Provinsi NTT sebesar 19,48 persen. Jumlah dan persentase penduduk miskin yang semakin menurun disesuaikan dengan garis kemiskinan di Kabupaten Alor yang meningkat sebesar Rp. 472.516 pada tahun 2024.

Persoalan kemiskinan tidak hanya pada jumlah penduduk miskin tetapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Data Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dalam empat tahun terakhir tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2 35 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahannya Kemiskinan	
	Alor	NTT	Alor	NTT
2020	2,92	4,02	0,58	1,05
2021	3,31	3,96	0,65	1,05
2022	3,42	3,63	0,72	0,93



Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		Indeks Keparahan Kemiskinan	
	Alor	NTT	Alor	NTT
2023	2,82	3,33	0,63	0,80
2024	2,25	3,14	0,49	0,85

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan selama Tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan penghasilan dan tingkat penghasilan penduduk miskin masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Kemiskinan Ekstrem, Kabupaten Alor termasuk salah satu dari 18 Kabupaten/ Kota Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT. Pemerintah secara nasional berupaya melakukan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor telah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bekerja untuk keluar dari kategori kabupaten dengan kemiskinan ekstrem melalui sejumlah program kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

2.2.1.5. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem menurut BPS kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2024 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Data kemiskinan ekstrem kabupaten Alor tahun 2021-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 36 Data kemiskinan ekstrem kabupaten Alor tahun 2021-2024

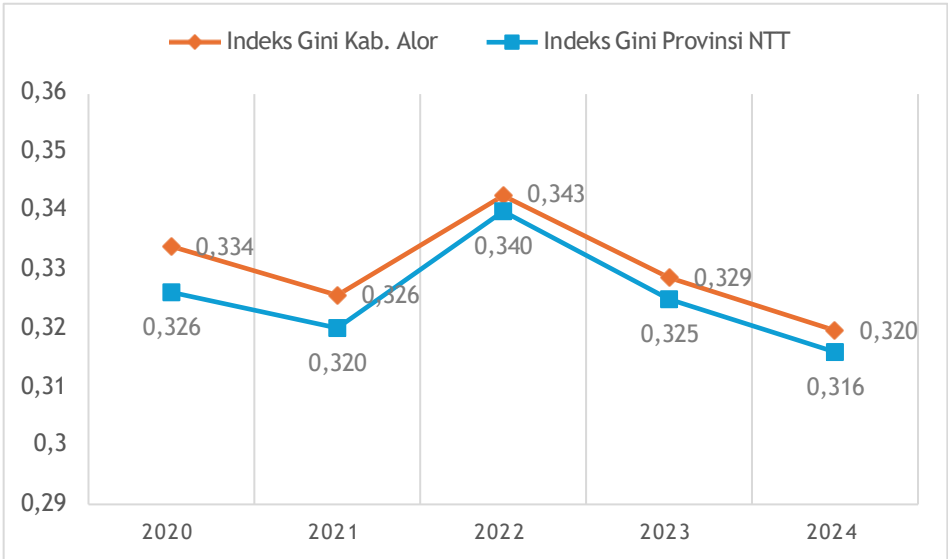
No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu jiwa)	43,83	42,3	41,91	41,89
2	Persentase Penduduk Miskin	21,09	20,25	19,97	19,87
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (dalam ribu jiwa)	5,75	4,98	n.a	6,2
4	Persentase Penduduk Miskin Ekstrem	2,77	2,38	n.a	2,79

Sumber: BPS NTT, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2021-2024 mengalami fluktuatif. Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS pada Maret tahun 2024 menghasilkan persentase penduduk miskin ekstrem di kabupaten Alor mencapai 2,79 persen atau sejumlah 6,2 ribu jiwa.

2.2.1.6. Ketimpangan

Indikator pembangunan lainnya yakni terkait ketimpangan pendapatan atau indeks gini. Indeks gini (*gini ratio*) digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, jika nilainya mendekati 0, maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Data indeks Gini Ratio Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020 -2024 sebagaimana ditunjukkan pada grafik 2.7.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025 dan Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 7 Grafik Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Gini Kab. Alor dan Prov. NTT Tahun 2020-2024

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Alor dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi ketimpangan pendapatan yang mencerminkan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Indeks Gini Alor tercatat sebesar 0,334 pada tahun 2020, turun menjadi 0,326 pada 2021, namun meningkat signifikan menjadi 0,343 pada 2022 angka tertinggi dalam periode tersebut. Tren ini kemudian berbalik dengan penurunan bertahap menjadi 0,329 pada 2023 dan kembali turun ke 0,320 pada 2024.

Dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Alor secara konsisten mencatat tingkat ketimpangan yang sedikit lebih tinggi, meskipun menunjukkan arah perbaikan yang paralel. Kenaikan tajam pada

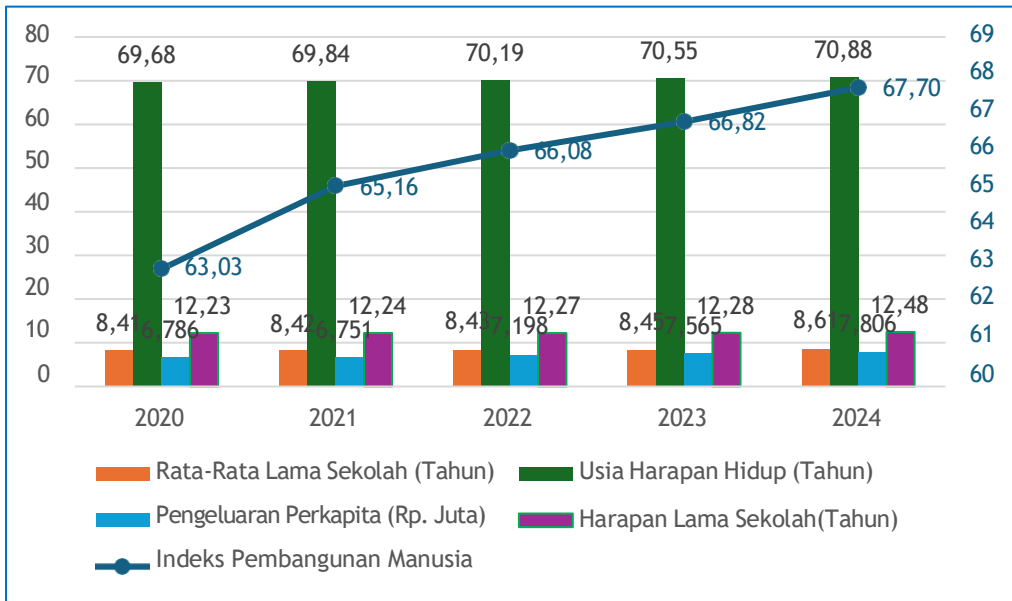
2022 mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi belum sepenuhnya inklusif, dengan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Penurunan indeks gini dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi lokal, serta intervensi sektor informal dan UMKM. Namun, capaian ini masih membutuhkan konsistensi dan penguatan dalam kebijakan redistributif yang lebih terstruktur.

Dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Alor memprioritaskan agenda pembangunan yang menekankan pemerataan ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan akses masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi. Pendekatan pembangunan berbasis inklusi sosial dan ekonomi akan menjadi fondasi dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan, sekaligus mengakselerasi pencapaian target penurunan ketimpangan secara berkelanjutan.

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. IPM dibentuk oleh 3 faktor, yakni: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh usia harapan hidup saat lahir (UHH), yakni jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan standard hidup layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

IPM Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan. IPM Kabupaten Alor Tahun 2020 mencapai 63,03 poin, meningkat menjadi 67,70 pada tahun 2024 atau terjadi peningkatan sebesar 2,57 poin atau secara rata-rata tumbuh 0,97 persen pertahun. perkembangan IPM pada Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 8 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Alor Tahun 2020-2024.

Data pada grafik diatas menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan pada keempat faktor pembentuk IPM Kabupaten Alor yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Usia Harapan Hidup (UHH); merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pada tahun 2020-2024 UHH meningkat 1,20 Tahun dan secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,43 persen per tahun. UHH Tahun 2020 sebesar 69,68 Tahun dan Tahun 2024 mencapai 70,88 Tahun yang berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang untuk hidup hingga 70 Tahun 10 bulan 16 hari.
- 2) Harapan Lama Sekolah (HLS); periode 2020-2024 meningkat sebesar 0,25 Tahun dan secara rata-rata tumbuh sebesar 0,51 persen per Tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan kecenderungan positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah pada Tahun 2024. HLS mencapai 12,48 tahun artinya bahwa anak-anak usia 7 Tahun memiliki peluang untuk menamatkan SMA.
- 3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS); periode 2020-2024 meningkat sebesar 0,20 Tahun dan secara rata-rata tumbuh sebesar 0,59 persen per tahun. Pada Tahun 2024 RLS mencapai 8,61 Tahun yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Alor hanya sampai SMP kelas 2.
- 4) Standar Hidup Layak; yang direpresentasikan oleh pengeluaran perkapita masyarakat mencapai Rp. 7,806 Milyar pada Tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran perkapita masyarakat rata rata bertumbuh sebesar 3,60 persen per tahun .

Keseluruhan indikator pembentuk IPM selama lima tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan Pembangunan di Kabupaten Alor.



2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Alor berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Capaian kinerja bidang kesehatan ditunjukkan oleh sejumlah indikator yang diuraikan lebih lanjut berikut ini.

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan rata rata lama hidup penduduk di suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Usia harapan hidup masyarakat kabupaten Alor meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 seiring dengan kemajuan pembangunan. Usia harapan hidup tahun 2020 sebesar 69,68 tahun meningkat 1,20 tahun menjadi 70,88 tahun pada tahun 2024, yang berarti bahwa setiap penduduk kabupaten Alor mempunyai peluang untuk hidup hingga 70 Tahun 10 bulan 16 hari. Hal ini tentunya membutuhkan kebijakan lanjutan terhadap penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang jumlahnya semakin meningkat, diantaranya dalam bidang kesehatan berupa peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi lansia, program kesehatan spesifik bagi lansia dan upaya preventif penyakit degeneratif. Pada bidang sosial berupa peningkatan kesejahteraan sosial lansia dan peningkatan akses layanan lansia.

2.2.2.2. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan cakupan gizi kurang sejak janin dalam kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan (1000 HPK). Tingginya angka stunting pada satu sisi menggambarkan secara fisik pertumbuhan yang pendek dan kurus yang adalah *predisposing factor* menderita penyakit-penyakit degenerative atau penyakit tidak menular pada saat dewasa, namun pada sisi lain adalah terbatasnya kemampuan belajar di sekolah sebagai akibat pertumbuhan kapasitas otak yang rendah dan tak tergantikan (*irreversible*) selama masa pertumbuhan awal (*golden period*). Jumlah balita stunting yang teridentifikasi di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dirinci per kecamatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 37 Jumlah Balita Stunting Tahun 2020-2024 hasil e-PPBGM

No	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pantar	175	81	52	44	36
2	Pantar Barat	91	61	106	74	67
3	Pantar Tengah	70	63	139	100	109
4	Pantar Timur	184	209	185	124	121
5	Pantar Barat Laut	124	52	72	76	100
6	Alor Barat Daya	434	206	300	235	376
7	Mataru	272	211	134	136	142

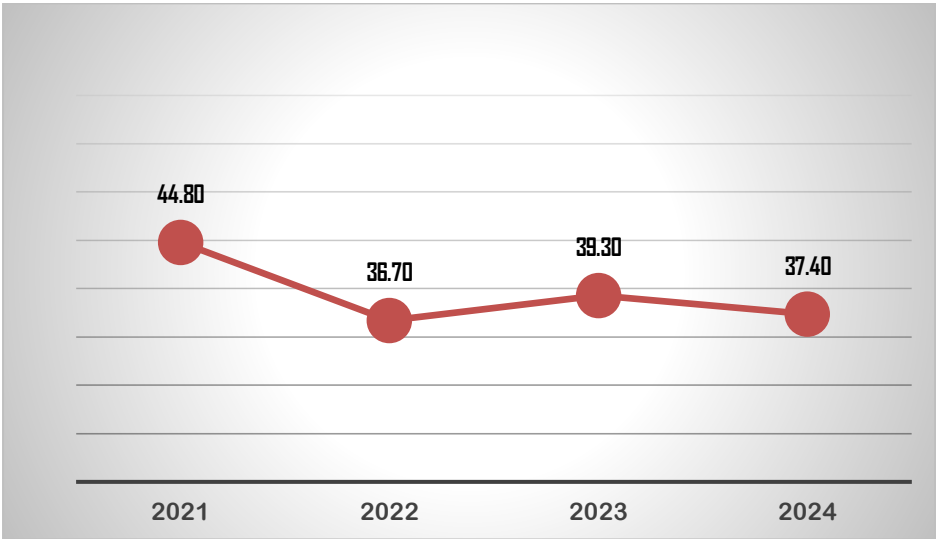


No	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting (Jiwa)				2024
		2020	2021	2022	2023	
8	Alor Selatan	356	178	157	130	197
9	Alor Timur	160	100	51	50	45
10	Alor Timur Laut	267	190	134	52	27
11	Pureman	36	61	45	47	49
12	Teluk Mutiara	186	582	218	223	341
13	Kabola	166	190	73	72	97
14	Alor Barat Laut	345	240	187	189	185
15	Alor Tengah Utara	272	539	51	72	121
16	Lembur	99	50	58	64	67
17	Pulau Pura	183	92	38	25	54
18	ABAD Selatan	na	44	119	60	126
Total		3.420	3.149	2.119	1.773	2.260
Persen balita stunting		22,50	18,90	15,60	11,10	13,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Data balita stunting pada tabel tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah balita stunting di Kabupaten Alor pada tahun 2020 hingga 2024. Walaupun pada sebagian besar kecamatan jumlah balita stunting menurun tetapi pada kecamatan lain terjadi peningkatan, seperti di Kecamatan Pantar Tengah, Pantar Timur, Pantar Barat Laut, Alor Barat Daya, Alor Tengah Utara, Teluk Mutiara, Kabola dan Abad Selatan. Data balita stunting yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil penimbangan pada pertengahan tahun atau hasil e-PPBGM. Kabupaten Alor sejak tahun 2019 masuk dalam 216 kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang prevalensi stunting tinggi.

Data prevalensi stunting berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia tahun 2021-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di kabupaten Alor mengalami fluktuasi. Data diamksud sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2025

Grafik 2. 9 Data Prevalensi Stunting SKI Kab. Alor Tahun 2021-2024

Data prevalensi stunting Kabupaten Alor baik dari hasil pengukuran e-PPBGM maupun SKI masih cukup tinggi. Dengan demikian membutuhkan intervensi penanganan baik spesifik maupun sensitif dengan keterlibatan seluruh *stakeholder* terkait.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata Rata Lama Sekolah

Rata rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata rata lama sekolah penduduk kabupaten Alor menunjukkan trend peningkatan selama 5 tahun terakhir. Rata rata lama sekolah pada periode 2020-2024 meningkat sebesar 0,20 tahun dan secara rata-rata tumbuh sebesar 0,59 persen per tahun. Pada tahun 2024 rata rata lama sekolah mencapai 8,61 tahun yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Alor hanya sampai SMP kelas 2.

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah diartikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur umur berikutnya, sama dengan peluang saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS); periode 2020-2024 meningkat sebesar 0,25 tahun dan secara rata-rata tumbuh sebesar 0,51 persen per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan kecenderungan positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah pada tahun 2024. HLS mencapai 12,48 tahun artinya bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan SMA.

2.2.3.3. Literasi/ Numerasi

Dalam dunia pendidikan, literasi dan numerasi merupakan dua kemampuan dasar yang sangat penting dan saling melengkapi. Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi secara kritis. Seorang siswa yang literat mampu menangkap makna dari bacaan, mengolah informasi dari berbagai sumber, serta mengekspresikan ide dan pemikirannya secara jelas dan logis.

Di sisi lain, numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari.



Numerasi tidak hanya sekadar kemampuan berhitung, melainkan mencakup keterampilan berpikir logis, menganalisis data, membaca grafik, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka dan pengukuran. Dalam konteks pendidikan, numerasi membantu siswa dalam memahami pelajaran tidak hanya di bidang matematika, tetapi juga di mata pelajaran lain yang melibatkan data dan angka.

Keduanya menjadi fondasi utama dalam proses belajar di sekolah dan di luar sekolah. Literasi memungkinkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran, menafsirkan informasi, dan mengembangkan pemikiran kritis. Sementara numerasi membantu mereka untuk menalar secara kuantitatif, berpikir sistematis, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada perhitungan dan logika.

Data literasi dan numerasi Kabupaten Alor ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 38 Data Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD-SMA Kab. Alor

No	Indikator	Jenjang Pendidikan	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Kemampuan literasi	SD Umum	29,46	31,91	39,52
		SD Kemenag	20,85	37,05	37,02
		SD SLB	-	66,67	-
		SD Kesetaraan	13,13	35,71	77,26
		SMP Umum	19,05	25,93	30,89
		SMP Kemenag	21,78	18,64	23,46
		SMP SLB	-	-	-
		SMP Kesetaraan	13,13	19,28	14,58
		SMA Umum	27,11	27,35	38,96
		SMA Kemenag	26,80	14,35	38,82
		SMA SLB	50,00	0,00	-
		SMA Kesetaraan	8,33	3,61	20,82
		SMK Umum	23,86	24,82	25,00
		Total Kabupaten	19,50	23,49	26,64
2	Kemampuan Numerasi	SD Umum	16,73	21,75	33,35
		SD Kemenag	10,09	26,01	37,71
		SD SLB	0,00	0,00	-
		SD Kesetaraan	23,81	19,05	63,64
		SMP Umum	18,84	18,76	32,46
		SMP Kemenag	20,80	11,30	20,50
		SMP SLB	25,00	-	-
		SMP Kesetaraan	14,75	13,10	17,71
		SMA Umum	18,74	23,52	44,72
		SMA Kemenag	18,23	18,06	42,79
		SMA SLB	-	-	0,00
		SMA Kesetaraan	11,35	9,94	23,53
		SMK Umum	13,36	15,64	40,57
		Total Kabupaten	14,75	13,63	27,46

Sumber: Dinas Pendidikan Kab, Alor, 2025

Perkembangan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan SD-SMA di Kabupaten Alor berkembang fluktuatif namun terus meningkat sampai tahun 2024. Angka literasi total kabupaten meningkat dari 19,50 di tahun 2022

menjadi 26,64 di tahun 2024. Sementara untuk angka numerasi, total kabupaten meningkat dari 14,75 di tahun 2022 menjadi 27,46 di tahun 2024. Meningkatkan literasi dan numerasi dalam pendidikan bukan hanya tentang memperkuat kemampuan akademik, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang cakap, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Oleh karena itu, kedua kemampuan ini menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum dan evaluasi mutu pendidikan di Indonesia saat ini.

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah gambaran tingkat kemajuan literasi di masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini berfungsi untuk menilai sejauh mana masyarakat memiliki akses terhadap sumber bacaan, kualitas layanan literasi, serta minat dan budaya membaca dalam kehidupan sehari-hari. IPLM disusun berdasarkan beberapa dimensi utama, yakni ketersediaan bahan bacaan dan fasilitas literasi, aksesibilitas terhadap layanan literasi, kualitas penyelenggaraan layanan perpustakaan, serta intensitas dan budaya membaca masyarakat. IPLM mendorong peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan infrastruktur literasi lainnya, serta memperkuat budaya membaca sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. IPLM Kabupaten Alor tahun 2023 berada pada angka 54,56 di bawah angka provinsi NTT yaitu 60,53 namun menurun di tahun 2024 menjadi 29,48 sementara provinsi meningkat menjadi 62,62. Melalui pemantauan yang rutin dan komprehensif, IPLM menjadi cerminan dari kemajuan pembangunan manusia di bidang literasi, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

2.2.3.5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai instrumen evaluasi untuk menilai kesiapan, kemampuan dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat di berbagai daerah. IMDI Kabupaten Alor tahun 2024 berada pada angka 39,64 dengan kategori cukup. Jika disandingkan dengan IMDI Provinsi NTT, maka kondisi kabupaten Alor masih di bawah provinsi NTT dengan angka 42,32. IMDI disusun berdasarkan empat dimensi utama yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah infrastruktur digital, yang mencakup ketersediaan jaringan internet, perangkat teknologi, dan layanan konektivitas yang menjadi fondasi utama pemanfaatan teknologi. Dimensi kedua adalah sumber daya manusia digital, yaitu sejauh mana masyarakat memiliki kecakapan dan pengetahuan dalam menggunakan teknologi digital secara produktif dan aman.



Dimensi ketiga adalah pemerintahan digital, yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik secara digital, termasuk efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi. Sementara dimensi keempat adalah ekonomi digital, yang menilai partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi, seperti perdagangan daring, sistem pembayaran digital, dan inovasi kewirausahaan digital.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1. Program Keluarga Harapan

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui dukungan dana dan penyediaan sarana prasarana baik oleh pemerintah maupun lembaga- lembaga swasta. Dukungan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan jumlah penerima dan total anggaran PKH sebagaimana tabel 2.37 berikut.

Tabel 2 39 Jumlah Penerima dan Realisasi Program PKH Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah KPM	Realisasi (Rp)
1	2020	16.321	73.358.481.000
2	2021	15.539	63.723.800.000
3	2022	15.639	58.010.875.000
4	2023	18.174	57.393.275.000
5	2024	32.552	154.486.700.000

Sumber: Dinas Sosial Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang fluktuatif terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun realisasi pendanaannya terus menurun dari tahun 2020-2023, selanjutnya meningkat lagi cukup signifikan di tahun 2024, baik dari sisi penerima manfaat maupun jumlah alokasi anggaran. Jika dibandingkan dengan KPM tahun 2022 terhadap 2024 terjadi peningkatan sebesar 16.231 KPM. Sedangkan besaran realisasi pendanaan PKH, tahun 2024 terjadi peningkatan sejumlah Rp. 81.128.219.000 atau meningkat 52,51 persen dari tahun 2020. Pendanaan bagi keluarga miskin diperuntukkan bagi beasiswa anak, kesehatan ibu menyusui dan sejumlah kebutuhan prioritas keluarga lainnya. Sejumlah peran pihak swasta dalam membantu pemerintah menangani masalah kesejahteraan sosial melalui penyediaan panti asuhan. Gambaran jumlah dan penghuni panti asuhan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2 40 Jumlah Panti dan Penghuni Panti Asuhan Tahun 2020-2024

No	Nama Panti Asuhan	2020			2021			2022			2023			2024		
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Amal Ikhlas	29	31	60	23	16	39	23	16	39	22	14	36	25	26	51
2	Damian	21	13	34	15	5	20	15	5	20	21	13	34	10	10	20
3	Tas Sion	23	17	40	21	14	35	21	14	35	30	14	44	16	19	35
4	Maria Malys	5	3	8	-	-	-	-	-	-	5	3	8	0	0	0
5	Cacat Sikhem	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-	15	15	0	0	0
6	An'Nur	26	-	26	30	-	30	30	-	-	27	-	27	33	0	33
7	Rahel	11	8	19	-	-	-	-	-	-	11	8	29	0	0	0
8	Bungabali	12	10	22	-	-	-	-	-	-	12	10	22	0	0	0
9	Arrahman	2	28	30	3	26	29	29	-	-	-	22	22	16	35	51
10	SLBN Alor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	30	67
11	SLB Pantar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	32
12	Dagadu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	34	82
13	LKS Fajar Intan Sejahtera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	26	46
Total		129	125	254	92	61	153	118	35	94	128	99	237	220	196	417

Sumber: Dinas Sosial Kab. Alor, 2025

Data pada tabel tersebut menggambarkan jumlah penghuni panti asuhan setiap tahun didominasi oleh laki-laki dengan rata rata persentase 58,96 persen dari total jumlah penghuni panti asuhan. Penghuni panti terus meningkat dari tahun 2020-2024 dengan persentase peningkatan mencapai 60,91 persen .

2.2.4.2. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja merupakan indikator penting dalam melihat sejauh mana perlindungan formal diberikan kepada para pekerja di suatu daerah, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Program ini mencakup perlindungan terhadap risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga beasiswa bagi anak tenaga kerja yang mengalami risiko kerja. Data kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di kabupaten Alor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 41 Data Kepesertaan Jamsostek Kab. Alor Tahun 2024

Pekerja	Potensi Peserta	Peserta Aktif	Persen Peserta Aktif	Belum Terlindungi
Penerima Umpah	21.616	12.481	57,74	9.135
Bukan Penerima Upah	39.115	1.609	4,11	37.506
Jasa Kontruksi	5.606	450	8,02	5.156
Jumlah	66.337	14.540	21,92	51.797

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Total pekerja yang berpotensi menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Alor mencapai 66.337 orang. Dari jumlah tersebut, baru 14.540 orang atau 21,92 persen yang tercatat sebagai peserta aktif. Artinya 78,08 persen atau 51.797 pekerja belum terlindungi oleh program jaminan sosial.

Dari data pada sisi pemberi kerja, terdapat 199 perusahaan atau kelompok usaha yang telah mendaftarkan pekerjaannya dalam program ini, dengan total tenaga kerja tercatat sebanyak 15.156 orang. Sebanyak 251 pekerja di Kabupaten Alor telah menerima manfaat dari program jaminan sosial dengan total klaim mencapai Rp2.165.623.917, yang mencakup manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta beasiswa. Sementara itu, dari kelompok pegawai non-ASN seperti perangkat desa, RT/RW, BPD, dan kader masyarakat, jumlah potensi peserta mencapai 16.245 orang. Namun, baru 5.089 orang atau 31,33 persen yang telah terlindungi. Beberapa kelompok seperti kader masyarakat dan perangkat RT/RW bahkan menunjukkan tingkat kepesertaan yang sangat rendah, mendekati nol persen.

Hal ini menunjukkan bahwa kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Alor masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjangkau pekerja sektor informal dan komunitas di tingkat desa. Upaya peningkatan kepesertaan sangat diperlukan guna memastikan perlindungan sosial yang merata dan berkeadilan bagi seluruh tenaga kerja di daerah ini.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih skor 84,25 dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2024, yang menempatkannya sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerukunan yang tinggi secara nasional. Meskipun belum tersedia pengukuran IKUB secara khusus untuk Kabupaten Alor, capaian provinsi ini menjadi dasar yang valid untuk menggambarkan atmosfer sosial-keagamaan yang harmonis dan toleran di tingkat lokal. Kabupaten Alor, sebagai bagian integral dari provinsi NTT, turut mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama, solidaritas antarumat, dan kohesi sosial yang kuat.

Pemerintah Kabupaten Alor memandang peran agama tidak hanya sebagai aspek spiritual dan kepercayaan personal, melainkan sebagai fondasi etika dan moral yang menopang seluruh dimensi pembangunan daerah. Agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter masyarakat, memperkuat integritas sosial, serta menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan stabilitas dan kedamaian yang berkelanjutan. Gambaran masyarakat kabupaten Alor menurut agama yang dianut ditampilkan dalam tabel berikut.



Tabel 2 42 Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Alor

Tahun	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
2020	54.338	145.051	6.449	138	-	197
2021	54.214	149.199	6.773	152	-	-
2022	54.214	149.199	6.773	152	-	-
2023	55.029	152.126	6.773	128	-	-
2024	54.178	152.046	6.776	128	-	-

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Secara keseluruhan, beragama maslahat di Kabupaten Alor adalah sebuah praktik agama yang membawa kebaikan tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Alor dapat hidup berdampingan dengan rukun, saling menghormati perbedaan serta berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Perkembangan jumlah tempat ibadah di kabupaten Alor ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2 43 Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Jumlah
2020	102	-	548	22	1	-	673
2021	106	8	566	22	1	-	702
2022	106	8	566	22	1	-	702
2023	106	8	571	23	1	-	709
2024	106	8	571	23	1	-	709

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Agama menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat dan memperkuat identitas budaya yang ada, menjadikan Kabupaten Alor sebagai daerah yang maju, damai, dan penuh kasih sayang. Pada bulan Februari tahun 2017, Kabupaten Alor mendapat anugerah Harmony Award Tingkat Nasional dari pemerintah pusat. Alor menjadi contoh bagaimana hidup beragama yang berbeda-beda justru menjadi kekuatan dari sebuah daerah.

Penguatan peran agama akan diarahkan pada tiga pilar utama. Pertama, membangun kemitraan yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam pembinaan umat dan penyelesaian persoalan sosial. Kedua, mendorong moderasi beragama melalui pendidikan keagamaan yang toleran, inklusif, dan kontekstual dengan kearifan lokal. Ketiga, menjadikan nilai-nilai religius sebagai penggerak perubahan sosial, khususnya dalam penguatan budaya gotong royong, kepedulian antarwarga, serta partisipasi aktif dalam pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Alor juga akan terus memfasilitasi kegiatan lintas agama yang bersifat dialogis, edukatif, dan rekonsiliatif guna memperkuat ruang pertemuan antarumat, mengurangi potensi konflik horisontal, dan memperluas praktik hidup berdampingan secara damai. Peran Forum



Komunikasi Umat Beragama (FKUB) akan diperkuat sebagai institusi strategis dalam menjaga keseimbangan dan komunikasi antar komunitas keagamaan.

2.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 berada pada angka 53,4. Meskipun belum tersedia pengukuran IPK secara spesifik untuk Kabupaten Alor, angka ini menjadi acuan awal dalam mengidentifikasi posisi strategis dan potensi pengembangan kebudayaan di tingkat kabupaten. Dalam konteks ini, kebudayaan dipandang sebagai faktor kunci pembangunan berkelanjutan, bukan semata sebagai warisan, tetapi sebagai sumber daya strategis dalam membentuk identitas, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat resiliensi sosial dan kohesi masyarakat.

Kabupaten Alor memandang pemajuan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Nasional.

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Alor diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan karakter masyarakat yang toleran, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai kearifan lokal. Dalam jangka menengah, strategi ini diharapkan mampu memperteguh jatidiri daerah, memperkuat semangat kebangsaan, serta meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan.

Kabupaten Alor memiliki seni budaya yang tumbuh dari kultur masyarakat hampir pada semua desa/kelurahan dengan keragaman yang khas termasuk yang terkait dengan kegiatan adat istiadat. Kondisi budaya dimaksud tumbuh dengan baik sesuai dengan berbagai kegiatan adatiah di tingkat masyarakat dalam bentuk kearifan lokal, seperti upacara adat, pernikahan, pemakaman jenazah, makan baru, serta kearifan lokal lainnya. Pengelolaan keberagaman budaya di Kabupaten Alor dimaksud untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bernilai budaya, melalui penyediaan Museum Daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Selain itu, pelaksanaan promosi budaya telah dilakukan oleh Pemerintah melalui festival baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. Kegiatan promosi budaya ini sangat berpengaruh dalam membuka informasi kepada dunia luar akan potensi wisata budaya yang ada di daerah.



Potensi potensi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di 18 kecamatan antara lain: bahasa manuscript, adat istiadat, ritus, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional seni, permainan rakyat dan karya budaya.

Potensi obyek wisata religius dan obyek wisata budaya di Kabupaten Alor sangat beragam dan tersebar di 18 wilayah kecamatan namun belum dikelola secara baik. Obyek wisata dimaksud disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 44 Situs dan Cagar Budaya di Kabupaten Alor

No	Nama situs / Cagar Budaya	Lokasi
1	Al Quran Kulit Kayu	Alor Besar, Desa Alor Besar, ABAL
2	Nekara	Museum 1000 Moko
3	Mesjid Tua di Lerabain	Lerabain, Desa Wakapsir, ABAD.
4	Perkampungan Adat Monbang	Desa Kopidil, Kabola
5	Perkampungan Adat Takpala	Desa Lembur Barat, ATU
6	Rumah Adat Tabi'E	Desa Pura Selatan, Pulau Pura
7	Gua Purlou (Liang Puri) & Bekas Kerajaan Batulolong	Desa Batulolong & Kiramana, Alsel
8	Rumah Adat Lakatuil	Bampalola, Alor Barat Laut
9	Rumah Adat Fet Tafalelang	Bampalola, Alor Barat Laut
11	Rumah Adat Bungabali	Desa Alor Besar, Alor Barat Laut
13	Rumah Adat Pasi	Desa Air Mancur, Alor Timur Laut
14	Rumah Adat Banglaweni	Desa Kopidil, Kabola
15	Rumah Adat Watang	Desa Alor Kecil, Alor Barat Laut
16	Bekas Kerajaan Lendola	Desa Lendola, Teluk Mutiara
17	Rumah Adat Tangwah	Desa Purnama, Pureman
18	Rumah Adat Kiriyas	Kel.Kabir. Pantar
19	Rumah Adat Salyo	Desa Tanglapui, Alor Timur
20	Rumah Adat Bisang	Desa Munaseli, Pantar
21	Rumah Adat Baloe Bang	Desa Bampalola, Alor Barat Laut
22	Mesbah Kawei Maita	Atoita, Desa Waisika, ATL
23	Gua Kadalambung (Benteng Pertahanan Jepang)	Desa Maritaing, Alor Timur
24	Rumah Adat Pelang Serang	Desa Lefokisu, Alor Barat Laut
25	Rumah Adat Lalang Koli	Desa Boweli, Pantar
26	Rumah Adat Makainwat	Desa Probur, Alor Barat Daya
27	Lokasi Wang Bo (Periuk tumbuh)	Desa Subo, Alor Selatan
28	Kuburan Tua Sultan Najamudin	Desa Hulnani, Alor Barat Laut
29	Jangkar Piring Sina	Desa Piring Sina, Pantar Barat
30	Mesbah Inukapa	Kel. Kolana Utara, Alor Timur
31	Mesbah Mur Masang	Desa Moramam, Alor Barat Daya
32	Mesbah Pitungbang	Desa Otvai, Alor Barat Laut
33	Batu Elang/Lonkoli	Desa Waisika, Alor Timur Laut
34	Gong Pusaka Alengwah	Desa Waimi, Lembur
35	Mesbah Beldor	Desa Probur, Alor Barat Daya
36	Rumah Adat Uma Kakang Pelang Serang	Desa Dulolong, Alor Barat Laut
37	Gua Berukir Dibloing	Desa Langkuru, Pureman

Sumber: Dinas Kebudayaan Kab. Alor, 2025

Data tersaji pada tabel di atas menggambarkan betapa kayanya daerah dengan objek budaya yang dimiliki. Hampir semua wilayah di Kabupaten Alor memiliki kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Beberapa persoalan yang harus diselesaikan kedepan adalah konsep pemeliharaan yang tepat terhadap



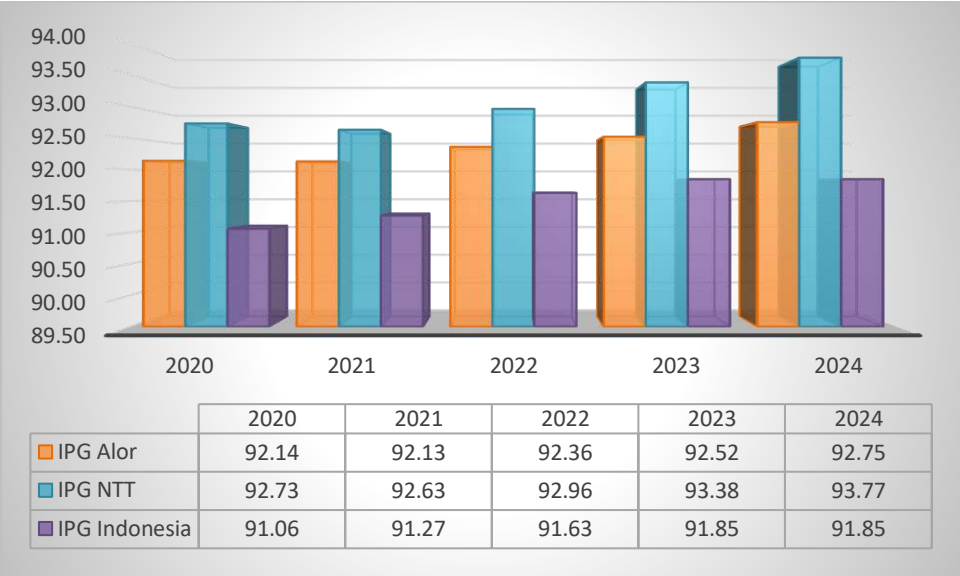
objek budaya dimaksud disamping upaya penuturan budaya secara berjenjang kepada generasi muda untuk diketahui secara tepat.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1. Indeks Pembangunan Gender

Pengarusutamaan prinsip Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) menjadi elemen strategis yang tak terpisahkan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, responsif, dan berkelanjutan. GEDSI bukan hanya pendekatan normatif, tetapi merupakan instrumen teknokratik untuk memastikan bahwa seluruh siklus pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi secara sistematis mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan potensi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar gender, disabilitas, status sosial-ekonomi, usia, etnisitas, atau kelompok rentan lainnya. Pemerintah Kabupaten Alor secara strategis mengintegrasikan pendekatan GEDSI sebagai prinsip fundamental dalam seluruh tahapan pembangunan. GEDSI tidak hanya diperlakukan sebagai komponen pelengkap, tetapi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara sistematis responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya.

Kesenjangan gender dalam pembangunan manusia adalah terpenuhinya hak dasar yang setara bagi laki-laki maupun Perempuan. Hak dasar yang dimaksud di antaranya terpenuhinya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan dan lingkungan sosial yang layak. Dengan hak dasar yang setara ini, laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menciptakan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT dan Nasional tahun 2020-2024 sebagaimana grafik 2.10 dibawah ini.



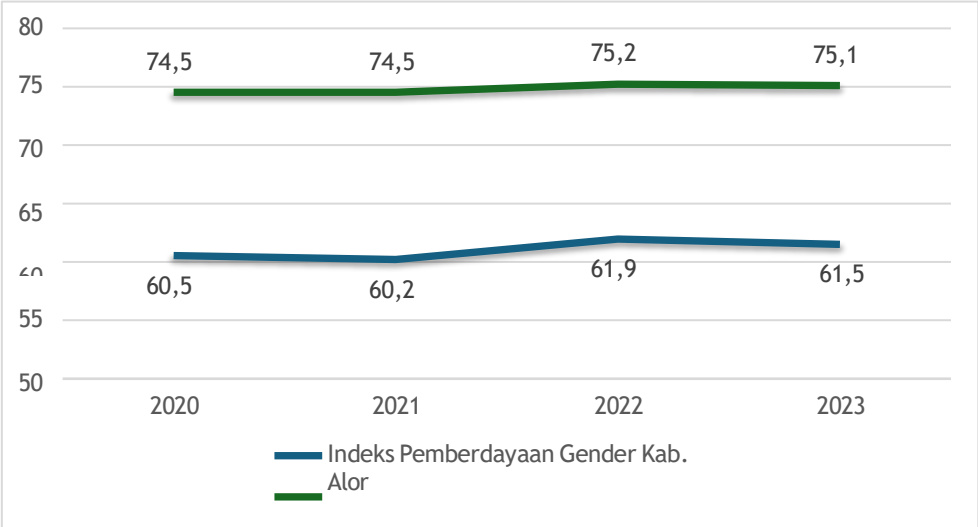
Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 10 Indeks Pembangunan Gender Kab. Alor, NTT dan Nasional Tahun 2020-2024

Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Alor fluktuatif selama pada periode 2020-2024, dikarenakan komponen pembentuknya juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Alor sebesar 87,50 poin dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 0,10 poin, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 92,75 poin di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT pada tahun yang sama, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Alor masih berada dibawah Provinsi NTT namun nilainya berada di atas nilai IPG secara nasional. Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender Provinsi NTT berada pada 92,73 poin dan meningkat menjadi 93,77 poin di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan pembangunan berbasis gender di Kabupaten Alor belum dilaksanakan secara optimal dan perlu mendapat perhatian pemerintah.

2.2.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender

Selain Indeks Pembangunan Gender, UNDP juga memperkenalkan ukuran komposit lainnya yang juga terkait dengan gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal peranan aktif dan *power* dari sisi politik, ekonomi, pendapatan dan pengambilan keputusan. Peran gender dari sisi politik dan pengambilan keputusan dilakukan proksi dengan keterlibatan perempuan di parlemen. Selanjutnya keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional merupakan pendekatan dari sisi ekonomi sementara sisi pendapatan dilakukan pendekatan dengan kontribusi pendapatan yang dihasilkan perempuan. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020-2023 sebagaimana grafik 2.11 berikut.



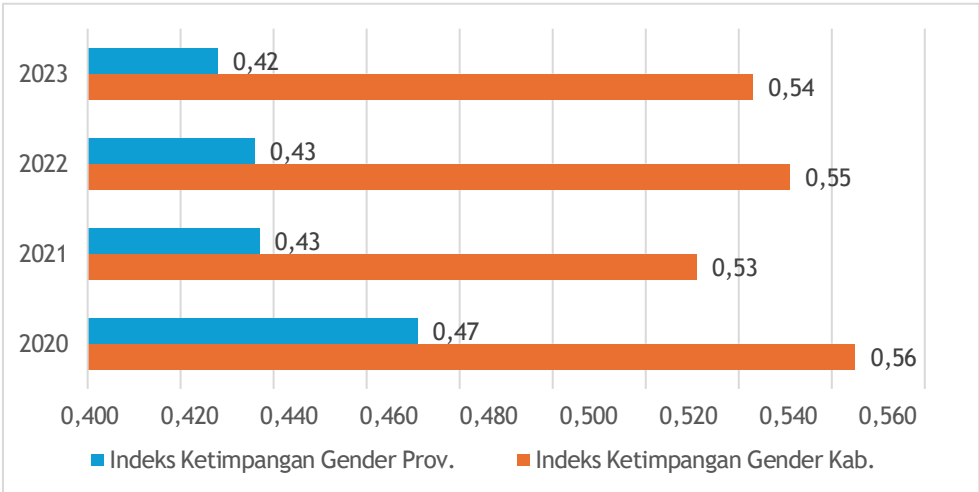
Sumber: BPS NTT, 2025

Grafik 2. 11 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa perkembangan indeks pemberdayaan gender Kabupaten Alor dan NTT selama tahun 2020-2023 fluktuatif. Peran perempuan kabupaten Alor dalam kehidupan politik memperlihatkan perkembangan yang positif. Apabila dilihat dari data pilah gender pada periode 2019-2024 terdapat 1 orang perempuan dari 30 orang anggota DPRD atau 3,33 persen meningkat pada periode 2025-2029 menjadi 2 dari 30 orang anggota DPRD atau 6,67 persen. Demikian juga dengan jabatan struktural dalam birokrasi. Terdapat 7 orang Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II) dan 34 orang Pejabat Pengawas Administrator (Eselon IIIa dan IIIb) pada tahun 2024, meningkat dari 6 orang dan 30 pada tahun 2020.

2.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender menunjukkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Ketimpangan gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS NTT, 2025

Grafik 2. 12 Grafik Indeks ketimpangan gender Kabupaten Alor dan Provinsi NTT



Ketimpangan gender Kabupaten Alor sejak Tahun 2020 hingga 2023 sebagaimana grafik 2.12 cenderung fluktuatif. Tahun 2020 berada pada 0,565 poin, setelah empat tahun Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Alor menurun menjadi 0,543 poin. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Jika dibandingkan dengan Provinsi NTT, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Alor lebih tinggi.

2.2.6.4. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indikator yang mengukur pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. IPA terdiri dari 27 indikator yang mencakup lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. IPA digunakan untuk memantau kemajuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak. Indeks ini membantu pemerintah dan pihak terkait untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Perkembangan IPA Kabupaten Alor tahun 2021-2023 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 45 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Alor

No	Uraian	2021	2022	2023
1	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	39,93	40,88	39,09
2	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	72,77	65,98	65,64
3	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	67,62	66,48	67,95
4	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	20,22	23,46	27,43
5	Indeks D5 Perlindungan Khusus	41,78	42,46	39,1
	Indeks Perlindungan Anak	49	48,2	48

Sumber: Kementerian PPPA, 2024

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Alor dalam kurun waktu 2021–2023 menunjukkan kecenderungan stagnan dengan skor yang berkisar pada angka 48 hingga 49, di bawah ambang ideal. Hal ini mencerminkan bahwa sistem perlindungan anak yang selama ini dilaksanakan perlu diperbaiki untuk mewujudkan indeks perlindungan anak yang semakin baik.

Dimensi hak sipil dan kebebasan (D1) serta perlindungan khusus (D5) menunjukkan penurunan, menandakan masih rendahnya akses anak terhadap identitas hukum, partisipasi publik yang aman, dan lemahnya sistem perlindungan bagi anak-anak dalam kondisi rentan, termasuk anak korban kekerasan, pekerja anak, dan anak berhadapan dengan hukum. Sementara itu, dimensi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (D2) juga mengalami penurunan signifikan, menunjukkan tantangan dalam membangun sistem pengasuhan yang layak dan mendukung ketahanan keluarga. Meski demikian,



terdapat peningkatan pada dimensi pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya (D4), dari skor 20,22 pada tahun 2021 menjadi 27,43 pada tahun 2023, meskipun angka ini masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan pendidikan, kegiatan rekreatif, dan ruang ekspresi budaya anak masih terbatas.

Situasi ini menunjukkan urgensi penguatan sistem perlindungan anak yang komprehensif dan lintas sektor, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan layanan dasar, pengasuhan berbasis keluarga, sistem rujukan terpadu, dan kebijakan desa ramah anak. Perlindungan anak tidak hanya merupakan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga merupakan prasyarat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, adaptif, dan tangguh.

2.2.6.5. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kualitas keluarga di suatu wilayah. IPKK merupakan pengukuran pencapaian kualitas keluarga yang mencakup berbagai aspek seperti kualitas legalitas dan struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi, dan ketahanan sosial budaya. Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 72,46. Walaupun belum tersedia data spesifik untuk Kabupaten Alor, capaian ini menjadi rujukan awal dalam memotret kualitas dan ketangguhan keluarga di tingkat daerah. Dalam konteks pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kabupaten Alor memandang keluarga sebagai unit sosial strategis dalam pembentukan sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, dan produktif.

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat diarahkan untuk memperkuat kapasitas dasar manusia, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan psikososial. Ketangguhan ini menjadi prasyarat utama dalam menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan sosial, krisis ekonomi, maupun risiko bencana, serta mampu menjadi agen pembangunan yang aktif dan berdaya.

2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk mengukur dan memahami kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP memberikan gambaran komposit tentang pembangunan pemuda pada tiga lapisan domain, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan

kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. IPP digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kondisi pemuda, merefleksikan capaian pembangunan pemuda, dan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan serta program pembangunan pemuda.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara spesifik untuk Kabupaten Alor belum tersedia. Oleh karena itu, IPP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dijadikan sebagai acuan untuk menggambarkan kondisi umum pembangunan kepemudaan di Alor. Angka pengukuran IPP Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 54,33. Capaian ini mencerminkan bahwa pembangunan pemuda di wilayah ini masih berada pada tingkat sedang, dengan tantangan utama pada dimensi pendidikan, keterampilan dan kesempatan kerja, serta partisipasi aktif dalam pembangunan.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Alor, kondisi SDM saat ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang bagi transformasi pembangunan. Berdasarkan data tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Alor mencapai 67,70, dengan tren peningkatan tahunan yang stabil. Capaian ini menempatkan Alor dalam kategori sedang, namun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan secara signifikan.

Dari sisi pendidikan, kualitas pembelajaran dasar hingga menengah belum optimal, tercermin dari minimnya kompetensi literasi dan numerasi siswa serta capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih rendah. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 85,23 persen pada 2024, namun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat menjadi 2,27 persen, disertai dengan dominasi sektor informal dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Hal ini menandakan belum seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas.

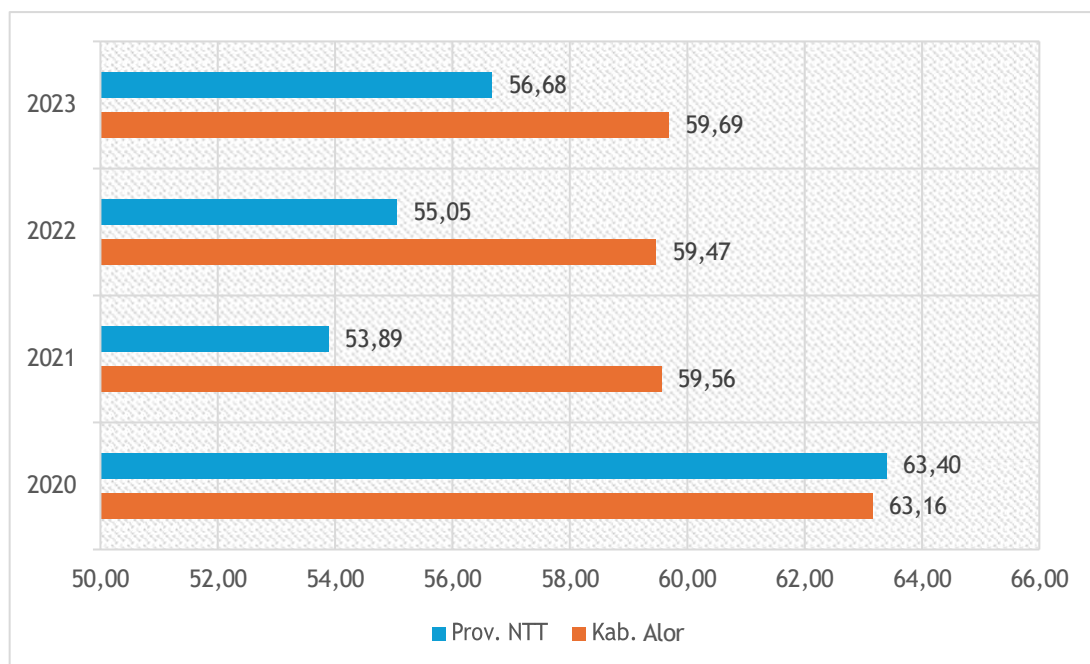
Dari aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Alor mencapai 70,88 tahun pada 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan kesehatan dasar dan tingkat kesejahteraan masyarakat masih berada dalam kategori sedang, dan perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan produktivitas SDM dalam jangka panjang.



2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 Tahun /penduduk muda dan penduduk usia 65 Tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 Tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Alor Pada Tahun 2010 sebesar 72,0 persen, masih lebih tinggi dibanding Rasio Ketergantungan Provinsi NTT sebesar 70,6 persen. Pada sepuluh Tahun selanjutnya, Rasio Ketergantungan Kabupaten Alor mengalami penurunan menjadi 63,16 persen lebih rendah dari Rasio Ketergantungan Provinsi NTT 63,40 persen. Pada Tahun 2023 Rasio Ketergantungan Kabupaten Alor sebesar 59,69 persen sedangkan Rasio Ketergantungan Provinsi NTT 56,68 persen.

Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Alor dan Provinsi NTT 2020-2023 sebagaimana grafik berikut.



Sumber : BPS Kab. Alor 2024

Grafik 2. 13 Rasio Ketergantungan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Alor dan Provinsi NTT

2.3.1.2. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya saing ekonomi daerah adalah kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sambil tetap berpartisipasi dalam persaingan domestik dan internasional. Ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal ekonomi, produktivitas, dan kemandirian. Daya saing ekonomi daerah melibatkan beberapa aspek diantaranya:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Alor menunjukkan kontribusi daya saing yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama tahun 2020-2024. Sektor

pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan rata-rata kontribusi sebesar 32,53 persen. Peningkatan signifikan juga terlihat pada produksi tanaman pangan, seperti padi yang meningkat dari 3.324 ton pada tahun 2020 menjadi 15.988,6 ton pada tahun 2024, serta jagung yang meningkat dari 25.258 ton menjadi 28.000 ton lebih. Sektor peternakan, perikanan, dan kehutanan juga berkembang secara bertahap, memperkuat fondasi ekonomi primer daerah dan membuka peluang kerja baru yang berkelanjutan.

b) Inovasi dan Teknologi

Penerapan teknologi di Kabupaten Alor mulai diarahkan pada sektor-sektor strategis. Dalam perikanan, pemanfaatan penginderaan jauh dan citra satelit telah digunakan untuk menentukan 67 titik potensi penangkapan ikan yang efisien. Teknologi ini mendukung nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan. Pada sektor energi, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai desa juga menunjukkan langkah awal inovasi berbasis energi terbarukan. Di bidang pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat hingga mencapai 81,05 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan konsumsi pangan berbasis gizi seimbang dan program edukasi pangan lokal yang berkelanjutan.

c) Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah. Investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi, serta program penyuluhan pertanian dan peternakan telah berdampak pada peningkatan produktivitas sektor primer. Kinerja SDM juga tercermin dalam pengelolaan program konservasi berbasis masyarakat, seperti Thresher Shark Conservation Champion, yang melibatkan pemuda dalam pelatihan ekologi dan pelestarian laut.

d) Infrastruktur yang Memadai

Infrastruktur menjadi aspek kunci dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Kabupaten Alor telah mencatat peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik. Konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan dari 175,18 kWh pada tahun 2020 menjadi 15,36 kWh pada tahun 2024, meskipun data tersebut menunjukkan kebutuhan peningkatan efisiensi dan pemerataan akses. Pada sektor air minum, cakupan air minum layak mencapai 88,04 persen dari total kepala keluarga pada tahun 2024. Sementara itu akses sanitasi layak meningkat dari 77,32 persen pada tahun 2020 menjadi 85,83 persen pada tahun 2024, dengan kondisi Kabupaten Alor lebih unggul



dibandingkan rata- rata Provinsi NTT.

Secara keseluruhan, Kabupaten Alor menunjukkan tren peningkatan daya saing yang positif dalam lima tahun terakhir. Dukungan kuat dari sektor pertanian, peningkatan inovasi di bidang energi dan kelautan, pembangunan SDM lokal yang mulai bergerak maju, serta infrastruktur dasar yang terus diperbaiki menjadikan Alor berada dalam jalur menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan masih ada, terutama pada konsistensi distribusi layanan dasar dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, namun fondasi daya saing yang telah dibentuk memberikan optimisme bagi arah pembangunan ke depan.

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi

2.3.2.1. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2021 hingga 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2 46 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Alor dan Provinsi NTT

Indeks Inovasi Daerah		2021	2022	2023	2024
Kab. Alor	Indeks	3,2	9,1	10,9	15
	Predikat	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif	Kurang Inovatif
Prov. NTT	Indeks	53,35	59,76	62,53	50,10
	Predikat	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif

Sumber : Olahan Bappelitbang Kab. Alor 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Alor pada Tahun 2021 sebesar 3,2 poin dengan predikat Kurang Inovatif dan walaupun meningkat pada tahun 2024 menjadi 15 poin namun masih dengan predikat yang sama. Jika dibandingkan dengan Indeks Inovasi daerah Provinsi NTT yang mencapai 53,35 poin pada tahun 2021 dan 50,10 poin pada tahun 2024 dengan predikat inovatif capaian Kabupaten Alor masih jauh dibawah Provinsi NTT.

2.3.2.2. Nilai AKIP

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan alat ukur penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 komponen AKIP yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Data SAKIP Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2 47 Data SAKIP Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Alor	Indeks	50,06	50,20	51,79	50,56	60,11
	Predikat	CC	CC	CC	CC	B

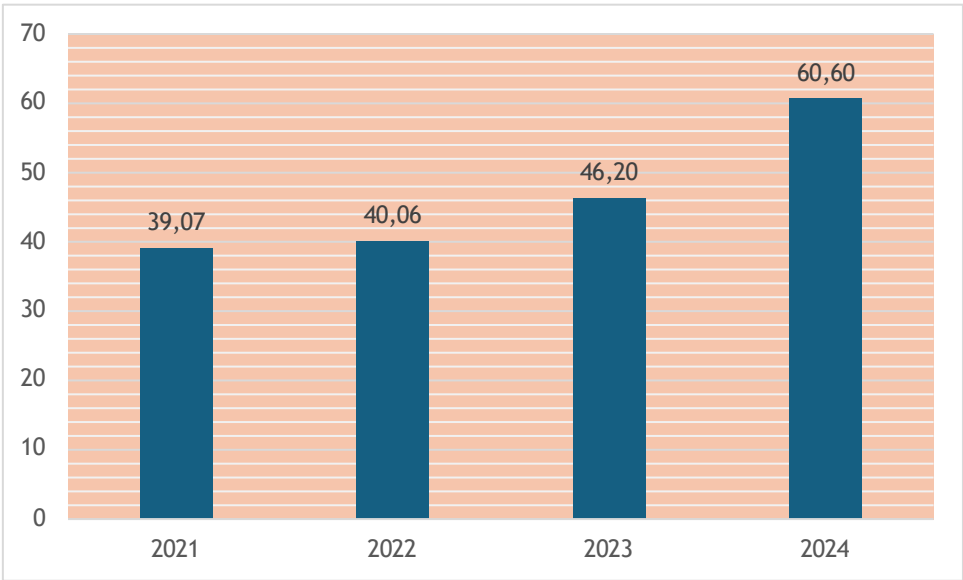
Sumber : Kementerian PANRB, 2025

Nilai AKIP Kabupaten Alor sejak Tahun 2020 meningkat hingga tahun 2022 menjadi 51,79 dengan predikat CC, namun sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 50,56 masih dengan predikat CC, pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 60,11 dengan predikat B.

2.3.2.3. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menjelaskan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Pemerintah kabupaten Alor pada Tahun 2024 memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi senilai 60,60 dengan kategori B.

Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Alor Tahun 2021-2024 sebagaimana terlihat pada grafik 2.14 di bawah ini, bahwa terjadi peningkatan indeks reformasi birokrasi dari tahun 2021-2024 yang menunjukkan penataan birokrasi di kabupaten Alor semakin baik ke arah penerapan *good governance*.



Sumber: Kemenpan RB, 2025

Grafik 2. 14 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Alor Tahun 2021-2024

Selama tahun 2021-2024 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Alor menunjukkan tren yang positif dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kenaikan nilai IRB dalam tiga tahun pertama ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik dari sisi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun manajemen aparatur sipil negara. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana nilai IRB meningkat cukup tinggi menjadi 60,66. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Alor telah optimal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh langkah-langkah strategis seperti penguatan sistem akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas SDM aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pengawasan dan integritas birokrasi. Secara keseluruhan, tren IRB Kabupaten Alor dari tahun 2021 hingga 2024 memperlihatkan kemajuan yang konsisten dan signifikan, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong birokrasi yang lebih bersih, efektif, dan melayani.

2.3.2.4. Rasio PDRB

Rasio PDRB Industri Pengolahan merupakan perbandingan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Di Kabupaten Alor, kontribusi sektor ini masih sangat rendah. Pada tahun 2020, industri pengolahan hanya menyumbang sebesar 1,46 persen terhadap total PDRB. Industri yang berkembang masih didominasi oleh industri rumah tangga skala kecil seperti makanan-minuman, tenun, dan kerajinan lokal. Ketiadaan industri menengah dan besar menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini agar dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang lebih signifikan.

Rasio PDRB ADHB untuk Akomodasi, Makan, dan Minum menunjukkan peningkatan secara bertahap dalam kontribusinya terhadap PDRB, dari 0,40 persen pada tahun 2020 menjadi 0,45 persen pada tahun 2024. Walaupun proporsinya relatif kecil, kenaikan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan, sementara kontribusi sektor ini ADHK pertumbuhan riilnya sangat signifikan, dari -10,31 persen pada tahun 2020 menjadi 15,53 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2021, mencerminkan peningkatan mobilitas, kunjungan wisatawan, serta daya beli masyarakat.

Untuk rasio PDRB Industri Pengolahan ADHB kontribusinya relatif stabil, dari 1,45 persen pada tahun 2020 menjadi 1,56 persen pada tahun 2024. Peningkatan yang lambat menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi tulang punggung ekonomi daerah, meskipun ada perbaikan, sedangkan ADHK dari sisi pertumbuhan riil, sektor ini mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2021 tetapi kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 6,35 persen



dan terus tumbuh hingga tahun 2024 mencapai 5,93 persen. Kondisi ini mencerminkan adanya pemulihan sektor manufaktur lokal, meskipun kontribusinya terhadap total PDRB tetap kecil.

Sementara Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif tersebar di beberapa sektor, utamanya yaitu informasi dan Komunikasi yang turun dari 6,07 persen pada tahun 2020 menjadi 0,49 pada tahun 2024 ADHB. Ini bisa menunjukkan adanya perubahan klasifikasi atau penurunan signifikan dalam subsektor ini secara nominal. Walaupun demikian pertumbuhan riilnya tetap positif, meskipun moderat pada angka 3–5 persen per tahun. Untuk jasa lainnya stabil di sekitar 0,45–0,48 persen, namun sempat mengalami kontraksi besar pada tahun 2020 menjadi -10,50 persen dan selanjutnya tumbuh rendah pada tahun-tahun berikutnya, selanjutnya Jasa Perusahaan yang proporsinya menurun dari 0,48 persen menjadi 0,38 persen, meskipun pertumbuhan riil menunjukkan pemulihan sejak tahun 2022.

Dengan proporsi ADHB yang kecil dan pertumbuhan riil yang bervariasi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB Kabupaten Alor masih terbatas, meskipun ada potensi pertumbuhan terutama di subsektor komunikasi dan jasa perusahaan.

2.3.2.5. Rasio Kewirausahaan

Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Alor menunjukkan tren peningkatan rasio kewirausahaan. Pada tahun 2021, proporsi penduduk yang bekerja sebagai wirausaha berada di angka 45,74 persen dari total penduduk bekerja. Kategori wirausaha ini mencakup mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar.

Tahun 2023 terjadi peningkatan secara signifikan dalam jumlah pelaku usaha mandiri. Jumlah wirausahawan meningkat dari 47.939 orang pada 2022 menjadi 62.632 orang pada 2024. Kenaikan ini mendorong rasio kewirausahaan naik 52,08 persen dari total tenaga kerja. Peningkatan tertinggi terjadi pada kelompok berusaha sendiri dan berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap, yang menunjukkan tumbuhnya semangat kemandirian ekonomi dan aktivitas usaha berskala mikro di masyarakat. Pada sisi lain, jumlah pelaku usaha dengan buruh tetap mengalami penurunan drastis dari 1.865 orang pada 2021 menjadi 637 orang pada 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas wirausaha masih berada pada level kecil atau belum mampu mengembangkan usaha ke skala formal dengan struktur ketenagakerjaan yang lebih stabil.



Secara keseluruhan, peningkatan rasio kewirausahaan ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif secara mandiri. Namun, masih diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan, dan akses permodalan untuk mendorong wirausaha agar dapat tumbuh ke level yang lebih tinggi dan menyerap tenaga kerja secara lebih luas.

2.3.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pembangunan nasional dan daerah sangat dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja yang didukung oleh kualitas dan besarnya jumlah angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Angkatan kerja pada dasarnya menunjuk pada kelompok penduduk usia 15 tahun atau lebih yang berada pada pangsa pasar kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Secara sederhana, angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja atau memiliki pekerjaan maupun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Data angkatan kerja menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Alor terangkum dalam tabel 2.46 berikut.

Tabel 2 48 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	2021			2022			2023			2024		
	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
Berusaha Sendiri	10.603	9.752	20.355	10.603	9.752	20.355	15.659	14.951	30.610	15.659	14.951	30.610
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	17.652	8.067	25.719	17.652	8.067	25.719	17.523	13.862	31.385	17.523	13.862	31.385
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	1.546	319	1.865	1.546	319	1.865	415	222	637	415	222	637
Buruh / Karyawan / Pegawai	15.785	12.929	28.714	15.785	12.929	28.714	17.628	10.554	28.182	17.628	10.554	28.182
Pekerja Bebas	2.162	380	2.542	2.162	380	2.542	2.154	-	2.154	2.440	58	2.498
Pekerja Keluarga / Tidak dibayar	6.564	19.055	25.619	6.564	19.055	25.619	6.874	20.074	26.948	6.874	20.074	26.948
Total	54.312	50.502	104.814	54.312	50.502	104.814	60.253	59.663	119.916	60.253	59.663	120.260

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut status pekerjaan utama mengalami fluktuatif dalam tiga tahun terakhir pada setiap status pekerjaan utama. Secara umum terdapat empat status pekerjaan utama yang dominan di Kabupaten Alor yaitu berusaha dibantu buruh tidak



tetap atau buruh tidak dibayar, buruh atau karyawan atau pegawai, kemudian berusaha sendiri dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau (*Green Economy index/ GEI*) merupakan salah satu alat untuk mengukur transformasi ekonomi guna menilai interaksi sosial ekonomi lingkungan dalam lingkup ekonomi hijau serta mengidentifikasi potensi risiko dan peluang untuk merancang kebijakan ekonomi hijau yang lebih baik pada masa yang akan datang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 15 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.47 berikut.

Tabel 2 49 Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kab. Alor

Pilar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,11	2,58	2,27	2,52	2,27
	Tingkat Kemiskinan	21,09	21,09	20,25	19,97	19,87
	Angka Harapan Hidup	69,68	69,84	70,19	70,55	70,88
	Rata-rata Lama Sekolah	8,41	8,42	8,43	8,45	8,61
Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	-0,58	2,50	2,98	4,09	4,24
	Skor Pola Pangan Harapan	71,27	74,04	77,15	80,23	81,05
	Pengeluaran Perkapita	658.031	714.394	777.295	1.409.815	789.510
	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	32,14	32,90	32,98	32,73	31,91
Lingkungan	Rasio Elektrifikasi	92,62	93,40	97,74	98,06	98,13
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,58	67,19	66,4	70,81	66,58
	Indeks Risiko Bencana	183,2	128,42	128,42	133,11	128,21
Indeks Ekonomi Hijau		-31,766	-20,375	-11,326	50,066	13,402

Sumber: Data Olahan Bappelitbang 2025

2.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan alat untuk mengukur kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam Sektor Ekonomi Biru. Indeks Ekonomi Biru terdiri dari 35 (tiga puluh lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) pilar yaitu pilar ekonomi yang menekankan pada analisis rantai nilai produksi dan perdagangan antar daerah, pilar sosial yang menekankan pada potensi perempuan dan kelompok marginal untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap sektor ekonomi biru, serta pilar lingkungan yang menekankan pada pengelolaan sampah khususnya sampah laut.



2.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktifitas sehari-hari sehingga menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang digital. Indeks Masyarakat Digital Indonesia memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga Kabupaten/kota termasuk kabupaten Alor yang dapat menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital. Kerangka kerja Indeks Masyarakat Digital Indonesia berfokus pada empat pilar utama yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan digital, pilar pemberdayaan dan pilar pekerjaan.

Data indeks masyarakat digital Indonesia kabupaten Alor tahun 2022-2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.50 Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kab. Alor Tahun 2022-2024

No	Pilar	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Infrastruktur dan Ekosistem	45,80	57,65	50,20
2	Keterampilan Digital	47,69	47,66	52,04
3	Pemberdayaan	22,99	20,17	20,75
4	Pekerjaan	35,06	19,41	39,19
Indeks Masyarakat Digital		37,40	36,90	39,64
Kategori		Cukup	Cukup	Cukup

Sumber: Kementerian Komunikasi dan informatika, 2025

Selama periode 2022–2024, Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Alor berada pada kategori cukup, dengan skor fluktuatif yaitu 37,40 pada tahun 2022 kemudian menurun menjadi 36,90 tahun 2023, selanjutnya meningkat menjadi 39,64 tahun 2024. Meskipun terdapat perbaikan, capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya merata dan berdaya guna di seluruh lapisan masyarakat.

Pilar infrastruktur dan ekosistem digital menunjukkan pergerakan signifikan, naik pada 2023 namun kembali menurun pada 2024, menandakan tantangan dalam konsistensi penyediaan akses digital dan keberlanjutan dukungan kelembagaan. Sementara itu, keterampilan digital masyarakat mengalami tren peningkatan, mencerminkan adanya perbaikan kapasitas literasi digital dasar. Namun, pilar pemberdayaan digital tetap rendah dan stagnan, menandakan belum optimalnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat peran masyarakat dalam ekonomi digital, layanan sosial, dan partisipasi publik. Adapun pilar pekerjaan digital sempat terpuruk pada 2023 sebelum melonjak tajam pada 2024, mengindikasikan dinamika adopsi digital yang masih belum stabil di sektor ketenagakerjaan dan wirausaha.

2.3.5. Integrasi Ekonomi, Domestik dan Global

Dalam menghadapi tantangan dan peluang era globalisasi, integrasi antara perekonomian domestik dan global menjadi kunci penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Alor. Perekonomian daerah saat ini masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor unggulan. Namun, kontribusi sektor ini terhadap nilai tambah regional masih terbatas, sehingga mendorong diversifikasi ekonomi serta integrasi dalam rantai pasok nasional dan global menjadi langkah strategis yang harus diambil ke depan.

Peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Alor menjadi indikasi positif atas tumbuhnya investasi, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2022, PMTB tercatat mencapai Rp 943,92 miliar, menunjukkan adanya penguatan dalam penyediaan infrastruktur dan alat produksi yang dapat mempercepat transformasi struktural ekonomi daerah. Hal ini menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki orientasi ekspor dan nilai tambah tinggi.

Dari sisi perdagangan internasional, Kabupaten Alor mulai menunjukkan eksistensinya melalui ekspor beberapa komoditas utama seperti rumput laut dan vanili. Tercatat, selama Februari hingga Maret 2023, ekspor rumput laut kering mencapai 62 ton. Bahkan, vanili kering dari Alor telah berhasil masuk pasar Eropa, menunjukkan kualitas produk lokal yang mampu bersaing di pasar internasional. Namun demikian, secara keseluruhan net ekspor barang dan jasa Kabupaten Alor masih menunjukkan nilai negatif, mengindikasikan bahwa nilai impor daerah masih lebih besar dibandingkan ekspor. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas produksi dan efisiensi logistik untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Integrasi ekonomi domestik dan global harus diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan sektor produktif, serta pembangunan ekosistem industri berbasis potensi lokal. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Alor perlu mendorong kemitraan strategis dengan pelaku usaha, memperkuat infrastruktur dasar, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pelabuhan, jalan, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil produksi merupakan kebutuhan mendesak agar Alor dapat terhubung lebih baik ke pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada investasi fisik, tetapi juga pada transformasi digital dan adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap koperasi, UMKM, dan petani lokal dalam bentuk pelatihan, akses pembiayaan, serta perluasan pasar akan



meningkatkan kapasitas mereka untuk masuk dalam rantai pasok global secara berkelanjutan.

2.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Saat ini, perkembangan pembangunan cukup pesat sehingga membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Komponen IKLI terdiri atas ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektivitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*) dan kontribusi pada perekonomian.

2.3.6.2. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian yang layak merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Alor, tantangan pemenuhan hunian layak masih signifikan, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dasar, sanitasi, dan akses air bersih. Kondisi ini diperparah oleh topografi yang berat, risiko bencana, serta keterbatasan daya beli sebagian besar rumah tangga. Data BPS menunjukkan bahwa akses hunian layak (rumah layak huni) di kabupaten Alor mengalami peningkatan dari 56,05 persen pada tahun 2022 menjadi 58,78 persen pada tahun 2024 dari total rumah yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 41,22 persen hunian/rumah tidak layak huni di kabupaten Alor.

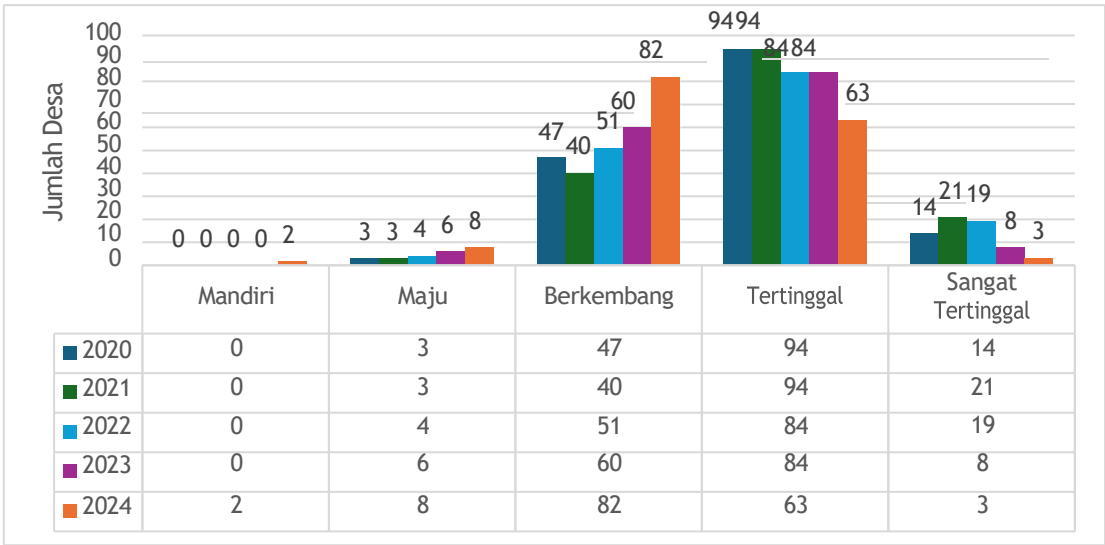
Pengembangan wilayah perkotaan di Kabupaten Alor, khususnya di sekitar Kota Kalabahi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, terus *diarahkan* menjadi pusat jasa dan perdagangan yang maju dan berdaya saing. Namun, pertumbuhan urbanisasi belum sepenuhnya dibarengi dengan pengelolaan tata ruang dan hunian yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Masih terdapat kesenjangan antarwilayah dalam akses layanan dasar, termasuk kawasan padat dengan hunian tidak permanen.

Sementara itu, pembangunan wilayah perdesaan diarahkan menuju

kemandirian dan keberlanjutan melalui pendekatan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata berbasis alam dan budaya. Meski demikian, tantangan keterisolasian, keterbatasan infrastruktur konektivitas, dan minimnya akses ke pembiayaan serta teknologi, menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi desa dan kualitas hunian di wilayah rural.

2.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Alor. Dalam beberapa tahun terakhir, capaian desa mandiri di Alor masih tergolong rendah, mencerminkan tantangan dalam hal akses infrastruktur dasar, layanan publik, kapasitas ekonomi lokal, dan kelembagaan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa masih berada pada kategori berkembang atau tertinggal, dengan ketimpangan spasial antarwilayah yang cukup tinggi, khususnya pada desa-desa kepulauan dan wilayah dengan medan geografis sulit. Status Desa di Kabupaten Alor berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik berikut.



Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 15 Status IDM Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Alor menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Jumlah desa kategori tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan, sementara jumlah desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri meningkat secara bertahap. Pada tahun 2020 dari total 158 desa, tidak ada desa yang masuk kategori mandiri, dan hanya 3 desa tergolong maju. Kondisi ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 2 desa mandiri atau 1,27 persen dan 8 desa maju atau 5,06 persen dari 158 desa di Kabupaten Alor.



Jumlah desa berkembang juga meningkat dari 47 desa tahun 2020 menjadi 82 desa berkembang atau 51,90 persen pada tahun 2024.

Penurunan desa tertinggal dari 94 desa pada tahun 2020 menjadi 63 desa pada tahun 2024, serta penurunan desa sangat tertinggal dari 14 desa menjadi 3 desa dalam periode yang sama, mencerminkan efektivitas program pembangunan berbasis desa. Peningkatan akses infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, penguatan layanan publik, serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi desa menjadi faktor pendorong utama pergeseran ini. Namun demikian, jumlah desa tertinggal yang masih cukup besar menunjukkan bahwa tantangan pembangunan desa belum sepenuhnya teratasi, khususnya di wilayah kepulauan dan desa-desa dengan keterbatasan geografis serta kapasitas kelembagaan rendah. Secara keseluruhan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Alor juga meningkat dari tahun 2020 ke 2024. Peningkatan IDM Kabupaten Alor tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 51 IDM Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Rata-rata IDM	0,5626	0,5560	0,5712	0,5843	0,6095
Status IDM	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang

Sumber : Kementerian Desa PDT, 2025

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1. Gambaran Ekonomi Makro

a) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Alor mengalami fluktuasi selama periode 2020–2023. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,55 persen akibat dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan sebesar 2,50 persen yang kemudian meningkat menjadi 2,95 persen pada tahun 2022, dan mencapai 4,09 persen pada tahun 2023.

b) Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi Kabupaten Alor masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan kontribusi sebesar 32,83 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2021. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 12,28 persen, diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 16,84 persen.

c) PDRB dan PDRB Per Kapita

Pada tahun 2021, PDRB Kabupaten Alor atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.166,93 miliar, meningkat dari Rp3.052,80 miliar pada tahun 2020. PDRB per kapita juga mengalami peningkatan, dari Rp14,45 Milyar pada tahun 2020 menjadi Rp14,80 Milyar pada tahun 2021.

d) Komponen Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar, dengan kontribusi sebesar 73,38 persen terhadap PDRB pada tahun 2021. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan, dari Rp1.350,10 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1.436,53 miliar pada tahun 2021.

e) Sektor Unggulan dan Tantangan

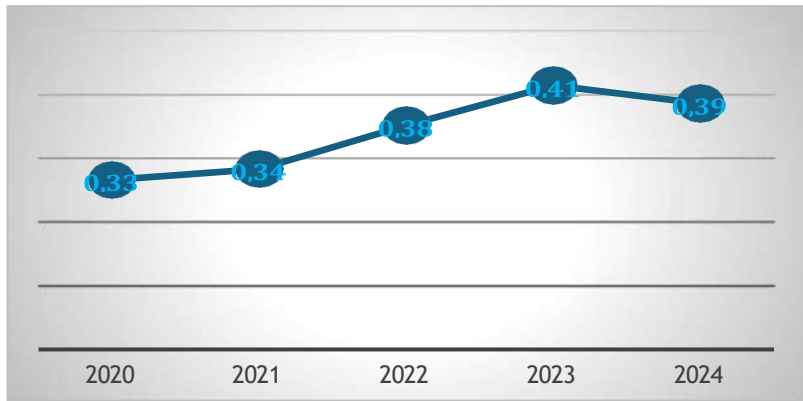
Sektor konstruksi menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021, sebesar 11,44 persen, diikuti oleh sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 6,50 persen. Namun, beberapa sektor mengalami kontraksi, seperti jasa perusahaan sebesar -9,92 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar -5,84 persen. Kondisi menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Alor menghadapi tantangan akibat pandemi, perekonomian daerah menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang positif. Sementara diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor potensial tetap diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.3.7.2. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Alor menunjukkan tren yang cenderung meningkat, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB berada pada angka 0,33 persen, mencerminkan kontribusi pajak daerah yang relatif kecil terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, rasio ini mengalami peningkatan menjadi 0,34 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, ketika rasio pajak daerah meningkat signifikan menjadi 0,38 persen, mencerminkan penguatan basis pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 0,41 persen, yang menjadi indikasi bahwa pengelolaan pajak daerah semakin membaik, baik dari sisi pemungutan maupun administrasi fiskal.

Pada tahun 2024, rasio ini mengalami penurunan menjadi 0,39 persen. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak daerah, serta dinamika kebijakan fiskal dan administrasi perpajakan di tingkat daerah.

Gambaran tren kontribusi pajak daerah kabupaten Alor terhadap PDRB selama lima tahun ditampilkan pada grafik 2.16 berikut.



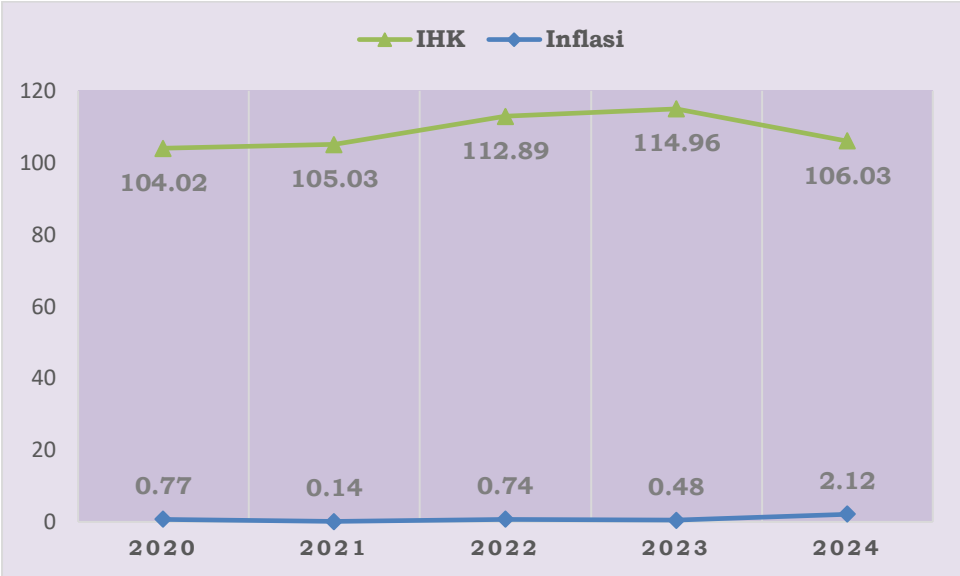
Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 16 Tren Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kab. Alor Tahun 2020-2024

Rasio yang masih berada di bawah 1 persen selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap total output ekonomi masih rendah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, termasuk mengembangkan basis pajak baru yang sesuai dengan potensi lokal, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, meningkatkan kapasitas aparatur perpajakan daerah serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Upaya ini penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

2.3.7.3. Tingkat Inflasi

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, kondisi inflasi dan perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Alor menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Keadaan ini mencerminkan pengaruh dari berbagai faktor internal dan eksternal terhadap harga-harga barang dan jasa di tingkat konsumen. Pengukuran inflasi secara langsung tidak dilakukan di Kabupaten Alor. Badan Pusat Statistik (BPS) hanya melakukan penghitungan inflasi untuk beberapa kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, data inflasi yang digunakan untuk Kabupaten Alor mengacu pada pergerakan inflasi Kota Kupang sebagai kota acuan terdekat dan representatif. Perkembangan Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi Kabupaten Alor berdasarkan kabupaten acuan terlihat pada grafik 2.17 berikut.



Sumber: BPS NTT, 2025

Grafik 2. 17 Perkembangan IHK dan Laju Inflasi Kab. Alor Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, IHK Kabupaten Alor (berdasarkan acuan Kota Kupang) tercatat sebesar 104,02, dengan laju inflasi 0,77 persen . Ini mencerminkan adanya tekanan inflasi yang masih terkendali di tengah pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga. Tahun 2021 ditandai oleh tingkat inflasi yang sangat rendah, yakni hanya 0,14 persen , dengan IHK sebesar 105,03. Hal ini mengindikasikan stabilitas harga yang kuat, meskipun juga dapat mencerminkan lemahnya permintaan domestik akibat dampak lanMilyarn dari pandemi terhadap pendapatan masyarakat. Memasuki tahun 2022, terjadi peningkatan IHK yang cukup signifikan menjadi 112,89, sementara inflasi tercatat 0,74 persen . Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi dan naiknya permintaan konsumen, meskipun laju inflasi masih dalam kisaran yang terkendali. Pada tahun 2023, IHK kembali naik menjadi 114,96, namun tingkat inflasi justru sedikit menurun menjadi 0,48 persen . Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok mulai melandai, dan stabilitas harga relatif terjaga.

Tahun 2024 menunjukkan dinamika yang berbeda, di mana IHK mengalami penurunan menjadi 106,03, namun laju inflasi melonjak menjadi 2,12 persen , tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan inflasi ini kemungkinan dipicu oleh gejolak harga pada kelompok komoditas tertentu yang sensitif, seperti energi atau pangan, atau bisa juga mencerminkan efek musiman dan tekanan dari sisi penawaran yang tidak tertangkap sepenuhnya oleh agregat IHK.



2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1. Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mengacu pada sistem pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan mematuhi hukum. Kondisi ini ditunjukkan dengan berbagai indikator, termasuk Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas Nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, di mana informasi penting harus mudah diakses dan dipahami oleh publik. Selain itu, tata kelola yang baik harus didasarkan pada penegakan hukum yang kuat.

2.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Alor memperoleh nilai sebesar 67,88 dengan kategori B (Cukup Baik). Kondisi ini meningkat dari hasil penilaian tahun sebelumnya yaitu berada pada nilai 45,98 dengan kategori C (buruk). Capaian ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan upaya nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih tertib, akuntabel, dan responsif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam beberapa aspek strategis.

Capaian tertinggi diperoleh pada aspek koordinasi harmonisasi regulasi dan pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Alor telah mulai membangun landasan kelembagaan dan teknis dalam mendukung kualitas legislasi daerah. Namun demikian, kualitas re-regulasi atau deregulasi, serta penataan database peraturan melalui JDIH, masih belum optimal. Belum adanya pelaporan kinerja JDIH, keterbatasan data dukung kegiatan evaluasi regulasi, dan minimnya pelibatan analis hukum menjadi tantangan yang perlu segera ditangani.

2.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nilai Indeks SPBE Kabupaten Alor tahun 2024 sebesar 2,19 dengan predikat cukup.

2.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PANRB tahun 2024 terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Alor mendapatkan nilai 2,21 dengan kategori C minus. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian setiap perangkat daerah pelayanan publik di Kabupaten Alor.

2.4.1.4. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil penghitungan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut terhadap surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah maka pemerintah kabupaten Alor telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah kabupaten Alor pada tahun 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, dari 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten Alor, terdapat 32 OPD yang telah menyampaikan laporannya sedangkan 31 OPD lainnya tidak menyampaikan laporan SKM tahun 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) sebanyak 119 unit, terdapat 52 UPP yang menyampaikan laporan SKM, sedangkan 67 UPP lainnya tidak menyampaikan laporan SKP. Hasil penilaian SKM tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkup pemerintah kabupaten Alor secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan publik yang baik dengan nilai SKM rata rata 81,95. Dari seluruh UPP yang telah melakukan hasil SKM terdapat beberapa UPP yang telah memiliki rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

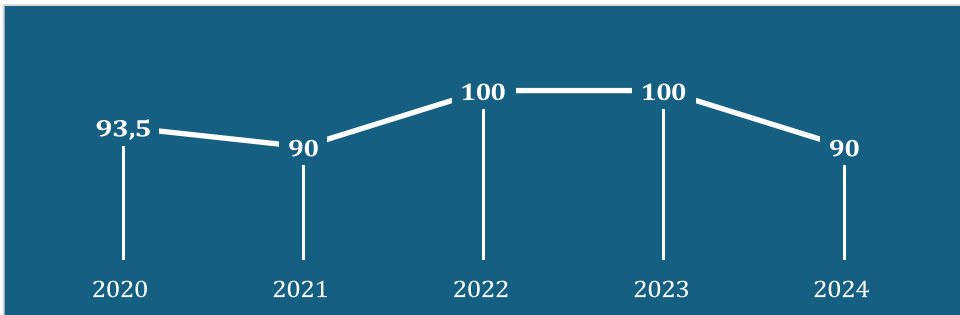
Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan inklusif, pembangunan hukum di Kabupaten Alor diarahkan pada

terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat, dan berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM). Supremasi hukum menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal.

Pembangunan hukum yang berkepastian dan bermanfaat tercermin dalam optimalisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Pemerintah Kabupaten Alor terus memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dan perangkat daerah guna memastikan implementasi Perda secara konsisten dan efisien. Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan hukum, serta penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.

2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan supremasi hukum di daerah. Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Alor telah menegakkan sebanyak 16 Perda yang menjadi dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintahan daerah. Gambaran penegakan perda di kabupaten Alor tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tampilan grafik berikut.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 18 Persentase Penegakan Perda di Kab. Alor Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kinerja penegakan perda mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021 capaian berada di atas 90 persen, yang menandakan bahwa sebagian besar perda telah ditegakkan dengan baik, meskipun belum menyeluruh. Puncak kinerja terjadi pada tahun 2022 dan 2023, di mana penegakan perda mencapai tingkat maksimal sebesar 100 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, komitmen penegakan hukum di tingkat lokal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Pada tahun 2024 terjadi penurunan ke angka 90 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan baru dalam pelaksanaan perda. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak berdampak pada ketertiban umum, efektivitas regulasi daerah, serta

kepercayaan publik terhadap sistem hukum lokal. Secara keseluruhan, kinerja penegakan perda Kabupaten Alor selama lima tahun terakhir tergolong cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan konsistensinya.

2.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat daerah. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah aksi atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan jumlah aksi yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) oleh pemerintah daerah.

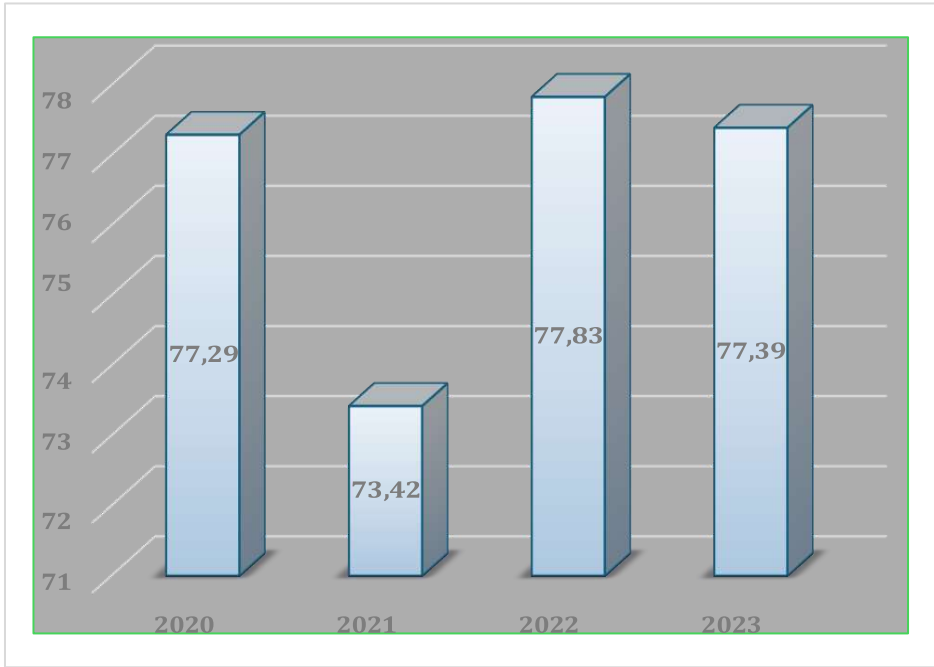
Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Alor pada tahun 2023 mencapai 47,14 persen, berdasarkan hasil verifikasi nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. Nilai ini dihitung sebagai rata-rata pelaksanaan terhadap tujuh aksi prioritas nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM Tahun 2021–2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi HAM di Kabupaten Alor masih berada pada kategori rendah dan belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM) di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis.

Analisis terhadap data capaian menunjukkan disparitas antar aksi prioritas. Aksi-aksi yang berkaitan dengan layanan pendidikan anak rentan (80 persen), layanan kesehatan anak rentan (60 persen) dan pemenuhan akomodasi kerja untuk penyandang disabilitas (70 persen) menunjukkan capaian yang cukup tinggi, namun untuk capaian rendah ditemukan pada aksi-aksi seperti pemberian bantuan usaha bagi perempuan kepala keluarga (15 persen), dokumen kependudukan anak rentan (25 persen) dan layanan kesehatan fisik-psikososial bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (30 persen).

2.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur dalam menilai kualitas demokrasi suatu wilayah melalui tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi. Karena belum tersedianya data IDI secara spesifik untuk Kabupaten Alor, maka pengukuran kualitas demokrasi daerah ini menggunakan acuan IDI Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Capaian IDI provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2023 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber: BPS NTT, 2025

Grafik 2. 19 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT Tahun 2020-2023

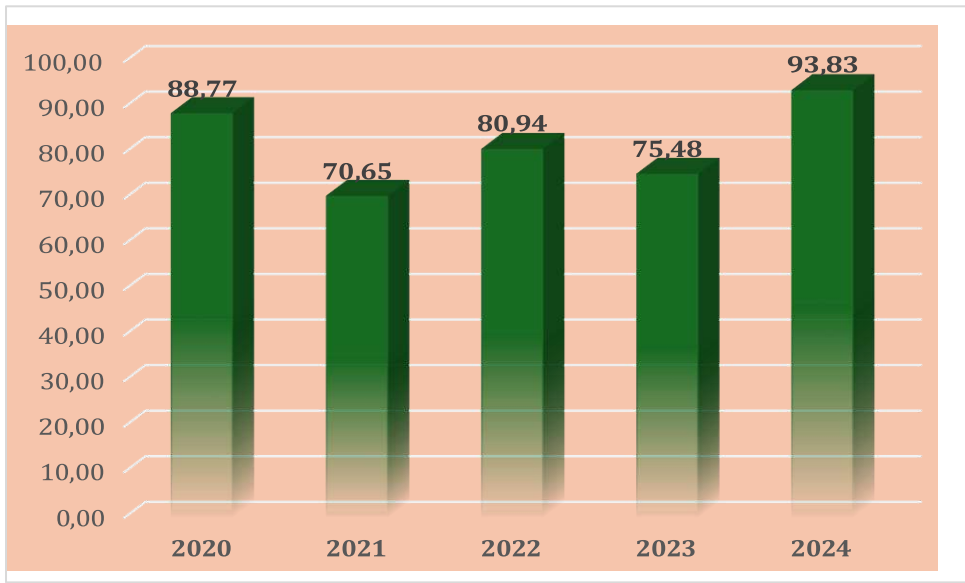
Kinerja demokrasi Provinsi NTT pada tahun 2020 berada pada tingkat sedang dengan capaian 77,29. Pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 73,42 yang mengindikasikan adanya tantangan terhadap stabilitas demokrasi yang berkaitan dengan menurunnya kebebasan sipil atau melemahnya fungsi lembaga demokrasi.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dengan nilai mencapai 77,83 yang merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini mencerminkan upaya penguatan demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada hak asasi manusia. Pada tahun 2023, IDI tetap terjaga pada tingkat yang stabil di angka 77,39. Secara umum tren IDI NTT selama periode 2020–2023 menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung membaik dan stabil, yang dapat digunakan sebagai proyeksi positif bagi kondisi demokrasi di Kabupaten Alor. Kinerja ini juga memberikan sinyal bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal perlu diarahkan pada dimensi substansial, tidak hanya bersifat prosedural.

2.4.2.4. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IKKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai capaian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) oleh pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di suatu daerah.

Indeks ketenteraman dan ketertiban kabupaten Alor tahun 2020-2024 tersaji dalam grafik 2.20 berikut.



Sumber: Sat.Pol.PP Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 20 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab. Alor Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Alor mengalami fluktuasi secara signifikan. Pada tahun 2020 KKU berada pada angka 88,77. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 70,65. Penurunan ini mengindikasikan adanya gangguan atau penurunan kualitas ketenteraman dan ketertiban di wilayah tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2022 IKKU mengalami peningkatan menjadi 80,94, yang mencerminkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada tahun 2023 terjadi ke angka 75,48, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masih tetap ada. Pada tahun 2024, IKKU meningkat secara signifikan hingga mencapai 93,83. Ini merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir dan menjadi indikasi positif bahwa Kabupaten Alor telah berhasil meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum secara menyeluruh.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Budaya Gentar Kawasan

2.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu parameter untuk mengetahui tingkat produktifitas daerah. Model pengukuran IDSD ini dikembangkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi - BRIN untuk mengukur potensi dan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. IDSD menggambarkan bagaimana produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023 mencakup 4 komponen dasar daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya mausia, pasar dan ekosistim inovasi. Keempat komponen daya



saing ini dielaborasi kedalam 12 (dua belas) komponen diantaranya Institusi, Infastruktur, Adposi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis serta Kapabilitas Inovasi.

Berdasarkan publikasi Indeks Daya Saing Daerah yang dikeluarkan oleh BRIN, nilai indeks daya saing daerah Kabupaten Alor tahun 2022-2024 tidak dapat diukur karena tidak semua komponen daya saing tersebut ada nilainya. Untuk tahun 2022, pilar 1 (kesatu) Institusi dari komponen lingkungan pendukung untuk Kabupaten Alor tidak ada nilainya, sedangkan untuk Tahun 2023 dan 2024 pilar 11 (sebelas) dari komponen ekosistim inovasi dinamisme bisnis tidak ada nilainya. Pilar Institusi menggambarkan seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktifitas perekonomian daerah. Pilar Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan memulai dan melakukan bisnis serta kemudahan untuk mengadakan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Ketiadaan nilai dari kedua pilar tersebut menyebabkan nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Alor Tahun 2022-2024 tidak dapat diukur. Data indeks daya saing daerah untuk Kabupaten Alor pada 4 komponen dan 12 pilar pembentuk indeks daya saing daerah tahun 2022-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 52 Indeks Daya Saing Daerah Kab. Alor Tahun 2022-2024

Tahun	Indeks Daya Saing Daerah												Skor IDSD
	Lingkungan Pendukung				SDM		Pasar				Inovasi		
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	-	3,34	2,35	2,12	3,23	2,90	3,55	3,35	1,89	0,13	5,00	1,23	-
2023	4,00	1,24	3,63	3,76	3,23	3,09	3,67	3,30	1,65	3,41	-	1,67	-
2024	4,25	2,63	3,63	4,12	3,12	3,84	3,32	2,80	2,84	3,43	-	2,08	-

Sumber: BRIN, 2025

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah.

Angka partisipasi sekolah menunjuk pada jumlah murid sekolah pada jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk berumur pendidikan pada setiap jenjang pendidikan. Melalui angka partisipasi sekolah dapat mempermudah kebijakan daerah dalam meningkatkan keterlibatan murid pada semua jenjang pendidikan. Angka partisipasi sekolah tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.51 berikut.



Tabel 2 53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2020-2024

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	4-6 Tahun	31,82	32,04	47,53	42,69	37,36
	• Laki-laki	30,85	31,06	23,009	41,21	36,14
	• Perempuan	32,78	33,01	24,52	44,29	38,68
2	7-12 Tahun	97,52	97,43	98,74	91,22	90,22
	• Laki-laki	97,23	97,93	79,84	92,23	90,84
	• Perempuan	97,81	96,95	82,79	90,14	89,56
3	13–15 Tahun	93,81	93,75	93,35	74,08	74,05
	• Laki –laki	89,20	91,18	51,07	73,43	72,43
	• Perempuan	98,42	96,85	53,90	74,76	75,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah pada tahun 2020-2024 fluktuatif setiap tahun namun jika dilihat secara rata-rata maka terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pembukaan akses pendidikan lanMilyarn yang lebih besar bagi semua kelompok usia sekolah untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Data di atas menunjukkan semakin tinggi usia, semakin rendah partisipasi penduduk bersekolah. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan fasilitas pendidikan dan jarak tempuh serta dapat disebabkan karena faktor ekonomi dan budaya masyarakat.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, berapapun usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD/SMP berarti bahwa perbandingan jumlah siswa pada tingkatan pendidikan SD-SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun atau rasio jumlah siswa berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan pula tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Capaian APK pada jenjang pendidikan SD hingga SMP sederajat tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.52 berikut.



Tabel 2 54 Kondisi APK Kab. Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar				
	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD/Sederajat	33,37	27,05	62,11	63,31	62,72
SD/MI/Sederajat	93,39	91,96	93,72	103,41	90,77
SMP/MTs/ Sederajat	93,27	80,41	81,07	89,71	84,44

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar dari Tahun 2020 sampai 2024 untuk jenjang Pendidikan SD/MI/ Sederajat trend perkembangnannya fluktuatif, demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP/MTs/Sederajat.

c) **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjuk pada partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu, sekaligus merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Perkembangan data APM Kabupaten Alor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 55 Kondisi APM Kabupaten Alor dan Provinsi NTT Tahun 2020 – 2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni				
	2020	2021	2022	2023	2024
PAUD/Sederajat	27,79	25,59	46,69	59,75	56,53
SD/MI/Sederajat	83,93	83,27	93.78	95,93	82,16
SMP/MTs/ Sederajat	70,16	77,66	88,02	87,22	72,81

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa APM Kabupaten Alor untuk semua jenjang Pendidikan berkembang fluktuatif selama tahun 2022-2024. Kondisi ini menunjukkan pula bahwa meskipun secara umum angka partisipasi cukup tinggi pada setiap tahun namun tetap menjadi catatan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan akses pendidikan dasar dimaksud dengan menyiapkan berbagai indikator untuk pencapaian APM.

d) **Angka Melek Huruf**

Pembangunan sektor pendidikan juga diarahkan pula pada upaya penurunan jumlah penduduk buta huruf usia lebih dari 15 tahun yang menamatkan pendidikan dalam berbagai jenjang. Angka melek huruf mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Kinerja indikator pembangunan pendidikan pada angka melek huruf sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2 56 Angka Melek Huruf Tahun 2020-2024

Kemampuan Membaca	2020	2021	2022	2023	2024
▪ Melek Huruf	83,41	86,71	87,01	98,25	97,25
▪ Buta Huruf	16,59	13,29	12,99	1,75	2,75

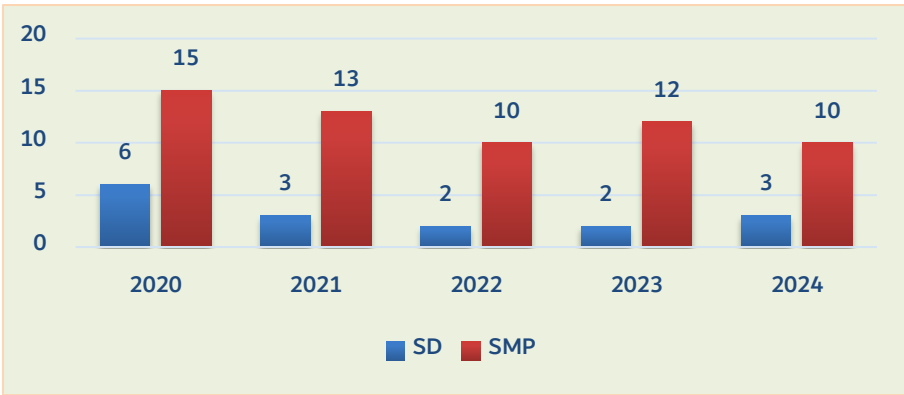
Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk melek huruf selama tahun 2020 hingga 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 2,75 persen atau sejumlah 4.278 jiwa. Kondisi ini menunjukkan masih adanya penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf sehingga perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah.

e) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjuk pada jumlah murid semua tingkatan pendidikan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena berbagai faktor seperti tingkat keterjangkauan wilayah, kondisi internal keluarga berkenaan dengan kondisi ekonomi juga masalah budaya.

Perkembangan angka putus sekolah Kabupaten Alor sebagaimana Grafik 2.21 berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 21 Angka Putus Sekolah Tahun 2020-2024

Sajian grafik di atas menunjukkan angka putus sekolah cenderung menurun pada semua tingkatan pendidikan, hal antara lain disebabkan oleh penerapan kebijakan alokasi beasiswa bagi siswa berprestasi oleh Pemerintah Daerah dan sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat melalui program-program bantuan sosial. Penerapan kebijakan ini akan terus dilakukan sehingga angka putus sekolah dapat diminimalisir termasuk melanjutkan kebijakan pembangunan unit sekolah baru secara selektif pada wilayah-wilayah tertentu.



f) Tingkat Kelulusan

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan wajib pendidikan lainnya dilihat dari persentase tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional. Perkembangan tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat 2019/2020-2023/2024 sebagaimana terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 57 Persentase Kelulusan Siswa SD Sederajat dan SMP Sederajat Tahun Pelajaran 2019/2020 – 2023/2024

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Kelulusan pada Tahun Pelajaran				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD sederajat	100	100	100	100	100
2	SMP sederajat	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Persentase kelulusan siswa Tahun 2020-2024 sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendidikan mencapai 100 persen. Persentase kelulusan diupayakan untuk tetap dipertahankan dengan berbagai kebijakan.

g) Pendidikan Guru

Dalam memberikan pelayanan pendidikan secara berkualitas kepada anak didik dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan harus tersebar secara merata. Perkembangan tingkat pendidikan guru Tahun 2020-2024 terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 58 Jumlah Guru di Setiap Jenjang Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

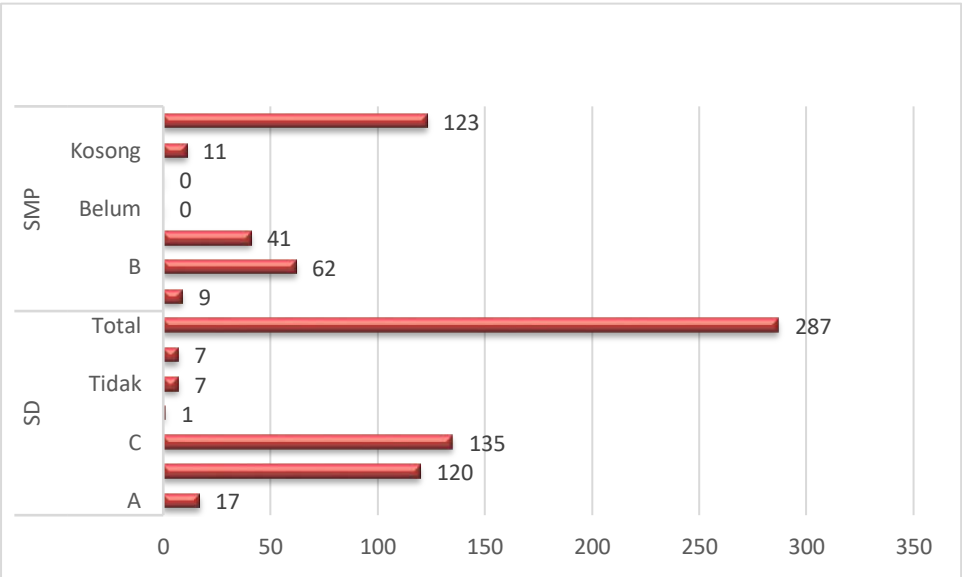
No	Tingkat Pendidikan Guru	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Guru SD sederajat						
1	SMA/Sederajat	1.115	1.128	601	527	527
2	D I – D III	36	273	159	150	150
3	D IV / S1	1.808	1.811	2.042	2.450	2.450
4	S2	6	5	2	4	4
Jumlah		2.255	2.978	2.965	2.804	3.131
Guru SMP sederajat						
1	SMA/Sederajat	280	255	47	31	31
2	D I – D II	18	18	21	20	20
3	D IV / S1	1.583	1.580	1.763	1.970	1.970
4	S2	4	4	7	9	9
Jumlah		1.271	1.898	1.885	1.838	2.030

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Data pada tabel menunjukkan kualitas tenaga pendidik di tahun 2020- 2024 cukup baik, karena kualifikasi sebagian besar pada jenjang DIII sampai S1. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik akan terus dilakukan sehingga dapat memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang kependidikan.

h) Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian terhadap kualitas pendidikan sebuah sekolah yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Proses ini menilai apakah sekolah memenuhi kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Akreditasi memberikan pengakuan terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Data akreditasi SD dan SMP di Kabupaten Alor tahun 2025 ditampilkan pada grafik 2.22 berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 22 Akreditasi Sekolah SD/ SMP Tahun 2025

Dari total 287 Sekolah Dasar (SD) yang terdata, sebanyak 135 sekolah (47%) berada pada level akreditasi C, yang mencerminkan bahwa hampir separuh satuan pendidikan dasar di Kabupaten Alor masih berada pada kategori mutu rendah berdasarkan kriteria Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Sementara itu, 120 sekolah (42%) telah mencapai akreditasi B, dan hanya 17 sekolah (6%) yang berhasil memperoleh akreditasi A, yang merupakan indikator capaian tertinggi mutu pendidikan dalam aspek manajemen, proses pembelajaran, dan hasil capaian peserta didik. Masih terdapat pula sekolah yang belum memiliki status



akreditasi, terdiri dari 1 sekolah yang belum diajukan, 7 sekolah yang dinyatakan tidak terakreditasi, serta 7 sekolah dengan status data akreditasi kosong. Fakta ini menunjukkan masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya dalam mendukung peningkatan mutu secara menyeluruh.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 123 sekolah yang terdata, distribusi status akreditasi relatif sedikit lebih baik, dengan 62 sekolah (50%) memperoleh akreditasi B dan 41 sekolah (33%) berada pada akreditasi C. Namun demikian, jumlah sekolah berakreditasi A masih sangat rendah, yakni hanya 9 sekolah (7%). Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan dalam pencapaian standar mutu unggul pada jenjang pendidikan menengah pertama. Tidak terdapat sekolah SMP yang belum diajukan atau tidak terakreditasi, tetapi masih ditemukan 11 sekolah atau 9% yang belum tercatat status akreditasinya dalam sistem data resmi, yang menimbulkan keraguan terhadap kelengkapan basis data pendidikan sebagai dasar perencanaan yang akurat.

Kondisi ini menggambarkan belum optimalnya sistem penjaminan mutu pendidikan di tingkat kabupaten, baik dari sisi input (guru, sarana prasarana, dan manajemen sekolah), proses (pelaksanaan kurikulum dan asesmen), maupun output (prestasi dan ketercapaian kompetensi siswa).

i) Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Guru-Murid

Dalam rangka mempercepat akses dan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan pemenuhan atas aspek strategis pembangunan pendidikan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan tenaga pendidik/guru di setiap jenjang pendidikan. Jumlah sekolah, murid, guru dan rasionya tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 59 Rasio Sekolah, Kelas, Guru Terhadap Murid Tahun 2020-2024

No	Indikator	T a h u n				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	SD/ Sederajat					
1	Jumlah Sekolah	284	286	286	287	287
2	Jumah Murid	27.302	27.005	27.451	27.146	26.768
3	Jumlah Guru	2.876	2.494	2.606	2.818	2.818
4	Jumlah Kelas	1.603	2.088	1.794	1.669	1.877
5	Rasio Guru : Murid	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 10	1 : 9
6	Rasio Sekolah : Murid	1 : 96	1 : 94	1 : 96	1 : 95	1 : 93
7	Rasio Kelas : Murid	1 : 17	1 : 13	1 : 16	1 : 17	1 : 14



No	Indikator	T a h u n				
		2020	2021	2022	2023	2024
B	SMP/ Sederajat					
1	Jumlah Sekolah	115	117	118	123	123
2	Jumah Murid	12.652	12.330	11.863	8.762	11.382
3	Jumlah Guru	1.776	1.688	1.911	1.921	1.921
4	Jumlah Kelas	632	651	586	394	532
5	Rasio Guru : Murid	1 : 7	1 : 7	1 : 7	1 : 5	1 : 6
6	Rasio Sekolah : Murid	1 : 96	1 : 78	1 : 101	1 : 71	1 : 93
7	Rasio Kelas : Murid	1 : 20	1 : 19	1 : 20	1 : 22	1 : 21

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Data Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid untuk tingkat pendidikan SD sederajat rata- rata 1 guru mengajar 9 anak didik; sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP sederajat, telah pula memenuhi standar rasio yakni 1 guru mengajar 6 orang murid sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yakni tidak melebihi 1 : 32 untuk tingkat SD/MI sederajat dan 1 : 36 untuk tingkat SMP sederajat. Kondisi ini menunjukkan dari aspek ketersediaan guru SD dan SMP tidak menjadi masalah, namun tentunya belum ditinjau dari aspek kualitas guru yang ada.

j) Fasilitas Pendidikan

Keberadaan fasilitas pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas didik. Data menunjukkan bahwa dari keseluruhan ruang kelas yang dibangun terjadi peningkatan dari Tahun 2020 sampai tahun 2024. Namun demikian, dari total ruang yang dibangun mengalami kerusakan yang membutuhkan perhatian untuk perbaikan. Jumlah dan kondisi ruang belajar SD/SMP Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 60 Jumlah dan Kondisi ruang Belajar SD dan SMP Tahun 2020-2024

No	Kondisi Bangunan	Ruang Kelas Satuan Pendidikan	
		SD	SMP
1	Tahun 2020		
	Baik (unit)	370	156
	Rusak (unit)	1.521	474
	Jumlah (Unit)	1.891	630
	Persentase Kerusakan (persen)	80,43	75,24
2	Tahun 2021		
	Baik (unit)	575	278
	Rusak (unit)	1.513	373



No	Kondisi Bangunan	Ruang Kelas Satuan Pendidikan	
		SD	SMP
	Jumlah (Unit)	2.088	651
	Persentase Kerusakan (persen)	72,46	57,30
3	Tahun 2022		
	Baik (unit)	452	223
	Rusak (unit)	1.337	363
	Jumlah (Unit)	1.789	586
	Persentase Kerusakan (persen)	74,73	61,95
4	Tahun 2023		
	Baik (unit)	506	239
	Rusak (unit)	1.446	425
	Jumlah (Unit)	1.952	664
	Persentase Kerusakan (persen)	74,08	64,01
5	Tahun 2024		
	Baik (unit)	501	164
	Rusak (unit)	1.376	368
	Jumlah (Unit)	1.877	532
	Persentase Kerusakan (persen)	73,31	69,17

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jumlah ruang belajar dengan kondisi rusak lebih besar dibanding kondisi baik. Kondisi ini membutuhkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas ruang belajar melalui pembangunan dan peningkatan ruang kelas baru pada jenjang SD dan SMP. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu landasan untuk mengukur persentase partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Jumlah lembaga PAUD/TK/RA berkembang fluktuatif namun terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir hingga pada tahun 2024 berjumlah 320 unit. Demikian halnya dengan jumlah rombongan belajar dan jumlah guru yang terus meningkat, meskipun jumlah murid terjadi fluktuatif selama kurun waktu lima tahun. Perkembangan PAUD/TK/RA tahun 2020-2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2 61 Perkembangan PAUD/TK/RA Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah				Rasio Guru : Murid
		Lembaga PAUD/TK/RA	Rombongan Belajar	Murid	Guru	
1	2020	291	501	6.385	743	1 : 9
2	2021	310	515	7.466	785	1 : 10
3	2022	325	159	2.201	637	1:16
4	2023	348	482	6.141	622	1 : 10
5	2024	320	546	7.055	681	1 : 10

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Alor, 2025



Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan rasio guru terhadap murid selama empat tahun rata-rata mencapai 1: 11. Kebijakan dalam pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pendukung PAUD/TK/RA akan terus ditingkatkan dalam rangka menunjang kualitas anak usia dini. Pemerintah Kabupaten Alor juga telah mendorong penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) sesuai arahan Pemerintah Pusat dengan mengintegrasikan pelayanan pendidikan anak usia dini yang menyatu dengan gizi, kesehatan, pengasuhan dan perlindungan anak. Pada tahun 2024 terdapat 234 unit PAUD HI dari 320 Unit PAUD atau 73,125 persen PAUD di Kabupaten Alor telah menjadi PAUD HI yang menjadi pendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Alor sejak usia dini.

2) Urusan Kesehatan

a) Jumlah Kelahiran Bayi dan Balita Gizi Buruk

Kelahiran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu daerah. Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu dan wilayah tertentu. Tingkat kelahiran pada masa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Balita gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi pada balita yang mengalami kurang gizi, diketahui berdasarkan pengukuran *antropometri* seperti pertambahan berat badan, tinggi badan/panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan dan lain-lain. Penyebab dari tingginya prevalensi gizi kurang secara langsung adalah adanya asupan gizi yang tidak sesuai antara yang dikonsumsi dengan kebutuhan tubuh, dimana asupan gizi secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola pengasuhan terhadap anak yang diberikan oleh ibu.

Data jumlah kelahiran, kematian dan status gizi bayi balita dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 62 Jumlah Kelahiran, Kematian dan Status Gizi Bayi dan Balita

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A.	BAYI					
	- Jumlah Kelahiran	4.371	5.227	4.833	4.937	4353
	- Jumlah Kelahiran Hidup	4.362	5.210	4.816	4.827	4310
	- Persentase Lahir	99,79	99,67	99,64	97,77	99,01
	- Kematian	17	17	67	110	59



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	- Persentase Mati	0,39	0,32	1,4	2,2	0,99
B	BALITA					
	- Jumlah Balita	20.226	19.548	19.126	25.314	23.542
	- Jumlah Kematian	12	17	70	113	59
	- Persentase Mati	0,06	0,09	0,37	0,44	0,25
C	STATUS GIZI BAYI					
	- BBLR	101	168	99	69	151
	- Persentase	2,3	6,5	4,3	1,5	3,6
D	STATUS GIZI BALITA					
	- Balita Ditimbang	15.262	15.639	18.253	11.971	13,139
	- Gizi BGM	2.685	1.829	2.987	3.447	3.098
	- Persentase gizi BGM	17,6	11,7	16,4	19,3	23,6
	- Gizi Buruk	1.450	1.095	310	275	275
	- Persentase gizi buruk	9,5	7.0	1,7	1,5	2,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Selama tahun 2020–2024, angka kelahiran cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun pada akhir periode, yakni dari 4.371 kelahiran pada tahun 2021 menjadi 4.353 pada 2024. Jumlah kelahiran hidup juga fluktuatif selama lima tahun terakhir mengikuti jumlah kelahiran bayi. Meskipun persentase kelahiran hidup tetap tinggi, namun masih terjadi tingkat kematian bayi baru lahir mengindikasikan potensi tekanan pada mutu layanan persalinan atau aksesibilitas fasilitas kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan, dengan peningkatan pada tahun 2022 sebanyak 67 kasus dan mencapai puncak pada tahun 2023 sebanyak 110 kasus, dan menurun menjadi 59 kasus di tahun 2024. Laju kematian bayi yang meningkat ini mengindikasikan ketidaktercukupannya intervensi kesehatan neonatal dan sistem rujukan yang belum optimal, terutama pada wilayah dengan akses terbatas. Angka kematian balita memperlihatkan tren yang serupa. Kematian balita meningkat hampir sepuluh kali lipat dari 12 kasus pada tahun 2020 menjadi 113 pada tahun 2023. Kemudian menurun pada tahun 2024. Fakta ini menandakan adanya defisit efektivitas pada program intervensi kesehatan anak usia dini, serta kemungkinan kegagalan dalam deteksi dan penanganan dini kasus gizi buruk dan penyakit infeksi. Tren Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) menunjukkan dinamika yang mencerminkan variabilitas kualitas asupan gizi ibu hamil dan akses



terhadap layanan prenatal. Terjadi peningkatan BBLR pada tahun 2021 dan kemudian menurun menjadi 69 kasus pada tahun 2023, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 151 kasus. Hal ini mengindikasikan belum terbangunnya sistem intervensi yang konsisten dan berkelanjutan terhadap gizi ibu hamil.

Cakupan penimbangan balita mengalami penurunan signifikan, dari 18.253 anak ditimbang pada tahun 2022 menjadi 11.971 pada tahun 2023, dengan sedikit perbaikan pada tahun 2024. Penurunan ini berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam deteksi dini masalah gizi dan intervensi tepat waktu. Hal ini sejalan dengan peningkatan persentase balita dengan gizi BGM (Bawah Garis Merah), yang meningkat dari 11,7 persen di tahun 2021 menjadi 23,6 persen pada tahun 2024, menandakan terjadinya krisis gizi kronis.

Sementara itu, angka gizi buruk mengalami penurunan drastis dari 1.450 kasus di tahun 2020 menjadi stagnan pada 275 kasus pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun penurunan ini patut diapresiasi, stagnasi kasus menunjukkan bahwa kelompok paling rentan belum sepenuhnya tersentuh intervensi gizi intensif. Indikator ini mencerminkan masih adanya kantong kerentanan gizi yang sulit dijangkau oleh program konvensional.

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup (KH). Angka kematian ibu menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Data jumlah kematian ibu dari Tahun 2020 sampai 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2 63 Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Alor

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	160 / 100.000 KH	192 / 100.000 KH	270 / 100.000 KH	186 / 100.000 KH	162 / 100.000 KH
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	3,9 / 1.000 KH	3,30 / 1.000 KH	14 / 1.000 KH	22,8 / 1.000 KH	13,7 / 100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Berdasarkan data time-series Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Alor selama periode 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika sistem pelayanan kesehatan dasar, khususnya di bidang kesehatan ibu dan anak.

AKI Kabupaten Alor tercatat mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2022 sebesar 270 per 100.000 kelahiran hidup. Meskipun demikian tren menurun yang konsisten selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya respons adaptif dari sistem, di mana AKI berhasil diturunkan menjadi 186 pada tahun 2023, dan kembali mendekati *baseline* awal sebesar 162 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan sejumlah intervensi strategis, antara lain optimalisasi program PONEK, adanya pendampingan dokter spesialis berupa transfer pengetahuan untuk penanganan kasus kegawatdaruratan di puskesmas, peningkatan kapasitas dokter dalam pemanfaatan USG di puskesmas, revitalisasi peran bidan desa, peningkatan akses transportasi rujukan ibu hamil berisiko tinggi berupa penyediaan kendaraan rujukan (layanan Call Centre) serta ketersediaan jaminan kesehatan daerah.

Indikator AKB dari posisi *baseline* rendah yaitu 3,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dan 3,3 pada tahun 2021, meningkat menjadi 14 pada 2022 dan meningkat terus pada tahun 2023 hingga mencapai 22,8 per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan AKB hingga lebih dari 5 kali lipat dalam dua tahun tersebut merupakan sinyal kegagalan sistemik dalam menjamin kelangsungan hidup neonatal dan bayi. Faktor determinan yang patut dicermati meliputi penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap, tingginya proporsi persalinan non-fasilitas kesehatan, serta tingginya angka bayi berat badan lahir rendah (BBLR) yang tidak tertangani secara baik. Meski demikian pada tahun 2024 AKB berhasil turun menjadi 13,7 per 1.000 kelahiran hidup. Walaupun masih jauh dari kondisi awal, tren ini mencerminkan adanya perbaikan awal terhadap infrastruktur layanan maternal kegawatdaruratan, adanya pendampingan dokter spesialis berupa transfer pengetahuan untuk penanganan kasus kegawatdaruratan, perluasan cakupan posyandu, integrasi sistem surveilans kematian bayi, serta ketersediaan jaminan kesehatan daerah.



Persentase kelahiran menurut penolong kelahiran Tahun 2022 sampai 2024 disajikan pada tabel 2.61 berikut.

Tabel 2 64 Persentase Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran

Tahun	Ibu Bersalin/ Nifas	Penolong Kelahiran				Mendapat Pelayanan Kesehatan Nifas
		Tenaga Kesehatan		Dukun Terlatih		
		Jumlah	persen	Jumlah	persen	
2020	4.772	4.371	91,60	401	8,4	4.371
2021	5.231	5.092	97,34	139	2,66	4.977
2022	4.605	3.051	66,26	1554	33,74	3.548
2023	4.937	4.297	87,01	641	12,9	4.473
2024	5.064	4.069	80,4	995	19,64	4.172

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025.

Selama kurun waktu 2020–2024, Kabupaten Alor menunjukkan dinamika signifikan dalam indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin dan nifas. Jumlah ibu bersalin relatif stabil, namun kualitas layanan mengalami fluktuasi tajam. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat tinggi pada tahun 2021 sebesar 97,34 persen, kemudian menurun menjadi 66,26 persen pada tahun 2022 yang mengindikasikan gangguan sistemik dalam layanan obstetri. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2023 menjadi 87,01 persen dan tahun 2024 sebesar 80,4 persen tetapi capaian tersebut belum kembali ke standar minimal pelayanan kesehatan dasar.

Proporsi kelahiran oleh dukun terlatih meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2020 sebesar 8,4 persen ke tahun 2024 sebesar 19,64 persen yang menunjukkan potensi kesenjangan akses dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan formal. Sementara itu, cakupan pelayanan kesehatan nifas juga menurun dari 4.977 pada tahun 2021 menjadi 4.172 pada tahun 2024. Hal ini memperkuat indikasi lemahnya kesinambungan layanan pasca persalinan. Kondisi ini menuntut penguatan sistem layanan primer melalui redistribusi tenaga kesehatan, integrasi dukun terlatih dalam skema kolaboratif, serta optimalisasi pemantauan pelayanan nifas berbasis data real-time untuk mencegah kematian maternal dan neonatal.

c) Penyakit Menular

Kategori penyakit menular yang ditemui di Kabupaten Alor dalam Tahun 2022-2024 meliputi penyakit Malaria, TB-Paru, Kusta, Diare dan HIV AIDS.



Jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Alor Tahun 2022 hingga 2024 disajikan dalam Tabel 2.62 berikut.

Tabel 2 65 Jumlah Penderita Penyakit Menular Tahun 2020-2024

Z	Jenis Penyakit	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Malaria	282	53	411	332	792
2.	TB-Paru	160	171	216	206	299
3.	Kusta	75	62	64	72	69
4.	Diare	n/a	1.885	832	1.419	2130
5.	HIV AIDS	69	77	589	81	80

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Alor mengalami fluktuasi dalam kasus penyakit menular. Beberapa penyakit menunjukkan tren peningkatan yang perlu diwaspadai. Kasus malaria meningkat terutama pada tahun 2024 yang mencapai 792 kasus, setelah sempat turun di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa malaria masih menjadi masalah endemik, dan upaya pengendalian vektor serta deteksi dini belum optimal.

Penyakit Tuberkulosis paru (TB-Paru) menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenaikan ini mencerminkan transmisi yang masih aktif serta tantangan dalam deteksi dan keberhasilan pengobatan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan.

Kusta tercatat relatif stabil, namun keberadaannya yang terus-menerus menunjukkan bahwa penyakit ini belum tereliminasi dan tetap membutuhkan perhatian melalui pendekatan berbasis komunitas. Kasus diare mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2024 setelah sebelumnya sempat menurun. Ini mengindikasikan adanya persoalan serius pada akses air bersih dan sanitasi lingkungan, serta ketahanan terhadap wabah yang bersifat musiman atau akibat perubahan iklim.

Sementara itu, kasus HIV/AIDS sempat tinggi pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini bisa mencerminkan perluasan layanan tes HIV atau adanya transmisi lokal yang sempat tidak terpantau. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa penyakit menular masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat di Kabupaten Alor. Diperlukan penguatan surveilans, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular secara berkelanjutan.



d) Sarana Kesehatan

Optimalisasi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Ketersedian sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2020-2024 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 66 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Kondisi Tahun 2020-2024

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumas Sakit Daerah	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Bergerak	1	1	1	1	0
3	Rumah Sakit Pratama	0	0	0	0	2
4	Puskesmas	26	26	26	27	28
	- Puskesmas Rawat Inap	14	14	14	14	14
	- Puskesmas non Rawat inap	12	12	12	13	14
5	Puskesmas Pembantu	48	49	49	54	54
6	Puskesmas Keliling	17	28	159	159	159
7	Poskesdes	42	46	46	45	45
9	Polindes	39	42	40	40	40
10	Posyandu	446	446	445	456	460
11	Klinik Pengobatan Swasta	4	4	5	15	10

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Prasarana kesehatan di Kabupaten Alor selama periode tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jumlah rumah sakit tetap satu unit, namun rumah sakit pratama baru hadir pada tahun 2024 yang dapat memperluas akses rujukan. Puskesmas meningkat dari 26 menjadi 28, dengan penambahan di Puskesmas non-rawat inap, meskipun Puskesmas rawat inap stagnan di 14 unit. Fasilitas kesehatan berbasis komunitas, seperti Puskesmas Pembantu, Posyandu, dan Poskesdes mengalami penambahan, meningkatkan akses kesehatan dasar. Puskesmas Keliling mengalami peningkatan cukup tinggi yang mencerminkan upaya untuk menjangkau wilayah terpencil, sementara klinik swasta masih mengalami fluktuasi dan Poskesdes serta Polindes tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Secara keseluruhan, perluasan dan pemerataan fasilitas kesehatan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan di wilayah terpencil.

e) Tenaga Kesehatan

Komposisi tenaga medis dan paramedis terdiri atas tenaga PNS dan tenaga non PNS. Spesifikasi dari tenaga medis dan paramedis atau tenaga kesehatan meliputi perawat umum, bidan dan tenaga medis



lainnya yang meliputi sanitarian, tenaga gizi, laboran, apoteker dan asisten apoteker.

Jumlah tenaga medis dan paramedis terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 67 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2020-2024

Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Pada Tahun (orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter	77	77	85	63	62
Perawat	720	758	797	774	747
Bidan	558	573	612	612	701
Tenaga Kefarmasian	95	116	101	110	100
Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	66	246	240	228	254
Tenaga Gizi	92	119	166	120	114
Tenaga Keterampilan Fisik	7	3	3	4	4
Tenaga Keteknisian Medis	34	58	56	80	66
Tenaga Kesehatan Lainnya	78	65	83	90	107
Jumlah	1727	2.015	2.143	2.081	2.162

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Jumlah tenaga medis secara umum belum mencukupi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, bahkan konsentrasi tenaga medis yang cenderung ada di perkotaan menyebabkan ketimpangan penyebaran tenaga medis yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) pada wilayah- wilayah perdesaan. Data sebagaimana diatas dapat diketahui dari rasio dokter dan tenaga paramedis terhadap jumlah penduduk sebagaimana tabel 2.65 berikut.

Tabel 2 68 Rasio Dokter dan Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter	77	77	85	63	62
	Rasio per 1000 penduduk	0,3643	0,3598	0,3923	0,2843	0,2760
2	Jumlah Tenaga Medis	1.278	1.331	1.409	1.386	1.448
	Rasio per 1000 penduduk	6,0319	6,2198	6,5042	6,2563	6,4350
3	Jumlah Penduduk	211.872	213.994	216.629	221.536	225.020

Sumber: Dinas Kesehatan, BPS Kab. Alor, 2025

Jumlah dokter di Kabupaten Alor selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dengan penurunan tertinggi pada tahun 2023 menjadi 63 dokter kemudian meningkat menjadi 62 dokter pada tahun 2024. Rasio dokter per 1.000 penduduk tetap rendah dan stagnan di angka 0,2843– 0,2760, jauh dari standar ideal WHO ($\geq 1/1.000$). Kondisi rasio jumlah dokter yang masih rendah menunjukkan kekurangan dokter signifikan di kabupaten Alor. Sebaliknya, jumlah tenaga medis (bidan, perawat, dan lainnya)



terus meningkat dari 1.278 di tahun 2020 menjadi 1.448 di tahun 2024, dengan rasio per 1.000 penduduk mencapai 6,4350 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan ketersediaan tenaga medis cukup baik untuk tenaga kesehatan non-dokter. Dengan populasi jumlah penduduk yang terus tumbuh dari 211.872 menjadi 225.020, ketimpangan rasio antara dokter dan tenaga medis menunjukkan disparitas distribusi SDM kesehatan, dan menekankan pentingnya kebijakan redistribusi tenaga medis serta insentif khusus bagi kabupaten Alor.

f) Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan capaian atau *output* dari kinerja sistem kesehatan yang digambarkan melalui angka morbiditas dan mortalitas penduduk. Tingginya angka kesakitan (*morbidity*) karena penyakit menular akibat lingkungan yang buruk dan status gizi masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang, terutama melanda penduduk rentan yaitu ibu hamil, bayi baru lahir dan balita mengakibatkan tingginya angka *stunting* dan kematian pada usia dini.

Sejak Tahun 2017 seluruh keluarga (100 persen) di Kabupaten Alor telah dinyatakan memiliki akses terhadap jamban sehat, yang ditandai dengan deklarasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*) oleh Menteri Kesehatan RI. Status kesehatan masyarakat di Kabupaten Alor masih terdapat persoalan yang harus segera ditangani.

Secara garis besar kondisi kesehatan masyarakat Tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 69 Angka Kesaktian dan Kondisi Pelayanan Kesehatan

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kesakitan malaria	Orang	282	53	411	3232	792
		Permil	1,33	0,24	1,93	1,5	3,5
2	Angka kesembuhan penyakit TBC	persen	36	2,3	1,9	12,1	33,1
		Orang	95	4	4	25	78
3	Angka penyakit kusta	Kasus	75	62	64	72	69
4	Penderita AIDS	Orang	69	77	589	56	56
		Permil	0,33	0,11	1,58	0,3	0,2
5	Penderita TBC	Orang	261	252	416	403	431
		Permil	1,23	1,15	2,78	1,8	1,9
6	Penderita DBD	Orang	479	8	36	55	301
		Permil	2,26	0,04	2,87	0,2	1,3
7	Penderita Diabetes Militus	Orang	334	334	3.163	952	136



No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Permil	1,58	1,52	2,77	4,3	0,6
8	Cakupan pelayanan ibu hamil dan bayi						
	Kunjungan ibu hamil kontak pertama (K1)	Orang	4.701	5.240	3.711	4528	4718
	Kunjungan ibu hamil ke empat dalam triwulan III (K4)	Orang	3.926	5.092	4.056	4006	4311
	Kunjungan Neonatus (bayi baru lahir)	Orang	4.362	4.732	3.596	3387	4189
9	Cakupan desa Universal Child Immunitation (UCI)	Desa/Kel; persen Desa /Kel	129/73,7	116/66,3	128/73,1	96/54,9	92/52,6
10	Hemodialisa (Hd)/ Cuci Darah	Orang	37	37	37	37	37

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Alor, 2025

Data Jaminan Kesehatan prabayar menunjukkan, dari total jumlah penduduk yang harus mendapat pelayanan sebanyak 226.646 jiwa, sebanyak 232.095 jiwa atau 102,40 persen telah menjadi peserta aktif BPJS yang terdiri dari 143.509 dibiayai melalui APBN dan 41.011 jiwa dibiayai melalui APBD, peserta mandiri 47.575 jiwa.

3) **Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Dalam rangka tertib pemanfaatan ruang maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor Tahun 2013-2033. Sebagai tindak lanjut dari penetapan RTRW maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen pengendali pemanfaatan ruang. Sampai dengan tahun 2018 telah di Perdakan RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) Kawasan Perkotaan Kalabahi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018. Pemerintah Pusat juga telah menyusun RDTR dan PZ Perluasan Kawasan Perbatasan Kalabahi dan Kawasan Perbatasan Maritaing. Selain itu, memperhatikan dinamika perkembangan ruang daerah baik dalam tataran perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, maka dibutuhkan revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Alor tahun 2013-2033 yang saat ini sedang berproses pada penyiapan rancangan perubahan tersebut. Dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah maka dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang bertugas antara lain untuk membantu Bupati dalam perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah. Selain itu RTRW dan

RDTR-PZ juga digunakan sebagai instrumen pemberian izin terkait pemanfaatan ruang.

Selama periode 2020–2024, penataan ruang Kabupaten Alor menunjukkan sejumlah perkembangan penting, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan keterbatasan kapasitas. Secara umum, implementasi RTRW Kabupaten Alor telah mulai diarahkan untuk mendukung fungsi wilayah sebagai pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, namun masih memerlukan penguatan dari sisi konsistensi pelaksanaan, kelembagaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Ibu Kota Kabupaten, Kalabahi, masih menjadi pusat pertumbuhan utama. Aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik terpusat di kawasan ini, yang menyebabkan tekanan terhadap ruang perkotaan semakin meningkat. Namun, hingga akhir 2024, perluasan kawasan perkotaan belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan tata ruang yang sistematis. Pemukiman tumbuh secara sporadis, infrastruktur dasar belum merata, dan belum ada zona pengembangan baru yang ditetapkan secara jelas.

Kawasan pesisir Kalabahi, termasuk Pantai Mutiara dan Pantai Lipa, telah mengalami kegiatan reklamasi dalam skala terbatas, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya terintegrasi dengan rencana tata ruang, dan belum ada kebijakan pemanfaatan kawasan reklamasi secara jangka panjang yang dilengkapi dengan kajian lingkungan dan sosial yang memadai.

Sementara itu, penyediaan ruang terbuka hijau dan taman kota masih sangat minim. Beberapa ruang publik yang ada belum berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas masyarakat. Keterbatasan anggaran dan belum tersusunnya perencanaan detail menyebabkan program pengembangan taman kota tertunda dalam implementasi.

Revitalisasi pasar khususnya Pasar Inpres Kalabahi, baru dilakukan dalam skala terbatas melalui perbaikan bangunan dan pengelolaan lapak. Penataan ruang pasar sudah dilakukan namun pemanfaatan oleh pengguna pasar yang tidak sesuai peruntukannya sehingga berpengaruh terhadap aspek integrasi sirkulasi, area parkir, dan sistem distribusi yang efisien. Sementara bangunan pasar Kadelang merupakan desain pasar modern yang dibangun dan telah dimanfaatkan dan mendukung aktifitas perekonomian masyarakat.

Untuk kawasan pemakaman, sejumlah lokasi pekuburan umum



mengalami tekanan lahan akibat pertumbuhan permukiman. Hingga tahun 2024, belum ada kebijakan yang mengatur zonasi khusus pemakaman, baik dari sisi lokasi baru maupun pengelolaan kawasan yang sudah ada. Ini berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang ke depan jika tidak ditangani secara terencana.

Secara keseluruhan, kondisi eksisting penataan ruang Kabupaten Alor menunjukkan adanya arah perkembangan, namun belum sepenuhnya terstruktur dan terintegrasi. Implementasi RTRW masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi turunan, kapasitas perencanaan teknis, dan koordinasi antar-perangkat daerah. Oleh karena itu, periode RPJMD 2025–2029 menjadi momentum penting untuk memperkuat kesinambungan arah kebijakan tata ruang secara lebih sistematis, terukur, dan berbasis data spasial.

Pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di tingkat Kabupaten melibatkan berbagai indikator penting untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa indikator penting dalam pembangunan bidang PUPR.

a) Jalan dan Jembatan

Jalan di Kabupaten Alor berdasarkan kewenangannya terdiri dari jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kabupaten, jalan Desa dan jalan non status. Kondisi jalan di Kabupaten Alor sebagaimana tabel 2.67 berikut.

Tabel 2 70 Panjang dan Kondisi Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2024

Status Jalan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Desa Strategis	Desa	Non Status	Total Jalan
A. Panjang Setiap Jenis Permukaan							
Aspal	129,61	97,58	459,12	5,00	31,55	46,40	769,26
Perkerasan	1,34	2,50	81,03	7,00	32,70	94,32	218,89
Telford	0,47	29,70	86,67	3,50	77,61	55,88	253,83
Tanah	13,91	2,07	244,35	331,00	167,90	164,11	923,33
Jumlah	145,33	131,85	871,16	346,50	309,76	360,71	2.165,31
B. Kondisi Permukaan Jalan							
Baik	46,86	75,76	208,60	22,50	92,10	82,03	527,85
Persen terhadap Panjang	32,24	57,46	23,95	6,49	29,73	22,74	24,38
Sedang	82,76	4,94	176,07	1,50	123,50	75,10	463,87
Persen terhadap Panjang	56,94	3,75	20,21	0,43	39,87	20,82	21,42
Rusak Ringan	7,41	1,95	85,12	3,60	49,50	39,47	187,05
Persen terhadap Panjang	5,10	1,48	9,77	1,04	15,98	10,94	8,64
Rusak Berat	13,91	49,20	401,37	318,90	44,66	164,11	986,55



Status Jalan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Desa Strategis	Desa	Non Status	Total Jalan
Persen terhadap Panjang	9,57	37,32	46,07	92,03	14,42	45,50	45,56
Panjang tidak mantap	21,32	51,15	486,49	322,50	94,16	203,58	1.179,20
Persen Panjang jalan tidak mantap	14,67	38,79	55,84	93,07	30,40	56,44	54,46
Panjang Jalan Mantap	129,61	80,70	384,67	24,00	215,60	157,13	991,71
Persen Panjang Jalan Mantap	85,88	61,21	44,16	6,93	69,60	43,56	45,80

Sumber: Dinas PUPR Kab. Alor dan Bappelitbang Kab. Alor, 2024

Data menunjukkan bahwa jalan dengan kondisi baik di Kabupaten Alor mencapai 527,85 km atau mencapai 24,38 persen dari total jalan sepanjang 2.165,31 km, sedangkan jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat atau dalam kondisi tidak mantap sepanjang 1.179,20 Km atau mencapai 54,46 persen.

Secara khusus untuk jalan kabupaten, kondisi rusak ringan dan rusak berat sepanjang 486,49 Km atau mencapai 55,84 persen dari total panjang jalan kabupaten. Apabila ditinjau dari kemantapan jalan maka jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2024 sepanjang 384,67 Km atau mencapai 44,16 persen. Perkembangan kondisi jalan kabupaten selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.68 berikut:

Tabel 2 71 Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024

Indikator	2020		2021		2022		2023		2024	
	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap	Mantap	Tidak Mantap
Panjang (Km)	472,4	398,76	432,48	438,64	408,76	462,40	403,87	467,29	384,67	486,49
Persentase	54,23	45,77	49,64	50,36	46,92	53,08	46,36	53,64	44,16	55,84
Total Panjang	871,16		871,16		871,16		871,16		871,16	

Sumber: Dinas PUPR Kab. Alor, 2025

Banyaknya jembatan pada ruas jalan kabupaten berjumlah 91 buah dengan panjang keseluruhan mencapai 802 meter. Persentase kemantapan jembatan pada tahun 2024 bahwa terdapat 72 unit atau 79,12 persen dalam kondisi mantap dan 19 unit atau 20,88 persen dalam kondisi tidak mantap.

Pada Tahun 2019 telah ditetapkan sejumlah ruas jalan desa dan jalan non status menjadi Jalan Desa Strategis yang menjadi ruas jalan penghubung antar desa dan juga penghubung antar wilayah strategis/potensi pada beberapa desa. Ruas jalan desa strategis tersebut kemudian diperbaharui pada Tahun 2021 dengan total



panjang jalan desa strategis 346,5 km. Sebagian besar ruas jalan tersebut masih dalam kondisi rusak berat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pembangunan jalan serta peningkatan jalan.

b) Irigasi

Kondisi jaringan irigasi tahun 2024 menunjukkan terdapat 33,69 persen dalam kondisi baik dan 63,02 persen dalam kondisi rusak dari total jaringan irigasi sepanjang 96.352,74 meter. Untuk mengatasi kondisi dimaksud, maka selama kurun waktu tahun 2020-2024 melalui intervensi pemerintah daerah telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada daerah irigasi.

Berdasarkan kewenangan pengelolaan daerah irigasi, terdapat 21 Daerah Irigasi (DI) yaitu 1 DI kewenangan Pemerintah Pusat (Benlelang) seluas 3.459 Ha dan 20 DI kewenangan Pemerintah Kabupaten yang total luasan 5.004 Ha. Sejak tahun 2021-2024 telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 6.899,15 meter dan peningkatan jaringan sepanjang 10.164,39 meter.

Disamping dilakukan juga rehabilitasi lahan irigasi seluas 870 ha dan peningkatan lahan irigasi seluas 692 ha. Sampai dengan akhir tahun 2017 panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik sejumlah 49.524,78 meter atau mencapai 43,67 persen.

Untuk mengatasi kekurangan air irigasi dan keperluan pertanian dan peternakan maka sampai tahun 2024 telah dibangun 35 embung di Kabupaten Alor. Beberapa unit saat ini dalam kondisi rusak dan belum menggunakan geomembrane sebagai lapisan dasar embung yang dapat mengurangi potensi kebocoran air. Untuk itu dalam lima tahun kedepan selain dibutuhkan penambahan jumlah embung, perlu juga dilakukan rehabilitasi dan pemasangan lapisan geomembran pada embung-embung tersebut.

4) Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

a) Rumah Layak Huni

Kelayakan hunian rumah dapat dilihat dari berbagai indikator kondisi fisik rumah. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap rumah yang layak huni. Indikator kondisi fisik rumah disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2 72 Perkembangan Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jenis Lantai					
	Bukan Tanah	83,77	83,11	86,64	87,93	85,93
	Tanah	16,23	16,89	13,36	12,07	14,07
2	Luas Lantai per kapita (m2)					
	≤19	2,41	3,52	2,49	0,78	0,63
	20 - 49	39,5	33,2	34,56	38,12	35,83
	50 - 99	45,43	49,81	45,51	48,76	54,02
	100 - 149	11,31	10,33	14,06	10,11	7,75
	150 +	1,34	3,13	3,38	2,24	1,77
3	Jenis Atap					
	Seng	96,83	99,2	97,6	98,61	97,22
	Genteng	0,47	0	1,55	0,86	1,17
	Jerami/ Ijuk	2,70	0,8	0,63	0,18	0,23
	Lainnya	-	-	0,22	0,35	1,38
4	Dinding Terluas					
	Tembok	67,76	73,20	75,67	70,41	77,48
	Plesteran anyaman bambu	0	1,28	3,34	3,90	4,42
	Kayu	8,37	8,20	5,62	4,54	2,85
	Anyaman Bambu; Bambu	23,09	16,03	11,39	17,28	12,03
	Lainnya	0,78	1,29	3,98	3,87	3,22
5	Akses Hunian Layak (Rumah Layak Huni)	-	-	56,05	52,84	58,78
6	Status Penguasaan Tempat Tinggal					
	Milik Sendiri	90,76	87,76	92,13	92,52	75,61
	Kontrak/Sewa	2,37	5,64	2,72	1,29	0,22
	Lainnya	6,86	6,61	5,14	6,19	24,17

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025

b) Luasan Kawasan Permukiman Kumuh

kawasan permukiman kumuh merupakan permukiman yang memiliki kualitas hunian dan prasarana yang tidak layak karena berbagai faktor, seperti kepadatan tinggi, minimnya akses terhadap infrastruktur dasar dan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Hasil pendataan dan verifikasi luasan permukiman kumuh tahun 2024 di Kabupaten Alor menunjukkan bahwa masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Teluk Mutiara dengan luasan mencapai 42,49 Hektar. Kondisi ini menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Alor

c) Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan Listrik di Kabupaten Alor sesuai data yang ditampilkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor tahun 2024 pada tahun 2022 jumlah pelanggan Listrik sebanyak 32.642, meningkat menjadi 51.113 pelanggan pada tahun 2023. Sementara rumah tangga menurut sumber penerangan tahun 2020 didominasi oleh sumber listrik PLN sebesar 70,23 persen



atau meningkat 4,28 persen dari kondisi tahun 2018 sebesar 65,95 persen. Gambaran rumah tangga menurut sumber penerangan tahun 2018 dan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 73 Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2020 - 2024

No	Jenis Penerangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024*
1	Listrik PLN	78,26	80,99	90,15	96,45	96,47
2	Listrik Bukan PLN	14,36	12,41	10,8	1,50	1,66
3	Bukan Listrik	7,38	6,6	2,26	2,05	1,87
4	Rasio Elektrifikasi	92,62	93,40	97,74	98,06	98,13

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2025.

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2020 ke 2024 menjadi 98,13 persen. Peningkatan rasio elektrifikasi ini disebabkan karena adanya peningkatan dan perluasan jaringan PLN yang menjangkau wilayah terpencil di kabupaten Alor. Selain itu juga terdapat pemanfaatan listrik bukan dari jaringan PLN berupa PLTMH dan PLTS yang diinisiasi oleh pemerintah desa.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten Alor, langkah-langkah kebijakan akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia, termasuk pemanfaatan potensi panas bumi, potensi sumber air dan potensi surya sebagai sumber energi alternatif.

5) Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan tanggap terhadap berbagai bentuk gangguan dan ancaman, Pemerintah Kabupaten Alor terus memperkuat implementasi urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Data tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian layanan dasar Trantibum berada pada tingkat yang relatif tinggi secara kuantitatif, namun masih menyisakan tantangan di sisi kualitas layanan dan pemerataan distribusi. Secara keseluruhan, Indeks Capaian SPM Trantibum Kabupaten Alor mencapai angka 89,37, mencerminkan kinerja pelayanan yang solid dalam aspek pelaksanaan teknis, namun tetap memerlukan optimalisasi pada sisi mutu dan dampak layanan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat sebanyak 734 kasus tindak kejahatan terjadi di wilayah tahun 2023. Jumlah tersebut menempatkan Alor sebagai kabupaten dengan jumlah tindak kejahatan terbanyak ketiga di Nusa Tenggara Timur, setelah Kota Kupang dan Timor Tengah Selatan. Tingginya angka kriminalitas di Alor juga tercermin dari crime rate yang mencapai 331 kasus per 100.000 penduduk, menjadikannya daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di NTT. Angka ini mengindikasikan bahwa risiko penduduk Alor menjadi korban tindak kejahatan jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi NTT. Intensitas terjadinya tindak kriminal relatif tinggi di kabupaten Alor. Data crime clock menunjukkan bahwa rata-rata satu tindak kejahatan terjadi setiap sekitar 43 menit. Frekuensi kejadian yang cukup tinggi ini menjadi indikator penting bagi perlunya peningkatan pengawasan dan kehadiran aparat di tengah masyarakat.

Tingkat penyelesaian kasus atau *clearance rate* di kabupaten Alor mencapai 68,80 persen, termasuk dalam kategori tinggi dibanding banyak kabupaten/kota lain di provinsi NTT. Hal ini menunjukkan komitmen aparat dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan menangani kasus-kasus yang terjadi. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi di Kabupaten Alor berada dalam kondisi yang relatif baik. Tidak seperti banyak lapas lain di NTT yang mengalami kelebihan kapasitas, lapas di Kalabahi beroperasi dalam kapasitas yang masih terkendali, sehingga memungkinkan terwujudnya suasana pembinaan yang lebih manusiawi dan tertib.

Secara keseluruhan, kondisi Trantibum di Kabupaten Alor masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan yang kerap terjadi. Upaya peningkatan edukasi hukum, patroli keamanan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan akan sangat krusial demi menciptakan situasi yang lebih kondusif dan aman bagi seluruh warga Alor.

6) Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui dukungan dana dan penyediaan sarana prasarana baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta. Dukungan pemerintah pusat dalam rangka



meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Jumlah penerima dan total anggaran PKH dalam lima tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 74 Jumlah Penerima dan Realisasi Program PKH Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah KPM	Realisasi (Rp)
1	2020	16.321	73.358.481.000
2	2021	16.015	14.212.875.000
3	2022	17.271	58.268.500.000
4	2023	27.631	91.043.980.000
5	2024	27.631	182.087.976.000

Sumber: Dinas Sosial Kab. Alor, 2024

Data pada Tabel menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang fluktuatif terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan realisasi pendanaan. Sejak tahun 2021 hingga 2024 realisasi pendanaan terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan jumlah tahun 2024 dengan tahun 2020, terjadi peningkatan KPM sebesar 11.310 keluarga dan peningkatan anggaran sebesar Rp.108.729.495.000. Pendanaan PKH bagi keluarga miskin diperuntukkan bagi beasiswa anak, kesehatan ibu menyusui dan sejumlah kebutuhan prioritas keluarga lainnya.

Dalam penanganan kesejahteraan sosial, telah terlibat sejumlah pihak swasta antara lain membantu pemerintah dengan penyediaan panti asuhan. Data jumlah dan penghuni panti asuhan pada tabel berikut.

Tabel 2 75 Jumlah Panti dan Penghuni Panti Asuhan Tahun 2020-2023

No	Nama Panti Asuhan	2020			2021			2022			2023		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Amal Ikhlas	29	31	60	23	16	39	23	16	39	22	14	36
2	Damian	21	13	34	15	5	20	15	5	20	21	13	34
3	Tas Sion	23	17	40	21	14	35	21	14	35	30	14	44
4	Maria Malys	5	3	8	-	-	-				5	3	8
5	Cacat Sikhem	-	15	15	-	-	-					15	15
6	An'Nur	26	-	26	30	-	30	30			27		27
7	Rahel	11	8	19	-	-	-				11	8	29
8	Bungabali	12	10	22	-	-	-				12	10	22
9	Arrahman	2	28	30	3	26	29	29				22	22
10	SDLB										11	9	20
Total		129	125	254	92	61	153	92	61	153	139	108	247

Sumber: Dinas Sosial Kab. Alor, 2024

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penghuni 10 panti asuhan di Kabupaten Alor tahun 2023 lebih banyak didominasi oleh laki-laki yakni 139 orang atau 56,27 persen dari total jumlah



penghuni panti asuhan.

Hubungan sosial kemasyarakatan juga berkaitan dengan jumlah penduduk dengan agama yang dianut dan sebaran tempat peribadatan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Alor memeluk agama kristen protestan, kemudian disusul islam, kristen katolik dan Hindu. Sebaran sarana peribadatan di Kabupaten Alor mengikuti jumlah pemeluk agama pada setiap kecamatan sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 76 Jumlah Sarana Peribadatan Penduduk di Kabupaten Alor Tahun 2024

No	Kecamatan	Masjid, Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Jumlah Tempat Ibadah
1	Pantar	13	11	3	-	-	27
2	Pantar Barat	11	6	-	-	-	17
3	Pantar Timur	8	21	-	-	-	29
4	Pantar Barat Laut	4	7	-	-	-	11
4	Pantar Tengah	2	19	-	-	-	21
6	Alor Barat Daya	12	67	5	-	-	84
7	Mataru	-	29	-	-	-	29
8	Alor Selatan	-	67	2	-	-	69
9	Alor Timur	-	44	-	-	-	44
10	Alor Timur Laut	-	43	3	-	-	46
11	Pureman	-	32	-	-	-	32
12	Teluk Mutiara	22	63	2	1	-	88
13	Kabola	4	38	1	-	-	43
14	Alor Barat Laut	30	27	-	-	-	57
15	Alor Tengah Utara	2	70	6	-	-	78
16	Lembur	-	18	1	-	-	19
17	Pulau Pura	4	9	-	-	-	13
18	Abad Selatan	2	11	-	-	-	13
	Jumlah	114	582	23	1	-	720

Sumber: BPS Kab. Alor, 2024

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang hidup secara terpencar, terisolasi dan memiliki keterbatasan terhadap akses pelayanan dasar serta pembangunan sosial ekonomi. Keberadaan KAT lebih dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi yang membuat mereka sulit dijangkau oleh sistem pelayanan publik normal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui berbagai program pemberdayaan berupaya untuk meningkatkan taraf hidup KAT secara berkelanjutan untuk menciptakan kehidupan mereka yang mandiri, layak dan terintegrasi dengan masyarakat umum tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Kondisi KAT di Kabupaten Alor tahun 2020 sampai 2024 sebagaimana termuat dalam tabel berikut.



Tabel 2 77 Data Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

No	Lokasi Komunikasi Adat Terpencil (KAT)			Tahun Pemberdayaan
	Kecamatan	Desa	KK	
1.	Lembur	Tuleng	100	1975
2.	Abad Selatan	Tribur: Buraga/Bukbur	80	1993
3.	Alor Timur	Tanglapui Timur : Kaipera	50	1999
4.	Alor Timur	Tanglapui : Lantoka	50	2000
5.	Alor Timur	Tanglapui Timur	50	2003
6.	Alor Timur	Kolana Utara : Akubala	50	2003
7.	ABAD	Probur : Amaklat	50	2003
8.	Mataru	Mataru Utara	66	2009
9.	Alor Timur Laut	Kenarimbala : Lipang	96	2012
10	Alor Selatan	Kelaisi Barat	94	2014

Sumber: Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, 2024

2.4.4.2. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

1) **Urusan Tenaga Kerja**

Pembangunan nasional dan daerah sangat dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja yang didukung oleh kualitas dan besarnya jumlah angkatan kerja. Pembangunan ketenagakerjaan perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Angkatan kerja pada dasarnya menunjuk pada kelompok penduduk usia 15 tahun atau lebih yang berada pada pangsa pasar kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Secara sederhana, angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja atau memiliki pekerjaan maupun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah angkatan kerja mengalami flukuasi dalam empat tahun terakhir. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 berjumlah 111.680 orang, kemudian menurun menjadi 107.596 orang pada tahun 2021 dan terus bergerak naik pada tahun 2023 menjadi 123.364 orang.

Data angkatan kerja menurut jenis pekerjaan utama di Kabupaten Alor terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2 78 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Status Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	10.603	9.752	20.355	10.603	9.752	20.355	15.659	14.951	30.610
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	17.652	8.067	25.719	17.652	8.067	25.719	17.523	13.862	31.385



Status Pekerjaan Utama	2021			2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	1.546	319	1.865	1.546	319	1.865	415	222	637
Buruh / Karyawan / Pegawai	15.785	12.929	28.714	15.785	12.929	28.714	17.628	10.554	28.182
Pekerja Bebas	2.162	380	2.542	2.162	380	2.542	2.154	-	2.154
Pekerja Keluarga / Tidak dibayar	6.564	19.055	25.619	6.564	19.055	25.619	6.874	20.074	26.948
Total	54.312	50.502	104.814	54.312	50.502	104.814	60.253	59.663	119.916

Sumber: BPS Kabupaten Alor, 2025

Data tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk menurut status pekerjaan utama mengalami fluktuatif dalam tiga tahun terakhir pada setiap status pekerjaan utama. Secara umum terdapat empat Status pekerjaan utama yang dominan di Kabupaten Alor yaitu berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, buruh atau karyawan atau pegawai, kemudian berusaha sendiri dan pekerja keluarga atau tidak dibayar.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kebijakan pembangunan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, peningkatan kualitas dan produktifitas perempuan, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir antara lain meningkatkan kesempatan keikutsertaan perempuan di bidang politik serta pembentukan lembaga pemerhati perempuan seperti Forkom P2HP, P2TP2A, forum anak, pembentukan rumah aman, fasilitasi Gabungan Organisasi Perempuan. Dukungan terhadap lembaga-lembaga tersebut antara lain penyediaan fasilitas tambahan untuk Forkom P2TP2A, forum anak dalam bentuk sekretariat untuk aktifitas pelayanan, serta membangun jaringan kerjasama dengan pihak kepolisian dan lembaga-lembaga agama untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kiprah perempuan pada dunia birokrasi pemerintahan daerah menunjukkan angka yang cukup baik. Dari sejumlah jabatan daerah terdapat 5 orang perempuan yang menduduki jabatan jabatan Eselon II dan Eselon IIIa strategis atau mencapai 13,16 persen dari total 38 jabatan Eselon II



dan Eselon IIIa strategis.

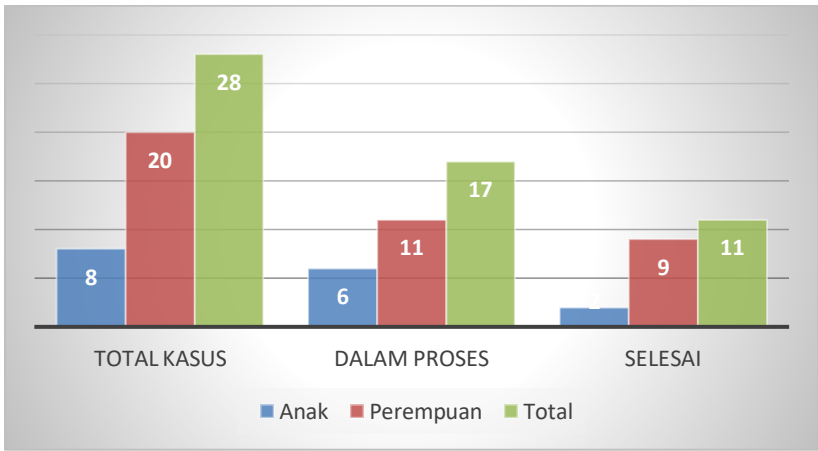
Berbagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus dilakukan Pemerintah Daerah, namun dalam empat tahun terakhir masih ditemukan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor. Data korban kekerasan yang dialami perempuan dan anak sebagaimana terangkum pada tabel berikut.

Tabel 2 79 Jenis dan Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Jenis Kekerasan										
No	Tahun	Obyek	Penel antar an	Peme rkosa an	Pencabulan / Pelecehan Sex	Fisik / KDR T	Pembu nuhan	Perampasan Hak Asuh Anak	Lain- lain	Total
1	2020	Anak	7	6	38	7	0	0	0	58
		Perempuan	6	2	4	8	0	0	0	20
		Jumlah	13	8	42	15	0	0	0	78
2	2021	Anak	1	21	7	13	2	0	1	45
		Perempuan	2	3	5	37	0	0	0	47
		Jumlah	3	24	12	50	2	0	1	92
3	2022	Anak	0	13	0	2	0	0	8	23
		Perempuan	7	1	2	3	0	0	1	14
		Jumlah	7	14	2	5	0	0	9	37
4	2023	Anak	0	5	9	1	0	1	4	20
		Perempuan	1	0	5	2	0	0	2	10
		Jumlah	1	5	14	3	0	1	6	30
5	2024	Anak	0	0	3	3	0	1	1	8
		Perempuan	1	0	1	4	0	1	13	20
		Jumlah	1	0	4	7	0	2	14	28

Sumber: Dinas P3A Kab. Alor, 2024

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah korban kekerasan yakni pada tahun 2020 jumlah kasus yang terjadi 118 menjadi 91 kasus pada tahun 2022. Untuk tahun 2024, dari total 28 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengananannya dilakukan 100 persen sesuai tampilan grafik berikut.



Sumber: DP3A Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 23 Data Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024



Secara umum jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tergolong tinggi sehingga kebijakan perlindungan anak dan perempuan tidak hanya sebatas pada penanganan pasca kejadian tetapi juga dibutuhkan upaya pencegahan sekaligus peningkatan kapasitas diri termasuk kesadaran dalam melaporkan segala tindak kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Alor perlu diterapkan dengan pendekatan GEDSI (*Gender Equality, Disability dan Social Inclusion*) yakni kebijakan dalam pelaksana pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan. Penerapan Kebijakan ini dapat mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, marginalisasi, dan eksklusi berbasis jenis kelamin, gender, disabilitas, dan identitas sosial lainnya (misalnya umur, suku, agama/keyakinan, ras, antar golongan, dan lokasi geografis) agar semua orang dapat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan, memperoleh akses dan kontrol atas sumber daya dan layanan publik, serta manfaat pembangunan secara adil, setara, inklusif dan berkelanjutan.

3) Urusan Pangan

Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati adalah pembangunan ketahanan pangan yang tidak saja berorientasi pada penguatan struktur pangan, tetapi lebih dari itu diupayakan terciptanya kedaulatan pangan daerah untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga penduduk yang sangat tinggi. Ketersediaan pangan daerah dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 80 Ketersediaan Pangan Untuk Konsumsi Perkapita/Hari

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Energi (K.Kal)					
	· Hewani	133,90	127,22	83,93	101,01	185,61
	· Nabati	2.380,00	2.979,40	2.823,38	2.384,26	2.235,34
	· Jumlah	2.513,89	3.106,62	2.907,32	2.485,27	2.420,95
2	Protein (gram)					
	· Hewani	19,13	18,15	10,01	10,93	23,24
	· Nabati	49,34	63,26	65,57	55,58	40,16
	· Jumlah	68,48	81.41	75.57	66.52	63,40
3	Lemak (gram)					
	· Hewani	5,86	5,89	4,88	6,35	9,18
	· Nabati	21,76	24,58	29,16	22,71	25,58
	· Jumlah	27,63	30,47	34,04	29,05	34,76

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Alor, 2025



Dari data tabel di atas menunjukkan tingkat konsumsi pangan perkapita per hari penduduk kabupaten Alor fluktuatif dari tahun ke tahun sehingga ketersediaan pangan utama perlu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat. Sedangkan peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Alor perlu difokuskan pada peningkatan produksi pangan berbasis lokal, diversifikasi sumber pangan, serta penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pangan yang lebih beragam. Selain itu, diperlukan kebijakan adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian guna meningkatkan resiliensi terhadap ancaman ketidakpastian iklim yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi pangan.

4) Urusan Pertanahan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Alor menunjukkan tingginya kebutuhan ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pemerintah, diantaranya pembangunan Bandar Udara Mali dan Bandar Udara Kabil, Pembangunan Pos Lintas Batas Negara, Tempat Pemakaman Umum, dan infrastruktur lainnya. Di samping itu kebutuhan masyarakat untuk sertifikasi kepemilikan lahan pribadi masih menjadi persoalan yang terus diupayakan penyelesaiannya.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan Lingkungan Hidup merupakan isu penting yang harus mendasari semua perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup bidang lingkungan hidup yang dianalisa sebagaimana uraian berikut.

a) Kawasan Kritis

Berdasarkan RTRW Kabupaten Alor, terdapat sejumlah kawasan kritis yang membutuhkan penanganan khusus guna meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan daerah. Luas Kawasan hutan 104.334 hektar, terdiri dari: Hutan Lindung 59.419,22 hektar. Hutan Produksi 22.938,81 hektar. Hutan Produksi Terbatas 21.976,78 hektar. Dari total luasan kawasan



hutan dimaksud, besaran lahan kritis mencapai 64.570 hektar yang berada di dalam kawasan hutan mencapai 31.494 hektar sedangkan 33.076 hektar berada di luar kawasan hutan.

b) Daerah Aliran Sungai (DAS)

DAS merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi dimana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Kegunaan DAS adalah menerima, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. Berdasarkan pengertian dan sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, maka wilayah sungai di Kabupaten Alor termasuk dalam wilayah sungai Flores Timur Kepulauan-Lembata-Alor dengan 148 DAS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Alor. Beberapa DAS di Kabupaten Alor perlu mendapat perhatian dalam hal kebijakan perlindungan dan konservasi DAS sebagai upaya mengurangi potensi banjir pada musim hujan sekaligus kekeringan pada musim kemarau. DAS tersebut antara lain DAS Lembur, DAS Kabola, DAS Kolana, DAS Kabir dan DAS Kikilai.

6) **Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Pengakuan dan perlindungan negara terhadap status kependudukan warga negara dilakukan dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan dimaksud merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen serta data kependudukan melalui pendaftaran pada pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemerintah Kabupaten Alor terus melakukan pelayanan penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti identitas diri setiap penduduk berupa KTPel, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Mutasi Penduduk, kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian serta kutipan akta perkawinan dan perceraian. Data kepemilikan KTP elektronik penduduk Kabupaten Alor ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2 81 Penduduk Ber-KTP di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	157.252	152.080	147.621	157.597	158.058
2	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-el	131.687	138.583	137.088	146.364	156.536
	Persentase Kepemilikan KTP-el (persen)	83,74	91,13	92.86	92,87	99,04

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Alor, 2025



Data pada tabel menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki e-KTP sebagai tanda bukti diri atau identitas. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, terjadi juga peningkatan kepemilikan KTP elektronik. Kondisi pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan persentase kepemilikan e-KTP sebesar 18,27 persen dari tahun 2020. Untuk administrasi kependudukan lainnya seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta cerai dan mutasi penduduk sebagaimana termuat pada tabel berikut.

Tabel 2 82 Penduduk Yang Memiliki Administrasi Kependudukan di Kabupaten Alor

Jenis Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang Memproses				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akta Kelahiran	68.096	112.939	69.526	71.106	128.381
Akta Kematian	1.295	893	1.199	3.989	10.615
Akta Perkawinan	26.675	29.945	62.146	66.352	83.951
Akta Cerai	183	257	364	441	509
Mutasi Penduduk					
- Datang	1.143	1.676	4.256	38.875	3.713
- Pindah	1.494	1.704	4.924	4.984	4.708

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Alor, 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Alor menunjukkan perkembangan yang signifikan. Permintaan akta kelahiran menunjukkan tren yang fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan. Dari 68.096 permohonan pada tahun 2020, terjadi lonjakan menjadi 112.939 pada 2021, dan kemudian menurun di dua tahun berikutnya, sebelum kembali meningkat menjadi 128.381 pada tahun 2024. Kenaikan ini menandakan keberhasilan intervensi kebijakan yang mendorong legalisasi identitas anak, baik melalui layanan proaktif di fasilitas kesehatan maupun inovasi layanan digital.

Sementara itu, permohonan akta kematian meningkat drastis dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2021 menjadi 893 permohonan, kemudian meningkat menjadi 3.989 di tahun 2022 dan mencapai 10.615 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pencatatan kematian. Keberhasilan ini memperkuat validitas data penduduk, yang sangat penting dalam penghitungan proyeksi demografis serta evaluasi program-program jaminan sosial dan pelayanan publik berbasis kuota.

Tren yang serupa terlihat pada akta perkawinan dan akta cerai. Jumlah permohonan akta perkawinan mengalami pertumbuhan dari 26.675 pada tahun 2020 menjadi 83.951 pada tahun 2024.



Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan peristiwa perkawinan sebagai dasar keabsahan hukum dan administrasi keluarga. Di sisi lain, permohonan akta cerai juga meningkat secara bertahap, dari 183 pada 2020 menjadi 509 pada 2024. Meskipun jumlahnya relatif kecil, peningkatan ini perlu dicermati sebagai refleksi dari perubahan struktur sosial dan perlunya penguatan layanan konseling serta dukungan hukum bagi keluarga yang rentan.

Mutasi penduduk juga mencerminkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis. Jumlah penduduk datang meningkat signifikan dari 1.143 pada 2020 menjadi 38.875 pada 2023, yang salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu pemulihan ekonomi pasca-pandemi, urbanisasi, serta peningkatan daya tarik wilayah tertentu. Sebaliknya, jumlah penduduk yang pindah turut meningkat, dari 1.494 pada 2020 menjadi 4.984 pada 2023. Mobilitas ini memberikan sinyal penting bagi penyusunan kebijakan tata ruang dan pemerataan pelayanan publik, terutama di wilayah tujuan migrasi yang berpotensi mengalami tekanan infrastruktur dan sosial.

Dengan memperhatikan tren ini, dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai layanan dasar, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adaptif.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pembangunan masyarakat dan desa dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan peran dan akses masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selama tahun 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Alor telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, termasuk pelatihan bagi perangkat desa dan bendahara dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan rendahnya kemampuan manajerial kelembagaan dan administrasi desa, serta belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi fokus dalam meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Namun, banyak



BUMDes di Kabupaten Alor masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, manajemen yang lemah, dan kurangnya akses pasar. Upaya penguatan BUMDes memerlukan intervensi terpadu dari pemerintah daerah melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi perizinan, serta integrasi dengan rantai pasok lokal dan regional. Perkembangan pengelolaan BUMDes pada 18 kecamatan di Kabupaten Alor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 83 Data BUMDes Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak	Aktif	Tidak
1	Teluk Mutiara	3	3	4	2	3	3	2	4	4	2
2	Alor Barat Laut	6	10	4	12	6	11	8	10	9	9
3	Alor Timur	5	2	2	5	2	6	4	4	5	4
4	Alor Selatan	2	9	2	13	0	13	3	10	1	12
5	Alor Tengah Utara	2	12	2	12	3	11	4	10	5	9
6	Alor Barat Daya	5	6	5	6	4	7	4	8	6	6
7	Alor Timur Laut	1	6	2	5	3	4	4	4	6	2
8	Kabola	3	1	2	2	3	1	0	4	2	2
9	Lembur	2	4	1	5	1	5	1	5	1	5
10	Mataru	1	5	3	3	3	3	4	2	4	3
11	Pantar	2	7	2	7	2	7	3	6	2	8
12	Pantar Tengah	1	5	0	6	0	7	0	7	1	6
13	Pantar Tengah	0	9	1	9	0	9	1	9	0	10
14	Pantar Barat Laut	3	2	0	5	0	5	0	5	0	7
15	Pantar Timur	1	10	1	10	1	10	1	10	3	8
16	Pureman	1	3	2	2	0	4	2	2	2	2
17	Pulau Pura	1	3	2	2	0	4	0	4	2	3
18	ABAD Selatan	2	2	0	4	0	6	1	6	0	7
Total		41	99	35	110	31	116	42	110	53	105

Sumber: BPMPD Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel 2.78 di atas menggambarkan bahwa selama tahun 2020–2024 jumlah BUMDes aktif di Kabupaten Alor sempat mengalami penurunan terutama pada tahun 2022 dengan hanya 32 unit aktif dari total 149 BUMDes. Kondisi ini mulai membaik sejak tahun 2023 dan berkembang hingga tahun 2024, dari total 158 BUMDes yang terbentuk jumlah BUMDes aktif mencapai 53 unit. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pengelolaan, pendampingan, serta dukungan kebijakan di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 66 persen BUMDes di kabupaten Alor belum beroperasi secara fungsional yang mencerminkan masih lemahnya kapasitas manajemen, keterbatasan modal, minimnya kualitas SDM, serta tidak relevannya jenis usaha terhadap potensi lokal desa.



8) **Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, khususnya di daerah-daerah dengan karakteristik kependudukan yang dinamis seperti Kabupaten Alor. Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan program KB berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup keluarga dan pencapaian indikator kesehatan masyarakat.

Pentingnya program KB tidak hanya terletak pada aspek pengendalian kelahiran, tetapi juga pada upaya membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berdaya. Melalui program KB, pasangan usia subur dapat merencanakan kehamilan secara lebih bertanggung jawab, sehingga berdampak langsung pada kesehatan ibu dan anak, serta meminimalkan risiko kematian maternal dan neonatal. Lebih jauh, keberhasilan KB juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pilar kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kemiskinan. Data jumlah peserta KB aktif kabupaten Alor dan Provinsi NTT terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2 84 Jumlah Peserta KB Aktif Perbandingan Kab. Dan NTT Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Alor					
IUD	1.125	1.103	254	400	242
MOW	713	678	310	474	432
MOP	124	113	17	16	18
Kondom	82	85	84	135	174
Implant	7.269	8.209	2.732	3.655	3.601
Suntikan	11.110	11.480	11.712	14.132	12.970
PIL	682	733	812	1.022	1.206
Total	21.105	22.401	15.921	19.834	18.643
Prov. NTT					
IUD	43.193	42.278	19.843	21.977	19.583
MOW	36.729	37.988	25.675	28.337	28.595
MOP	2.068	1.954	676	587	520
Kondom	3.613	3.727	1.468	1.886	4.267
Implant	137.671	151.348	81.808	107.811	106.589
Suntikan	234.656	226.137	162.442	202.811	186.325
PIL	37.095	34.342	26.236	26.380	31.372
Total	495.025	497.774	318.148	389.789	377.251

Sumber: BPS Alor, 2025

Data menunjukkan bahwa jumlah peserta KB aktif secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, mencerminkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program di tingkat lapangan. Pada tahun 2020, jumlah total peserta KB aktif tercatat sebanyak 21.105 orang, kemudian meningkat menjadi 22.401 orang pada tahun



2021. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 29 persen, dengan total peserta KB aktif hanya mencapai 15.921 orang.

Pada tahun 2023 jumlah peserta KB aktif meningkat menjadi 19.834, sebelum sedikit menurun kembali menjadi 18.643 pada tahun 2024. Meskipun belum kembali menyamai capaian tertinggi pada tahun 2021, tren pemulihan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan sistem pelayanan dan distribusi alat kontrasepsi oleh pemerintah daerah dan mitra pelaksana.

Dari sisi metode kontrasepsi yang digunakan, metode suntikan tetap menjadi pilihan dominan di kalangan peserta KB di Alor sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, metode suntikan digunakan oleh 14.132 peserta atau sekitar 71 persen dari total pengguna KB. Kemudian pada tahun 2024, jumlahnya menurun menjadi 12.970 peserta. Sementara penggunaan metode pil menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, dari 682 peserta pada 2020 menjadi 1.206 pada tahun 2024.

Untuk penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implant dan IUD mengalami penurunan. Peserta KB aktif yang menggunakan implant turun dari 7.269 orang pada tahun 2020 menjadi 3.601 pada tahun 2024. Begitu pula metode IUD, yang mencapai 1.125 pengguna pada tahun 2020, menjadi hanya 242 pengguna pada tahun 2024.

Penggunaan metode kontrasepsi pria, baik vasektomi (MOP) maupun kondom, masih sangat rendah dan stagnan. Jumlah peserta MOP selama lima tahun tidak pernah melebihi 20 orang per tahun, sementara pengguna kondom meskipun meningkat dari 82 pengguna pada tahun 2020 menjadi 174 pengguna pada tahun 2024, masih sangat terbatas dibandingkan metode lainnya. Hal ini menandakan bahwa beban penggunaan kontrasepsi masih sangat dominan di kalangan perempuan, dan perlu upaya lebih besar untuk mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB.

Jika dibandingkan dengan tren di tingkat Provinsi NTT, Kabupaten Alor menunjukkan pola yang serupa, terutama penurunan signifikan pada tahun 2022 dan pemulihan bertahap di tahun-tahun berikutnya. Namun, secara proporsional, capaian kabupaten Alor dalam penggunaan metode jangka panjang masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata provinsi NTT.

9) Urusan Perhubungan

Kinerja sektor transportasi di Kabupaten Alor selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan infrastruktur yang moderat dengan fluktuasi pada aspek pelayanan. Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19, namun pulih kembali pada 2022, mencerminkan responsivitas sektor transportasi terhadap dinamika sosial ekonomi.

a) Infrastruktur Perhubungan

Pembangunan perhubungan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan angkutan bagi barang dan orang. Tiga kekuatan perhubungan di Kabupaten Alor sebagai kabupaten kepulauan yaitu perhubungan darat, laut dan udara. Kondisi pembangunan perhubungan tergambar dalam beberapa indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 85 Kondisi Pembangunan Perhubungan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	162.486	141.542	165.431	125.431	128.205
2	Jumlah Terminal Darat	4	5	5	5	5
3	Jumlah Pelabuhan Laut	11	11	11	11	11
4	Jumlah Bandara Udara	1	2	2	2	2
5	Jumlah Tambatan Perahu (Pelabuhan pengumpan lokal)	76	76	76	76	76
6	Jumlah Angkutan Darat	129	134	146	148	148

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Alor 2025

Di sisi infrastruktur, terdapat peningkatan pada jumlah terminal darat dari 4 unit (2020) menjadi 5 unit sejak 2021, serta penambahan satu bandara udara yang mulai beroperasi pada tahun yang sama. Meskipun demikian, jumlah pelabuhan laut dan tambatan perahu atau pelabuhan pengumpan lokak tetap stagnan selama lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan belum adanya ekspansi signifikan pada infrastruktur transportasi laut yang seharusnya menjadi prioritas utama di daerah kepulauan seperti Alor. Pertumbuhan jumlah armada angkutan darat dari 129 unit pada tahun 2020 menjadi 148 unit pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan ketersediaan sarana transportasi lokal, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat.



b) Perhubungan Darat

Pertumbuhan kendaraan selama tahun 2020 sampai 2024 relatif meningkat dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kelancaran dan kepadatan arus lalu lintas. Untuk menjangkau wilayah perdesaan maka Pemerintah Daerah menyediakan sejumlah fasilitas kendaraan yang diperoleh dari bantuan Lementeriaan/ Lembaga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 86 Sarana dan Prasarana Transportasi Bantuan Pemerintah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Truck roda enam	-	-	-	1	-
2	Pick Up	7	10	12	-	1
3	Mini Bus	1	4	4	-	-
3	Kapal Motor	1	1	-	1	1
4	Halte Penumpang	-	2	-	1	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Alor, 2025

Jumlah sarana transportasi darat yang bersumber dari pemerintah yang sampai saat ini masih beroperasi yaitu pick up modifikasi double gardan *single* cabin 25 unit, mini bus 5 unit, Bus Sekolah 2 unit, bus armada 3 unit, truck lintas 1 unit dan pick up modifikasi cold L-300 3 unit. Perkembangan sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Alor selama tahun 2020–2024 menunjukkan pola yang tidak konsisten dan cenderung fluktuatif, dengan kecenderungan stagnasi pada beberapa jenis moda.

Secara umum, data mencerminkan bahwa pengembangan sarana-prasarana transportasi masih bersifat sporadis, belum terencana dalam kerangka pengembangan moda transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dibutuhkan perencanaan yang lebih konsisten dan berbasis kebutuhan wilayah untuk menjamin ketersediaan dan kontinuitas layanan transportasi publik serta distribusi logistik antardesa dan antarpulau.

c) Transportasi Laut

Sebagai kabupaten kepulauan, sarana pelabuhan dan tambatan perahu sangat dibutuhkan dalam pergerakan orang dan barang untuk mendukung upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 2024, Kabupaten Alor telah memiliki 2 pelabuhan umum (Pelabuhan Kalabahi dan Pelabuhan Maritaing), 3 pelabuhan perintis, 1 pelabuhan peti kemas (pelabuhan Peti kemas Moru), 3 pelabuhan penyeberangan (Pelabuhan

Penyeberangan Kalabahi, Baranusa dan Bakalang), 2 pelabuhan khusus (Pertamina dan PLTU) dan 76 tambatan perahu. Pembangunan pelabuhan dan tambatan perahu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat telah membangun sejumlah pelabuhan di pulau Pantar, seperti Dermaga Pelabuhan Laut/Penyeberangan Beang yang sampai saat ini belum dapat dioperasikan karena hambatan teknis, sehingga diharapkan pelabuhan ini dapat difungsikan pada tahun yang akan datang. Pelayanan transportasi keluar daerah Kabupaten Alor dilayani oleh armada laut dari PT. PELNI, PT. ASDP dan operator swasta, sedangkan pelayanan antar pulau dalam wilayah Kabupaten Alor dilayani oleh armada perahu motor dengan kapasitas 3 – 10 GT. Antar pulau komoditi dan barang kebutuhan hidup lainnya dilayani oleh perusahaan swasta yang melayani rute Kalabahi-Surabaya dan Kalabahi-Makassar secara rutin. Angkutan laut perahu motor yang melayani antar pulau/antar pesisir dalam wilayah Kabupaten Alor didominasi kepemilikannya oleh pribadi.

d) Transportasi Udara

Prasarana perhubungan udara di Kabupaten Alor adalah bandar udara Mali yang memiliki panjang landasan pacu 1.600 meter dan lebar 30 meter yang dapat dilandasi oleh pesawat terbang jenis ATR 72 dan Fokker 50. Pada Tahun 2024 hanya terdapat 1 maskapai penerbangan yang melayani rute Kupang-Kalabahi PP dengan frekwensi penerbangan 1 kali sehari, sehingga pada waktu tertentu harga tiket pesawat melonjak cukup tinggi yang menyulitkan masyarakat dalam menggunakan sarana transportasi udara.

Arus penumpang datang dan berangkat relatif tinggi sehingga Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sejumlah fasilitas bandara. Salah satu infrastruktur perhubungan yang berhasil dibangun adalah Bandar Udara Pantar di Kabir, Kecamatan Pantar. Bandar Udara Pantar diresmikan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2021. Bandar Udara Pantar semakin menunjukkan komitmen dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Alor terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Pantar sekaligus mendukung rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Pantar.



10) Urusan Komunikasi Dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika mencakup jangkauan pelayanan jasa telekomunikasi dan informatika. Usaha untuk meningkatkan pelayanan jasa komunikasi dilakukan melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi berupa *Base Transceiver Station* (BTS) dari 4 (empat) provider/penyedia layanan telekomunikasi yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat dan XL. Selain itu untuk mendukung penyebaran berita baik pemerintah, swasta dan masyarakat, tersedia 1 unit jaringan televisi pemerintah daerah, 1 jaringan RSPD dan 1 jaringan radio swasta. Gambaran penyediaan infrastruktur BTS sebagaimana tabel 2.83 berikut.

Tabel 2 87 Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi di Kabupaten Alor

No	Provider / sarana komunikasi	Jumlah BTS	Cakupan Wilayah
1	Telkom	4 unit	1354 satuan sambungan
2	Telkomsel	131 unit	18 Kecamatan
3	Indosat	25 unit	25 Desa di 12 Kecamatan
4	XL	6 Unit	6 Kecamatan
5	Televisi	1 unit	3 Kecamatan
6	Radio Siaran Pemerintah Daerah	1 unit	18 Kecamatan
7	Radio Swasta	1 unit	12 Kecamatan

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa layanan telekomunikasi telah menjangkau seluruh kecamatan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi termasuk dukungan terhadap sektor pendidikan melalui kemudahan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Selain itu guna meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi, melalui intervensi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah dibangun jaringan palapa ring yang menggunakan teknologi jaringan fiber optic. yang diharapkan akan mempercepat pemenuhan kebutuhan informasi dan telekomunikasi.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro memberikan kontribusi dalam perekonomian di daerah. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Alor sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2 88 Jumlah dan Jenis Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pantar	6	6	5	-	-
2	Pantar Barat	4	4	3	1	2
3	Pantar Timur	5	5	4	-	-
4	Pantar Barat Laut	7	6	6	-	-
5	Pantar Tengah	5	7	2	2	2
6	Alor Barat Daya	15	13	12	6	7
7	Mataru	3	3	2	-	-
8	Abad Selatan	-	2	2	-	-
9	Alor Selatan	6	6	6	2	2
10	Alor Timur	5	5	2	1	1
11	Alor Timur Laut	7	7	5	2	2
12	Pureman	-	-	-	-	-
13	Teluk Mutiara	92	92	79	44	48
14	Kabola	2	2	3	1	1
15	Alor Barat Laut	17	17	17	9	9
16	Alor Tengah Utara	4	4	3	-	-
17	Pulau Pura	3	3	3	-	-
18	Lembur	2	2	3	-	-
Total		183	184	157	68	74

Sumber: BPS Kab. Alor, 2025

Selama tahun 2020–2024 Kabupaten Alor mengalami penurunan drastis dan sistemik dalam jumlah koperasi aktif, dari 183 koperasi pada tahun 2020 menjadi hanya 74 koperasi pada tahun 2024, yang mencerminkan kontraksi kelembagaan ekonomi masyarakat sebesar 59,5 persen dalam lima tahun. Fenomena ini bukan semata bersifat administratif, melainkan mencerminkan pelemahan dalam keberlanjutan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas yang selama ini menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Distribusi penurunan koperasi aktif bersifat menyeluruh hampir di seluruh kecamatan, dengan beberapa wilayah bahkan menunjukkan data kosong atau tidak dilaporkan secara konsisten, seperti Pureman, Mataru, Pantar Timur dan Alor Tengah Utara. Hal ini mengindikasikan masalah struktural dalam sistem monitoring, verifikasi dan pendampingan koperasi, serta potensi disintegrasi antara data administrasi dan kondisi riil lapangan.

Kecamatan Teluk Mutiara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi koperasi terbesar, mengalami penurunan signifikan dari 92 koperasi pada tahun 2020 menjadi hanya 48 koperasi di tahun 2024. Penurunan lebih dari 47 persen di pusat ekonomi ini merefleksikan melemahnya daya saing dan adaptabilitas koperasi terhadap dinamika pasar lokal maupun kebutuhan transformasi



kelembagaan menuju koperasi modern. Tren ini mengindikasikan tidak terbangunnya ekosistem dukungan kelembagaan koperasi secara holistik, baik dari sisi kapasitas kelembagaan, tata kelola internal, maupun jaringan pembiayaan dan pasar, menjadi faktor utama penurunan eksistensi koperasi aktif.

Beberapa kecamatan, seperti Pantar Tengah, Pantar Barat, dan Alor Barat Laut, menunjukkan stabilitas angka koperasi aktif dalam dua tahun terakhir atau mengalami sedikit pemulihan. Meskipun skalanya kecil, tren ini dapat menjadi contoh untuk mengembangkan model revitalisasi koperasi berbasis lokalitas dan potensi sektoral spesifik.

Penurunan jumlah koperasi aktif yang lebih tinggi di wilayah pesisir dan kepulauan dibandingkan dengan wilayah pusat mengindikasikan adanya ketimpangan geospasial dalam penguatan kelembagaan ekonomi lokal.

Untuk mendukung perekonomian daerah, pemerintah telah membentuk dua perusahaan daerah yakni Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (PDMH) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nusa Kenari. Keberadaan BUMD pada sebuah daerah dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk deviden maupun pajak. Secara makro BUMD berperan terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

12) Urusan Penanaman Modal

Sebagai daerah berkembang, Kabupaten Alor mempunyai iklim investasi yang cukup kondusif. Penanaman Modal merupakan kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan baik oleh penanam modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Data nilai investasi di Kabupaten Alor Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.85 berikut.

Tabel 2 89 Nilai Investasi di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Investasi (Rp)		Pertumbuhan (persen)
2020	PMDN	8.535.709.534	
	PMA	46.979.220.357	
	Total	55.514.929.891	
2021	PMDN	59.437.014.767	5,96
	PMA	623.977.272.253	12,28
	Total	683.414.287.020	11,31
2022	PMDN	23.171.585.675	(0,61)
	PMA	79.164.522.939	(0,87)



Tahun	Nilai Investasi (Rp)		Pertumbuhan (persen)
2023	Total	102.336.108.614	(0,85)
	PMDN	12.131.515.319	(0,48)
	PMA	160.711.792.370	1,03
	Total	172.843.307.689	0,69
2024	PMDN	395.895.977.929	31,63
	PMA	118.926.727.802	(0,26)
	Total	514.822.705.731	1,98

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kab. Alor. 2025

Data pada tabel diatas menggambarkan nilai investasi yang diperoleh dari PMA maupun PMDN terjadi fluakuatif selama lima tahun terakhir, sekaligus menunjukkan juga bahwa investasi tersebut tentunya memberikan kontribusi pada sektor riil masyarakat untuk pembangunan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat.

13) **Urusan Kepemudaan Dan Olahraga**

Organisasi pemuda yang berkembang di Kabupaten Alor dan memberikan kontribusi dalam mendukung program pembangunan di daerah yang terwadahi dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meliputi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Pancasila, GP Ansor dan sejumlah organisasi lainnya.

Pada sebagian besar desa/kelurahan telah terbentuk Karang Taruna sebagai wadah yang tidak saja bergerak di bidang kepemudaan tetapi juga membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dalam bidang keolahragaan dapat dilihat dari perkembangan jumlah klub olah raga dan sarana prasarana olah raga. Klub olah raga yang ada di kabupaten alor pada tahun 2024 sejumlah 154 klub, antara lain klub sepak bola, bola voli, tinju, atletik dan olah raga bela diri. Jumlah klub tersebut berkembang secara baik dan dibina oleh pengurus cabang olahraga masing-masing dalam wadah KONI Kabupaten Alor.

Beberapa cabang olahraga potensial berprestasi yang dikembangkan di kabupaten Alor yaitu bola voly dengan jumlah atlet binaan 178 orang, bulu tangkis 26 orang, tenis lapangan 26 orang, karate 88 orang, pencak silat 290 orang, kempo 96 orang dan tinju 86 orang. Secara umum terdapat 780 atlet binaan dari tujuh cabang olahraga



unggulan di kabupaten Alor. Dari jumlah tersebut terdapat 180 atlet yang berprestasi di tingkat kabupaten dan provinsi.

14) Urusan Statistik

Bidang Statistik memiliki nilai strategis dalam penyiapan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor dalam penyiapan data statistik sektoral yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. Data dukung statistik sektoral dari perangkat daerah perlu ditingkatkan keakuratan dan keandalannya sehingga menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan. Data statistik yang dipublikasikan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait tanpa mengurangi esensi dari publikasi tersebut.

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan statistik di Daerah dapat diperoleh melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik serta untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Keluaran dari EPSS adalah nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Nilai Indeks Pembangunan Statistik Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2024 adalah 2,05 dengan predikat “Cukup”. Secara rinci, Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan nilai Indeks Domain Kabupaten Alor disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2 90 Nilai Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Alor Tahun 2024

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Indeks Hasil Penilaian
Prinsip Satu Data Indonesia	28%	2,60	2,43	2,00
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,12
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,26
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,94
Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,89
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,05

Sumber: BPS, 2025



15) Urusan Persandian

Pergerakan tata kelola pemerintahan menuju era digital, memunculkan inovasi-inovasi baru. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi dan informasi publik dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respons dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*), dan fungsi pemerintahan lainnya. Beralihnya tata kelola pemerintah menuju era digital, berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Karenanya, perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik.

Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Terhadap kondisi ini maka menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Alor untuk mempersiapkan SDM persandian yang handal untuk keamanan dan kenyamanan dalam penerapan aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah.

16) Urusan Kebudayaan

Selama tahun 2020–2024 Pemerintah Kabupaten Alor telah menyelenggarakan urusan kebudayaan melalui berbagai program strategis yang bertujuan untuk pelestarian, revitalisasi, dan pemajuan budaya lokal. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pelibatan masyarakat, dan integrasi dengan sektor pariwisata, Kabupaten Alor berhasil mengangkat dan mempromosikan kekayaan budaya yang dimilikinya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya. Pada tahun 2021, Festival Cerita Rakyat Alor (FCRA) digelar untuk pertama kalinya dengan tujuan melestarikan sejarah, budaya, dan bahasa daerah. Kegiatan ini berlangsung selama hampir dua



bulan dan mencakup seminar nasional, workshop penulisan cerita rakyat, lomba penulisan cerita rakyat, serta pentas seni. FCRA bertujuan untuk mendokumentasikan tradisi lisan dan mendorong literasi budaya masyarakat Alor.

Pada bulan Juni tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Alor meluncurkan program Visit Alor 2023 yang mengintegrasikan berbagai festival budaya dalam satu rangkaian kegiatan. Festival-festival yang diselenggarakan meliputi Festival Tenun Ikat, Festival Al-Qur'an Tua, Festival Dugong, Festival Paralayang, Festival Olang Mangsari, dan Festival Balai Hatel. Program ini bertujuan untuk memudahkan wisatawan dalam menikmati berbagai atraksi budaya Alor dalam satu kunjungan. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Alor bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaksanakan program Sekolah Lapang Kearifan Lokal (SLKL). Program ini berhasil mengidentifikasi dan mendokumentasikan 582 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Kegiatan ini melibatkan 20 pandu budaya dari lima pulau di Alor dan dilaksanakan di delapan desa. Sebagai bagian dari program SLKL, Festival Melang Bila diselenggarakan pada September 2024 di Kalabahi. Festival ini menampilkan berbagai hasil karya pangan lokal olahan masyarakat Alor, seperti ubi-ubian, sayur-sayuran, dan sambal, yang telah dibina dalam program SLKL. Kegiatan ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang hampir punah akibat kemajuan teknologi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pelestarian naskah kuno dan akuisisi arsip di Kecamatan Pantar Barat pada Oktober 2024. Kegiatan ini melibatkan pimpinan sekolah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya naskah kuno sebagai bagian dari warisan budaya dan sejarah Alor. Pada bulan November tahun 2024, Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor menyelenggarakan pelatihan manajemen pengelolaan lembaga adat desa yang diikuti oleh pengurus lembaga adat dari 18 kecamatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam mengelola lembaga adat secara profesional dan efektif,



sehingga dapat mendukung program pembangunan desa berbasis budaya lokal.

17) Urusan Perpustakaan

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, pemerintah melaksanakan fungsi pembinaan perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Alor terlihat dalam tabel 2.86 berikut.

Tabel 2 91 Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Sekolah	435	435	435	435	435
2	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1
3	Perpustakaan Kecamatan	3	3	4	4	4
4	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	2.671	5.422	4.480	6.680	6.694
5	Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah (eks)	19.185	19.659	20.891	20.891	21.104
6	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	4	4	0	0	0
7	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baik persen)	70	70	72,30	84,61	84,61
8	SDM Pengelola Kearsipan (orang)	15	15	10	10	10

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2025

Tabel 2.86 diatas menunjukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Alor belum memiliki perpustakaan kecamatan yang terpusat di kantor kecamatan, sedangkan untuk perpustakaan sekolah data menunjukkan seluruh tingkatan pendidikan telah memiliki perpustakaan sekolah. Demikian halnya dengan ketersediaan koleksi buku pada perpustakaan daerah yang terus mengalami peningkatan. Melalui ketersediaan koleksi buku ini diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat untuk membaca.

18) Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen atau arsip pada unit kerja. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan, penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip.

Selama periode 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Alor telah menunjukkan komitmen dalam urusan kearsipan melalui berbagai program pelestarian naskah kuno, penguatan infrastruktur dan SDM, serta integrasi kearsipan dalam pembangunan daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal pengembangan kapasitas SDM dan



perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan pelestarian warisan budaya tertulis yang lebih efektif dan menyeluruh.

Pengelolaan arsip yang baik menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Alor dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Alor dari CC menjadi B pada tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan kinerja dan dokumentasi pemerintahan.

2.4.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah yang memiliki prospek bagus dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Jenis usaha yang dikembangkan meliputi perikanan tangkap dengan strategi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan usaha berorientasi pada kekuatan pasar dan *consumer oriented* melalui sistem keterkaitan produsen dan konsumen; dan perikanan budidaya yang meliputi budidaya tambak, budidaya kolam, budidaya laut dengan keramba dan mina padi.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Alor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 92 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Layang	3.641	3.017	3.502	3.703	3.759
2	Kakap	8.130	445	781	803	758
3	Tongkol	811	217,30	792	811	690
4	Cakalang	810,6	830,19	878	893	852
5	Tuna	572	229,57	572	709	780
6	Kerapu	465,686	300,53	389	409	365
Total Tangkapan		14.430	5.040	6.914	7.328	7.204

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Alor, 2025

Data pada tabel menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Kabupaten Alor tahun 2020-2024 fluktuatif. Produksi tertinggi pada tahun 2020 pada jenis ikan kakap yang mencapai 56,34 persen dari total produksi perikanan tangkap. Sedangkan yang produksi paling kecil adalah jenis ikan tuna yang mencapai 3,96 persen dari total produksi perikanan tangkap.

Wilayah perairan yang luas memberikan prospek cerah bagi perikanan tangkap dan budidaya. Komoditas utama seperti ikan, rumput laut, dan kerang mutiara memiliki potensi ekonomi besar. Namun,



penguatan sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta hilirisasi produk perlu menjadi fokus pengembangan. Produksi perikanan yang cenderung berkurang disebabkan juga karena armada tangkap yang digunakan nelayan di kabupaten Alor berukuran kurang dari 5 GT. Untuk perikanan budidaya tahun 2020-2024 termuat pada tabel berikut.

Tabel 2 93 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Alor

No	Jenis Komoditas	Produksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumput Laut Kering (ton)	827,191	1.730	425,651	521,013	591,02
2	Bandeng (ton)	0,5	1,5	0,9	0,67	-
3	Kulit kerang mutiara (kg)	27.421	55.084	40.489	58.155	111.758
4	Mutiara biji (gram)	572,685	335,86	-	-	409,252
5	Garam (ton)	8	5,42	2,45	-	10

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Alor, 2025

Perkembangan perikanan budidaya di Kabupaten Alor sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa produksi rumput laut kering mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Untuk produksi garam juga mengalami fluktuatif produksi sejak tahun 2020 sampai 2024. Saat ini telah dilaksanakan pengalihan metode pengelolaan dari metode tradisional ke modern dengan pemanfaatan geomembran, namun belum terlalu meningkatkan produksi garam. Pada tahun 2021 produksi garam mengalami penurunan dari tahun 2020 karena adanya bencana banjir akibat badai siklon tropis seroja.

2) **Urusan Pariwisata**

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Alor yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejak tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Alor telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2010–2030. Pengembangan pariwisata sesuai RIPPDA dimaksud difokuskan pada 9 klaster meliputi 66 titik pengembangan yang tersebar pada 18 Kecamatan. Penetapan 9 klaster termasuk 4 klaster utama, yakni Klaster Kota Kalabahi mencakup wilayah Teluk Kenari hingga Monbang dan sekitarnya; Klaster II meliputi Sebanjar dan sekitarnya. Klaster III Mali, Pante Deere, mencakup Takpala dan sekitarnya dan Klaster IV meliputi Jawa Toda dan sekitarnya. Minat terhadap potensi pariwisata di Kabupaten Alor dilihat dari kunjungan wisatawan baik



wisatawan domestik maupun mancanegara sebagaimana tabel 2.88 berikut.

Tabel 2 94 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Jenis	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan Wisatawan Domestik (Orang)	4.033	4.279	17.016	16.949	17.670
2	Kunjungan Wisatawan Manca Negara (Orang)	47	105	1.487	3.818	3.827
	Total Kunjungan (Orang)	4.080	4.384	18.503	20.767	21.497
	Rata-rata Kunjungan WNA perbulan (Orang)	4	9	124	318	319

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tabel 2.89 di atas menunjukkan tingginya minat wisatawan domestik dan mancanegara yang melakukan kunjungan di Kabupaten Alor. Data lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik dengan peningkatan rata rata 86,31 persen per tahun. Hal ini menunjukkan tingginya minat wisatawan domestik dan mancanegara yang melakukan kunjungan di Kabupaten Alor. Berkenaan dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Alor baik potensi wisata sejarah, budaya, kerajinan, bahari dan wisata geologi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 95 Potensi Wisata di Kabupaten Alor

NO	JENIS WISATA	OBJEK WISATA	JARAK DARI KOTA KALABAH
A. WISATA ALAM PANTAI : 39 DESTINASI PANTAI			
1	Wisata Alam (Bahari)	Taman Laut (Diving dan Snorkling)	18 km
2	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pasir Putih (Diving dan Snorkeling)	18 km, 2 mil dari Alor Kecil
3	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Obi Singa (Pasir Putih) dan lokasi Diving dan Snorkeling	18 km, 2 mil dari Alor Kecil
4	Wisata Alam (Bahari)	Fenomena Air Laut Dingin	15 km
5	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pulau Kepa (Divin dan Snorkeling)	15 km
6	Wisata Alam (Bahari)	Ekowisata Mangrove	26 km
7	Wisata Alam (Bahari)	Taman Laut (Diving dan Snorkling)	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
8	Wisata Alam (Bahari)	Taman Laut (Diving dan Snorkeling)	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
9	Wisata Alam (Bahari)	Taman laut (Diving dan Snorkeling)	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
10	Wisata Alam (Bahari)	Canary Beach, Mangrove Beach (Pasir Putih)	21 km
11	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Batu Putih	29 km
12	Wisata Alam (Bahari)	Pantai llawe	29 km
13	Wisata Alam (Bahari)	Pantai DulyBala	102 km
14	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pigewa (Batu Lubang)	117 km
15	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Batu Kapal	117 km
16	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Adagae (Taman laut)	42 km
17	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Habeta (hamparan Budidaya Mutiara)	24 km
18	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Kasih	20 km
19	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Ling Al (Pasir Putih)	54 km, 15 mil Kalabahi
20	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Welolo (Taman Laut)	117 km
21	Wisata Alam (Bahari)	Batu Candi	22 mil dari Kalabahi
22	Wisata Alam (Bahari)	Putaran Arus Air Laut	14 mil dari Kalabahi



NO	JENIS WISATA	OBJEK WISATA	JARAK DARI KOTA KALABAH
23	Wisata Alam (Bahari)	Dulionong Beach	500 M
24	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Diddi (Pasir Putih)	53 km, 42 mil dari Kalabahi
25	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Puntaru (Pasir 3 warna)	53 km, 42 mil dari Kalabahi
26	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Delaki (Selancar)	74 km, 42 mil dari Kalabahi
27	Wisata Alam (Bahari)	Taman Laut (Diving dan snorkling)	43 mil dari Kalabahi
28	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Wato Patti (Diving, Snorkeling)	43 mil dari Kalabahi
29	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Wollu (Pasir Putih)	43 mil dari Kalabahi
30	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Jawa Toda (Diving dan Snorkeling)	14 mil dari Kalabahi
31	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Batu Topi	84 km
32	Wisata Alam (Bahari)	Wetabua Beach	500 M
33	Wisata Alam (Bahari)	Wisata Pantai Mali	12 km
34	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pulau Lapang (Pasir Putih)	36 mil dari Kalabahi
35	Wisata Alam (Bahari)	Wisata Pantai Maimol	12 km
36	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Bota dan Pantai Padang Garam (Pasir putih dan padang garam)	34 km
37	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Sebanjar (Diving dan Snorkling)	18 km
38	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pulau Rusa	43 mil dari Kalabahi
39	Wisata Alam (Bahari)	Pantai Pulau Kambing	43 mil dari Kalabahi
B. WISATA ALAM (PEGUNUNGAN, AIR TEJUN, DLL): 28 DESTINASI			
40	Wisata Alam	Bukit Famaisa/ Bukit Teletabis	54 km
41	Wisata Alam	Bukit Bedoe (Titik start Paralayang)	15 km
42	Wisata Alam	Sumber mata air bawah tanah	1,5 km
43	Wisata Alam	Hutan Kenari dan Pepohonan Sukun	1,5 km
44	Wisata Alam	Air Terjun Ilawe	29 km
45	Wisata Alam	Air Panas Bumi Tuti Adagae	42 km
46	Wisata Alam	Kolam Buaya	42 km
47	Wisata Alam	Hutan Kenari	36 km
48	Wisata Alam	Agrowisata Persawahan Tuleng	33 km
49	Wisata Alam	Hutan Madu	94 km
50	Wisata Alam	Gua Kadalomu	102 km
51	Wisata Alam	Bukit Roldemelang	24 km
52	Wisata Alam	Madu Hutan	117 km
53	Wisata Alam	Gunung Koya-koya	83 km
54	Wisata Alam	Padang Rusa	117 km
55	Wisata Alam	Air Terjun Biental	39 km
56	Wisata Alam	Air Terjun Kotal	51 km
57	Wisata Alam	Batu Talopu / Bukit Talopu	51 km
58	Wisata Alam	Tanjung Wolwal (Diving dan Snorkling)	24 km
59	Wisata Alam	Bukit Cinta Tuabang	14 mil dari Kalabahi
60	Wisata Alam	Danau Suntaing	97 km
61	Wisata Alam	Kolam Bidadari (Tempat Pemandian)	34 km
62	Wisata Alam	Agrowisata Persawahan Pailalang	13 km
63	Wisata Alam	Danau Kuifana	46 km
64	Wisata Alam	Periuk Tumbuh	52 km
65	Wisata Alam	Gunung Sirung (Tracking)	43 km, 14 mil dari Kalabahi
66	Wisata Alam	Kolam Pemandian Air Panas	51 km, 14 mil dari Kalabahi
67	Wisata Alam	Taman Laut (Diving dan Snorkling)	16 mil dari Kalabahi
68	Wisata Alam/Tracking	Puncak Gunung Maru	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
C. WISATA BUDAYA : 29 DESTINASI			
69	Wisata Budaya	Goa Bersejarah Liang Puri	79 km, 44 mil dari Kalabahi
70	Wisata Budaya	Magang Kabi	43 km, 14 mil dari Kalabahi
71	Wisata Budaya	Tiang Mahligai	51 km, 14 mil dari Kalabahi
72	Wisata Budaya	Festival Makan Baru Tenu ikat	18 km, 2 mil dari Alor Kecil
73	Wisata Budaya	Kampung Adat Bampalola	17 km
74	Wisata Budaya	Makam Sultan Najamudin Oil Lelang	15 km
75	Wisata Budaya	Jubah Dodo	15 km
76	Wisata Budaya	Kampung Adat Takpala	14 km
77	Wisata Budaya	Kampung Adat Matalafang	14 km
78	Wisata Budaya	Kampung Adat Tabi'e	15 km, 4 mil dari Alor Kecil



NO	JENIS WISATA	OBJEK WISATA	JARAK DARI KOTA KALABAH
79	Wisata Budaya	Sunat Adat dan Makan Baru	9 km
80	Wisata Budaya	Kampung Adat (Monbang/Ehenghulu)	12 km
81	Wisata Budaya	Kampung Adat Bang Towo	12 km
82	Wisata Budaya	Kampung Adat Mabur	38 km
83	Wisata Budaya	Tugu Pahlawan Lembur	20 km
84	Wisata Budaya	Kampungan adat Salyo	77 km
85	Wisata Budaya	Kampung Adat Tangwah	97 km
86	Wisata Budaya	Kampung Adat Ateng Afeng	75 km
87	Wisata Budaya	Sumur Mandi Raja	16 mil dari Kalabahi
88	Wisata Budaya	Kampung Adat Marang	16 mil dari Kalabahi
89	Wisata Budaya	Wato Being	16 mil dari Kalabahi
90	Wisata Budaya	Batu Tiga Tungku	16 mil dari Kalabahi
91	Wisata Budaya	Kampung Adat Bisang	16 mil dari Kalabahi
92	Wisata Budaya	Kampung Adat Lalang Koly	25 mil dari Kalabahi
93	Wisata Budaya	Jangkar Pring Sina	36 mil dari Kalabahi
94	Wisata Budaya	Atribut Raja Batulolong	75 km
95	Wisata Budaya	Tradisi Ritual Adat Mulung di Laut	36 mil dari Kalabahi
96	Wisata Budaya	Goa Berukir (dibloing)	84 km
D. WISATA MINAT KHUSUS : 8 DESTINASI			
97	Wisata Minat Khusus	Wisata Pengamatan Dugong	17 km dari Kalabahi
98	Wisata Minat Khusus	Aneka Anyaman	36 km
99	Wisata Minat Khusus	Kerajinan Tenun Ikat dan Songket	18 km, 2 mil dari Alor Kecil
100	Wisata Minat Khusus	Agrowisata Cengkeh	4 km
101	Wisata Minat Khusus	Aneka Anyaman Daun Koli	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
102	Wisata Minat Khusus	Penangkapan Ikan tanpa alat bantu	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
103	Wisata Minat Khusus	Kerajinan Tangan	15 km, 4 mil dari Alor Kecil
104	Wisata Minat Khusus	Kerajinan Tangan (Aksesoris)	14 km
E. WISATA SEJARAH : 4 DESTINASI			
105	Wisata Sejarah	Monumen Perjuangan Kalabahi	0 km
106	Wisata Sejarah	Patung Emas	14 mil dari Kalabahi
107	Wisata Sejarah	Kuburan Raja Nampira	9 km
108	Wisata Sejarah	Patung Sudirman	102,3 km dari Kalabahi
F. WISATA BUATAN : 3 DESTINASI			
109	Wisata Buatan	Destinasi Wisata Kota (Deswita)	0 km
110	Wisata Buatan	Kolam Besi	30 km
111	Wisata Buatan	Pesona Mangrove	3 km
G. WISATA RELIGI : 5 DESTINASI			
112	Wisata Religi	Mimbar Tua Gereja	1,5 km
113	Wisata Religi	Gereja Ismail dan Masjid Ishaq	29 km
114	Wisata Religi	Masjid Tua At Taqwa Lerabaing	48 km
115	Wisata Religi	Al Qur'an Tua (Kulit Kayu) Alor Besar	14 mil dari Kalabahi
116	Wisata Religi	Al Qur'an Tua (Kulit Kayu) Pantar Timur	18 km

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Alor, 2025

Potensi wisata alam dan budaya di Alor sangat melimpah, mencakup taman laut, pantai-pantai eksotis, air terjun, dan situs budaya seperti rumah adat dan gua sejarah. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong ekonomi kreatif masyarakat lokal dan meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Alor maka Pemerintah melalui Dinas Pariwisata telah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif. Saat ini terdapat kurang lebih 66 pengusaha ekonomi kreatif dengan 11 jenis

usaha yang ditekuni, antara lain usaha kuliner, salon, souvenir, dan wahana bermain anak.

Beberapa permasalahan dalam pengembangan pariwisata yang harus segera diselesaikan melalui pelaksanaan 5A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Akomodasi, Amenitas dan Aktivitas dengan dukungan peningkatan kapasitas serta profesionalitas sumber daya manusia di bidang pariwisata termasuk penyediaan usaha jasa kuliner, penyediaan souvenir, tenun ikat dan songket dan aneka kerajinan lainnya.

3) Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Alor Tahun 2019-2023 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan 16 sektor lainnya yakni rata-rata mencapai 31,23 persen. Tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor primer yang meliputi bidang pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan. Persentase penyerapan tenaga kerja bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas pada sektor primer atau sektor pertanian tahun 2023 mencapai 50,02 persen atau sejumlah 60.152 orang, sektor manufaktur mencapai 10,90 persen atau sejumlah 13.106 orang dan sektor tersier atau jasa mencapai 39,08 persen atau 47.002 orang. Dalam upaya mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB maka dibutuhkan kebijakan pengembangan sub sektor pertanian antara lain peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Alor bermata pencaharian sebagai petani sehingga sektor pertanian menjadi salah satu andalan utama bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Peningkatan produksi pertanian dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian. Hal ini tercermin dari produksi tanaman pangan sumber karbohidrat (padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian) dan sumber protein nabati (sayur dan buah).

4) Urusan Kehutanan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Berdasarkan SK Menteri



Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.6615/ MenLHK-PKTL/ KUH/ PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTT bahwa luas hutan di Kabupaten Alor mencapai 105.073,3704 hektar, terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 61.456,9631 hektar, hutan produksi seluas 19.341,0646 hektar, hutan produksi terbatas seluas 16.571,8156 hektar. Selain itu terdapat juga hutan kemasyarakatan seluas 10.055 hektar dan hutan konservasi (taman wisata alam) seluas 7.073,5271 hektar.

5) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan perwujudan kebijakan Indonesia terang 2020 maka pengembangan energi juga dilaksanakan dengan strategi memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT). Potensi sumber daya energi terbarukan yang dapat digunakan sebagai Pembangkit Listrik di Kabupaten Alor meliputi air dan tenaga surya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebar di beberapa desa, PLTS terpusat di wilayah Kabupaten Alor antara lain di Desa Mataru Selatan, Tribur, Pulau Buaya, Kelaisi Tengah, Tanglapui, Pido, Kenarimbala, Mauta, Bagang, Tude, Tube, Piringsina, Kaera, Ternate Selatan, Tereweng dan Kaleb. PLTS tersebut sebagian besar dibangun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan PT. PLN untuk mendukung realisasi kebijakan Indonesia Terang pada akhir tahun 2020. Potensi sumber daya energi listrik Kabupaten Alor dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 96 Potensi Sumber Daya Energi Listrik

No	Sumber Potensi	Lokasi (desa/kecamatan)	Debit (liter/dtk)	Ket
1	Air Terjun	Taman Mataru / Kec. Mataru	5	Survey
2	Sungai	Kiraman, Kelaisi Tengah, Subo / Kec. Alsel	4,5	Survey; DED
3	Sungai	Kaleb, Nulle, Bungabali/ Kec. Pantar Timur	6;10;4	Survey
4	Sungai	Baolang / Kec Pantar	6	Survey
5	Sungai	Aramaba / Kec. Pantar Tengah	2	Survey
6	Sungai	Pido / Kec. Alor Timur Laut	4	Survey
7	Sungai	Tribur/ Kec. ABAD Selatan	6	Survey



No	Sumber Potensi	Lokasi (desa/kecamatan)	Debit (liter/dtk)	Ket
8	Sungai	Alila Selatan / Kec. Alor Barat Laut	4	Survey
9	Sungai	Mataru Selatan / Kec. Mataru	9,5	Survey; DED
10	Sungai	Kelaisi Tengah (Kawangwai) / Kec. Alor Selatan	8	2003/67 KWh
11	Sungai	Belemana / Kec. Alor Timur	5	2011/15 KWh
12	Sungai	Adang Buom / Kec. Teluk Mutiara	2	2014/3 KWh
13	Panas Bumi	Air Mancur (Pilisi) / Kec. Alor Timur Laut		27 Mwe
14	Panas Bumi	Aramaba (Korolou) / Kec. Pantar Tengah		150 MMBTU
15	Panas Bumi	Langkuru (Puimang) / Kec. Pureman		40 MMBTU
16	Panas Bumi	Mausamang (Takala) / Kec. Alor Timur		20MMBTU

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2024

Sebagian besar potensi sumber daya mineral di Kabupaten Alor sampai tahun 2022 masih dalam tahapan eksplorasi. Secara khusus untuk bahan galian batuan telah dieksploitasi sebagai bahan baku untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Alor. Potensi bahan galian batuan dan mineral yang dieksplorasi dan dieksploitasi tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2 97 Potensi Bahan Galian Mineral dan Batuan

No	Potensi Bahan Galian	Luas Area (Ha)	Lokasi (Desa)	Tahapan Pengelolaa n
1	Emas dan Tembaga	17.000	Probur, Halerman; Sidabui, Wakapsir, Wakapsir Timur, Pido, Kenarimbala, Bukit Mas, Kabir, Kuneman dan Lella.	Eksplorasi
2	Galena	9.200	Wolwal, Kuneman, Kelaisi Tengah, Pido, Lipang, Langkuru, Langkuru Utara, Ombay.	Eksplorasi
		3.000	Wakapsir, Wakapsir Timur.	Operasi Produksi
3	Batu Hitam	15,13	Pantai Air Panas Desa Wakapsir, Pantai Mokonla Desa Kuifana, Pantai Landao Desa Kiraman, Pantai Lamole Desa Elok, Pantai Aban Gau (Losmas) Mueya Desa Kiraman dan Pantai Oimana, Desa Lakatuli.	Operasi Produksi
4	Pasir dan Batu	Tersebar di 18 Kecamatan		Operasi Produksi

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2025

Data tabel menunjukkan potensi bahan galian batuan sudah dieksploitasi melalui operasi produksi, sedangkan bahan galian mineral masih dalam tahapan eksplorasi.

6) **Urusan Perdagangan**

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Alor didukung oleh perdagangan dalam negeri melalui perdagangan antar pulau. Jenis komoditi yang diantarpulaukan antara lain: kemiri, kopra, jambu mente, asam, dan sejumlah komoditi lainnya. Hasil komoditi yang diantarpulaukan

masih bersifat gelondongan dengan tujuan utama antara lain Surabaya dan Makasar. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah maka jenis komoditas dan nilai pengantarpulauan harus dipacu melalui pengembangan sektor unggulan di daerah yang memiliki daya saing di pasar global dan pengembangannya dalam skala ekonomi.

Jumlah pasar di Kabupaten Alor sampai dengan Tahun 2024 mencapai 61 unit, terdiri dari 3 unit pasar di Kota Kalabahi dan lainnya tersebar di kecamatan. Dari 61 unit pasar dimaksud, 33 pasar masih aktif beroperasi sedangkan 28 pasar sudah tidak aktif. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Alor baik melalui perdagangan antar pulau maupun melalui aktivitas pasar memberikan kontribusi sektor perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan.

7) Urusan Perindustrian

Pembangunan di bidang perindustrian cukup banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, hal ini nampak pada perkembangan jenis usaha industri masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahun. Data pada tahun 2024 terdapat 381 pengusaha industri rumah tangga dengan menyerap 14,80 persen tenaga kerja. Industri yang berkembang di Kabupaten Alor adalah industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang berbasis pada masyarakat kecil. Aktivitas sektor ini masih pada tingkat rumah tangga sehingga lebih banyak bergerak pada industri makanan dan minuman, industri tenun dan jasa industri lainnya dalam skala kecil yang belum dapat memberikan omset yang cukup besar karena keterbatasan produksi, pasar, keahlian dan sumber dana. Sektor ini sangat tepat jika diberdayakan melalui berbagai kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri sedang dan besar belum menunjukkan peran dalam perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Alor yang baru mencapai 1,56 persen pada tahun 2024.

8) Urusan Transmigrasi

Sebaran penduduk di Kabupaten Alor masih belum merata yang ditunjukkan dengan sekitar 25,47 persen berdomisili di Kota Kalabahi dan sekitarnya dengan kepadatan penduduk 645 jiwa/Km². Sehubungan dengan hal tersebut maka pembangunan



ketransmigrasian merupakan salah satu solusi dalam upaya penyebaran penduduk pada wilayah-wilayah potensial. Keputusan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi telah menetapkan kawasan Tanglapui sebagai salah satu kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan Tanglapui meliputi: 1) Kawasan Permukiman Baru (KPB) di Tanglapui Kecamatan Alor Timur; 2) Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yakni SKP A Kecamatan Mataru, SKP B Kecamatan Alor Selatan, SKP C Kecamatan Pureman dan SKP D Kecamatan Alor Timur. Selain Kawasan Tanglapui sebagai KPB dan SKP, melalui kebijakan pemerintah telah dibangun pula UPT Wolu di Kecamatan Pantar Barat Laut dan Transmigrasi Lokal Tude Mauta di Kecamatan Pantar Tengah sebagai kawasan transmigrasi.

2.4.4.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Fungsi administrasi pemerintahan meliputi bidang politik, bidang hukum dan HAM, bidang keamanan dan ketertiban serta penguatan kelembagaan daerah. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya kerjasama secara sinergis antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP, Aparat Keamanan baik TNI dan POLRI, Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan segenap unsur terkait lainnya. Dalam bidang Hukum dan HAM, produk regulasi daerah yang ditetapkan tahun 2020-2024 meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Nota Kesepahaman (MoU) sebanyak 2.614 buah. Penetapan regulasi ini dimaksudkan untuk memperkuat azas legalitas formal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Jumlah regulasi daerah yang ditetapkan secara lengkap terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 98 Produk Regulasi Daerah yang Ditetapkan Tahun 2020-2024

No	Produk Regulasi	Jumlah Produk Regulasi yang Ditetapkan Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Peraturan Daerah	9	7	8	5	5	34
2	Peraturan Bupati	65	25	59	42	34	225
3	Surat Keputusan Bupati	367	335	383	468	351	1904
4	Nota Kesepahaman (MOU)	308	31	31	44	37	451
	Jumlah	749	398	481	559	427	2614

Sumber: Bag. Hukum Setda Alor, 2025



Secara keseluruhan, penetapan regulasi daerah di Kabupaten Alor menunjukkan bahwa tahun 2020 adalah periode paling aktif dalam penyusunan regulasi, khususnya pada SK Bupati dan MoU. Namun, terdapat penurunan konsisten pada jumlah regulasi sejak 2020, yang dapat mencerminkan pergeseran fokus kebijakan atau konsolidasi terhadap peraturan yang telah ada. SK Bupati tetap menjadi instrumen regulasi utama, sementara penurunan Perda dapat menandakan perlunya evaluasi efektivitas legislasi di tingkat daerah.

2) Sekretariat DPRD

Dalam bidang politik, lembaga DPRD Kabupaten Alor yang beranggotakan 30 orang, terbagi dalam 7 fraksi dan terdistribusi pada 3 komisi sebagai mitra Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pemerintahan dan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

2.4.4.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengoperasian sumber daya yang ada dalam waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan melalui integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengukuran pelaksanaan perencanaan pembangunan menggunakan indikator ketercapaian target jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (20 tahun). Ketercapaian perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tahun 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 99 Capaian Sasaran Jangka Menengah Kab. Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi LKIP	Kategori
2020	97,02	Sangat Tinggi
2021	105,88	Sangat Tinggi
2022	88,96	Tinggi
2023	88,96	Sedang



Tahun	Realisasi LKIP	Kategori
2024	73,68	Sedang

Sumber: Bappelitbang, 2025

Capaian sasaran jangka menengah Kabupaten Alor tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 2.99 diperoleh dari evaluasi indikator kinerja utama RPJMD Kabupaten Alor tahun 2020-2024, yang menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama tersebut mengalami fluktuasi. Terdapat beberapa indikator yang memenuhi target yang direncanakan namun juga ada indikator tertentu yang belum tercapai sehingga membutuhkan perhatian kebijakan lebih lanjut.

2) **Urusan Keuangan**

a) **Tata Kelola Keuangan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang tepat sesuai kaidah pengelolaan keuangan. Tata kelola keuangan yang baik diukur dari penilaian BPK terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2013 opini BPK Perwakilan NTT terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), sedangkan tahun 2014-2019 meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*) dan tahun 2020-2023 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*).

b) **Pendapatan Asli Daerah**

Kinerja pengelolaan keuangan daerah terukur dari besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah dan kemampuan serapan anggaran pada belanja daerah. Kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 100 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Alor

No	Uraian	Tahun (persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Asli Daerah	5,28	5,08	5,40	5,68	5,62
2	Pendapatan Transfer	92,57	92,37	94,38	92,98	94,38
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,15	2,12	0,23	1,33	0

Sumber: BKAD Kab. Alor, 2025

Selama tahun 2020-2024, kontribusi PAD terhadap jumlah pendapatan daerah fluktuatif. Kondisi yang sama juga terjadi pada pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain lain pendapatan daerah yang sah.



3) **Urusan Kepegawaian**

a) Keadaan Aparatur

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh 66 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 25 Dinas Daerah, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, 8 Badan, 1 Sekretariat, 10 Bagian, 1 RSD, 1 RSB, 1 Inspektorat Daerah dan 18 Kecamatan. Dukungan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2 101 Kondisi PNS di Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	Kondisi Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh	L	P	Jlh
1	Jumlah PNS	2.569	2.293	4.862	2.485	2.263	4.748	2.497	2.662	5.159	2.479	2842	5.321	2668	3524	6.192
2	Jabatan															
	Struktural															
	Eselon IIa/IIb	34	6	40	29	5	34	34	8	42	35	7	42	35	7	42
	Eselon III	176	30	206	163	31	194	172	45	217	168	36	204	161	34	195
	Eselon IV	465	254	719	440	263	703	96	49	145	183	133	316	174	129	303
	Eselon V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fungsional Tertentu	901	1.376	2.277	876	1.351	2.227	1.462	1.830	3.292	1672	2156	3.828	1997	2774	4.771
	Fungsional Umum	1.08	583	1.663	1.052	538	1.59	683	780	1.463	407	524	931	384	497	881
3	Tingkat pendidikan :															
	- Strata 2	49	13	62	49	13	62	49	16	65	59	19	78	94	86	180
	- Strata 1 (S1)/DIV	986	900	1.886	970	842	1.812	1.215	1.301	2.516	1.109	1280	2.389	1398	2030	3.428
	D1 - D3	390	787	1.177	358	671	1.029	258	640	898	491	954	1.445	384	844	1.228
	SMA/ sederajat	1017	590	1.607	1.029	684	1.713	892	696	1.588	738	580	1.318	718	557	1.275
	SMP	75	12	87	76	14	90	54	9	63	53	9	62	51	7	58
	SD	43	0	43	42	0	42	29	0	29	29	0	29	23	0	23

Sumber: BKPSDM Kab. Alor, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 dari total 6.192 PNS di Kabupaten Alor, jumlah terbanyak pada tingkat pendidikan S1/DIV yang mencapai 3.428 orang sedangkan jumlah terkecil pada tingkat pendidikan SD sejumlah 23 orang. Selain itu, sebagai prasyarat untuk menduduki jabatan maka didahului dengan Diklat Kepemimpinan dengan perkembangan selama tahun 2020-2020 terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 102 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Aparatur PNS Kabupaten Alor

No	Uraian	Jumlah Peserta				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat penjenjangan pejabat :					
	- Pejabat Tinggi Pratama	-	-	-	-	2
	- Pejabat Administrator	16	-	-	-	-
	- Pejabat Pengawas	22	-	-	-	-
2	Diklat Fungsional	-	-	-	-	-



No	Uraian	Jumlah Peserta				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Tugas belajar	77	48	30	-	-
4	Ikatan Dinas	339	267	300	-	-

Sumber: BKPSDM Kab. Alor, 2025

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun sebanyak 40 orang PNS telah mengikuti diklat penjenjangan baik itu PIM II, III, dan PIM IV. Pada tahun 2020 jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan mencapai jumlah yang tertinggi selama lima tahun terakhir karena teknis pelaksanaannya yang dilakukan secara daring. Kondisi ini memungkinkan adanya pejabat yang menduduki jabatan tanpa mengikuti pendidikan penjenjangan, sedangkan PNS yang mendapat tugas belajar diusulkan sesuai kebutuhan daerah.

b) Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintahan. IPASN bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat profesionalitas ASN yang meliputi aspek kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kerja, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian yang lebih efektif dan terarah.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. IP ASN disusun berdasarkan empat dimensi utama, yakni kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kerja. Dalam konteks Kabupaten Alor, dinamika nilai IP ASN selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dan mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan kapasitas ASN secara berkelanjutan.

Gambaran IP ASN Kabupaten Alor tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 103 Indeks Profesionalitas ASN Kab. Alor Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PNS	4748	5159	5321	6192
2	Kualifikasi	9,91	20,44	19,46	19,53
3	Kompetensi	6,47	36,34	33,35	20,88
4	Kinerja	11,86	26,49	24,93	19,75
5	Disiplin	4,98	4,99	5	4,99



No	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
6	Total (Indeks Profesional ASN)	33,22	88,26	82,74	65,15
7	Kategori	Sangat rendah	tinggi	Tinggi	rendah

Sumber: BPPSDM Kab. Alor, 2025

Pada tahun 2021, IP ASN Kabupaten Alor tercatat sebesar 33,22, yang dikategorikan sebagai sangat rendah. Nilai ini merefleksikan lemahnya kualitas SDM aparatur pada seluruh dimensi, khususnya pada aspek kompetensi dengan nilai 6,47 dan kualifikasi dengan nilai 9,91, serta kinerja dengan nilai 11,86 yang belum optimal. Disiplin kerja ASN juga menunjukkan angka rendah, yakni 4,98. Kondisi ini menjadi cerminan dari tantangan struktural dalam pengembangan kapasitas ASN di awal periode RPJMD sebelumnya.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pada nilai IP ASN menjadi 88,26, yang termasuk dalam kategori tinggi. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pada aspek kompetensi sebesar 36,34 dan kinerja sebesar 26,49, serta perbaikan pada aspek kualifikasi sebesar 20,44. Kenaikan ini mengindikasikan adanya intervensi kebijakan manajemen ASN yang cukup efektif pada tahun tersebut, meskipun indikator disiplin relatif stagnan dengan nilai 4,99. Jumlah ASN juga meningkat menjadi 4.343 orang, yang turut mendukung optimalisasi pelayanan publik. Pada tahun 2023, IP ASN mengalami koreksi menurun menjadi 82,74, meskipun tetap berada dalam kategori tinggi. Penurunan nilai terlihat pada seluruh dimensi, terutama kompetensi dengan nilai 33,35 dan kinerja dengan nilai 24,93, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pembinaan dan pengembangan ASN secara konsisten. Aspek disiplin hanya mengalami kenaikan marginal mencapai 5,00, sementara jumlah ASN mengalami penurunan menjadi 4.268 orang.

Pada tahun 2024 tren penurunan IP ASN berlanjut dengan capaian nilai sebesar 65,15, yang menggeser posisinya kembali ke dalam kategori rendah. Aspek kompetensi dan kinerja kembali menurun ke angka 20,88 dan 19,75 secara berurutan, sementara kualifikasi sedikit meningkat menjadi 19,53. Disiplin ASN tetap stagnan pada angka 4,99. Penurunan nilai IP ASN ini bersamaan dengan penurunan jumlah ASN yang signifikan menjadi 4.122 orang, yang mempengaruhi kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

Dinamika IP ASN Kabupaten Alor selama empat tahun terakhir



mencerminkan perlunya reformulasi kebijakan manajemen talenta ASN, serta penguatan sistem pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan organisasi. Penurunan tren sejak tahun 2023 menjadi indikator perlunya peningkatan investasi pada penguatan kualitas SDM aparatur, baik melalui perencanaan kebutuhan pegawai yang berbasis data, pelatihan teknis dan manajerial yang relevan, maupun sistem evaluasi kinerja yang objektif dan terintegrasi. Upaya ini menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan akselerasi reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Alor.

4) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan yang akurat, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Alor, fungsi litbang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang juga menangani perencanaan, yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang).

Dalam lima tahun terakhir, fungsi litbang di Kabupaten Alor mulai diarahkan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah. Namun, efektivitas pelaksanaan urusan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain terbatasnya kapasitas SDM peneliti dan analis kebijakan, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, selain itu minimnya alokasi anggaran riset, sehingga ruang lingkup penelitian masih terbatas. Kabupaten Alor memiliki potensi untuk menjalin kemitraan strategis dengan universitas, lembaga penelitian, serta pelaku inovasi lokal guna mendorong riset-riset yang relevan dengan konteks kepulauan, sosial budaya, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan sistem data yang lebih terintegrasi melalui program Satu Data Indonesia dapat memperkuat basis data pembangunan daerah dan mendukung riset berbasis bukti. Selama lima tahun terakhir, kerjasama yang dibangun pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan untuk melakukan penelitian dan riset sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 104 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Peneliti

No	Kegiatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Penelitian di bidang pertanian tanaman hortikultura kerjasama dengan UNTRIB Kalabahi	√			



No	Kegiatan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
2	Penelitian dibidang Pemerintahan Desa terkait Desa Adat kerjasama dengan UNDANA Kupang		√		
3	Penelitian di Bidang Kebudayaan tentang sejarah Alquran Tua di Desa Sebanjar kerjasama dengan Yayasan dari Makasar			√	
4	Penelitian dibidang Perikanan,Perertanian, infrastruktur kerjadsama dengan UNTRIB Kalabahi	Tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat			

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Dengan penguatan urusan litbang yang terarah, Kabupaten Alor diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan pembangunan yang berbasis pengetahuan, sekaligus mendorong inovasi daerah yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

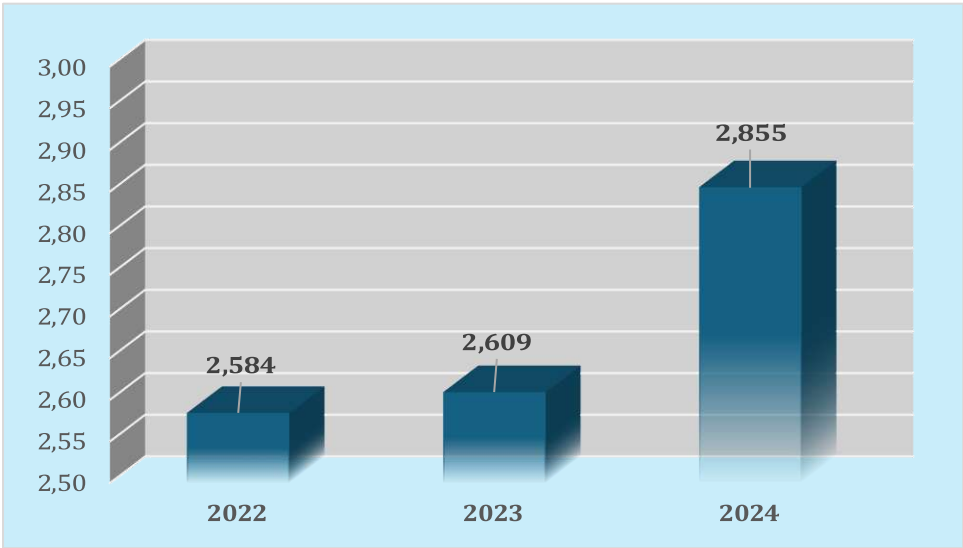
5) **Urusan Pengelolaan Perbatasan**

Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah kepulauan yang memiliki letak geografis strategis karena berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste melalui wilayah laut bagian timur dan tenggara. Posisi ini menjadikan Kabupaten Alor sebagai bagian dari kawasan perbatasan negara yang memiliki arti penting, baik dari sisi pertahanan keamanan, ekonomi, maupun sosial budaya. Sebagai daerah perbatasan laut, pengelolaan wilayah perbatasan di Kabupaten Alor tidak hanya bertujuan menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga menjadi instrumen pembangunan daerah yang mendorong pemerataan, konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar. Dengan pengelolaan wilayah perbatasan yang terpadu dan berbasis potensi lokal, Kabupaten Alor tidak hanya menjadi garda depan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dapat berkembang menjadi gerbang ekonomi dan pusat pertumbuhan baru di wilayah timur Indonesia.

2.4.4.6. **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah**

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistim penerapan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Capaian keberhasilan sistem pengendalian ini dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan atau kesempurnaan

penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian interen. Nilai matuitas SPIP Kabupaten Alor tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik 2.24 berikut.



Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Alor, 2025

Grafik 2. 24 Nilai Matruiitas SPIP Kab. Alor Tahun 2022-2024

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan komitmen yang konsisten dalam memperkuat penerapan SPIP di seluruh perangkat daerah. Hal ini tercermin dari tren positif nilai maturitas SPIP selama tiga tahun terakhir. Peningkatan nilai dari tahun 2022 ke 2023 tidak signifikan yang mencerminkan proses pembenahan internal yang masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun budaya pengawasan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 menjadi indikasi kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Alor telah berhasil melakukan langkah- langkah strategis dalam memperkuat pengendalian intern, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan risiko, pelaporan, serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan capaian nilai 2,855 pada tahun 2024, Kabupaten Alor berada pada tahap menuju Level 3 (Terdefinisi) dalam skala maturitas SPIP. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengendalian intern telah terstandarisasi, didokumentasikan, dan mulai diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan diarahkan pada terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel, untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah sampai dengan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel



berikut.

Tabel 2 105 Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah

NO	Jenis Kegiatan	Kerugian		Pembayaran						Sisa		Keterangan
				Angsuran		Selesai		Penghapusan				
		Jlh	Nilai (Rp)	Jlh	Nilai (Rp)	Jlh	Nilai (Rp)	Jlh	Nilai (Rp)	Jlh	Nilai (Rp)	
I	Kasus yang Telah Diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM											
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pihak Ketiga (P.III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Kasus Kerugian daerah yang sedang dalam proses penetapan pembebanan											
1	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	1	242.410.000	-	-	1	242.410.000	-	-	-	-	
2	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1	360.084.300	1	324.119.654	-	-	-	-	1	35.964.646	
3	Pihak Ketiga (P.III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah II	2	602.494.300	1	324.119.654	1	242.410.000	-	-	1	35.964.646	
III	Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau belum diproses penyelesaiannya											
1	BPK	102	13.497.956.983,79	32	6.455.089.991,55	63	4.682.087.347,57	-	-	39	7.329.192.571,06	
2	Aparat Pengawasan Fungsional	663	15.090.040.142,06	18	1.738.070.149,16	353	4.851.531.468,93	-	-	310	8.500.438.523,97	
	Jumlah III	765	28.587.997.125,85	50	8.193.160.140,71	416	9.533.618.816,50	-	-	349	15.829.631.095,03	
	Jumlah I+II+III	767	29.190.491.425,85	51	8.517.279.794,71	417	9.776.028.816,50	-	-	350	15.865.595.741,03	

Sumber: Irda Kab. Alor, 2025

Data sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa dari audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Alor sampai dengan semester I tahun 2023 ditemukan bahwa dari total kerugian sejumlah Rp.29.190.491.425,85,- yang telah selesai dibayar sesuai rekomendasi dengan nilai sebesar Rp.9.219.985.746,74,-. Angsuran Rp.7.137.919.026,31 sisa yang belum dibayar adalah senilai Rp.12.832.586.652.80,-. Besaran jumlah ini akan terus ditindaklanjuti sampai tuntas.

2.4.4.7. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pembinaan dilaksanakan melalui kemitraan dengan elemen strategis bangsa yang berkembang di masyarakat. Langkah-langkah pembinaan yang telah dilakukan antara lain melalui kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan, koordinasi dan diskusi kerukunan umat beragama antar Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB); dan koordinasi dan diskusi kerukunan umat beragama. Dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa serta upaya perlindungan masyarakat terhadap berbagai ancaman, telah dilakukan pula perkuatan intelijen di daerah dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten, serta penertiban dan pemantauan aktifitas orang/lembaga asing di daerah. Beberapa lembaga



asing yang sementara beraktifitas di wilayah Kabupaten Alor terbaca pada tabel berikut.

Tabel 2 106 Lembaga Non Pemerintah Yang Beraktifitas di Kabupaten Alor

No	Nama Lembaga	Jenis Aktifitas	Lama waktu kegiatan
1	WVI / ADP	Bidang sosial kemasyarakatan	1995 - sekarang
2	WWF	Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2006 - sekarang
3	CD Bethesda	Kesehatan	2015 - sekarang
4	HI (<i>Handycap International</i>)	Pemberdayaan ekonomi inklusif	2018 – 2021
5	PPA/ Compassion	Pembinaan anak	2018 – sekarang
6	<i>Thresher shark Indonesia</i>	Konservasi Hiu Tikus	2020 – sekarang
7	Momentum	Stunting AKI AKB	2021 – 2023

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.4.5. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai Peraturan Bupati Alor Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut capaian SPM urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2022 sebagai berikut.

2.4.5.1. SPM Bidang Pendidikan

Kabupaten Alor melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar; dan Pendidikan Kesetaraan. Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Pendidikan di Kabupaten Alor pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 107 Target dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2023							2024						
	Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar	Capaian SPM	Indeks capaian SPM bidang pendidikan	Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar	Capaian SPM	Indeks capaian SPM bidang pendidikan
	Jumlah Sasaran		Target	Realisasi				Jumlah Sasaran		Target	Realisasi			
	Total yang harus dilayani	Total yang terlayani						Total yang harus dilayani	Total yang terlayani					
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						81,53	46,89						58,73	69,83
Jumlah anak usia 5 – 6 Tahun berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	8.232	7.781	100	94,52	5,92			12.421	7.864	100	63,31	40,38		
Pendidikan Dasar:													86,80	
Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	29.223	19.317	100	66,10	6,27	30.550		29.544	100	96,71	47,16			
Pendidikan Kesetaraan:													63,95	
Jumlah warga negara yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	59.129	-	100	-	-	3.950		2.835	100	71,77	33			

Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2023							2024						
	Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar	Capaian SPM	Indeks capaian SPM bidang pendidikan	Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar	Capaian SPM	Indeks capaian SPM bidang pendidikan
	Jumlah Sasaran		Target	Realisasi				Jumlah Sasaran		Target	Realisasi			
	Total yang harus dilayani	Total yang terlayani						Total yang harus dilayani	Total yang terlayani					
Alokasi Anggaran Total Urusan Pendidikan (M)														

Sumber : Kemendagri, 2025.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan SPM khusus pada Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar akan terus dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerataan akses pendidikan dasar pada seluruh wilayah di Kabupaten Alor.

2.4.5.2. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mencakup 12 indikator yang dalam pelaksanaannya di Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 108 Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM (%)	KATEGORI	KATEGORI KABUPATEN
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	85,13	85,13	100	77,28	77,28	83,56	Tuntas Madya	81,41 (TUNTAS MADYA)
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	80,35	80,35	100	85,73	85,73	81,43	Tuntas Madya	
3 .	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	86,51	86,51	100	73,42	73,42	83,89	Tuntas Madya	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita	100	52,98	52,98	100	57,61	57,61	53,91	Belum Tuntas	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	78,61	78,61	100	79,15	79,15	78,72	Tuntas Pratama	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	93,93	93,93	100	75,33	75,33	90,21	Tuntas Utama	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	99,91	99,91	100	92,29	92,29	98,39	Tuntas Utama	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	76,66	76,66	100	98,05	98,05	80,94	Tuntas Madya	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	80,15	80,15	100	93,3	93,30	82,78	Tuntas Madya	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	59,44	59,44	100	50,45	50,45	57,64	Belum Tuntas	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100,00	100	86,9	86,90	97,38	Tuntas Utama	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	86,2	86,20	100	95,86	95,86	88,13	Tuntas Madya	

Sumber : Kemendagri, 2025

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tabel diatas menunjukkan dari 12 indikator, yang telah mencapai SPM adalah pelayanan kesehatan pada orang terduga TBC, disusul oleh pelayanan kesehatan lansia sebesar 98,39 persen



dan layanan kesehatan pada usia produktif sebesar 90,21 persen . Sedangkan capaian SPM terendah ada pada pelayanan kesehatan balita sebesar 53,91 persen , pelayanan kesehatan ODGJ sebesar 57,65 persen .

Dengan memperhatikan capaian SPM pada sektor kesehatan sebagaimana penjelasan tabel diatas, diperlukan strategi secara tepat antara lain optimalisasi pelayanan kesehatan sampai pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta SDM kesehatan.

2.4.5.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang meliputi Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 109 Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2024						
		Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar (persen)	Capaian SPM (persen)	Indeks capaian SPM bidang PUPR (perse)
		Jumlah Sasaran (Org)		Target (persen)	Realisasi (persen)			
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani					
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari:							99,00
	Jumlah warga yang terpenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari	7.895	9.830	100	124,51	100	100	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik:							
	Jumlah warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.500	2.450	100	98,00	98	98	

Sumber : Kemendagri, 2025

Dari 2 jenis pelayanan dasar serta 2 indikator pada SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel diatas menunjukkan tingkatan realisasi yang cukup baik yakni mencapai diatas dari 90 persen . Namun demikian upaya pemenuhan terhadap kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat sehari-hari dan pengelolaan air limbah domestik menjadi prioritas untuk dipenuhi melalui berbagai kebijakan, sehingga upaya pencapaian target dapat terpenuhi pada tahun -tahun mendatang.

2.4.5.4. SPM Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diarahkan pada Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak



huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 110 Target dan Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2024						
		Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar (persen)	Capaian SPM (persen)	Indeks capaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (persen)
		Jumlah Sasaran (Org)		Target (persen)	Realisasi (persen)			
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani					
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana:							100
	Jumlah tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana	47	47	100	100,00	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah:							
	Jumlah tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten Alor	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Kemendagri, 2025

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk indikator Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana tahun 2024 mencapai 100 persen . Sementara Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program tidak dilaksanakan karena pada tahun 2024 tidak ada relokasi program pemerintah. Pemerintah Daerah Upaya untuk mempertahankan capaian SPM akan terus dilakukan terutama optimalisasi ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi akibat kebijakan pemerintah.

2.4.5.5. SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup 5 layanan dasar dan 5 indikator yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah masing- masing Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian SPM untuk Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.106 berikut.



Tabel 2 111 Target dan Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2024							
		Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar (persen)	Capaian SPM (persen)	Capaian SPM Sub Bidang	Indeks Capaian SPM
		Jumlah Sasaran (Org)		Target (persen)	Realisasi (persen)				
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani						
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada								
		221.960	221.960	100	100	46,85	89,37	89,37	
2.	Pelayanan Informasi rawan Bencana								
	Jumlah Warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	221.960	180.000	100	81,1	89,32	82,74		
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								89,37
		221.960	174.550	100	78,64	89,38	79,71		
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana							87,48	
	Jumlah Warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana								
		150	150	100	100	100	100		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran								
	Jumlah Warga yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran							95,31	
		47	47	100	100	76,56	95,31		

Sumber : Kemendagri, 2025

Data sebagaimana tabel diatas menunjukan dari 5 layanan dasar dan 5 indikator SPM, 3 indfikator mencapai standar SPM (100 persen) sedangkan 2 indikator lainnya mencapai 93,48 persen dan 80,85 persen . Untuk pencapaian standar SPM baik pada upaya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana maupun informasi terkait Peraturan Daerah perlu dilakukan langkah-langkah strategis antara lain optimalisasi pelaksanaan sosialisasi, simulasi serta publikasi secara luas kepada seluruh masyarakat untuk diketahui.



2.4.5.6. SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran target berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2 112 Target dan Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	2024						
		Penerima Layanan Dasar				Capaian Mutu Layanan Dasar (persen)	Capaian SPM (persen)	Indeks capaian SPM bidang Sosial (persen)
		Jumlah Sasaran (Org)		Target (persen)	Realisasi (persen)			
		Total yang harus dilayani	Total yang terlayani					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti							82,55
	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	71	71	100	100,00	100	100	
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti							
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	261	261	100	100,00	100	100	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti							
	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	261	261	100	100,00	100	100	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
	Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	-	-	-	-	-	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana daerah							
	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten Alor yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Kemendagri, 2025

Capaian target SPM pada Bidang Sosial yang mencakup 5 jenis layanan dasar menunjukkan capaian SPM yang mencapai target berada pada layanan jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dan Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi



sosial di luar panti, sedangkan 3 layanan dasar lainnya belum memenuhi SPM. Untuk layanan pada indikator gelandangan dan pengemis target dan realisasinya tidak ditetapkan karena tidak didapati kelompok gelandangan dan pengemis di Kabupaten Alor.

2.4.6. Evaluasi RPJMD Periode 2020-2025

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), merupakan bagian integral dari siklus pembangunan daerah, yang berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan serta menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis, yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan lima tahunan. Pemerintah Kabupaten Alor melakukan Evaluasi RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2020–2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2020–2024, sekaligus sebagai dasar penyusunan RPJMD periode selanjutnya (2025–2029).

Evaluasi ini secara khusus difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah), yaitu indikator yang menggambarkan hasil utama pembangunan dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap capaian target pembangunan sesuai IKU digambarkan sebagai berikut.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode RPJMD 2020–2024, IPM Kabupaten Alor menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten, dari posisi 61,33 pada tahun 2020 menjadi 67,70 pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya berhasil melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya sejak tahun 2022, tetapi juga menunjukkan loncatan kualitas yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Alor bergerak ke arah yang lebih inklusif dan progresif.

Pada tahun 2021, realisasi IPM jauh dari target karena dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang memengaruhi akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, pemulihan yang cepat terlihat pada tahun 2022, di mana realisasi IPM melonjak 5,45 poin hanya dalam dua tahun, dari 61,37 ke 66,82.

Capaian IPM Kabupaten Alor pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambaran capaian indikator pembentuk yang terdiri dari tiga dimensi yaitu:



1. Dimensi Pendidikan:

- Meskipun realisasi harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) belum sepenuhnya sesuai target, kualitas akses terhadap pendidikan tampaknya mengalami perbaikan, baik melalui penyediaan infrastruktur pendidikan maupun program afirmatif seperti beasiswa daerah.
- Program pembelajaran daring, pelibatan komunitas dalam pendidikan informal, serta penguatan peran desa dalam pengelolaan pendidikan dasar diyakini berkontribusi pada peningkatan capaian pendidikan yang berdampak pada IPM.

2. Dimensi Kesehatan:

- Peningkatan usia harapan hidup (UHH) dari 61,43 tahun (2020) menjadi 62,62 tahun (2024) mencerminkan adanya perbaikan layanan kesehatan primer, termasuk penurunan angka stunting dan peningkatan cakupan imunisasi.
- Intervensi program kesehatan ibu dan anak serta penguatan Posyandu berbasis masyarakat turut memperkuat ketahanan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil.

3. Dimensi Ekonomi:

- Pengeluaran per kapita mengalami peningkatan stabil dari Rp 8,572 juta (2020) menjadi Rp 9,577 juta (2024), menunjukkan pertumbuhan daya beli masyarakat.
- Meski PDRB belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi, program pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM mampu menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal.

Capaian IPM yang melampaui target pada tiga tahun terakhir (2022–2024) mengindikasikan resiliensi dan adaptabilitas pembangunan daerah, bahkan dalam konteks krisis. Namun demikian, ketimpangan capaian antarwilayah di dalam kabupaten masih menjadi tantangan nyata. Daerah pesisir dan kepulauan kecil cenderung tertinggal dari pusat-pusat layanan di Kalabahi dan sekitarnya. Hal ini memerlukan kebijakan afirmatif yang lebih tajam, termasuk perluasan layanan dasar berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi untuk menjangkau daerah terisolasi.

Selain itu, meskipun skor IPM meningkat, keberlanjutan capaian memerlukan penguatan pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Misalnya, peningkatan angka sekolah perlu diiringi dengan mutu pengajaran dan kompetensi lulusan, sementara pengeluaran per kapita harus diimbangi

dengan pengendalian inflasi dan penciptaan pekerjaan layak.

Secara umum, IPM Kabupaten Alor selama periode RPJMD 2020–2024 mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia yang cukup progresif.

2. Persentase Penduduk Miskin

Secara umum, terjadi tren penurunan persentase penduduk miskin dari 21,09% pada 2020 menjadi 19,87% pada 2024, dengan penurunan sebesar 1,22 persen poin selama lima tahun. Meskipun laju penurunan tidak terlalu tajam, arah perubahannya stabil dan menunjukkan kecenderungan positif, terutama sejak tahun 2022. Setelah stagnan pada 2020–2021, penurunan kembali berlangsung pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian realisasi yang secara konsisten lebih baik dari target mulai 2022 hingga 2024.

Penurunan angka kemiskinan ini cukup berarti mengingat Kabupaten Alor menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan keterbatasan fiskal daerah. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021 memperburuk daya beli masyarakat, khususnya sektor informal dan subsisten, yang selama ini mendominasi struktur ekonomi lokal. Ketertinggalan capaian pada 2021 menjadi cerminan nyata dari dampak ekonomi pandemi terhadap masyarakat rentan.

Meskipun angka kemiskinan menurun, disparitas spasial antar kecamatan di Kabupaten Alor masih tinggi. Beberapa wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata kabupaten. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih afirmatif dan kontekstual dalam desain kebijakan menggabungkan intervensi sektoral dengan penguatan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat.

Capaian penurunan kemiskinan Kabupaten Alor selama periode RPJMD 2020–2024 mencerminkan arah kebijakan yang relatif efektif namun belum cukup transformatif.

3. Pertumbuhan PDRB ADHK

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam di Kabupaten Alor, tercermin dari realisasi pertumbuhan negatif sebesar -0,80%, jauh di bawah target 5,25%. Ini merupakan dampak langsung dari pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan permintaan global dan domestik, serta terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi produktif.

Memasuki tahun 2021, ekonomi daerah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan tipis sebesar 0,02%, meskipun

masih belum mencerminkan pemulihan yang kuat. Tahun 2022 dan 2023 mencatatkan pertumbuhan yang semakin membaik, masing-masing sebesar 3,05% dan 3,40%, didorong oleh kembali normalnya kegiatan ekonomi, optimalisasi belanja pembangunan, serta meningkatnya produksi sektor pertanian, perdagangan, dan pemerintahan.

Pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD (2024), pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,47%, tetap menunjukkan tren naik meskipun belum mencapai target akhir sebesar 5,65%. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi akselerasi pemulihan, kapasitas struktur ekonomi daerah belum cukup elastis untuk mencapai target yang telah direncanakan.

Fakta ini menandai pentingnya penguatan sektor-sektor produktif strategis di masa mendatang, seperti pertanian berbasis nilai tambah, pengembangan UMKM, serta integrasi sektor pariwisata dan perikanan dalam kerangka ekonomi lokal. Perluasan investasi swasta dan peningkatan konektivitas antarwilayah juga menjadi pendorong utama untuk memacu pertumbuhan secara lebih inklusif dan berkelanjutan pada periode RPJMD selanjutnya.

4. Pengeluaran Perkapita

Selama periode 2020–2024, tren pengeluaran per kapita di Kabupaten Alor menunjukkan arah peningkatan yang konsisten dan bahkan melampaui target yang ditetapkan sejak tahun 2022. Pada awal periode (2020), pandemi COVID-19 memberikan tekanan pada daya beli masyarakat, di mana realisasi pengeluaran per kapita hanya mencapai Rp10.304 ribu atau sekitar 95,4% dari target yang ditetapkan.

Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, terjadi pemulihan yang cukup progresif. Tahun 2022 menjadi titik balik yang penting, di mana realisasi pengeluaran per kapita berhasil melampaui target, yakni sebesar Rp11.625 ribu dibandingkan target sebesar Rp11.200 ribu. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian Rp12.660 ribu melampaui target akhir sebesar Rp11.600 ribu, menunjukkan kinerja yang sangat positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian ini menegaskan bahwa selain pemulihan ekonomi makro, kebijakan intervensi daerah—seperti program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan pendapatan masyarakat berbasis potensi wilayah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga.

Secara strategis, penguatan tren ini harus dijaga dan ditingkatkan dalam periode RPJMD berikutnya dengan memperluas akses masyarakat

terhadap sumber penghasilan produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong keberlanjutan program peningkatan pendapatan rumah tangga berbasis komunitas. Selain itu, penting untuk terus memantau kualitas pengeluaran rumah tangga agar sejalan dengan peningkatan indikator kesejahteraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.

5. Persentase penduduk yang bekerja

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa selama periode 2020–2024, Kabupaten Alor mampu menjaga tingkat partisipasi kerja yang relatif tinggi dan stabil. Pada awal masa pandemi (2020), meskipun terdapat tekanan signifikan terhadap sektor-sektor tenaga kerja padat karya, realisasi masih berada pada angka 94,39% atau hanya sedikit di bawah target.

Seiring berjalannya waktu, khususnya pasca pandemi, terlihat adanya pemulihan yang konsisten, bahkan pada tahun 2022 dan 2023, capaian persentase penduduk yang bekerja berhasil melampaui target. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika realisasi mencapai 95,37% dibanding target 95,05%. Capaian ini menunjukkan pemulihan lapangan kerja yang cepat, khususnya di sektor informal, pertanian, perdagangan kecil, dan jasa pemerintahan. Namun, pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD (2024), meskipun capaian tetap tinggi pada 95,21%, angka ini sedikit berada di bawah target 95,35%. Hal ini menunjukkan adanya tekanan struktural atau perlambatan daya serap tenaga kerja di tengah peningkatan jumlah angkatan kerja baru dan belum optimalnya pertumbuhan sektor-sektor formal.

Secara umum, kinerja indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Alor memiliki ketahanan tenaga kerja yang cukup kuat, namun memerlukan transformasi struktural jangka menengah ke depan. Arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada:

- Diversifikasi sektor pencipta lapangan kerja, khususnya industri kecil dan ekonomi kreatif;
- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan *link-and-match* dengan kebutuhan pasar;
- Perluasan akses modal usaha mikro;
- Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi sektor padat karya.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya tingkat penduduk yang bekerja tetap tinggi, tetapi juga kualitas pekerjaan meningkat baik dari sisi upah, perlindungan kerja, maupun produktivitas.

6. Harapan Lama sekolah

Selama periode RPJMD 2020–2024, capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Alor menunjukkan tren meningkat secara konsisten dan selalu melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Tahun 2020 mencatatkan realisasi sebesar 13,05 tahun dibandingkan target 13,01, dan capaian ini terus mengalami kenaikan hingga mencapai 13,17 tahun pada tahun 2024, lebih tinggi dari target akhir sebesar 13,14 tahun.

Capaian ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sistem pendidikan formal, baik dari sisi partisipasi pendidikan dasar hingga menengah, maupun dari sisi ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan distribusi tenaga pendidik. Kinerja ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial, yang terefleksi dalam meningkatnya angka partisipasi murni dan kasar di berbagai jenjang.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa meskipun capaian kuantitatif HLS cukup menggembirakan, kualitas pendidikan tetap menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan ke depan. Tantangan seperti disparitas antar wilayah, keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil, dan keterbatasan guru berkualitas perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif dan pendekatan berbasis wilayah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian HLS dalam jangka menengah, arah kebijakan pembangunan pendidikan ke depan perlu difokuskan pada:

- Peningkatan akses dan retensi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama dari kelompok rentan;
- Pemerataan sarana pendidikan berkualitas di wilayah kepulauan dan perdesaan;
- Penguatan sistem pendidikan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global.

Dengan pendekatan tersebut, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Alor tidak hanya terus meningkat, tetapi juga mencerminkan kualitas dan relevansi pendidikan yang lebih baik dalam membentuk SDM unggul yang kompetitif.

7. Rata-rata lama sekolah

Selama periode RPJMD 2020–2024, indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Alor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan hampir mencapai target tahunan secara bertahap. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 7,92 tahun atau sekitar 98,5% dari target 8,03 tahun.

Kenaikan bertahap terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana capaian realisasi sebesar 8,15 tahun mendekati target akhir 8,17 tahun.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan retensi peserta didik di jenjang dasar hingga menengah. Selain itu, pencapaian ini juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal sebagai modal utama pengembangan sumber daya manusia.

Meski capaian realisasi RLS relatif positif, masih terdapat tantangan signifikan, seperti tingginya angka putus sekolah di beberapa wilayah terpencil dan rendahnya partisipasi di jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih terarah untuk menekan angka putus sekolah dan mendorong kelanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Strategi ke depan perlu menitikberatkan pada:

- Penguatan program penuntasan wajib belajar 12 tahun, dengan fokus pada daerah dengan angka putus sekolah tinggi;
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan, termasuk tenaga pendidik yang kompeten dan infrastruktur memadai;
- Pengembangan jalur pendidikan alternatif dan vokasi yang mampu menjawab kebutuhan pasar kerja lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Alor tidak hanya terus meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan yang lebih kuat untuk pengembangan SDM unggul dan berdaya saing.

8. Angka melek huruf usia 15 tahun keatas

Selama periode RPJMD 2020–2024, Kabupaten Alor berhasil mempertahankan dan secara bertahap meningkatkan angka melek huruf pada kelompok usia 15 tahun ke atas, dengan capaian realisasi yang secara konsisten mendekati dan bahkan melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pada tahun 2020, realisasi mencapai 97,72% atau hampir setara dengan target 97,83%, menunjukkan tingkat literasi dasar yang sudah cukup tinggi meskipun masih menghadapi tantangan geografis dan sosio-ekonomi. Seiring dengan kebijakan peningkatan akses pendidikan dan program literasi masyarakat, capaian terus meningkat hingga mencapai 98,15% pada tahun 2024, sedikit melampaui target 98,14%.

Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan literasi, seperti akses ke fasilitas pendidikan dan penyuluhan literasi di komunitas terpencil. Namun, keberlanjutan capaian ini menuntut upaya yang konsisten dalam menjaga kualitas pendidikan dasar serta program pemberdayaan literasi fungsional di semua jenjang usia.

Untuk memperkuat indikator ini ke depan, perlu difokuskan pada:

- Peningkatan kualitas pembelajaran membaca dan menulis sejak dini;
- Program literasi berkelanjutan untuk kelompok usia dewasa dan lanjut usia;
- Pengembangan akses sumber belajar dan teknologi informasi di daerah terpencil;
- Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan kampanye literasi.

Dengan demikian, angka melek huruf di Kabupaten Alor tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

9. Penurunan Prevalensi Stunting

Selama periode RPJMD 2020–2024, Kabupaten Alor telah menunjukkan komitmen nyata dalam menurunkan prevalensi stunting melalui berbagai intervensi gizi dan kesehatan, serta peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak. Data capaian menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting yang konsisten meskipun masih belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, prevalensi stunting tercatat sebesar 32,30%, sedikit melebihi target 32,00%, yang merefleksikan kondisi awal yang masih perlu perhatian intensif. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan penurunan bertahap, di mana realisasi pada tahun 2021 dan 2023 mendekati dan bahkan sedikit melampaui target. Namun, capaian pada tahun 2022 dan 2024 masih berada sedikit di atas target, yaitu 29,00% dan 25,10%, dibandingkan target 28,50% dan 24,00%.

Kendala utama yang mempengaruhi pencapaian target penurunan stunting meliputi tantangan geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya kesehatan, dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pola konsumsi gizi keluarga. Oleh karena itu, penurunan stunting



memerlukan pendekatan multisektoral yang lebih terintegrasi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, edukasi gizi, perbaikan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat.

Ke depan, strategi utama yang perlu dikembangkan mencakup:

- Penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan fokus pada 1.000 hari pertama kehidupan;
- Perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
- Peningkatan kesadaran dan praktik pola hidup sehat melalui edukasi masyarakat;
- Koordinasi lintas sektor dan pelibatan aktif masyarakat dalam program penurunan stunting.

Dengan upaya tersebut, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Alor dapat ditekan lebih signifikan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi peningkatan kualitas SDM dan pembangunan berkelanjutan.

10. Usia Harapan Hidup

Capaian Usia Harapan Hidup di Kabupaten Alor selama periode RPJMD 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten, serta selalu melampaui target yang ditetapkan setiap tahun. Pada tahun 2020, realisasi UHH tercatat sebesar 67,71 tahun, sedikit lebih tinggi dari target 67,69 tahun. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana capaian realisasi sebesar 68,17 tahun melampaui target akhir sebesar 68,13 tahun.

Kinerja positif ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Alor terus mengalami perbaikan. Peningkatan ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain: peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, ketersediaan tenaga medis, program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.

Namun demikian, pencapaian ini masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah kepulauan dan perdesaan, disparitas akses layanan antar wilayah, serta masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan di beberapa lokasi. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan upaya yang lebih holistik dan inklusif untuk mendorong kenaikan UHH secara merata.

Arah kebijakan strategis yang perlu dikembangkan meliputi:



- Penguatan layanan kesehatan primer dan promotif-preventif, terutama di wilayah terpencil;
- Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia;
- Perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan keberlanjutan pembiayaan daerah untuk pelayanan kesehatan dasar;
- Integrasi program kesehatan dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan sehat.

Dengan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Alor akan terus meningkat secara bermakna dan menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.

11. Cakupan peserta KB aktif

Capaian cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Alor selama periode RPJMD 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, dengan kinerja yang secara umum mendekati dan bahkan melampaui target pada sebagian besar tahun. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 72,80%, hanya sedikit di bawah target 73,00%. Pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada 2022 dan 2023, capaian berhasil melampaui target, masing-masing sebesar 74,21% dan 74,36%.

Namun demikian, pada tahun terakhir (2024), capaian sedikit mengalami stagnasi di angka 74,44%, tidak mencapai target akhir sebesar 75,00%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berkurangnya intensitas penyuluhan, keterbatasan logistik alat kontrasepsi di lapangan, serta tantangan geografis dalam menjangkau wilayah terpencil dan kepulauan. Secara umum, tren positif ini mencerminkan keberhasilan program penguatan peran Puskesmas, kader KB, dan sinergi antara BKKBN dengan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi keluarga dalam program KB. Ketersediaan metode kontrasepsi yang beragam dan akses yang lebih mudah juga turut berkontribusi terhadap capaian ini.

Namun, keberhasilan jangka panjang sangat tergantung pada kualitas layanan KB, keberlanjutan program edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan partisipasi laki-laki dalam program KB, yang selama ini masih rendah.

Arah kebijakan strategis ke depan perlu difokuskan pada:

- Perluasan jangkauan layanan KB berbasis wilayah, terutama daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK);

- Peningkatan kualitas layanan KB dan pelatihan tenaga kesehatan;
- Penguatan program advokasi dan edukasi masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga;
- Integrasi program KB dengan layanan kesehatan ibu dan anak serta pembangunan keluarga sejahtera.

Dengan pendekatan tersebut, cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Alor diharapkan terus meningkat secara berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga serta pengendalian struktur demografis daerah.

12. Indeks Kualitas Lingkungan

Selama periode RPJMD 2020–2024, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Alor menunjukkan tren positif yang relatif konsisten. Pada tahun 2020, capaian sebesar 67,44 telah melampaui target 66,00. Peningkatan berlanjut hingga tahun 2023, di mana capaian menyentuh angka 69,10. Namun pada tahun 2024, capaian sedikit menurun ke 69,50 dari target 70,00, meskipun secara absolut tetap lebih tinggi dibandingkan awal periode.

Peningkatan kualitas lingkungan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta rehabilitasi kawasan kritis. Beberapa inisiatif seperti pengendalian sampah, pelestarian hutan lindung, pengembangan desa konservasi, serta pengawasan terhadap kegiatan industri ekstraktif dinilai berkontribusi positif terhadap kinerja IKL.

Namun demikian, tantangan utama masih berkisar pada:

- Keterbatasan infrastruktur pengelolaan limbah dan sampah domestik,
- Ancaman degradasi kawasan pesisir dan laut akibat aktivitas perikanan dan pariwisata,
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program lingkungan berbasis komunitas, serta
- Minimnya data spasial dan sistem informasi lingkungan yang mutakhir.

Selain itu, tekanan terhadap ekosistem pesisir dan perbukitan akibat alih fungsi lahan serta pembangunan permukiman baru juga menjadi faktor yang harus diwaspadai.

Dalam konteks keberlanjutan pembangunan, beberapa langkah strategis perlu diperkuat untuk mempertahankan dan meningkatkan IKL, antara



lain:

- Peningkatan kapasitas pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, baik udara, air, maupun tanah;
- Rehabilitasi kawasan kritis dan penghijauan wilayah berbasis kearifan lokal;
- Penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah dan limbah;
- Penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan yang lebih responsif dan terintegrasi;
- Digitalisasi sistem pemantauan kualitas lingkungan melalui aplikasi dan dashboard berbasis spasial.

Dengan pendekatan yang adaptif dan partisipatif, peningkatan IKL diharapkan tidak hanya menjadi indikator teknis semata, namun juga sebagai fondasi dalam menciptakan ekosistem yang sehat, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

13. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Capaian indikator menunjukkan tren pertumbuhan yang positif namun relatif lambat dalam kurun waktu 2020–2024. Dimulai dari angka realisasi 28,42% pada tahun 2020, peningkatan berjalan konsisten hingga mencapai 31,10% pada tahun 2024. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan, yaitu 33,00%.

Gap antara target dan realisasi yang cenderung konsisten mengindikasikan adanya tantangan struktural dan fiskal dalam mempercepat peningkatan kualitas jalan. Beberapa penyebab utama keterbatasan capaian antara lain:

- Keterbatasan anggaran infrastruktur jalan, terutama untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan berkala di wilayah dengan medan berat,
- Kondisi geografis Kabupaten Alor yang dominan bergunung dan tersebar dalam wilayah kepulauan, sehingga menimbulkan biaya konstruksi dan logistik yang tinggi,
- Rendahnya kapasitas kontraktor lokal dan peralatan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan jalan di medan sulit, serta
- Keterbatasan data kondisi jalan secara digital dan terintegrasi yang menghambat prioritas intervensi berbasis spasial.

Meskipun demikian, arah pembangunan infrastruktur jalan selama RPJMD 2020–2024 sudah berada dalam jalur yang benar. Pemerintah

Kabupaten Alor telah memulai pendekatan pembangunan jalan berbasis klaster pertumbuhan ekonomi (akses ke pasar, pariwisata, dan pelayanan dasar), serta intervensi pemeliharaan rutin melalui skema padat karya. Dalam rangka meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik secara signifikan di tahun-tahun mendatang, beberapa strategi prioritas yang dapat dikedepankan antara lain:

- Peningkatan alokasi anggaran berbasis cost-efficiency dan skala prioritas ruas jalan strategis;
- Pemanfaatan teknologi pemetaan jalan berbasis GIS untuk pengambilan keputusan berbasis bukti;
- Peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat melalui DAK fisik dan Dana Inpres Jalan Daerah;
- Penguatan pemeliharaan jalan melalui sinergi lintas OPD, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan jalan lingkungan;
- Pengembangan metode konstruksi yang adaptif terhadap kondisi geografis dan iklim ekstrem wilayah Alor.

Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan berbasis data, peningkatan kualitas jaringan jalan kabupaten tidak hanya akan memperbaiki indikator teknis, namun juga berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan konektivitas antar pulau, dan penguatan basis ekonomi lokal.

14. Rasio PAD

Selama periode 2020–2024, Rasio PAD Kabupaten Alor menunjukkan tren meningkat secara bertahap, dari 5,38% pada tahun 2020 menjadi 7,10% pada tahun 2024. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir sebesar 7,50%, pencapaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja pendapatan asli daerah, terutama dalam aspek intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.

Peningkatan ini mencerminkan hasil dari berbagai inisiatif daerah, seperti:

- Digitalisasi layanan perizinan dan pajak daerah melalui sistem informasi pendapatan,
- Penguatan kapasitas petugas pemungut retribusi di sektor-sektor strategis (pasar, parkir, terminal),
- Penyesuaian regulasi daerah yang mendukung optimalisasi potensi PAD (diantaranya penyesuaian tarif retribusi),

- Upaya penertiban dan pemutakhiran data objek pajak daerah, terutama PBB dan pajak restoran.

Namun demikian, struktur pendapatan daerah Kabupaten Alor masih sangat tergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini menandakan masih rendahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi fiskalnya secara optimal, yang dipengaruhi oleh:

- Terbatasnya basis objek pajak dan retribusi karena struktur ekonomi yang belum kuat,
- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak lokal,
- Kelemahan dalam sistem pengawasan dan penegakan sanksi pajak/retribusi,

Untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah ke depan, strategi yang harus ditempuh antara lain:

- Diversifikasi sumber PAD berbasis potensi unggulan daerah seperti sektor pariwisata, perikanan tangkap, dan jasa transportasi antar pulau;
- Transformasi digital dalam manajemen pendapatan daerah, termasuk integrasi data pajak dan retribusi dengan layanan publik;
- Peningkatan efisiensi pemungutan dan pengawasan berbasis teknologi (e-monitoring dan e-billing);
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta dan lembaga keuangan untuk mengelola aset daerah secara produktif;
- Reformulasi peraturan daerah yang responsif terhadap dinamika ekonomi lokal dan keterjangkauan masyarakat.

Dengan penguatan aspek kelembagaan, SDM, regulasi, dan teknologi, Rasio PAD Kabupaten Alor diharapkan tidak hanya meningkat secara numerik, tetapi juga secara struktural, menjadikan PAD sebagai pilar utama dalam pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Nilai SAKIP

Selama periode RPJMD 2020–2024, capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Alor menunjukkan tren perbaikan yang konsisten, meskipun secara bertahap. Pada tahun 2020 hingga 2023, nilai SAKIP Kabupaten Alor berada pada kategori CC, mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih dalam tahap penguatan dasar, dengan sejumlah catatan dalam hal efektivitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi internal.

Meskipun berada dalam kategori yang sama selama empat tahun

berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Alor terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan, antara lain melalui:

- Penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berbasis kinerja,
- Penajaman indikator dan sasaran perangkat daerah,
- Penguatan evaluasi internal berbasis RB (reformasi birokrasi),
- Pendampingan teknis lintas OPD dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
- Peningkatan pemahaman aparatur terhadap *performance-based budgeting*.

Hasil dari berbagai upaya tersebut mulai terlihat pada tahun 2024, di mana nilai SAKIP Kabupaten Alor meningkat menjadi kategori B. Kenaikan ini menjadi tonggak penting yang menandakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi penggunaan anggaran, serta penguatan budaya kerja berorientasi hasil di seluruh lini birokrasi. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen pimpinan daerah dalam mengawal transformasi kinerja secara sistemik, serta menjadi pijakan penting dalam menyusun RPJMD berikutnya yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat capaian SAKIP ke depan, arah strategis yang perlu ditempuh meliputi:

- Penguatan manajemen kinerja berbasis data dan hasil, bukan hanya pemenuhan dokumen administratif,
- Penguatan integrasi SAKIP dengan sistem penganggaran dan e-planning,
- Revitalisasi cascading kinerja sampai pada level jabatan fungsional, agar akuntabilitas melekat secara menyeluruh,
- Penerapan reward and punishment system berbasis capaian kinerja perangkat daerah,
- Pemanfaatan dashboard monitoring kinerja real-time agar pimpinan daerah dapat mengambil keputusan berbasis bukti.

Dengan demikian, SAKIP tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga menjadi sistem manajemen kinerja yang strategis untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

16. Opini BPK Terhadap LKPD

Selama periode 2020–2024, Pemerintah Kabupaten Alor secara konsisten berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini mencerminkan bahwa laporan keuangan

daerah disusun secara andal, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung dengan sistem pengendalian intern yang efektif, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian opini WTP selama lima tahun berturut-turut bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti komitmen daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil (result-based governance).

Konsistensi ini juga menjadi indikator bahwa Kabupaten Alor telah:

- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan sistematis, terutama dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran,
- Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penatausahaan aset daerah secara berkelanjutan,
- Memperkuat peran APIP (Inspektorat Daerah) dalam fungsi pengawasan dan reviu laporan keuangan,
- Menindaklanjuti secara cepat dan tuntas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Meskipun telah memperoleh opini WTP, tantangan yang lebih besar adalah memastikan bahwa capaian akuntabilitas ini memberikan dampak langsung pada kualitas layanan publik dan efektivitas pembangunan. Oleh karena itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Alor perlu:

- Memastikan keterhubungan antara laporan keuangan, laporan kinerja, dan output pembangunan, sehingga akuntabilitas anggaran benar-benar sejalan dengan hasil pembangunan daerah,
- Memperkuat kualitas belanja daerah, dengan memastikan alokasi anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting),
- Mengembangkan sistem pengendalian internal berbasis risiko (risk-based internal control) untuk memitigasi kelemahan yang belum berdampak material namun berpotensi berulang,
- Meningkatkan literasi dan kapasitas keuangan bagi ASN, khususnya bendahara, PPK, dan pengelola keuangan di OPD,
- Mengintegrasikan pengelolaan aset dan barang milik daerah dalam satu sistem informasi yang akurat dan real time.

Dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), pencapaian WTP diharapkan bukan hanya menjadi prestasi akuntansi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2.5. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode dimaksud.

Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau baseline data yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor periode Tahun 2025-2029. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah ke depannya.



2.5.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Alor meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 2 113 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

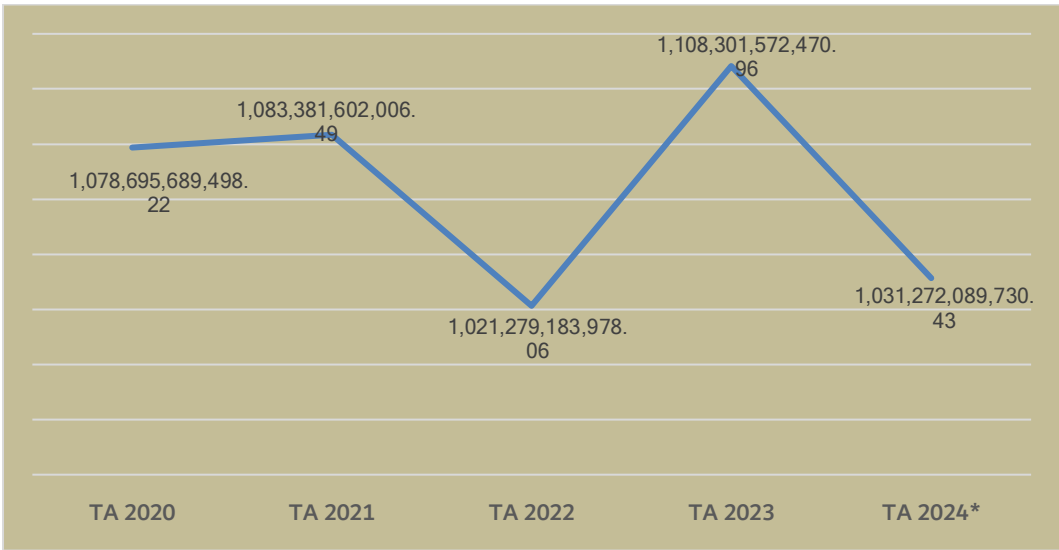
No	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan asli daerah	61.348.896.749,31	50.490.183.376,97	60.146.259.389,06	62.998.943.707,96	57.922.250.516,43
	B. Pendapatan Transfer	968.498.286.055,41	994.746.727.567,00	929.143.994.855,00	1.030.584.861.270,00	973.349.839.214,00
	C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	48.848.506.693,50	38.144.691.062,52	31.988.929.734,00	14.717.767.493,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.078.695.689.498,22	1.083.381.602.006,49	1.021.279.183.978,06	1.108.301.572.470,96	1.031.272.089.730,43
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	659.263.474.779,00	646.966.612.285,05	652.003.301.127,19	709.815.097.228,54	701.992.772.536,00
	B. Belanja Modal	184.295.110.185,78	192.289.964.548,00	147.806.459.997,00	172.283.457.695,00	111.221.835.832,00
	C. Belanja Tak Terduga	1.381.103.752,00	1.551.406.000,00	1.950.342.270,00	1.871.266.594,64	184.033.625,00
	D. Belanja Transfer	226.498.046.962,00	224.779.225.389,00	212.032.713.852,00	195.233.808.919,00	199.447.555.720,00
	JUMLAH BELANJA	1.071.437.735.678,78	1.065.587.208.222,05	1.013.792.817.246,19	1.079.203.630.437,18	1.012.846.197.684,00
	SURPLUS/DEFISIT	7.257.953.819,44	17.794.393.784,44	7.486.366.731,87	29.097.942.033,78	18.425.892.046,43
5	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	25.659.219.713,02	32.924.392.832,46	47.719.449.799,79	51.213.049.636,48	14.425.892.046,43
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.954.000.000,00	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.659.219.713,02	29.924.392.832,46	43.719.449.799,79	46.259.049.636,48	-4.000.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	32.917.173.532,46	47.718.786.616,90	51.205.816.531,66	75.356.991.670,26	14.425.892.046,43

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

2.5.1.1. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Secara garis besar

pertumbuhan pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Alor dalam periode 2020-2024 sebagaimana gambar berikut.

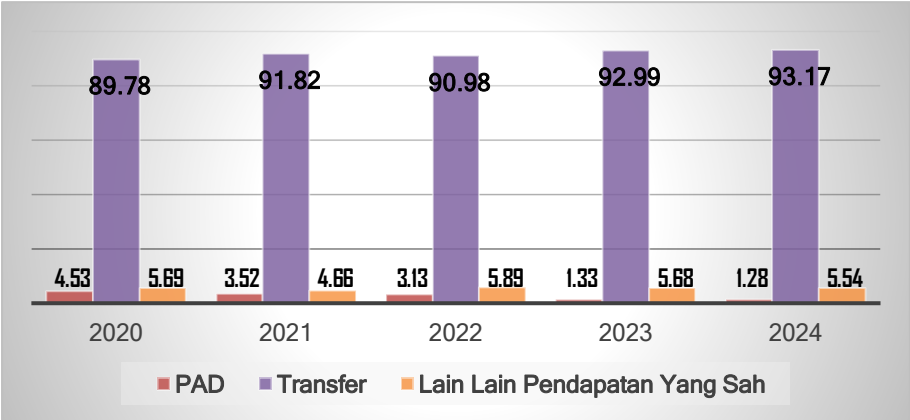


Sumber: BKAD Kabupaten Alor, Tahun 2025

Grafik 2. 25 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Alor selama kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi pertumbuhan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan daerah Tahun 2020 sebesar Rp. 1.083.381.601.506,49 atau meningkat 0,43 persen ; selanjutnya tahun 2022 menurun 5,73 persen atau berkurang menjadi Rp. 1.021.279.183.978,06 Tahun 2023 meningkat sebesar 8,52 persen atau meningat menjadi Rp. 1.108.301.572.470,96 dan tahun 2024 berkurang sebesar 6,95 persen atau berkurang menjadi Rp. 1.031.272.089.730,43. Dengan demikian maka rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Alor Tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar (-2,00 persen).

Pertumbuhan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Proporsi masing-masing kelompok pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Alor, Tahun 2025

Grafik 2. 26 Persentase Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Alor

Berdasarkan proporsi sumber pendapatan, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan yang paling dominan berasal dari pendapatan transfer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Alor pada periode 2020-2024 masih bergantung pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa serta Dana Transfer Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

a) Realisasi PAD Tahun 2020-2024

Pendapatan Asli Daerah meliputi; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran tentang realisasi PAD tahun 2020-2024 fluktuasi sebagaimana grafik berikut:



Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Grafik 2. 27 Realisasi PAD Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan struktur PAD Kabupaten Alor masih sangat bergantung pada dua komponen utama, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun terjadi peningkatan agregat PAD dalam beberapa tahun terakhir, kinerja dua komponen lainnya cenderung stagnan atau menurun, yang menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan kekayaan daerah serta pemanfaatan sumber pendapatan sah lainnya. Ke depan, diperlukan langkah strategis untuk diversifikasi sumber PAD, peningkatan kapasitas kelembagaan pemungutan, serta reformasi BUMD agar mampu berkontribusi lebih signifikan terhadap fiskal daerah.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah kelompok pendapatan yang menyumbang porsi terbesar bagi pendapatan daerah. Rata-rata porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan Kabupaten Alor tahun 2020–2024 sebesar 91,99 persen dengan rata-rata pertumbuhan 0,37 persen pertahun. Secara umum realisasi pendapatan transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat atau Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi NTT dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Alor Tahun 2025

Grafik 2. 28 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

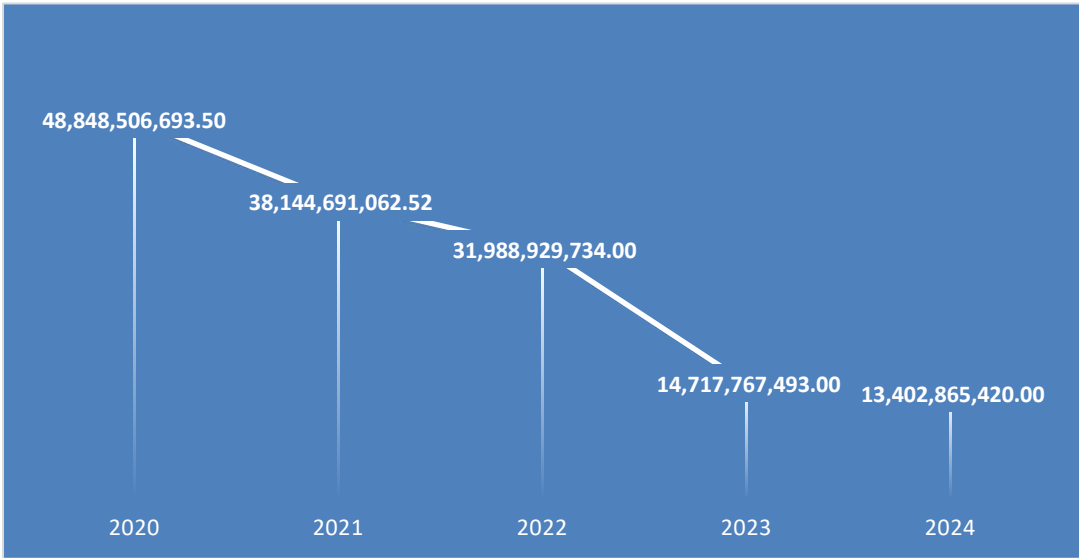
Pendapatan transfer merupakan komponen dominan dalam struktur pendapatan Kabupaten Alor, yang berasal dari transfer pemerintah pusat (baik Dana Perimbangan maupun transfer lainnya) serta transfer dari Pemerintah Provinsi. Selama lima tahun terakhir tren pendapatan transfer menunjukkan dinamika setiap komponen. Dana Perimbangan merupakan sumber utama pendapatan transfer dengan kontribusi terbesar setiap tahunnya dengan nilai realisasi mengalami fluktuasi dengan rata-rata selama lima tahun mencapai 802,17 miliar. Tren ini menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan penyesuaian yang lazim terjadi akibat perubahan formula DAU, realokasi DAK dan kebijakan transfer sektoral dari pusat. Untuk komponen Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yang mencakup Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, atau transfer khusus lainnya di luar dana perimbangan, realisasinya menunjukkan tren menurun secara bertahap. Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan kinerja fiskal daerah agar tetap kompetitif dalam memperoleh alokasi transfer berbasis kinerja.

Untuk komponen Transfer dari Pemerintah Provinsi NTT cenderung rendah

namun mengalami tren meningkat. Meskipun nilainya masih kecil dengan rata-rata kontribusi hanya sekitar 2% dari total transfer, peningkatan ini merupakan sinyal positif dari perhatian provinsi terhadap pembangunan kabupaten.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD dan Dana Hibah. Rata-rata porsi yang disumbangkan oleh kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode 2020-2024 adalah sebesar 2,25 persen per tahun. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Dah dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Grafik 2. 29 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan data realisasi, komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah di Kabupaten Alor menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan dari komponen ini tercatat sebesar 48,85 miliar, kemudian menurun menjadi 14,72 miliar pada tahun 2023. Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 69,9 persen dalam kurun waktu empat tahun. Di sisi lain, prosentase capaian terhadap target juga menunjukkan kecenderungan menurun. Jika pada tahun 2020 capaian mencapai 129,95 persen, maka pada tahun 2023 turun menjadi 94,19 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas dalam optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber yang tidak termasuk dalam pendapatan utama daerah. Secara teknis, hal ini perlu menjadi perhatian karena mencerminkan baik potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal maupun perlunya penyempurnaan dalam perencanaan dan pengelolaan



pendapatan lainnya. Untuk kondisi tahun 2024 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum ditampilkan dikarenakan masih dalam tahapan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

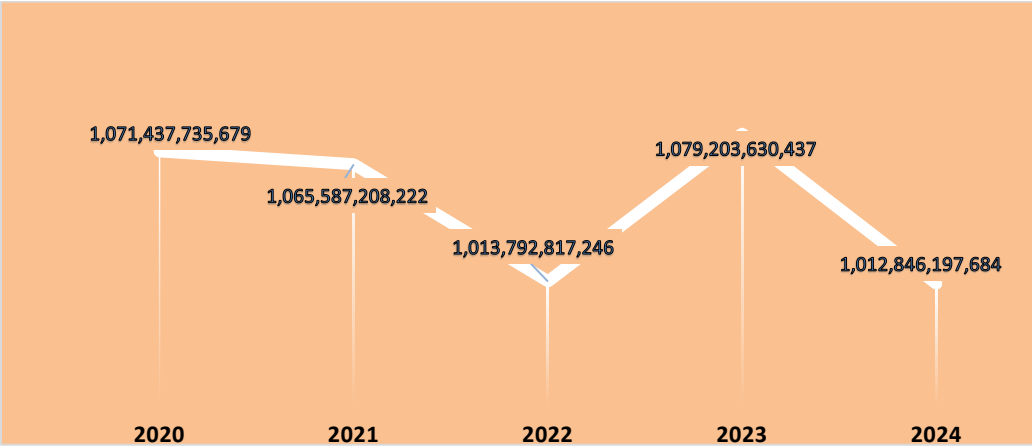
2.5.1.2. Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga, (4) Belanja Transfer. Klasifikasi kelompok belanja dimaksud selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pengelolaan belanja daerah mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*Performance Budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

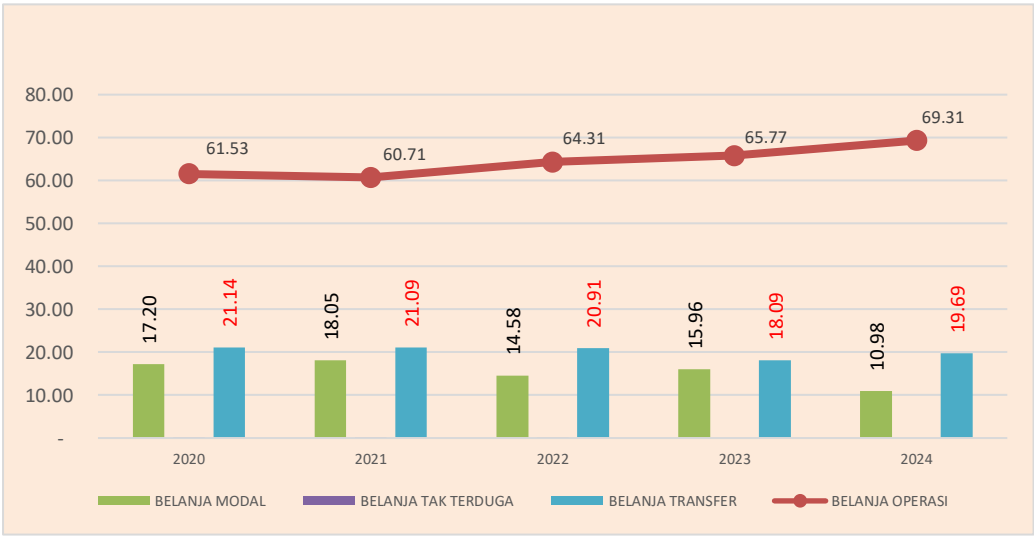
Data belanja daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Grafik 2. 30 Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah Kabupaten Alor selama kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi pertumbuhan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan ritme yang sama dengan realisasi pendapatan daerah sebagaimana tersaji pada gambar 3.1. Pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2020 berkurang sebesar 9,46 persen dan tahun 2021 sebesar minus 0,55 persen sebagai akibat dari adanya penyesuaian terhadap penurunan pendapatan daerah. Pada pelaksanaan APBD Tahun 2022 belanja daerah menurun 4,86 persen, tahun 2023 pertumbuhan belanja meningkat 6,45 persen dan pada Tahun 2024 pertumbuhana belanja menurun lagi sebesar minus 6,15 persen. Secara rata-rata belanja daerah pada periode 2020-2024 mengalami penurunan sebesar minus 1,28 persen. Penurunan belanja daerah sebagaimana dimaksud dihasilkan dari kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Data realisasi belanja daerah pada masing-masing kelompok belanja sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada grafik berikut.



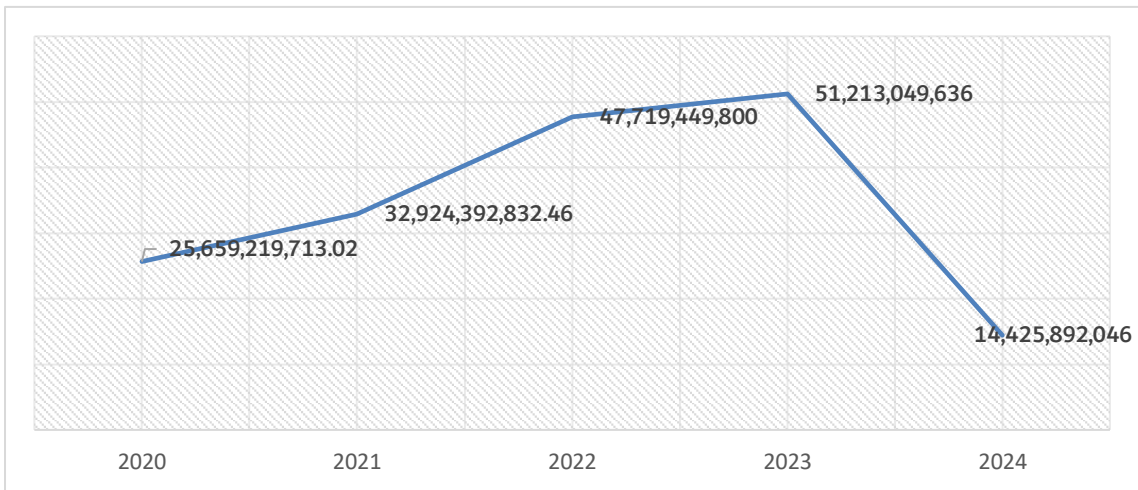
Sumber : BKAD, 2025

Grafik 2. 31 Prosentase Realisasi Komponen Belanja Daerah

2.5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Surplus terjadi ketika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka pengeluaran pembiayaan untuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran maka Penerimaan Pembiayaan untuk menutup Defisit.

Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2020-2024 mengacu pada kebijakan anggaran Surplus Anggaran yang digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan yakni Penyertaan Modal pada Bank NTT dan Perusahaan Daerah sehingga anggaran menjadi berimbang. Pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selalu terdapat penambahan pada penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dapat menambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan. Penambahan pada SiLPA berdampak pada peningkatan Pembiayaan Netto yang dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan maupun tambahan kegiatan baru. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Alor selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut.

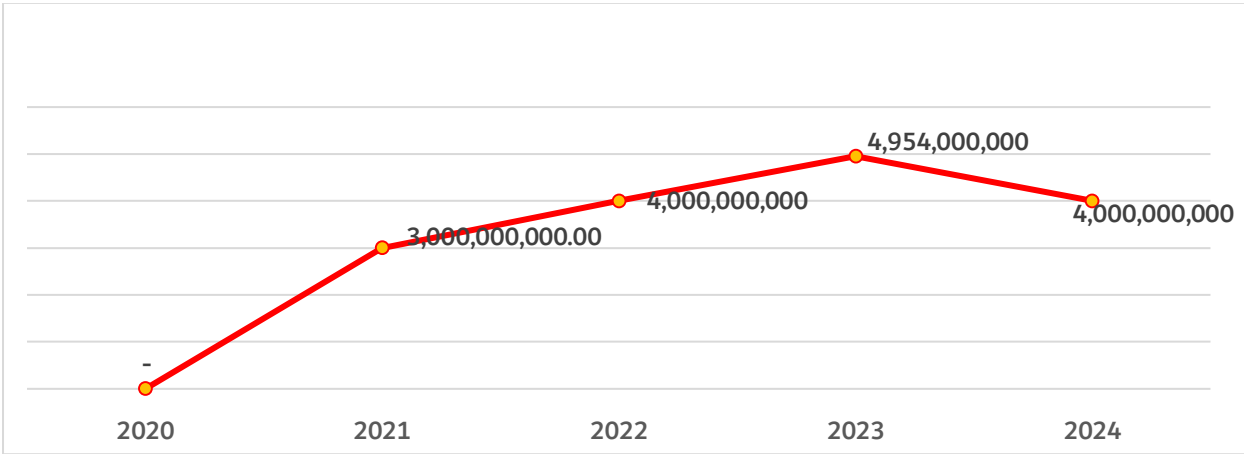


Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Grafik 2. 32 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) pada PT. Bank Nusa Tenggara Timur dan Perusahaan Daerah. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Grafik 2. 33 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024



2.5.1.4. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar). Neraca Kabupaten Alor tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2 114 Neraca Kabupaten Alor tahun 2020-2023

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset lancar	53.996.025.997,18	71.709.107.720,42	76.308.229.839,60	109.660.752.484,93	122.012.572.117,71
	B. Investasi jangka panjang	14.557.355.337,97	17.303.821.840,03	20.657.574.318,32	24.382.394.427,23	28.363.987.406,08
	C. Aset tetap	1.804.301.889.764,90	2.140.035.437.118,90	1.788.150.735.052,98	1.842.621.239.930,39	1.847.479.478.178,11
	D. Aset lainnya	191.563.319.878,99	203.594.281.071,14	206.314.104.691,91	215.693.146.838,22	216.558.805.052,85
	JUMLAH ASET	2.064.418.590.979,03	2.432.642.647.750,49	2.091.430.643.902,82	2.195.779.889.439,95	2.217.829.414.525,53
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban jangka pendek	12.543.618.851,04	11.297.801.677,15	4.120.230.146,98	4.717.226.038,92	2.025.952.119,29
	B. Jumlah kewajiban jangka panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	12.543.618.851,04	11.297.801.677,15	4.120.230.146,98	4.717.226.038,92	2.025.952.119,29
3.	EKUITAS					
	Ekuitas	2.051.874.972.127,99	2.421.344.846.073,34	2.087.310.413.755,83	2.191.062.663.401,03	2.215.803.462.406,24
	JUMLAH EKUITAS	2.051.874.972.127,99	2.421.344.846.073,34	2.087.310.413.755,83	2.191.062.663.401,03	2.215.803.462.406,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.064.418.590.979,03	2.432.642.647.750,49	2.091.430.643.902,82	2.195.779.889.439,95	2.217.829.414.525,53

Sumber: BKAD Kab. Alor, 2025



Aset atau aktiva dalam akuntansi memiliki pengertian sebagai sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan dan (5) aset lainnya. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam Dana Cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio keuangan daerah Tahun 2020 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 115 Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (<i>Curent Ratio</i>)	4,30	6,35	18,52	23,25	
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	3,02	4,69	14,13	19,10	
3	Total Hutang Terhadap Total Aset	0,006076	0,004644	0,001970053	0,002148315	

Sumber: BKAD Kabupaten Alor Tahun 2025



Current ratio merupakan cara menghitung rasio likuiditas untuk mengetahui tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva likuid yang dimiliki pada saat ini atau aktiva lancar (current asset). Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Current Ratio terus meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2024. Pada tahun 2020 nilai Current Ratio sebesar 4,30 yang artinya bahwa setiap Rp. 1,- hutang Pemerintah Kabupaten Alor dapat dijamin oleh Rp. 4,30,- dari harta lancar yang dimiliki atau kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek adalah 4,30 :1.

Quick Ratio lebih quick dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick Ratio telah mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Alor menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2020 setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan 4,30 berbanding 1 untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Rasio total hutang terhadap total aset sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Alor masih cukup kuat dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang yang ada saat ini.

2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024

2.5.2.1. Proporsi Anggaran

Proporsi realisasi anggaran Kabupaten Alor bertujuan untuk memperoleh data realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan pada tahun berikutnya. Untuk mendapatkan nilai proporsi realisasi anggaran belanja Kabupaten Alor terlebih dahulu dengan mengetahui realisasi belanja setiap komponen belanja tahun anggaran 2019 – 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2 116 Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Per Tahun					%
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BELANJA	1.071.437.735.678,78	1.065.587.208.222,05	1.013.792.817.246,19	1.079.203.630.437,18	1.012.846.197.684,00	- 0,01
1.1	BELANJA OPERASI	659.263.474.779,00	646.966.612.285,05	652.003.301.127,19	709.815.097.228,54	701.992.772.536,00	0,02
1.1.1	Belanja Pegawai	338.074.097.195,00	338.126.914.876,70	351.399.612.546,00	369.019.162.539,00	428.232.419.922,00	0,06
1.1.2	Belanja Barang	313.463.527.584,00	278.185.455.362,35	274.298.088.853,19	290.418.007.075,54	218.830.610.609,00	- 0,08
1.1.5	Belanja Hibah	5.813.850.000,00	13.828.697.500,00	7.38.209.000,00	18.403.972.500,00	45.501.398.500,00	0,97
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.912.000.000,00	16.825.544.546,00	18.927.390.728,00	31.973.955.114,00	9.428.343.505,00	1,98
1.2	BELANJA MODAL	184.295.110.185,78	192.289.964.548,00	147.806.459.997,00	172.283.457.695,00	111.221.835.832,00	- 0,09
1.2.1	Belanja Tanah	4.000.000.000,00	1.519.840.000,00	55.227.878,00	3.145.937.600,00	-	13,34
1.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	51.324.271.576,00	30.085.420.365,00	34.409.905.109,00	42.681.724.026,00	22.819.473.958,00	- 0,12
1.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	59.110.749.899,00	116.352.760.510,00	63.880.286.474,00	36.638.717.887,00	35.663.479.231,00	0,02
1.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.410.813.930,11	42.618.732.223,00	48.137.570.735,00	88.798.469.927,00	52.708.882.643,00	0,09
1.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.449.274.780,67	1.713.211.450,00	1.323.469.801,00	1.018.608.255,00	30.000.000,00	- 0,58
1.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.381.103.752,00	1.551.406.000,00	1.950.342.270,00	1.871.266.594,64	184.033.625,00	- 0,14
1.3.1	Belanja Tak Terduga	1.381.103.752,00	1.551.406.000,00	1.950.342.270,00	1.871.266.594,64	184.033.625,00	- 0,14
1.4	TRANSFER	226.498.046.962,00	224.779.225.389,00	212.032.713.852,00	195.233.808.919,00	199.447.555.691,00	- 0,03
1.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	759.819.809,00	692.204.610,00	780.476.937,00	829.620.648,00	923.722.319,00	0,05
1.4.2	Bagi Hasil Pajak						
1.4.3	Bantuan Keuangan ke Desa	225.738.227.153,00	224.087.020.779,00	211.252.236.915,00	194.404.188.271,00	198.523.833.372,00	- 0,03
1.4.4	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, Tahun 2025



Selanjutnya proporsi atau rasio pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2 117 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Kabupaten Alor

Tahun	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Pengeluaran Pembiayaan	Total Belanja Daerah	Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan	Proporsi Belanja Pegawai + Pengeluaran Pembiayaan (%)
2020	338.074.097.195	-	1.071.437.735.679	1.071.437.735.679	31,55
2021	338.126.914.877	3.000.000.000	1.065.587.208.222	1.068.587.208.222	31,64
2022	351.399.612.546	4.000.000.000	1.013.792.817.246	1.017.792.817.246	34,53
2023	369.019.162.539	4.954.000.000	1.079.203.630.437	1.084.157.630.437	34,04
2024	341.472.276.922	4.000.000.000	1.012.846.197.684	1.016.846.197.684	33,58
	1.738.092.064.079	15.954.000.000	5.242.867.589.268	5.258.821.589.268	33,05

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Alor selama periode 2020-2024 adalah sebesar 33,05 persen. Rasio ini mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir seiring dengan adanya pemerintah pusat untuk penerimaan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Pegawai Negeri Sipil.

2.5.2.2. Analisis Fiskal Daerah

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Data Proporsi Belanja Operasi dan komponen belanjanya dari tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.113 berikut.



Tabel 2 118 Proporsi Belanja Operasi dan Komponen Belanja Kabupaten Alor, Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi	Nilai	Proporsi
BELANJA	1.071.437.735.678,78		1.065.587.208.222,05		1.013.792.817.246,19		1.079.203.630.437,18		1.012.846.197.684,00	
BELANJA OPERASI	659.263.474.779,00	61,53	646.966.612.285,05	60,71	652.003.301.127,19	64,31	709.815.097.228,54	65,77	701.992.772.536,00	69,31
Belanja Pegawai	338.074.097.195,00	31,55	338.126.914.876,70	31,73	351.399.612.546,00	34,66	369.019.162.539,00	34,19	428.232.419.922,00	42,28
Belanja Barang dan Jasa	313.463.527.584,00	29,26	278.185.455.362,35	26,11	274.298.088.853,19	27,06	290.418.007.075,54	26,91	218.830.610.609,00	21,61
Belanja Hibah	5.813.850.000,00	0,54	13.828.697.500,00	1,30	7.378.209.000,00	0,73	18.403.972.500,00	1,71	45.501.398.500,00	4,49
Belanja Bantuan Sosial	1.912.000.000,00	0,18	16.825.544.546,00	1,58	18.927.390.728,00	1,87	31.973.955.114,00	2,96	9.428.343.505,00	0,93

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

Selama lima tahun terakhir Belanja Operasi dalam APBD Kabupaten Alor menunjukkan tren yang cenderung meningkat, baik dari segi nilai absolut maupun proporsinya terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2020 Belanja Operasi tercatat sebesar 61,53 persen dari total belanja dan meningkat pada tahun 2024 menjadi persen 701,99 miliar atau 69,31 persen dari total belanja daerah dan merupakan proporsi tertinggi selama lima tahun terakhir.

Secara komposisi, Belanja Pegawai mendominasi struktur Belanja Operasi, naik dari persen 338,07 miliar pada 2020 menjadi 428,23 miliar pada 2024. Proporsinya terhadap total belanja operasi juga meningkat dari 31,55 persen menjadi 42,28 persen.

Sebaliknya Belanja Barang dan Jasa menunjukkan tren menurun, dari 313,46 miliar atau 29,26 persen pada tahun 2020 menjadi 218,83 miliar atau 21,61 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran prioritas belanja. Sedangkan untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial menunjukkan fluktuasi, namun secara keseluruhan, tren belanja operasi Kabupaten Alor selama lima tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan dominasi Belanja Pegawai yang semakin besar, serta dinamika pada pos belanja lain yang menunjukkan respons terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan sosial daerah.



Informasi tentang Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 119 Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
2020	338.074.097.195,00	1.108.660.994.915	30,49
2021	338.126.914.876,70	1.127.253.684.938	30,00
2022	351.399.612.546,00	1.076.648.704.600	32,64
2023	369.019.162.539,00	1.144.108.663.321	32,25
2024	341.472.276.922,00	1.012.846.197.684	33,71

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rasio belanja modal Pemerintah Kabupaten Alor berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional serta kemampuan keuangan daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 120 Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Alor

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2020	184.295.110.186	1.108.660.994.915	16,62
2021	192.289.964.548	1.127.253.684.938	17,06
2022	147.806.459.997	1.076.648.704.600	13,73
2023	172.283.457.695	1.144.108.663.321	15,06
2024	111.221.835.832	1.012.846.197.684	10,98

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Alor, 2025

c) Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta



pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Besaran belanja tak terduga mengalami fluktuatif dari tahun 2020 sampai 2024. Rasio belanja tak terduga Kabupaten Alor tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 121 Proporsi Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Daerah

Tahun	Belanja Tak Terduga	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah
2020	1.381.103.752	1.108.660.994.915	0,12
2021	1.551.406.000	1.127.253.684.938	0,14
2022	1.950.342.270	1.076.648.704.600	0,18
2023	1.871.266.595	1.144.108.663.321	0,16
2024	184.033.625	1.012.846.197.684	0,02

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025

d) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen Belanja transfer yang dibelanjakan Kabupaten Alor dalam APBD empat tahun terakhir adalah Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan ke Desa. Besaran belanja transfer mengalami fluktuatif selama tahun 2020 hingga 2024. Rasio belanja transfer Tahun 2020-2024 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 122 Proporsi Transfer terhadap Total Belanja Daerah

Tahun	Belanja Transfer	Total Belanja Daerah	Proporsi Belanja Transfer Terhadap Total Belanja Daerah
2020	226.498.046.962	1.108.660.994.915	20,01
2021	224.779.225.389	1.127.253.684.938	21,09
2022	212.032.713.852	1.076.648.704.600	20,91
2023	195.233.808.919	1.144.108.663.321	17,06
2024	199.447.555.720	1.012.846.197.684	19,69

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, Tahun 2025



2.5.2.3. Ruang Fiskal

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Secara sederhana ruang fiskal dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Kondisi ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Alor mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kemudian menurun padat tahun 2024, yang disebabkan karena realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat setiap tahunnya selalu disertai sejumlah mandat untuk dilaksanakan dalam rangka menunjang capaian kinerja prioritas pembangunan Nasional. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Alor perlu menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas Nasional untuk mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai bagi pencapaiannya. Kondisi ruang fiskal Kabupaten Alor tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2 123 Ruang Fiskal Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Pendapatan	1.206.470.777.931	1.229.295.521.650	1.258.330.066.842	1.287.370.399.909	1.318.630.019.109	1.342.669.724.523
2	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
3	Dana Alokasi Khusus	255.497.413.000	252.408.053.100	257.456.214.162	262.605.338.445	267.857.445.214	273.214.594.118
4	Jaminan Kesehatan Nasional	11.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000
5	Belanja Pegawai	577.551.422.422	648.660.286.316	664.876.793.473	668.201.177.441	670.205.780.973	693.662.983.307
6	Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa	223.394.801.100	225.613.171.461	227.837.819.470	230.062.467.481	232.287.115.492	236.351.763.503
7	Pengeluaran Pembiayaan	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
8	Selisih	138.827.141.409	85.414.010.773	90.959.239.737	93.301.416.542	93.079.677.430	126.240.383.594
Ruang Fiskal Daerah		11,51	6,95	7,23	7,25	7,06	9,40

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, Tahun 2025



2.5.2.4. Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut.

Sebaliknya semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Alor pada periode 2020-2024 tidak pernah melebihi 6persen . Rasio kemandirian daerah tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,89 persen dan terus menurun menjadi 5,62 persen pada tahun 2024 atau masuk pada katagori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap alokasi Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi NTT masih sangat tinggi. Untuk meningkatkan kemandirian daerah kedepannya, Pemerintah Kabupaten Alor perlu melakukan strategi untuk meningkatkan PAD. Gambaran tentang kemandirian Kabupaten Alor tahun 2020-2024 dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 124 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020-2024

Tahun	Total Pendapatan	Total PAD	Rasio Kemandirian Daerah
2020	1.078.695.689.498,22	61.348.896.749	5,69
2021	1.083.381.602.006,49	50.490.183.377	4,66
2022	1.021.279.183.978,06	60.146.259.389	5,89
2023	1.108.301.572.470,96	62.998.943.708	5,68
2024	1.031.272.089.730,43	57.922.250.516	5,62

Sumber: Analisis Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.5.2.5. Kemampuan Membiayai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.



Tabel 2 125 Rasio Kemampuan Membiayai Belanja Daerah Kabupaten Alor

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2+3)	(7)=(4)	(8)=(6)/(7)
2020	1.078.695.689.498,22	25.659.219.713,02	1.071.437.735.678,78	-	1.104.354.909.211,24	1.071.437.735.678,78	1,08
2021	1.083.381.602.006,49	32.924.392.832,46	1.065.587.208.222,05	3.000.000.000,00	1.116.305.994.838,95	1.065.587.208.222,05	1,06
2022	1.021.279.183.978,06	47.719.449.799,79	1.013.792.817.246,19	4.000.000.000,00	1.068.998.633.777,85	1.013.792.817.246,19	1,04
2023	1.108.301.572.470,96	51.213.049.636,48	1.079.203.630.437,18	4.954.000.000,00	1.159.514.622.107,44	1.079.203.630.437,18	1,07
2024	1.031.272.089.730,43	-	1.012.846.197.684,00	4.000.000.000,00	1.031.272.089.730,43	1.012.846.197.684,00	1,02

Sumber: Analisis Bappelitbang, Tahun 2025

Rata rata kemampuan mendanai Belanja Daerah Kabupaten Alor pada periode 2020-2024 kurang lebih 1,05. Memperhatikan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dikaji serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan.

2.5.2.6. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan mencakup Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, proyeksi pendapatan, proyeksi Pengeluaran Periodik Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama, dan Penghitungan Kerangka Pendanaan. Analisis kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan untuk menghitung pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan pengalokasian belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan memperhitungkan kebutuhan yang bersifat periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.5.3. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan proyeksi yang cermat terhadap pendapatan untuk mendanai tindakan yang direncanakan melalui belanja dan Pembiayaan daerah.

Proyeksi pendapatan, belanja dan Pembiayaan Daerah yang termuat sebagai postur APBD Kabupaten Alor 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2 126 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE		PROYEKSI TAHUN				
	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	1.031.272.089.730,43	1.206.470.777.931	1.272.505.080.281	1.299.905.056.004	1.329.699.788.720	1.361.728.895.563	1.377.300.172.044
PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.922.250.516	69.326.954.440	65.036.984.250	68.863.676.860	72.306.860.703	77.572.248.105	82.801.138.666
Pajak Daerah	15.740.661.179,00	19.488.056.497	20.936.984.250	23.083.025.135	24.237.176.393	26.054.964.622	27.878.812.145
Retribusi Daerah	34.833.904.136,00	42.550.497.943	36.575.599.343	38.404.379.310	40.324.598.275	43.384.943.146	46.383.369.166
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.102.159.500,00	1.500.000.000	1.575.000.000	1.736.437.500	1.823.259.375	1.914.422.344	2.010.143.462
Lain-lain PAD yang Sah	6.245.525.701,43	5.788.400.000	5.949.400.657	5.639.834.915	5.921.826.660	6.217.917.993	6.528.813.893
PENDAPATAN TRANSFER	1.049.772.287.331	1.125.943.823.491	1.194.268.096.031	1.217.841.379.144	1.244.192.928.017	1.270.956.647.458	1.281.299.033.378
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.027.346.419.840	1.103.517.956.000	1.171.842.228.540	1.195.515.511.653	1.221.967.060.526	1.248.830.779.967	1.259.273.165.887
# Dana Alokasi Umum	658.115.503.300,00	688.871.926.000	754.430.311.940	767.097.257.671	782.439.202.825	798.087.986.881	800.083.206.849
# Dana Bagi Hasil	6.489.893.000,00	5.745.565.000	5.757.791.000	5.872.946.820	5.990.405.756	6.110.213.872	6.232.418.149
# Dana Alokasi Khusus	223.246.950.540,00	255.497.413.000	252.408.053.100	257.456.214.162	262.605.338.445	267.857.445.214	270.339.386.390
# Dana Insentif Fiskal	7.425.593.000,00	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000
# Dana Desa	132.068.480.000,00	131.561.026.000	137.404.046.500	143.247.067.000	149.090.087.500	154.933.108.000	160.776.128.500
Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.425.867.491,00	22.425.867.491	22.425.867.491	22.325.867.491	22.225.867.491	22.125.867.491	22.025.867.491
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.402.865.420,00	11.200.000.000	13.200.000.000,00	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0



URAIAN	BASELINE		PROYEKSI TAHUN				
	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.402.865.420,00	11.200.000.000	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00
BELANJA	1.022.266.043.746	1.206.470.777.931	1.268.505.080.281	1.295.905.056.004	1.309.699.788.720	1.319.728.895.563	1.377.300.172.044
BELANJA OPERASI	701.992.772.536	869.972.208.834	951.296.664.820	971.749.730.334	976.657.803.520	981.448.199.572	1.017.196.862.433
Belanja Pegawai	341.472.276.922,00	577.551.422.422	626.501.702.871	639.031.736.928	642.226.895.613	644.153.576.300	666.698.951.470
Belanja Barang dan Jasa	305.590.753.609,00	236.139.744.312	261.594.961.949	266.696.861.188	267.159.247.384	268.341.171.236	269.682.877.092
Belanja Hibah	45.501.398.500,00	54.163.873.000	58.200.000.000	60.771.132.218	61.890.410.523	63.437.670.787	71.829.872.803
Belanja Bantuan Sosial	9.428.343.505,00	2.117.169.100	5.000.000.000	5.250.000.000	5.381.250.000	5.515.781.250	8.985.161.067
BELANJA MODAL	111.221.835.832	110.603.767.997	88.595.244.000	93.317.506.200	99.979.517.719	102.993.580.499	120.751.546.108
Belanja Modal Tanah	-	2.514.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.819.473.958,00	27.932.596.370	18.689.370.000	19.623.838.500	20.410.262.619	20.196.686.738	22.940.104.253
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.663.479.231,00	25.752.747.007	30.441.252.000	31.963.314.600	34.657.439.800	35.765.533.700	42.090.293.391
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.708.882.643,00	54.111.443.620	35.314.622.000	37.080.353.100	39.761.815.300	41.381.360.061	52.071.148.465
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	30.000.000,00	292.981.000,00	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	184.033.625	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	184.033.625,00	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
BELANJA TRANSFER	208.867.401.753	223.394.801.100	225.613.171.461	227.837.819.470	230.062.467.481	232.287.115.492	236.351.763.503
Belanja Bagi Hasil	923.722.348,00	930.000.000	923.722.350	923.722.348,00	923.722.348,00	923.722.348,00	923.722.348,00
Belanja Bantuan Keuangan	198.523.833.372,00	222.464.801.100	224.689.449.111	226.914.097.122	229.138.745.133	231.363.393.144	235.428.041.155
Surplus/(Defisit)		0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0



URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN	71.356.991.670,20	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.356.991.670,20		0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0
Dana Cadangan	0	0	0		16.000.000.000	38.000.000.000	0
Pembiayaan Netto	71.356.991.670,20	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		0	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis Bappelitbang Kabupaten Alor, Tahun 2025

Proyeksi postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut merupakan perkiraan yang dapat berubah atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam penyajiannya telah mempertimbangkan aspek-aspek yang sangat berpengaruh sehingga diharapkan proyeksi ini memiliki tingkat bias yang rendah dan dapat dijadikan acuan yang baik dalam kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Alor Periode 2025-2029.



2.5.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam atas data pendapatan daerah 2020-2024 serta sejumlah regulasi terkini dari Pemerintah Pusat terkait Kebijakan Transfer ke Daerah dan Transfer Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil. Pendapatan Daerah hingga Tahun 2030 diproyeksikan bertambah 1.342 milyar lebih atau meningkat 30,20 persen. Peningkatan Pendapatan Daerah tersebut diperoleh dari peningkatan komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 42,95 persen menjadi Rp. 82.801.138.666, peningkatan komponen Dana Transfer sebesar 18,76 persen menjadi Rp. 1.246.668.585.857,- dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar 1,51 persen menjadi Rp.13.200.000.000,-.

2.5.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan analisis atas data belanja daerah 2020-2024 serta sejumlah regulasi terkini dari Pemerintah Pusat terkait. Belanja Daerah Tahun 2030 diproyeksikan bertambah menjadi Rp 1,342 milyar lebih atau meningkat 31,34 persen

2.5.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2029 diproyeksikan sebesar Rp.42.000.000.000 atau meningkat 1050 persen dari pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar RP. 4.000.000.000,-. Peningkatan alokasi pengeluaran pembiayaan daerah disebabkan pada tahun 2029 Pemerintah Daerah juga mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp. 38.000.000.000,- untuk cicilan Pilkada 2029 selain penyertaan modal sebesar Rp.4.000.000.000.

2.5.3.4. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

🔗 **Prioritas I**, dialokasikan untuk mendanai:

- 1) Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama yakni Belanja Pegawai;
- 2) Seluruh pendapatan yang bersumber dari DAK digunakan untuk mendanai belanja DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada setiap perangkat daerah pengelola DAK;

- 3) Seluruh pendapatan hibah Dana BOS digunakan untuk mendanai Belanja Hibah BOS pada Dinas Pendidikan;
- 4) Seluruh pendapatan yang bersumber dari JKN digunakan untuk belanja Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
- 5) Seluruh Pendapatan Dana Desa digunakan untuk mendanai belanja transfer ke desa yang dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 6) Melaksanakan belanja *mandatory* berupa pengalokasian belanja Alokasi Dana Desa sebesar 10persen dari Dana Transfer Umum dan belanjanya dianggarkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 7) Melaksanakan belanja *mandatory* khusus untuk memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada urusan wajib pelayanan dasar.

➤ **Prioritas II**, dialokasikan untuk pendanaan:

Belanja *mandatory* yang belum dialokasikan pada Prioritas I dan untuk mendanai Program prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Kerangka pendanaan pada RPJMD Kabupaten Alor tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 127 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah

NO	URAIAN	2026	2027	2028	2029	2030
A	Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah	1.229.295.521.650	1.258.330.066.842	1.287.370.399.909	1.318.630.019.109	1.342.669.724.523
1	Pendapatan	1.229.295.521.650	1.258.330.066.842	1.287.370.399.909	1.318.630.019.109	1.342.669.724.523
2	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0
B	Belanja	1.225.295.521.650	1.254.330.066.842	1.267.370.399.909	1.276.630.019.109	1.342.669.724.523
	Prioritas I	1.136.957.788.527	1.160.447.104.757	1.171.145.261.019	1.180.626.619.331	1.213.505.618.581
1	Belanja Pegawai	648.660.286.316	664.876.793.473	668.201.177.441	670.205.780.973	693.662.983.307
2	Belanja DAK	252.408.053.100	257.456.214.162	262.605.338.445	267.857.445.214	273.214.594.118
3	Belanja JKN	11.200.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000	11.200.000.000
4	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	224.689.449.111	226.914.097.122	229.138.745.133	231.363.393.144	235.428.041.155
	Prioritas II	88.337.733.123	93.882.962.085	96.225.138.890	96.003.399.778	129.164.105.942
	Belanja Mandatori yang belum dialokasikan pada Prioritas I dan Belanja Program Prioritas pada RPJMD 2025 - 2030.	88.337.733.123	93.882.962.085	96.225.138.890	96.003.399.778	129.164.105.942
C	Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
	Prioritas I	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
1	Penyertaan Modal	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0
2	Dana Cadangan Daerah	0	0	16.000.000.000	38.000.000.000	0
	Surplus/(defisit) = A - (B + C)	0	0	0	0	0
	SILPA	0	0	0	0	0

Sumber: Analisis Bappelitbang Kabupaten Alor, 2024

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.6.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan merupakan selisih ekspektasi atau “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan sebelumnya, dan antara apa yang ingin dicapai pada masa akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sekaligus dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Analisis terhadap permasalahan daerah dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2. 10 Ilustrasi Permasalahan Pemerintah Kabupaten Alor

Gambar di atas menjelaskan bahwa masalah utama yang menyebabkan masih rendahnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor dipengaruhi oleh (1) Pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal (sektor Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial); (2) Pengelolaan sektor Ekonomi unggulan/prioritas daerah yang belum optimal; (3) Ketersediaan infrastruktur daerah yang masih terbatas; (4) Masih rendahnya daya saing daerah; dan (5) Belum Optimalnya Pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, dirumuskan permasalahan pokok berdasarkan peletakan fondasi Transformasi untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Alor Tahun 2025-2029, sebagaimana penjelasan berikut ini.

2.6.1.1. Transformasi Sosial

Transformasi sosial diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi yang dicapai melalui akselerasi pendidikan berkualitas yang merata, akselerasi kesehatan untuk



semua melalui GESIT dan akselerasi perlindungan sosial yang adaptif. Permasalahan utama ketiga sektor pada transformasi sosial dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Belum optimalnya pengelolaan sektor pendidikan

Sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, sektor pendidikan di Kabupaten Alor masih terus diperhadapkan pada sejumlah permasalahan, yang berdampak pada rendahnya kualitas anak didik, yang ditandai dengan masih terdapat penduduk yang buta huruf, rendahnya angka rata-rata lama sekolah, rendahnya angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar dan masih tingginya angka putus sekolah. Belum optimalnya pengelolaan sektor pendidikan ini disebabkan karena Kualitas pendidikan yang belum merata, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan karena ketiadaan fasilitas pendidikan dan ketersediaan pendidik; Rendahnya kompetensi guru dan minimnya pelatihan berkelanjutan, Digitalisasi pendidikan yang belum optimal, Tantangan literasi dan numerasi di tingkat dasar, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi lainnya dan LSM dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Alor.

2) Pelayanan pada sektor kesehatan yang belum optimal

Dalam rangka menjamin ketersediaan SDM yang handal, maka sektor kesehatan mutlak diperlukan untuk dikelola secara baik guna menghasikan SDM yang sehat dan berkualitas. Pelayanan Kesehatan yang belum optimal akan berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat yang dilihat dari masih tingginya angka kesakitan, tingginya kasus penyakit menular diantaranya Malaria, TBC dan HIV/AIDS, angka kematian ibu dan bayi baru lahir masih tinggi, dan masih terdapat balita dengan status gizi buruk, tingginya penyakit anemia pada ibu hamil dan bayi yang kurang mendapatkan ASI eksklusif, serta angka prevalensi Stunting yang masih tinggi. Pelayanan Kesehatan yang belum optimal ini disebabkan karena belum meratanya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih rendah termasuk rasio ketersediaan dokter dan dokter spesialis terhadap jumlah penduduk serta belum meratanya persebaran tenaga medis dan paramedis pada Puskesmas dan jaringannya; masih terbatasnya sarana dan prasarana pada rumah sakit, puskesmas dan jaringannya, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat pada perilaku pola hidup bersih dan sehat.

3) Pelaksanaan Penanganan Sosial yang belum optimal

Bidang sosial berperan aktif mengurus hajat hidup masyarakat Alor, namun demikian pelaksanaan penanganan sosial yang belum optimal, yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup yang ditandai dengan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap layanan sosial, terbatasnya hunian yang layak, tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan, pencapaian SPM sosial yang belum optimal dan masih tingginya angka kemiskinan.

Pelaksanaan penanganan sosial yang belum optimal ini disebabkan karena masih belum optimal penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Alor karena terbatasnya jumlah kuota penerima bantuan sosial, DTKS belum terdata secara lengkap dan belum terupdate secara rutin, masih terdapatnya angka pengangguran terbuka akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, belum tersedianya sarana untuk akses bagi warga disabilitas di fasilitas pelayanan publik, serta rendahnya kepesertaan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

4) Pembangunan *gender, equality, disability dan social inclusion* (GEDSI) belum dilaksanakan secara optimal.

Pembangunan dengan pendekatan GEDSI masih menjadi persoalan tidak hanya dalam pelaksanaan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak tetapi juga pada urusan pemerintahan lainnya. Secara khusus dalam upaya menghadirkan keadilan bagi perempuan dan anak telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk diselesaikan, namun kebijakan yang responsif gender, kesetaraan, disabilitas dan inklusi sosial belum Optimal seperti yang diharapkan. Masih tingginya jumlah perempuan sebagai tulang punggung keluarga pada sektor ekonomi, belum terpenuhi secara optimal hak-hak perempuan dan anak, terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum terwujudnya kesetaraan gender, belum optimalnya keterlibatan kaum marginal dalam pembangunan masih menjadi persoalan yang dihadapi.

Pembangunan berbasis gender, kesetaraan, disabilitas dan sosial inklusif yang belum Optimal ini disebabkan karena rendahnya belum adanya kebijakan daerah terkait GEDSI, rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak, adanya sistem patriarki yang masih melekat kuat dalam budaya masyarakat Kabupaten Alor, terbatasnya jumlah dan peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, masih terjadinya perkawinan usia dini bagi anak, terbatasnya

kegiatan pemberdayaan yang melibatkan kaum marginal serta terbatasnya kompetensi petugas pemberdayaan dan pendampingan Perempuan dan anak.

- 5) Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Urusan pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil berkaitan dengan urusan penyediaan administrasi kependudukan dan proses legalitas penduduk sebagai warga negara yang memiliki hak-hak kependudukan. Pemerintah daerah menyadari bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum optimal sehingga berdampak pada masih adanya Masyarakat Kabupaten Alor yang belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan sehingga berpengaruh terhadap kemudahan pelayanan public yang akan diterima masyarakat serta data kependudukan belum lengkap, dan belum *up to date*. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini disebabkan antara lain karena tingginya tingkat kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan karena kondisi wilayah Kabupaten Alor yang merupakan wilayah kepulauan, disamping sebagian wilayah yang sulit dijangkau baik langsung maupun tidak langsung, termasuk ketersediaan jaringan internet yang sangat terbatas, sehingga menyulitkan akses masyarakat dalam mengurus sejumlah administrasi kependudukan, terbatasnya perangkat SIAK, rendahnya pengetahuan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan.

- 6) Upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang belum Optimal.

Perlunya menjaga demografi dan jumlah penduduk secara ideal, dimaksudkan agar lonjakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya beban negara dan daerah dalam memenuhi kebutuhan dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Bagi Pemerintah Kabupaten Alor, upaya untuk mengendalikan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) selama ini telah dilakukan, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kelahiran (fertilitas), masih terjadinya kasus kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, masih terjadi kasus kematian bayi dan balita, permasalahan kesehatan reproduksi perempuan, masih terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan beresiko tinggi serta masih tingginya



keluarga pra Sejahtera.

Belum optimalnya pengendalian penduduk dan KB ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang program KB khususnya alat kontrasepsi, kurangnya tenaga penyuluh lapangan berkompeten, adanya efek samping penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya dukungan suami dalam kepesertaan program KB.

7) Belum Optimalnya pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Urusan pada bidang kepemudaan memegang peran penting dalam pembangunan. Selain pemuda sebagai pemegang estafet pembangunan, pemuda juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah. Urusan kepemudaan tetap menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, karena pemuda sebagai bagian dari usia produktif yang akan bertanggungjawab pada masa bonus demografis kedepan. Selain itu, urusan keolahragaan disamping bertujuan untuk kebugaran, namun lebih dari pada itu, urusan kelolahragaan dapat menciptakan atlit-atlit berprestasi untuk mengharumkan nama daerah. Pemerintah daerah menyadari bahwa pengelolaan urusan kepemudaan dan olahraga belum optimal sehingga berdampak pada terbatasnya prestasi olahraga dan terbatasnya peran pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Belum optimalnya pengelolaan urusan kepemudaan dan olahraga ini disebabkan karena belum terdata secara baik potensi pemuda di Kabupaten Alor; masih rendahnya kesadaran pemuda dalam menciptakan lapangan kerja untuk bekerja secara mandiri; belum tersedianya fasilitas untuk menunjang kegiatan kepemudaan, terbatasnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pemuda. Sementara pada bidang olahraga terdapat sejumlah persoalan di antaranya belum tersedia sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga; masih kurangnya pelatih olahraga bersertifikat; minimnya penyelenggaraan even olahraga serta minimnya promosi dan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi.

8) Belum Optimalnya pengelolaan data Statistik

Ketersediaan data statistik di daerah sangat dibutuhkan, karena data statistik digunakan sebagai alat untuk mempermudah pengambilan kebijakan daerah. Data statistik digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu, menggambarkan persoalan-persoalan di daerah, termasuk membuat perkiraan dari data-data yang akurat untuk kebutuhan pembangunan



daerah. Pengelolaan data statistik di Kabupaten Alor belum optimal sehingga berdampak pada ketersediaan data yang kurang valid dan tidak terintegrasi, waktu perolehan data yang lama serta data sulit diperoleh.

Pengelolaan data statistik yang belum optimal ini disebabkan karena masih belum optimalnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam penerapan Alor satu data, pengolahan data belum memenuhi standar data statistik, dan rendahnya kompetensi petugas pengolah data statistik.

9) Belum Optimalnya Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan.

Perpustakaan memiliki nilai strategis dalam Pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena Perpustakaan adalah media untuk mendapatkan berbagai informasi sekaligus sebagai referensi nilai dalam kehidupan bersama. Sedangkan arsip sebagai sumber informasi kegiatan pemerintahan perlu juga dikelola secara baik agar aman dan mudah ditemukan Ketika dibutuhkan. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Alor belumlah optimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan yang relatif sedikit dan arsip yang sulit ditemukan ketika dibutuhkan.

Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan ini disebabkan karena rendahnya minat baca Masyarakat, terbatasnya koleksi bahan Pustaka, terbatasnya pejabat fungsional arsiparis dan belum terlaksananya digitalisasi arsip.

10) Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dan desa untuk keluar dari kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat dan desa terus dilakukan Pemerintah Daerah, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Alor, masih rendahnya pendapatan masyarakat, masih tingginya angka kemiskinan di Desa dan lambatnya kemajuan desa. Persentase desa tertinggal yang masih tinggi serta rendahnya persentase desa mandiri menjadi salah satu indikator belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Alor.

Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat dan desa ini disebabkan karena belum optimalnya pendampingan desa oleh petugas pendamping desa, rendahnya kemampuan managerial kelembagaan dan pengelolaan administrasi desa, terdapat potensi desa yang belum dikelola dengan baik,



pengelolaan dana desa yang belum optimal untuk meningkatkan kemajuan desa, belum optimalnya peran Bumdes dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dan Persentase desa tertinggal yang masih tinggi serta rendahnya persentase desa mandiri.

Hasil identifikasi masalah diatas, ditemukan rumusan masalah spesifik atau akar permasalahan yang berhubungan dengan terbatasnya SDM berkualitas sebagai bagian dari transformasi sosial adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 128 Masalah Pokok: Transformasi Sosial

Masalah Utama : Belum optimalnya pelayanan pada sektor sumberdaya manusia dan sosial budaya

No	Masalah Pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
1	Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pendidikan	1	Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
		2	Terbatasnya kualitas dan ketersediaan sarana prasarana Pendidikan.
		3	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi lainnya dan LSM dalam penyelenggaraan pendidikan.
2	Pelayanan pada sektor Kesehatan yang belum Optimal	1	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat
		2	Minimnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan pada sejumlah fasilitas kesehatan
		3	Terbatasnya sarana dan prasarana pada rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
		4	Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular (HIV/AIDS, Malaria, TBC) AKI/ AKB, dan prevalensi stunting.
3	Pelaksanaan Penanganan sosial yang belum Optimal	1	Masih minimnya penanganan terhadap PMKS di Kabupaten Alor karena terbatasnya jumlah kuota penerima bantuan sosial;
		2	DTKS belum terdata secara lengkap dan belum terupdate secara rutin,
		3	Masih tingginya angka kemiskinan;
		4	Masih terdapatnya angka pengangguran terbuka akibat ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas;
		5	Belum tersedianya sarana untuk akses bagi warga disabilitas di fasilitas pelayanan publik.
		6	Rendahnya kepesertaan tenaga kerja dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
4	Pembangunan <i>gender, equality, disability</i> dan <i>social inclusion</i> (GEDSI) belum dilaksanakan secara optimal	1	Adanya sistem patriarki yang masih melekat kuat dalam budaya masyarakat Kabupaten Alor

No	Masalah Pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
		2	Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan tentang perlindungan perempuan dan Anak
		3	Terbatasnya jumlah dan peran kelembagaan perlindungan perempuan dan anak
		4	Terbatasnya kegiatan pemberdayaan yang melibatkan kaum marginal
		5	Masih terjadinya Perkawinan usia dini pada anak
		6	Terbatasnya kompetensi petugas pemberdayaan dan pendampingan perempuan dan anak
5	Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	1	Tingginya tingkat kesulitan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan
		2	Terbatasnya ketersediaan jaringan internet
		3	Terbatasnya perangkat SIAK
		4	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait layanan administrasi kependudukan
		5	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
6	Upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang belum Optimal		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Keluarga Berencana
7	Belum Optimalnya pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olahraga	1	Belum terdata secara baik potensi pemuda di Kabupaten Alor
		2	Masih rendahnya kesadaran pemuda dalam menciptakan lapangan kerja untuk bekerja secara mandiri
		3	Belum tersedianya fasilitas untuk menunjang kegiatan kepemudaan
		4	Terbatasnya kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pemuda
		5	Belum tersedia sarana olahraga terpadu yang bisa menjadi tempat berlatih untuk berbagai macam cabang olahraga
		6	Masih kurangnya pelatih olahraga bersertifikat
		7	Minimnya penyelenggaraan even olahraga
		8	Minimnya pembinaan olahraga prestasi.
8	Belum Optimalnya pengelolaan data Statistik	1	Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan Alor satu data
		2	Pengolahan data belum memenuhi standar data statistik
		3	Kurangnya petugas kompeten pengolah data statistik
9	Belum Optimalnya Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan	1	Terbatasnya perangkat layanan perpustakaan Digital
		2	Terbatasnya koleksi bahan pustaka
		3	Terbatasnya pejabat fungsional arsiparis
		4	Belum terlaksananya digitalisasi arsip



No	Masalah Pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
10	Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Belum optimalnya pendampingan oleh petugas pendamping desa
		2	Rendahnya kualitas SDM perangkat desa
		3	Terdapat potensi desa yang belum dikelola dengan baik
		4	Pengelolaan dana desa yang belum optimal untuk meningkatkan kemajuan desa
		5	Belum optimalnya peran BUMDES untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa
		6	Persentase desa tertinggal yang masih tinggi serta rendahnya persentase desa mandiri.

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.6.1.2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor produktif sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja, serta mengurangi angka kemiskinan di daerah. Hasil analisis menunjukkan permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan transformasi ekonomi adalah belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi daerah.

Aspek pengembangan ekonomi daerah dan sumber daya alam menjadi penting untuk dikelola secara baik, karena keberadaan ekonomi di daerah menjadi titik sentral kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berdampak langsung pada sektor kehidupan lainnya. Selain itu, ketersediaan sumber daya alam menjadi mutlak diperlukan karena menjadi penyeimbang dalam kehidupan ekosistem kehidupan manusia. Berbagai langkah kebijakan dalam pengembangan sektor ekonomi di daerah dan pengelolaan sumber daya alam telah dilakukan Pemerintah Daerah, namun sejumlah persoalan masih terus dihadapi. Masalah-masalah terkait pengelolaan ekonomi daerah dan sumber daya alam dapat diidentifikasi sebagai masalah pokok daerah, yang mencakup rendahnya pertumbuhan ekonomi serta berbagai permasalahan di bidang pangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penanaman modal, sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Secara umum, analisis terhadap masalah pokok untuk melaksanakan transformasi bidang ekonomi, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengelolaan sektor Pangan yang belum Optimal

Keberadaan sektor pangan di daerah dimaksudkan untuk mewujudkan



ketahanan pangan masyarakat, sekaligus untuk mengantisipasi ancaman kerawanan pangan di tingkat masyarakat. Pengelolaan sektor pangan di Kabupaten Alor belum optimal sehingga berdampak pada belum terwujudnya kemandirian pangan di daerah. Hal ini diindikasikan dari masih adanya kerawanan pangan, terjadinya fluktuasi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan belum tepenuhinya angka kecukupan gizi masyarakat. Belum optimalnya pengelolaan sektor pangan ini disebabkan karena terbatasnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan pola konsumsi, rendahnya jumlah produksi pangan, terjadinya perubahan iklim dan terjadinya bencana alam.

2) Pengelolaan Koperasi dan UMKM yang belum Optimal

Sektor koperasi telah menjadi sokoguru dalam perekonomian Nasional, demikian halnya dengan keberadaan UMKM. Keberadaan koperasi dan UMKM juga menjadi penting karena merupakan sektor yang berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja di daerah, disamping berperan pula dalam pengembangan ekonomi masyarakat di daerah dalam pengelolaannya belum optimal sehingga berdampak pada masih terdapat usaha simpan pinjam dan koperasi yang tidak sehat, tidak berizin dan tidak menerapkan prinsip-prinsip koperasi, masih terdapat banyak usaha mikro, kecil dan menengah yang tidak sehat.

Pengelolaan koperasi dan UMKM yang belum optimal ini disebabkan karena masih rendahnya investasi pada sektor UMKM, kurangnya aparatur kompeten pendamping koperasi dan UMKM, rendahnya kualitas pengelola koperasi dan UMKM, terbatasnya pengawasan dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM.

3) Belum Optimalnya pengelolaan Penanaman Modal

Peranan Penanaman modal menjadi penting di daerah. Berbagai hal yang berhubungan dengan penanaman modal antara lain, akan menghasilkan investasi di daerah, yang berdampak pada meningkatnya produktifitas sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengelolaan penanaman modal di Kabupaten sudah upayakan namun belum optimal yang ditandai dengan rendahnya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Alor, begitu pula dengan peningkatan jumlah nilai investasi yang belum signifikan, dan lapangan kerja yang terbatas.

Pengelolaan penanaman modal yang belum optimal ini disebabkan karena Keterbatasan sarana dan prasarana dalam perizinan dan penanaman modal seperti belum tersedianya mall pelayanan publik untuk ketepaduan

pengelolaan perijinan dan pelayanan publik, terbatasnya fasilitas dan dan insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Alor serta potensi investasi di Kabupaten Alor yang belum terpublikasi secara baik untuk diakses oleh para investor.

4) Potensi Kelautan dan Perikanan yang belum dikelola secara optimal

Keberadaan Kabupaten Alor sebagai kabupaten kepulauan dengan total 110 desa/Kelurahan pesisir sesungguhnya memberikan nilai positif bagi pengembangan di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu Pemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai intervensi kegiatan namun pengelolaan potensi kelautan dan perikanan belum optimal seperti yang diharapkan sehingga terlihat bahwa pendapatan nelayan masih sangat rendah, harga ikan masih sangat mahal pada penjualan di tingkat pedagang namun sangat murah di tingkat nelayan, serta terbatasnya lapangan kerja dan lapangan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang belum optimal ini disebabkan karena nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam masih melakukan usahanya secara tradisional dan berskala usaha kecil skala mikro, sehingga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi maupun pemanfaatan sumber daya yang tidak berdaya saing. Selain itu, usaha perikanan di Kabupaten Alor belum menerapkan sistem manajemen rantai pasok terpadu yang meliputi produksi, industri pascapanen dan pemasaran, serta bisnis usaha (Unit Usaha) perikanan di Kabupaten Alor masih belum memenuhi skala ekonomi (*Economy of scale*). Permasalahan lainnya yang dihadapi seperti: Terbatasnya ketersediaan induk dan benih ikan unggul sehingga mengganggu peningkatan produktivitas dan kontinuitas produksi; masih tingginya ketergantungan pembudidaya terhadap pakan impor; sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik, sehingga terjadi serangan penyakit dan dapat menimbulkan gagal panen. Dari sisi SDM, masih dihadapi permasalahan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam menguasai budidaya ikan sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas hasil perikanan; belum adanya pusat pengolahan perikanan yang representatif, dan masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan dalam pengembangan usaha perikanan, serta adanya konflik pemanfaatan ruang antara akuakultur dengan sektor lainnya.



5) Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi di Nusa Tenggara Timur termasuk di Kabupaten Alor. Hal ini nampak pada penetapan prioritas pengembangan sektor ekonomi Provinsi NTT yang menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Alor telah berdampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah, namun pengelolaan sektor pariwisata belum dilakukan dengan optimal dan hal ini dapat diindikasikan dengan terbatasnya jumlah PAD dari sektor pariwisata dan rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Alor. Selain itu terbatasnya pengusaha lokal yang menjalankan usaha pariwisata, terbatasnya lapangan kerja bidang pariwisata, dan terdapat sejumlah potensi wisata yang belum dikelola juga menjadi persoalan yang membutuhkan kebijakan penanganan pemerintah daerah.

Belum optimalnya pengelolaan sektor pariwisata ini disebabkan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pariwisata yang kurang representatif; aksesibilitas tempat destinasi wisata yang masih sulit dijangkau; minimnya sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang terampil dalam mengelola usaha di bidang kepariwisataan.

Permasalahan dari sisi manajemen pengelolaan pariwisata belum profesional dilaksanakan, kurangnya penyelenggaraan event tetap pariwisata dan belum tersedianya pusat informasi terpadu di bidang pariwisata. Terkait pengelolaan, belum adanya kerjasama kepariwisataan antara Pemerintah Kabupaten Alor dengan Pemerintah Provinsi maupun kabupaten lainnya dalam pengembangan pariwisata, minimnya minat investor untuk pengembangan usaha di bidang pariwisata, sehingga perlunya keterlibatan kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mempromosikan pariwisata di Kabupaten Alor. Selain itu, mahal biaya transportasi udara menjadi alasan belum optimalnya kehadiran wisatawan.

6) Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pertanian

Sektor pertanian memberikan kontribusi besar bagi ekonomi daerah, karena hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Alor bekerja di sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 32 persen dan merupakan kontribusi tertinggi dalam PDRB daerah. Namun demikian, pengelolaan sektor pertanian belum optimal sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan petani, rendahnya produktivitas,

terbatasnya jumlah produksi sehingga kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian dipasok dari luar daerah, rendahnya ketahanan pangan, terbatasnya lapangan kerja sektor pertanian, terbatasnya industri olahan pasca panen dan rendahnya harga hasil produksi pertanian.

Belum optimalnya pengelolaan sektor pertanian ini disebabkan karena semakin berkurangnya lahan pertanian produktif karena adanya alih fungsi lahan; berkurangnya ketersediaan pasokan air bagi kegiatan pertanian; kurang tersedianya perbenihan dan pembibitan tanaman pertanian; kurangnya aksesibilitas infrastruktur ke lokasi produksi pertanian serta terbatasnya sarana dan prasarana produksi pertanian.

Dari sisi SDM, Terbatasnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan serta komitmen petani dalam mengaplikasikan teknologi pertanian disamping berkurangnya tenaga kerja dan minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian. Selain itu untuk pengembangan SDM pertanian diperlukan manajemen usaha tani yang lebih baik untuk mempermudah adopsi teknologi guna menghasilkan usaha tani yang mandiri untuk menghasilkan produktifitas pertanian yang lebih baik.

7) Pengelolaan sektor Perdagangan yang belum Optimal

Sektor perdagangan turut serta memberikan kontribusi bagi ekonomi daerah. Hal ini nampak pada peran sektor perdagangan untuk memperlancar arus barang dan jasa di daerah, mengusahakan dan menjaga tingkat harga sehingga tetap stabil, disamping peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Pengelolaan sektor perdagangan belumlah optimal dan hal ini berdampak pada antara lain: Masih tingginya biaya pengangkutan dari produsen ke konsumen; tingginya kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok.

Belum optimalnya pengelolaan sektor perdagangan disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pengelolaan metrologi; belum optimalnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha, serta belum optimalnya monitoring dan pengawasan terhadap ijin perdagangan. Terkait pasar di kecamatan dan desa, pengelolaannya belum optimal dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan dan desa.

8) Pengelolaan Sektor Industri yang Belum Optimal

Peran sektor industri sesungguhnya memiliki kontribusi besar bagi ekonomi daerah, karena pengelolaan sektor industri berdampak pada perluasan lapangan usaha, memperluas lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah. Namun demikian,

Pengelolaan sektor industri belum optimal sehingga berdampak pada rendahnya kontribusi sektor industri dalam PDRB yang pada tahun 2022 hanya mencapai 1,43 persen, terbatasnya jumlah industri kecil dan menengah yang sehat; masih terdapat industri kecil dan menengah yang tidak berijin, belum tersedianya industri besar yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Pengelolaan sektor industri yang belum optimal ini disebabkan karena belum optimalnya peranan IKM dalam rantai pasok industri. Dari aspek ketersediaan SDM, masih terbatasnya SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pembangunan dan pengembangan industri.

9) Pengelolaan Sumber Daya Energi yang belum Optimal

Kabupaten Alor memiliki banyak potensi energi yang jika dilelola secara baik, dapat memberikan nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sejumlah potensi energi yang tersedia di Kabupaten Alor, antara lain: potensi panas bumi, tenaga air, bahan galian galena, emas, kaolin dan bahan galian batuan serta juga minyak bumi yang tersebar pada sejumlah wilayah di Kabupaten Alor; Kabupaten Alor juga memiliki potensi energi terbarukan, berupa air, angin, panas matahari, gelombang laut dan lainnya.

Pengelolaan energi di Kabupaten Alor masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari penyediaan energi di Kabupaten Alor masih sangat terbatas, walaupun Kabupaten Alor memiliki potensi energi yang luar biasa. Masih terdapat sejumlah potensi energi yang belum dikelola, rasio elektrifikasi di Kabupaten Alor yang mencapai 83 persen, dan sangat tergantung pada sumber energi PLTU diesel yang dikelola oleh PLN. Kondisi ini menyebabkan wilayah- wilayah tertentu belum tersambung jaringan listrik; dan lebih daripada itu, semakin berkurangnya pasokan BBM akan menjadi ancaman bagi ketersediaan listrik bagi masyarakat.

Pengelolaan sumber daya energi yang belum optimal ini disebabkan karena terbatasnya SDM pengelola energi baru dan terbarukan yang trampil, tingginya biaya pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, dan topografi wilayah yang sulit dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit pada daerah-daerah tertentu sehingga energi yang dibutuhkan juga relatif sedikit.

Ringkasan masalah pokok, masalah utama dan akar masalah dalam transformasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



Tabel 2 129 Masalah Pokok Daerah: Transformasi Ekonomi

Masalah Utama : Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah

No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
1	Pengelolaan sektor Pangan yang belum Optimal	1 Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang keragaman pangan dan pola konsumsi
		2 Rendahnya jumlah produksi pangan
		3 Terjadinya perubahan iklim
		4 Terjadinya bencana alam
2	Pengelolaan Koperasi dan UMKM yang belum Optimal	1 Kurangnya jumlah aparatur kompeten pendamping koperasi dan UMKM
		2 Rendahnya kualitas pengelola koperasi dan UMKM
		3 Terbatasnya pengawasan dan evaluasi kegiatan koperasi dan UMKM
3	Belum Optimalnya pengelolaan Penanaman Modal	1 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam perizinan dan penanaman modal
		2 Terbatasnya fasilitas dan insentif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Alor
		3 Terbatasnya pengetahuan investor tentang potensi daerah Kabupaten Alor
4	Potensi Kelautan dan Perikanan yang belum dikelola secara optimal	1 Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar ikan dan petambak garam masih melakukan usahanya secara tradisional dan berskala usaha kecil skala mikro
		2 Usaha perikanan di Kabupaten Alor belum menerapkan sistem manajemen rantai pasok terpadu
		3 Terbatasnya induk dan benih ikan untuk budidaya
		4 Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan
		5 Belum dikelolanya TPI
		6 Tidak tersedianya industri pengolahan hasil Perikanan
		7 Rendahnya ketrampilan nelayan dan pembudidaya untuk melakukan usaha secara modern (pengolahan dan pemasaran).
		8 Adanya konflik pemanfaatan ruang antara akuakultur dengan sektor lainnya
5	Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pariwisata	1 Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata
		2 Akses ke tempat destinasi wisata yang relatif sulit
		3 Rendahnya ketrampilan pengelola lokal usaha pariwisata
		4 Kurangnya penyelenggaraan ivent tetap pariwisata
		5 Belum adanya kerjasama pariwisata dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan swasta
		6 Terbatasnya promosi pariwisata
6	Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pertanian	1 Alih fungsi lahan
		2 Kurangnya aksesibilitas infrastruktur Pertanian
		3 Potensi lahan pertanian yang belum dikelola
		4 Berkurangnya ketersediaan air bagi lahan pertanian



No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
7	Pengelolaan sektor Perdagangan yang belum Optimal	5 Rendahnya minat masyarakat usia muda untuk berusaha pada sektor pertanian
		1 Belum optimalnya pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha
		2 Kurangnya sumber daya pendukung metrologi
8	Pengelolaan Sektor Industri yang Belum Optimal	3 Belum optimalnya pengelolaan pasar desa dan pasar kecamatan
		1 Terbatasnya kompetensi SDM pendamping dan pengelola industri yang bersertifikat
		2 Belum optimalnya peranan IKM dalam rantai pasok
9	Pengelolaan Sumber Daya Energi yang belum Optimal	3 Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan dan pengembangan industri
		1 Terbatasnya SDM pengelola energi baru dan terbarukan yang trampil,
		2 Tingginya biaya pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan,
		3 Topografi wilayah yang sulit dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit pada daerah-daerah tertentu.

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.6.1.3. Transformasi Tata Kelola

Aspek Pelayanan publik menunjuk pada peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, sebagai konsekwensi dari tanggungjawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Fokus pelayanan publik diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui sejumlah indikator/penilaian atas kinerja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

Bagi Pemerintah Daerah, upaya penyediaan pelayanan publik telah dilakukan, namun demikian hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah belum optimal dan menjadi bagian dari masalah utama pemerintah daerah. Masalah utama ini disebabkan oleh beberapa masalah pokok yang hasil analisisnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Belum Optimalnya Penerapan Digitalisasi Pemerintahan

Belum optimalnya digitalisasi pemerintahan ditunjukkan melalui nilai Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Alor. Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap pelaksanaan penerapan SPBE bahwa SPBE Kabupaten Alor Tahun 2024 berada pada indeks 2,18 atau pada predikat Cukup. Permasalahan ini berdampak pada belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah, waktu pelayanan yang relatif lebih lama, tingginya biaya pelayanan publik, dan layanan



yang tidak terintegrasikan. Belum optimalnya penerapan digitalisasi pemerintahan ini disebabkan karena terbatasnya prasarana pendukung SPBE, terbatasnya kompetensi SDM pengelola dan terbatasnya pemahaman aparat, masyarakat tentang SPBE dan rendahnya kesiapan masyarakat untuk bertransformasi dari manual ke digital.

2) Belum maksimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Alor belum dijalankan secara maksimal. Hasil evaluasi terhadap AKIP Kabupaten Alor Tahun 2024 telah mencapai 60,11 atau kategori B dimana telah mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang hanya mencapai nilai sebesar 50,56 atau kategori CC, menurun dari nilai SAKIP Kabupaten Alor tahun 2022 mencapai angka 51,79 atau masih dalam kategori CC. Belum maksimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah ini disebabkan karena penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang kurang tepat, proses pengukuran dan pelaporan kinerja yang kurang sesuai, proses pengumpulan data kinerja yang tidak sesuai prosedur dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan secara keseluruhan.

3) Masih Lemahnya Implementasi Reformasi Birokrasi
Hasil implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Alor masih rendah; berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian PAN RB pada Tahun 2023, nilai implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Alor mencapai 46,20 point atau kategori C. Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi ini berdampak pada kualitas pelayanan publik yang kurang maksimal, pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan dengan penggunaan sumber daya yang kurang efektif dan efisien.
Masih lemahnya implementasi reformasi birokrasi ini disebabkan karena terbatasnya pemahaman aparat terkait reformasi birokrasi, belum optimalnya komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, terbatasnya sumber daya dalam implementasi reformasi birokrasi.
Ringkasan masalah utama, masalah pokok dan akar masalah dalam transformasi tata kelola sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2 130 Masalah Pokok Daerah: Transformasi Tata Kelola
Masalah Utama : Belum Optimalnya Pelayanan Publik

No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Penerapan Digitalisasi Pemerintahan	1 Terbatasnya prasarana pendukung SPBE
		2 Terbatasnya kompetensi SDM pengelola
		3 Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang SPBE



No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
2	Belum maksimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4 Rendahnya kesiapan masyarakat untuk bertransformasi dari manual ke digital.
		1 Penyusunan dokumen perencanaan kinerja yang kurang tepat
		2 Proses pengukuran dan pelaporan kinerja yang kurang sesuai
		3 Proses pengumpulan data kinerja yang tidak sesuai prosedur
3	Masih Lemahnya Implementasi Reformasi Birokrasi	4 Evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan secara keseluruhan
		1 Minimnya pemahaman aparatur terkait reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
		2 Belum optimalnya komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi
		3 Terbatasnya sumber daya dalam implementasi reformasi birokrasi

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.6.1.4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi

Suasana ketentraman dan ketertiban umum di daerah menjadi salah satu prasyarat keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, termasuk di wilayah Perbatasan negara. Beberapa masalah pokok yang terkait dengan Supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi sebagai berikut.

- 1) Kurangnya ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundangan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
Untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam masyarakat serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara diperlukan peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Peraturan yang ditaati akan menciptakan kondisi seperti yang yang diharapkan namun masih ditemukan ada masyarakat Kabupaten Alor yang kurang taat terhadap Peraturan perundang-undangan sehingga masih terjadi kasus pelanggaran hukum yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang undangan, kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan kurangnya pembentukan sikap dan perilaku pada lembaga pendidikan.
- 2) Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum optimal.
Berbagai peraturan yang dibuat atau ditetapkan di daerah memegang peranan penting dalam menata pembangunan daerah. Peraturan ini sebagai produk hukum pemerintahan daerah, dapat dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan

pemerintahan daerah. Peraturan daerah dan peraturan bupati yang telah ditetapkan telah mengatur dalam pelayanan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat, namun lemahnya sistem pengawasan norma dan standar HAM, yang ditandai dengan tidak tersedianya data jumlah kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan terakhir serta ketiadaan data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di tengah masih ditemukannya kasus korupsi, menjadi indikator lemahnya tata kelola regulasi daerah yang berkeadilan dan bebas korupsi. Dalam penegakannya juga belum optimal sehingga berdampak pada ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagian masyarakat yang tidak terpenuhi hak-haknya, gangguan keamanan dan ketertiban serta terjadinya kasus pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kurangnya ketegasan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah.

3) Terbatasnya jumlah penyidik PNS dan aparaturnya penegak Peraturan Daerah .

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat tertentu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. PPNS memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana umum yang ditangani oleh kepolisian. Pemerintah Kabupaten Alor memiliki jumlah PPNS yang sangat terbatas sehingga tugas-tugas penyidikan belum terlaksana dengan baik dan hal ini berdampak pada banyak masyarakat yang tidak tertib dan banyak kasus pelanggaran peraturan daerah yang tidak ditemukan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pemahaman tentang tugas dan fungsi PPNS, terbatasnya pendidikan dan pelatihan penyidik PNS, belum terlaksananya tugas penyidikan secara rutin/berkala.

Ringkasan masalah utama, masalah pokok dan akar masalah dalam supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



Tabel 2 131 Masalah Pokok: Supremasi Hukum, Stabilitas Dan Diplomasi

Masalah Utama : Rendahnya rasa aman masyarakat

No		Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
1		Kurangnya ketaatan masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundangan dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat	1	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang undangan
			2	Kurangnya ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan
			3	Kurangnya pembentukan sikap dan perilaku pada lembaga pendidikan
2		Penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati belum optimal	1	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati
			2	Kurangnya ketegasan pemerintah daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah
3		Terbatasnya jumlah penyidik PNS dan aparaturnya penegak Peraturan Daerah	1	Terbatasnya pemahaman tentang tugas dan fungsi PPNS
			2	Terbatasnya pendidikan dan pelatihan penyidik PNS
			3	Belum terlaksananya tugas penyidikan secara rutin/berkala.

2.6.1.5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Sosial budaya merupakan suatu tatanan dan interaksi dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, juga moral. Kondisi sosial budaya yang berkembang di Kabupaten sudah banyak tergerus oleh faktor-faktor seperti globalisasi serta pengaruh dari luar yang antara lain mengakibatkan terjadinya akulturasi dan asimilasi. Sedangkan ekologi menekankan pada aspek interaksi antar organisme dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan berbagai jenis ekosistem. Kondisi sosial budaya dan ekologi merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan kelanjutan hidup manusia. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi namun masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu nilai dan budaya lokal semakin ditinggalkan dan semakin rendahnya kualitas lingkungan.

1) Pengelolaan Kebudayaan yang belum Optimal

Fungsi utama dari kebudayaan adalah sebagai pedoman dalam hubungan antar manusia, disamping wadah untuk mengekspresikan perasaan dan kehidupan lainnya, termasuk sebagai pembimbing kehidupan sesama manusia dalam berelasi. Mengingat pentingnya kebudayaan, maka upaya untuk mengembangkan kebudayaan terus dilakukan Pemerintah, namun belum optimal sehingga berdampak pada adanya kebudayaan dan Bahasa

daerah yang terancam punah karena tidak dilestarikan dan banyak generasi muda yang lebih terbiasa dan mengikuti budaya luar dari pada budaya lokal.

Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan daerah ini disebabkan karena peran museum dalam pelestarian budaya, kurangnya upaya penuturan dan penulisan kembali sejarah dan kebudayaan, semakin berkurangnya para penutur adat dan pemerhati budaya dalam upaya untuk melestarikan warisan tutur adat dalam bentuk tulisan, kurang optimalnya promosi budaya lokal lewat peningkatan literasi Pengelolaan Kebudayaan Daerah.

2) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum Optimal

Lingkungan Hidup berperan penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan lingkungan hidup selain sebagai tempat manusia beraktifitas, berperan pula dalam mendukung berbagai aktifitas manusia. Lingkungan hidup berperan dalam menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup guna menghindari terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum memperoleh hasil yang maksimal sehingga berdampak pada masih terdapat lingkungan yang berstatus tidak bersih, tidak sehat dan tidak lestari; masih terdapat kegiatan pembangunan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan; masih tingginya jumlah produksi sampah rumah tangga yang tidak terkelola secara baik; dan belum adanya penerapan sistem pengelolaan sampah yang baik.

Pengelolaan lingkungan hidup yang belum optimal salah satunya diindikasikan dengan masih rendahnya jumlah sampah tertangani. Hal ini disebabkan karena selain tingginya produksi sampah, juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah, terbatasnya kompetensi petugas pengolah sampah, rendahnya keinginan Masyarakat untuk berlangganan sampah, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dalam pengolahan sampah. Pendataan, penanggulangan dan pengolahan limbah B3 juga menjadi persoalan tersendiri yang dihadapi daerah.

Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan belum optimal, proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi masih rendah, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan belum mengarusutamakan pelestarian keanekaragaman hayati melalui penyediaan anggaran dan

dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup.

3) Penanganan Kebencanaan yang belum Optimal

Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tingkat ancaman tinggi dari berbagai jenis bencana. Tingginya ancaman bencana diikuti dengan kerentanan terhadap bencana yang tinggi menyebabkan secara umum Kabupaten Alor memiliki risiko bencana yang tinggi sebagaimana data indeks risiko bencana dari BNPB. Kondisi ini perlu ditanggulangi dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan dalam penanggulangan bencana perlu dimulai dengan penyusunan sejumlah dokumen penanggulangan bencana yang meliputi rencana aksi daerah penanggulangan bencana, Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontigensi dan Rencana Operasi Penanggulangan Bencana menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengurangi risiko bencana di Kabupaten Alor.

Dalam menghadapi fenomena global terkait perubahan iklim, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan adaptasi perubahan iklim sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi perhatian seluruh *stakeholder* di daerah.

Kebijakan penataan ruang yang memperhatikan aspek kebencanaan dapat menjadi salah satu cara dalam mengurangi risiko bencana. Walaupun dalam kebijakan dan strategi penataan ruang telah ditetapkan wilayah rawan bencana dalam upaya pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah, namun upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana belum secara optimal dilakukan. Bencana gempa bumi pada tahun 2004 dan 2015 menyebabkan puluhan orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka serta kerusakan pada berbagai infrastruktur. Selain itu, bencana hidrometeorologi juga terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Alor dalam beberapa tahun terakhir. Badai siklon tropis seroja tahun 2021 telah menimbulkan kerusakan ratusan rumah penduduk dan sejumlah infrastruktur jalan, jembatan serta saluran irigasi lainnya. Kerusakan lingkungan akibat pengerukan pasir untuk kebutuhan ekonomi pada wilayah tertentu juga menimbulkan dampak abrasi pantai yang mengancam permukiman masyarakat pada wilayah pesisir.

Penanganan kebencanaan yang belum optimal disebabkan karena adanya kesulitan dalam memprediksi waktu terjadinya bencana, rendahnya



kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana, dan adanya kesulitan yang tinggi untuk mengakses daerah tertentu ketika terjadi bencana.

Ringkasan masalah utama, masalah pokok dan akar masalah terkait ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2 132 Permasalahan Pokok: Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi
Masalah Utama : Pengelolaan Budaya dan Lingkungan hidup belum optimal

No		Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
1		Belum Optimalnya Pengelolaan Kebudayaan Daerah	1	Terbatasnya jumlah dan peran para penutur adat dan pemerhati budaya
			2	Terbatasnya kegiatan festival budaya
			3	Rendahnya keinginan masyarakat untuk mengunjungi museum daerah
2		Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum Optimal	1	Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan Sampah
			2	Terbatasnya kompetensi petugas pengolah Sampah
			3	Rendahnya keinginan masyarakat untuk berlangganan sampah
			4	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan
			5	Tingginya aktivitas masyarakat yang cenderung merusak lingkungan
3		Penanganan Kebencanaan yang belum Optimal	1	Kurangnya sistem peringatan dini bagi masyarakat.
			2	Rendahnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
			3	Terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana
			4	Perencanaan tata ruang yang tidak responsif terhadap resiko bencana.

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.6.1.6. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Aspek penyediaan Infrastruktur dan pengembangan wilayah turut memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Ketersediaan infrastuktur yang layak mendorong konektivitas wilayah yang baik dan berdampak pada kehidupan sosial sekaligus merangsang tumbuhnya perekonomian baru pada suatu wilayah. Pembangunan infrastuktur yang representatif berkontribusi terhadap daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi pengembangan wilayah.

Pembangunan infrastuktur dan pengembangan wilayah telah menjadi prioritas dalam pembangunan daerah Kabupaten Alor. Pembangunan infrastuktur dan pengembangan wilayah yang dilaksanakan di Kabupaten Alor bertujuan selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun juga untuk pemerataan akses pembangunan bagi masyarakat pada wilayah terpencil dan perbatasan. Masih terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu belum optimalnya penyediaan infrastuktur dan pengembangan wilayah



terutama pada wilayah perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan pokok antara lain belum optimalnya pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang terbatas, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang belum optimal, fasilitas perhubungan yang masih terbatas, belum optimalnya pengelolaan Wilayah Perbatasan dan sejumlah permasalahan lainnya. Analisis terhadap permasalahan dimaksud dapat dijelaskan lebih lanjut berikut ini.

1) Belum Optimalnya Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Pekerjaan umum adalah berbagai macam proyek infrastruktur pembangunan fasilitas umum yang didanai dan dibangun oleh pemerintah yang meliputi seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainase dalam kota, pembangunan bangunan penangkap air dan penyediaan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian; pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum serta peningkatann akses sanitasi masyarakat melalui penyediaan fasilitas sanitasi.

Pemerintah daerah telah melakukan kegiatan pembangunan namun belum optimal sehingga berdampak pada belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas umum secara baik yang dapat dilihat dari masih rendahnya kondisi kemantapan jalan; masih banyak jembatan dalam kondisi rusak, masih terdapat wilayah yang belum terbangun akses jalan dan jembatan yang memadai, penataan drainase yang belum memadai pada kawasan perkotaan.

Permasalahan lain dari bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi: Rendahnya cakupan pelayanan air irigasi karena rusaknya sebagian besar saluran irigasi; adanya ketidaksesuaian fungsi, struktur dan pola ruang, masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, ketersediaan ruang yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan ruang yang terus meningkat; masih terdapat banyak sarana dan prasarana pelayanan umum yang dibutuhkan namun belum terbangun; dan masih rendahnya akses air minum dan sanitasi masyarakat. Akses air minum yang rendah terutama pada daerah kepulauan dan rawan air yang secara hidrologi memiliki keterbatasan sumber air minum. Keterbatasan akses sanitasi aman dan berkelanjutan di Kabupaten Alor diindikasikan dengan belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Pembangunan pada sektor pekerjaan umum yang belum optimal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Penyebab timbulnya permasalahan pokok pada bidang penataan ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Alor yang belum direvisi sesuai dengan perkembangan pemanfaatan ruang, terbatasnya pengawasan dalam pemanfaatan ruang dan belum optimalnya komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran RTRW.

2) Belum Optimalnya Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan permukiman.

Rumah menjadi kebutuhan dasar manusia yang menunjang kesejahteraan, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga Pemerintah Kabupaten Alor memandang penting untuk memberikan jaminan ketersediaan rumah dan penataan kawasan permukiman yang layak. Belum optimalnya pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman ini disebabkan karena terbatasnya lahan permukiman di daerah perkotaan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk; belum adanya lembaga pembiayaan infrastruktur yang secara optimal membantu pembangunan perumahan. Selain itu adanya permukiman kumuh masih menjadi permasalahan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada Kecamatan Teluk Mutiara dan beberapa kecamatan lainnya.

3) Belum Optimalnya Pembangunan Sarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan sarana perhubungan memberikan dampak bagi pembangunan daerah; antara lain karena ketersediaan sarana perhubungan yang memadai mempermudah perpindahan arus barang dan jasa, disamping menjadi urat nadi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah kabupaten Alor telah berupaya melakukan kegiatan pembangunan perhubungan namun belum optimal sehingga berdampak pada tingginya biaya transportasi, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jaminan keamanan dalam penggunaan sarana transportasi dan adanya angkutan darat dan laut yang tidak memenuhi standar.

Pembangunan perhubungan yang belum optimal ini disebabkan karena belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan baik jalan maupun pelayaran sebagai data base perencanaan; masih terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan untuk akses transportasi di pedesaan;



kurang optimalnya fasilitas perlengkapan jalan; belum optimalnya pengelolaan terminal dan layanan parkir; belum tertatanya sistem transportasi laut antar pesisir; serta terbatasnya sarana pelabuhan dan moda transportasi laut.

Permasalahan terkait komunikasi dan informatika yaitu belum Optimalnya proporsi penduduk yang terlayani *mobile broadband* karena belum seluruh wilayah kabupaten alor terakses layanan telepon dan internet. Transformasi digital dalam pembangunan Kabupaten Alor masih membutuhkan perhatian dengan sejumlah kebijakan. Indeks masyarakat digital Indonesia Kabupaten Alor selama tiga tahun terakhir masih pada kategori cukup sehingga perlu mendapat perbaikan sekaligus menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya merata dan berdayaguna di seluruh lapisan masyarakat.

4) Pengelolaan Bidang Pertanahan yang Belum Optimal

Pertanahan menunjuk pada kebijakan dalam mengatur hubungan-hubungan antara tanah dan orang per orang, keberadaan tanah menjadi penting untuk diatur oleh pemerintah, karena berhubungan dengan keberadaan seseorang untuk hidup diatasnya dan berdampak pada kehidupan yang lebih baik. Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyediakan tanah bagi berbagai kebutuhan pemerintah untuk pelayanan masyarakat namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya tanah pemerintah yang belum bersertifikat, masih terdapat kasus sengketa tanah pemerintah maupun tanah masyarakat yang belum terselesaikan, masih ada tanah pemerintah yang belum lunas pembayarannya, masih terdapat penggunaan lokasi, pembukaan tanah yang tidak berizin, dan terbatasnya jumlah tanah Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum.

Pengelolaan bidang pertanahan yang belum optimal ini disebabkan karena tidak tersedianya rencana kebutuhan tanah jangka panjang, terbatasnya sumber daya, proses hibah tanah masa lalu yang tidak dilengkapi dengan bukti hibah, dan masih terdapat tanah pemerintah daerah yang ditempati masyarakat karena jabatan orang tua masa lalu.

5) Belum optimalnya pengelolaan Wilayah Perbatasan.

Kabupaten Alor merupakan salah satu Kabupaten Perbatasan Negara, karena berbatasan laut dengan republik Demokrat Timor Leste. Rencana pembangunan wilayah perbatasan menjadi strategis untuk dilakukan, karena selain sebagai sabuk pertahanan negara, pentngnya kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan menjadi mutlak diperlukan. Beberapa



persoalan yang masih dihadapi daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan negara antara lain : Terbatasnya infrastuktur di daerah-daerah perbatasan; terbatasnya akses ekonomi masyarakat pada wilayah perbatasan; rendahnya kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan; dan wilayah perbatasan laut belum menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Ringkasan permasalahan utama, permasalahan pokok dan permasalahan spesifik atau akar masalah dalam mewujudkan Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2 133 Permasalahan: Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Masalah Utama : Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pembangunan Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	1 terbatasnya sumber daya untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
		2 frekuensi pemanfaatan fasilitas umum yang terus menerus dan tidak berhenti walaupun dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat
		3 RTRW Kabupaten Alor belum terupdate sesuai perkembangan terkini.
		4 terbatasnya pengawasan dalam pemanfaatan ruang
		5 Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran RTRW.
		6 Menurunnya kualitas dan kuantitas air pada sumber-sumber air
		7 Jumlah kebutuhan masyarakat akan rumah dan sanitasi layak tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya.
		8 Manajemen pengelolaan air yang tidak tertata secara profesional.
		9 Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak.
2	Belum Optimalnya Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan permukiman	1 Terbatasnya lahan permukiman di daerah perkotaan yang tidak sebanding dengan pertambahan jumlah penduduk
		2 Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni
		3 Masih tingginya luasan kawasan permukiman kumuh
		4 Belum terintegrasinya jaringan drainase perkotaan
3	Belum Optimalnya Pembangunan sarana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1 belum adanya rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan
		2 Terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan untuk akses transportasi di pedesaan
		3 kurang optimalnya fasilitas perlengkapan jalan;
		4 Belum optimalnya pengelolaan terminal dan layanan parkir
		5 Belum tertatanya sistem transportasi laut antar pulau;
		6 Terbatasnya sarana pelabuhan dan moda transportasi laut



No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah
		7 Belum Optimalnya proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband
4	Pengelolaan Bidang Pertanahan yang Belum Optimal	1 Tidak tersedianya rencana kebutuhan tanah jangka panjang
		2 Terbatasnya sumber daya
		3 Proses hibah tanah masa lalu yang tidak dilengkapi dengan bukti hibah
5	Belum optimalnya pengelolaan wilayah perbatasan	1 Terbatasnya infrastruktur di daerah-daerah perbatasan
		2 terbatasnya akses ekonomi masyarakat pada wilayah perbatasan.
		3 wilayah perbatasan laut belum menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

2.6.1.7. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjuk pada tingkat keunggulan kompetitif daerah yang memiliki peran untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam segala bidang. Sedangkan dari sisi ekonomi, daya saing daerah mengarah pada kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja untuk bersaing pada skala domestik, regional maupun internasional. Berbagai Upaya yang dilakukan pemerintah daerah belum dapat meningkatkan Daya Saing Daerah. Analisis permasalahan terhadap daya saing daerah difokuskan pada kontribusi PDRB pada sejumlah sektor prioritas, ketersediaan tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Secara umum, analisis terhadap penyebab timbulnya permasalahan dimaksud, dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya sektor pertanian terhadap nilai tambah Pembangunan ekonomi daerah

Sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Alor; rata rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama lima tahun terakhir di atas 31 persen. Meskipun demikian, terjadi fluktuatif dengan kecenderungan menurun selama tiga tahun terakhir. Peningkatan kontribusi sektor pertanian belum diikuti dari aspek nilai tambah; masih terdapat banyak potensi pertanian yang belum dikembangkan dalam menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah.

Jika dilihat dari ketersediaan potensi daerah, sesungguhnya sektor pertanian dan perikanan memiliki potensi yang cukup besar. Keberadaan jumlah penduduk di sektor pertanian yang cukup tinggi, disamping Kabupaten Alor sebagai wilayah kepulauan yang memiliki

110 desa/kelurahan pesisir seharusnya berkontribusi besar memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

2) Rendahnya kontribusi sektor Industri Pengolahan (manufaktur)

Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB sangatlah kecil. Data PDRB Tahun 2021 menunjukkan hanya 1,40 persen kontribusi sektor industri pengolahan; pada Tahun 2022 sedikit mengalami peningkatan menjadi 1,43 persen. Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan menjadi perhatian serius pemerintah, karena kedepan prioritas Pembangunan di NTT yang difokuskan pada sektor pariwisata dan industry kreatif harus benar-benar disikapi dalam memberikan nilai tambah produksi bagi para UMKM. Rendahnya nilai tambah sektor industri terhadap PDRB menyebabkan rendahnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri sehingga kurang memberi stimulan pada perekonomian masyarakat.

Sejumlah permasalahan di sektor industri seperti terbatasnya jumlah industri kecil dan menengah yang sehat; belum optimalnya peranan IKM dalam rantai pasok industri serta terbatasnya SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat menjadi persoalan utama di sektor industri pengolahan.

3) Rendahnya kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum

Rendahnya kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB menggambarkan rendahnya pengembangan sektor pariwisata. Data tahun 2021 menunjukkan hanya 0,39 persen kontribusi sektor akomodasi dan makan minum dalam PDRB; dan untuk Tahun 2022 meningkat menjadi 0,42 persen. Berbagai potensi di sektor pariwisata yang cukup menjanjikan, belum memberikan efek positif bagi ekonomi daerah. Pengelolaan pariwisata yang belum optimal, antara lain ketersediaan sarana prasarana pariwisata, manajemen pengelolaan, upaya promosi dan keterbatasan SDM pengelola sektor pariwisata memberikan dampak bagi rendahnya sektor akomodasi dan makan minum.

4) Rendahnya PDRB Perkapita

PDRB Perkapita mencerminkan rata-rata pendapatan seseorang pada setiap tahun; PDRB juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi alat untuk memprediksi tingkat pendapatan masyarakat kedepan. Dengan demikian, PDRB memiliki nilai strategis untuk menentukan sejahtera tidaknya seseorang. Laju

pertumbuhan PDRB Kabupaten Alor belum menunjukkan hasil yang optimal. Tahun 2021 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Perkapita mencapai 14,80 Juta, sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 15,55 juta. Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Alor lebih rendah dari provinsi NTT yang tahun 2022 mencapai 13,2 juta. Laju pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Alor sebesar 8,53 persen, lebih tinggi dari laju PDRB Perkapita Provinsi NTT sebesar 5,21 persen.

5) Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Untuk 3 tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap besaran Pendapatan Daerah berkisar 4-5 persen, atau ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat menjadi 95-56 persen. Kondisi ini disebabkan karena masih belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah.

6) Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Alor terus mengalami pengurangan jumlah pada setiap tahun, namun tetap menjadi permasalahan di daerah. Data pada Tahun 2021, TPT di Kabupaten Alor mencapai 2,59 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 107.596 orang. Pada Tahun 2024 mengalami pengurangan menjadi 2,27 persen dari total angkatan kerja 112.035. Persoalan TPT lebih banyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya kualitas tenaga kerja dan kurangnya keinginan masyarakat dalam berwirausaha.

Meskipun terjadi penurunan TPT namun keterbatasan lapangan kerja formal di Kabupaten Alor menyebabkan masih rendahnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal sehingga persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan masih tinggi dan cenderung meningkat.

Ringkasan Permasalahan utama, permasalahan pokok, dan permasalahan spesifik atau akar masalah dalam upaya mewujudkan kesinambungan pembangunan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2 134 Permasalahan Pembangunan: mewujudkan kesinambungan pembangunan

No	Masalah pokok	Masalah Spesifik/Akar Masalah	
1	Belum optimalnya sektor pertanian terhadap nilai tambah Pembangunan ekonomi daerah	1	Masih terdapat potensi sektor pertanian dan perikanan yang belum dikembangkan
		2	Rendahnya produktivitas lahan
		3	Terbatasnya ketrampilan petani/nelayan
		4	Terbatasnya jumlah petani pada lahan potensial
		5	Terbatasnya sarana prasarana pertanian
		6	Pengelolaan sektor peternakan yang masih tradisional
		7	Terbatasnya akses peternak terhadap permodalan
		8	Program pengembangan pembibitan unggul yang terbatas
		9	Terbatasnya fasilitas <i>biosecurity</i> dan vaksinasi pada ternak
		10	Terbatasnya sarana prasarana perikanan
2	Rendahnya kontribusi sektor Industri Pengolahan (<i>manufactur</i>)	1	Terbatasnya industri kecil menengah
		2	Terbatasnya pelaku usaha industri
		3	Tingginya pengiriman bahan baku ke luar Pulau
		4	Terbatasnya kompetensi pelaku usaha Industri
3	Rendahnya kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum	1	Terbatasnya sarana prasarana pariwisata
		2	Kurang optimalnya manajemen pengelolaan pariwisata
		3	Terbatasnya promosi pariwisata
		4	Kompetensi SDM pengelola sektor pariwisata yang terbatas
4	Rendahnya PDRB Perkapita	1	Terbatasnya kualitas sumber daya manusia
		2	Terbatasnya lapangan kerja
		3	Rendahnya daya beli masyarakat
		4	Rendahnya pendapatan masyarakat
5	Tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat	1	Rendahnya Pajak daerah
		2	Rendahnya retribusi daerah
		3	Terbatasnya inovasi sumber pendapatan baru
6	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka	1	terbatasnya lapangan pekerjaan
		2	Kualitas tenaga kerja yang masih minim
		3	kurangnya keinginan masyarakat dalam berwirausaha
7	Rendahnya penerapan inovasi daerah	1	Keterbatasan pengetahuan aparatur dalam berinovasi
		2	Belum ada sistem dalam penerapan inovasi daerah



2.6.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam 5 tahun ke depan.

Isu Strategis daerah sangat dipengaruhi pula oleh isu Strategis di tingkat Global, Nasional dan Isu strategis Pemerintah Provinsi NTT; berikut penjelasan terkait isu-isu strategis dimaksud:

2.6.2.1. Isu Global

Isu strategis global merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh negara negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing- masing. Isu strategis internasional adalah sebagai berikut :

a. Krisis kesehatan global

Kesehatan merupakan keutuhan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial dan kesehatan global meliputi penyebaran penyakit, perkembangan ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat, epidemiologi, serta faktor-faktor penentu lain seperti demografi, status ekonomi, serta kebudayaan. Menurut WHO terdapat beberapa tantangan terkait kesehatan global antarlain perubahan iklim dan cuaca, layanan di wilayah konflik, perbaikan layanan kesehatan, memperluas cakupan obat-obatan, menghentikan penyakit menular, persiapan menghadapi wabah, melindungi masyarakat dari produk berbahaya, investasi tenaga kesehatan, menjaga kesehatan remaja, mendapatkan kepercayaan publik, memanfaatkan teknologi, masalah resistensi antibiotik, dan menjaga sanitasi.

b. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi merupakan sebuah fenomena kesenjangan atau perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau kemampuan mengakses fasilitas tertentu sehingga tidak semua orang memiliki akses atau *privilege* yang sama terhadap suatu hal.

Ketimpangan ekonomi disebabkan oleh ketimpangan peluang sejak lahir, ketimpangan pasar kerja, tingkat Pendidikan, dan sulit beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dampak dari ketimpangan ekonomi adalah kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi dan produktivitas masyarakat menurun. Di Dunia saat ini terdapat 700



juta orang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem sementara hanya terdapat 10% penduduk saja yang memiliki 10% kekayaan dunia.

Ketimpangan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator, seperti koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu negara atau masyarakat. Semakin tinggi koefisien Gini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi, begitu pula sebaliknya.

c. Revolusi teknologi dan etika

Revolusi teknologi merupakan perubahan teknologi yang berlangsung dalam waktu cepat dan mengacu pada arah modern yang terjadi dalam semua bidang kehidupan manusia. Dunia telah memasuki Revolusi Industri 5.0 yang merupakan tahap terbaru dalam revolusi industri yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi, Revolusi Industri 5.0 menekankan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia kerja, manusia dan robot bekerja berdampingan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inovatif, produktif, dan etis.

Tantangan etis revolusi industri 5.0 ini berkaitan dengan privasi dan keamanan data dimana semakin banyaknya sistem berbasis AI, perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif menjadi tantangan besar yang harus diatasi, kesenjangan keterampilan dimana perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan, di mana pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital akan tertinggal dan tanggung jawab moral serta keputusan AI dimana penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis menimbulkan pertanyaan etis terkait akuntabilitas dan bias algoritma.

d. Keamanan pangan

Keamanan pangan merupakan metode penanganan, penyiapan dan penyimpanan makanan untuk mencegah penyakit atau keracunan makanan. Hal ini mencakup praktik-praktik yang dilakukan sepanjang rantai makanan mulai dari pengolahan hingga persiapan dan penyajian makanan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), mencatat, krisis pangan dan kekurangan gizi melanda 53 negara di dunia. Kasus krisis pangan dan kekurangan gizi diketahui terus memburuk pada tahun 2024 ada 295 juta orang menderita kelaparan akut.

e. Geopolitik Dan Keamanan Internasional

Geopolitik berkaitan dengan bagaimana faktor geografis, politik, dan ekonomi memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana lokasi geografis, sumber daya alam, demografi dan keamanan.

Geopolitik berdampak pada konflik internasional dimana persaingan atas sumber daya alam, kekuasaan, dan pengaruh sering kali menjadi pemicu konflik internasional. Ketegangan geopolitik dapat berujung pada konflik bersenjata antara negara-negara, kebijakan luar negeri dimana kepentingan nasional, aliansi, dan strategi diplomasi sangat dipengaruhi oleh faktor geopolitik, ekonomi global dimana kondisi geopolitik dapat mempengaruhi perdagangan internasional, arus investasi, dan stabilitas ekonomi global. Ketidakstabilan politik di satu negara dapat berdampak terhadap ekonomi global dan perdamaian dunia dimana geopolitik dapat membantu menciptakan kerja sama internasional yang berdampak positif. Organisasi internasional PBB berupaya mempromosikan perdamaian dunia melalui diplomasi geopolitik.

f. Perubahan Iklim Dan Pemanasan Global

Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca global baik perubahan dalam curah hujan, frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim serta perubahan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Sedangkan pemanasan global merupakan kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Aktivitas utama manusia yang berdampak terhadap perubahan iklim dan pemanasan global adalah pembakaran bahan bakar fosil.

Perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrim. Pemanasan global merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim.

g. Krisis Lingkungan

Krisis lingkungan merupakan fenomena yang mencakup deforestasi, kerusakan tanah, polusi, kepunahan spesies, lubang ozon, hujan asam, dan pemanasan global. Beberapa contoh bentuk krisis lingkungan yang terjadi di dunia, misalnya polusi udara, pencemaran limbah, polusi cahaya, perubahan iklim yang ekstrem, pencemaran air, kelangkaan air, hilangnya keragaman hayati (hewan, sumber daya alam) dan deforestasi, kemerosotan kualitas hidup dan sosial, serta ketimpangan global.



2.6.2.2. Isu Strategis Nasional

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dalam periode 5 tahun ke depan telah menetapkan visi Indonesia untuk periode 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan sejumlah isu Nasional, yaitu :

a. Kualitas SDM

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang penting bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan SDM untuk wilayah Indonesia bagian barat atau wilayah Jawa maka kualitas SDM di provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masih tergolong rendah. Hal ini diindikasikan dari beberapa hal antara lain tingginya prevalensi stunting dibandingkan nasional (NTB: 19,9 persen; NTT: 31 persen; Nasional: 18,3 persen), rendahnya cakupan penemuan kasus TBC di Provinsi NTB (52,6 persen), Provinsi NTT (44,1 persen), termasuk di Provinsi Bali (50,2 persen) yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional (77,5 persen), serta prevalensi beberapa penyakit yang masih tinggi seperti Hepatitis (Bali: 0,08; NTB: 0,33; NTT: 0,22; Nasional: 0,12), ISPA (Bali: 2,1; NTB: 1,9; NTT: 3,1; Nasional: 2,2), Pneumonia (Bali: 0,44; NTB: 0,43; NTT: 0,68; Nasional: 0,48). (Kementerian Kesehatan, 2023). Selain itu, Bali, NTB dan NTT merupakan wilayah endemis rabies yang telah menjadi KLB selama 2 tahun terakhir.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur memiliki IPM lebih rendah dari Nasional (NTB: 73,10; NTT: 69,14; Nasional: 75,02), hal ini terutama disebabkan oleh kondisi kesehatan yang masih rendah (BPS, 2024). Capaian HLS (Harapan Lama Sekolah) telah lebih tinggi dari nasional (NTB: 13,98; NTT: 13,23; Nasional: 13,21), namun capaian UHH (Umur Harapan Hidup) masih lebih rendah dari nasional (NTB: 72,25; NTT: 71,83; Nasional: 74,15) (BPS, 2024). Hal ini disebabkan di antaranya oleh tingginya unmet need pelayanan kesehatan (NTB: 8,24 persen; NTT: 7,06 persen; Nasional: 5,18 persen (BPS, 2024)), rendahnya akses air minum layak (NTT: 88,35 persen; Nasional: 91,72 persen), serta rendahnya akses sanitasi layak (NTT: 75,67 persen; Nasional: 82,36 persen) (BPS, 2023).

b. Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan dengan menghitung jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan penduduk di wilayah Bali lebih baik dibandingkan



Wilayah Nusa Tenggara yang angka kemiskinannya masih tinggi (Bali: 4 persen; NTB: 12,91 persen; NTT: 19,48 persen; Nasional: 9,03 persen (BPS, 2024)). Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di NTB dan NTT adalah tingginya lapangan pekerjaan di sektor informal (Bali: 50,68 persen; NTB: 70,51 persen; NTT: 73,32 persen; Nasional: 57,95 persen) (BPS, 2024). Selain itu, sektor pertanian yang menyerap 49,91 persen pekerja di NTT dan 36,16 persen pekerja di NTB (BPS, 2024), memiliki nilai tambah yang paling rendah dibandingkan provinsi lain (NTB: Ke-3 terendah; NTT: Ke-2 terendah) (BPS, 2023).

Selain itu, kondisi kemiskinan yang masih tinggi di NTB dan NTT juga disebabkan oleh tingginya status pekerja buruh tidak tetap (Bali: 13,19 persen; NTB: 19,78 persen; NTT: 21,01 persen; Nasional: 13,83 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar (Bali: 12,93 persen; NTB: 17,59 persen; NTT: 26,03 persen; Nasional: 13,34 persen), serta masih rendahnya cakupan pekerja dengan jam kerja penuh (Bali: 74,48 persen; NTB: 59,46 persen; NTT: 49,66 persen; Nasional: 68,06 persen). Ditinjau dari kualitas pekerja yang tersedia, sebagian besar pekerja di Provinsi NTB dan NTT masih didominasi oleh capaian pendidikan di bawah SD (Bali: 31,22 persen; NTB: 41,49 persen; NTT: 43,96 persen; Nasional: 35,80 persen) (BPS, 2024).

c. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan nilai dan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian Wilayah Bali-Nusa Tenggara mengalami perlambatan dari 5,08 persen (2022) menjadi 4,00 persen (2023), disebabkan salah satunya oleh kecilnya pertumbuhan sektor pertanian yang berperan cukup besar pada Provinsi NTB dari 2,2 persen (2022) menjadi 2,1 persen (2023) dan NTT dari 3,8 persen (2022) menjadi 2,5 persen (2023), sementara Provinsi Bali masih mengalami kontraksi namun telah lebih kecil dari -0,9 persen (2022) menjadi 0,6 persen (2023) (BPS, 2023). Selain itu, diversifikasi ekonomi masih belum optimal, ditunjukkan melalui rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan di NTB (3,86 persen) dan NTT (1,31 persen), serta masih rendahnya capaian indeks *Quality Tourism* pada destinasi wisata di Provinsi NTB dan NTT dibandingkan di Provinsi Bali dan angka nasional (BI Institute, 2023).

Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki beragam komoditas unggulan. NTT memiliki produksi rumput laut tertinggi ke-2 nasional (1,56 juta



ton pada tahun 2023) yang telah mampu menembus pasar internasional. Selain komoditas tersebut, NTB dan NTT merupakan produsen garam tertinggi ke-4 dan ke-5 nasional dengan produksi masing-masing mencapai 205.535 ton dan 22.983 ton pada tahun 2023.

Selain itu Wilayah Bali–Nusa Tenggara memiliki keindahan alam, ekosistem bahari, serta kekayaan adat dan budaya yang menjadi magnet wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2023, Pulau Bali (Bandara Ngurah Rai) masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. NTB dan NTT juga memiliki pesona pariwisata kelas dunia seperti Sirkuit Mandalika, Pulau Gili, Satwa Komodo, hingga Taman Nasional Komodo. Selain pesona pariwisata, juga terdapat potensi ekonomi kreatif berbasis komoditas unggulan dan budaya tradisi lokal.

d. Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan haruslah memiliki stok pangan yang cukup. Di Provinsi ini terdapat 2 lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas padi dan jagung yang menjadi potensi mendukung ketahanan pangan dengan produksi di Kabupaten Sumba Tengah pada 2021 sebesar 20.852 ton untuk padi dan 13.322 ton untuk jagung. Sementara itu untuk Kabupaten Belu pada 2021 sebesar 24.427 ton untuk padi dan 49.127 ton untuk jagung. Provinsi NTB juga memiliki potensi berupa tanaman pangan berupa padi dengan produktivitas yang tinggi (Peringkat ke-8 Nasional dan ke-2 di Wilayah KTI).

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional, namun Tingkat pengangguran terbuka tertinggi cenderung terdapat pada lulusan di atas pendidikan dasar (NTB: 4,73 (SMK); NTT: 5,66 (SMA); Bali: 3,4 (Diploma)) (BPS, 2024) dan masih terbatasnya link and match dengan lapangan kerja yang tersedia.

f. Adanya Kesenjangan Antar Wilayah

Isu kesenjangan antarwilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT, seiring dengan terkonsentrasinya aktivitas ekonomi pada kabupaten/kota tertentu, di mana 54 persen share PDRB NTB 2023



berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram, sementara 20 persen share PDRB NTT 2023 berasal dari 1 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi. NTT, yaitu Kota Kupang (BPS, 2023). Hal tersebut disebabkan beberapa di antaranya, belum meratanya pengembangan infrastruktur dasar, transportasi, dan telekomunikasi yang mendukung konektivitas antarwilayah dan antarpulau.

g. Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam memiliki nilai penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam berupa pertambangan tembaga dan emas. Hal ini didukung dengan keberadaan Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat yang diharapkan mampu mendukung Indonesia sebagai *economic powerhouse*.

Untuk Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki potensi energi terbarukan (EBT) hingga mencapai 457,42 GW. Potensi ini meliputi energi surya (414,5 GWp), hidro (0,13 GW), panas bumi (1,62 GW), bioenergi (1,4 GW), bayu (17,57 GW), dan arus laut (22,2 GW).

h. Konservasi Lingkungan Dan Pengendalian Bencana

Konservasi lingkungan merupakan upaya untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam serta menjaga keseimbangan ekosistem. Di Provinsi Nusa Tenggara banyaknya kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan Kawasan pertumbuhan.

Potensi Wilayah Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki indeks risiko bencana kategori sedang, namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar seperti *Flores Back Arc Thrust*, *Lombok Strait Strike-slip Fault*, *Teluk Panas Fault*, *Sape Strike-slip Fault*, *Bondowatu Fault*, *Sumba Ridge Thrust*, *Savu Thrust*, *Semau Fault*, *Sape Strike-slip Fault*, dan *Sumba Strike-slip Fault*. Beberapa ancaman bencana yang perlu diperhatikan diantaranya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, gelombang ekstrem, gunung berapi, serta kebakaran hutan dan lahan.



2.6.2.3. Isu Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sejumlah isu strategis Provinsi NTT yang ditetapkan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya Kualitas Dan Daya Saing SDM Serta Kemerossotan Nilai-Nilai Budaya

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pelayanan pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia di suatu wilayah. Jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) yang ada di Provinsi NTT akses terhadap pelayanan pendidikan yang ada masih belum optimal. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hingga tahun 2023 APM di Provinsi NTT di tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 65,68%, SMP/MTs/Sederajat sebesar 73,47 %, SMA/MA/Sederajat 58,15%.

Jika dilihat dari angka capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yang ada di Provinsi NTT masih berada pada angka 45,45%.

Jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTT ini belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi NTT.

Hal ini dikarenakan tidak semua fasilitas kesehatan yang ada didukung oleh tenaga kesehatan yang mumpuni. Di dalam upaya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas diperlukan sarana dan prasarana pendukung termasuk tenaga kesehatan yang memadai, sebagai contoh jika mengacu kepada standar WHO, jumlah dokter ideal 1:1.000. Artinya di Provinsi NTT masih kekurangan sekitar 4.500 dokter sehingga penyebarannya masih kurang dan timpang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terlayani.

b. Kemiskinan

Kemiskinan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Secara umum, Tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mengalami fluktuasi, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi NTT. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 19,96 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022. Dan jika dilihat berdasarkan tempat tinggal persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 8,84 persen, naik menjadi 9,12 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2022 sebesar 23,86 persen, turun menjadi 23,76 persen pada Maret 2023. Untuk jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 1,14 juta orang, meningkat 9,5 ribu orang terhadap Maret 2022. Dan dibanding Maret 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan meningkat sebanyak 8,8 ribu orang (dari 126,80 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 135,57 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,7 ribu orang (dari 1.004,83 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 1.005,55 ribu orang pada Maret 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp507.203,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp389.518,- (76,80 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp117.685,- (23,20 persen). Pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT memiliki 5,90 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.992.498,-/rumah tangga miskin/bulan.

c. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru Dan Ekonomi Hijau

Indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah merupakan ukuran utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan produk Domestik Regional Bruto (RDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Perekonomian provinsi NTT pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



Pada tahun 2023, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangan terbesar terhadap struktur ekonomi NTT sebesar 20.841,76 miliar rupiah kemudian diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6.282.586,7 miliar rupiah, konstruksi 7.854.706,51 miliar rupiah; informasi dan komunikasi 7.582.166,86 miliar rupiah.

d. Tingginya Ketergantungan Pada Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Serta Rendahnya Pemanfaatan Teknologi (Hilirisasi)

Pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor andalan provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sebagian besar Penduduk NTT menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar nilai PDRB di NTT, kategori ini mencakup sub kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang terdiri dari golongan tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan; sub kategori usaha kehutanan dan penebangan kayu; dan sub kategori perikanan. Kategori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

e. Belum optimalnya pengembangan pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu potensi unggulan provinsi Nusa Tenggara Timur dimana potensi ini tersebar pada seluruh Kabupaten Kota dengan berbagai keunikan dan keindahannya masing-masing.

Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa obyek wisata alam yang masih alami, termasuk pulau Komodo, danau kelimutu, cagar alam gunung mutis dan desa tradisional Bena. Makanan khas provinsi NTT meliputi jagung boso, daging asap sapi, seafood dan plencing kangkong. Beberapa objek wisata terbaik diantaranya Taman Nasional Kelimutu, Wae Rebo, Pulau Kera, Pink Beach, Pantai Lasiana, Pantai Neam, Pulau Alor, Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Rumah Adat Pasola, Pantai Koka, Pulau Riung, Pulau Kanawa, Gili Laba, Sawah Lingko, Air Terjun Neolaku, Pantai Nembrala, Pantai Pasir Panjang, dan objek lainnya. Selain potensi ini Provinsi NTT juga memiliki berbagai potensi wisata lain yang belum dikelola dengan baik sehingga belum dikenal oleh wisatawan. Fasilitas hotel untuk penginapan wisatawan terdata pada tahun 2024 telah tersedia 53 hotel berbintang dengan 3.622 kamar dan 563 hotel non berbintang dengan 8.030 kamar dan jumlah tamu yang menginap terdiri dari tamu mancanegara 291.105 orang

dan tamu domestik 885.362 orang. Jumlah hotel berbintang, jumlah kamar dan jumlah tamu/wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel ini jika dibandingkan dengan Provinsi Bali maka NTT masih sangat rendah dimana untuk Provinsi Bali terdapat 593 hotel berbintang dengan 61.094 kamar, dan kunjungan wisatawan mancanegara sejumlah 6.333.360 orang dan wisatawan domestik sejumlah 10.120.786 orang.

f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Salah satu azas penyelenggaraan good governance/ Pemerintahan yang baik tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan besaran 63,65 belum mencapai target yang ditetapkan, capaian SAKIP untuk Tingkat provinsi yaitu 75.

g. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum.

Proses penegakan hukum memberikan jaminan pada ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2022, Capaian SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi NTT belum benar-benar diwujudkan secara merata diseluruh kabupaten/kota. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTT pada Tahun 2022 sebesar 63 persen. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/ Kota Tahun 2022 yang tertinggi yaitu Kota Kupang sebesar 76 persen, Kabupaten Alor sebesar 70 persen serta Kabupaten Rote Ndao sebesar 68 persen. Masih terdapat 12 Kabupaten

di wilayah Provinsi NTT yang belum memiliki data capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

h. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan Dan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kejadian bencana akan memberikan dampak yang luas dan multi generasi. Meski dampak perubahan iklim banyak terdapat pada sektor-sektor berbasis lahan, tetapi dampaknya dapat meluas pada sektor lainnya seperti kesehatan masyarakat, pemenuhan pangan, kepastian investasi, dan produktivitas tenaga kerja serta kelangsungan sektor ekonomi unggulan. Kerentanan terhadap perubahan iklim semakin meningkat di Indonesia termasuk pada wilayah Kabupaten Alor dari adanya peningkatan emisi yang dihasilkan serta masih adanya penduduk yang belum resilien terhadap bencana, baik secara kelengkapan sarana dan prasarana tangguh bencana maupun dari segi kapasitas adaptasi masyarakat secara kolektif. Emisi yang meningkat akibat aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat memperparah intensitas dampak perubahan iklim. Selain itu, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap terjadinya peningkatan bencana, seperti masyarakat yang tinggal pada daerah rawan bencana, masyarakat yang sehari-hari memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, kelompok perempuan dan disabilitas, masyarakat adat, dan lain-lain. Isu kerentanan terhadap perubahan iklim memiliki relevansi yang kuat dengan penyelesaian TPB tentang ekosistem darat, ekosistem laut, dan perubahan iklim, maupun relevansi dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan kerawanan pangan, produktivitas sektor ekonomi dan komoditas unggulan, akses air bersih, permukiman yang berkelanjutan, dan perlindungan kehati.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Ketahanan Pangan NTT mencapai 63,81 yakni mengalami peningkatan dari nilai IKP pada tahun 2020 senilai 63,30. Meski telah mengalami peningkatan yang baik, rata-rata nilai IKP per kabupaten/kota di NTT dan indikator pembentuknya masih jauh lebih rendah daripada rata-rata nasional. Provinsi NTT dilewati oleh beberapa patahan sesar sehingga rentan terhadap aktivitas seismik. Kondisi klimatologi wilayah dilalui oleh arus angin dari Asia dan Samudera Pasifik yang telah kehilangan sebagian besar kandungan uap air sehingga curah hujan lebih sedikit dan cenderung kering. Secara historis, Provinsi NTT telah mengalami



576 kejadian bencana dalam 10 tahun terakhir, dengan angin puting beliung menjadi bencana yang paling sering terjadi, diikuti oleh banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Terdapat beberapa daerah yang diidentifikasi lebih rentan pada bencana tertentu. Kajian kerentanan terhadap risiko karhutla menunjukkan daerah-daerah dengan risiko karhutla tinggi dan sedang seperti Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Malaka, Manggarai, dan Flores Timur. Sedangkan mayoritas area dengan risiko tinggi banjir terpusat Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang, Malaka, Sumba Timur, dan Ende. Potensi bencana dan Matriks jumlah paparan risiko bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Resiko Bencana Indonesia Tahun 2023, menunjukkan nilai keterpaparan untuk 11 jenis bencana untuk resiko sosial, fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan berada pada kategori sedang- tinggi.

2.6.2.4. Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Alor

Dengan memperhatikan arah kebijakan pada Milestone tahap I pembangunan jangka panjang daerah maka dirumuskan isu strategis daerah dengan mempertimbangkan masalah, isu global, isu strategis Nasional dan Isu Strategis Provinsi NTT.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis untuk Kabupaten Alor, yaitu : (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

a) Terbatasnya Kualitas Dan Kapasitas SDM

Salah satu indikator dalam mengukur Pembangunan SDM adalah capaian point dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang. IPM dibentuk oleh 3 faktor, yakni: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH), yakni jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan standar hidup layak

digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli.

IPM Kabupaten Alor terus mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan. IPM Kabupaten Alor tahun 2020 mencapai 65,13 poin, meningkat menjadi 67,70 pada tahun 2024, terjadi peningkatan 2,57 poin atau tumbuh 3,95 persen. Meskipun terjadi peningkatan IPM pada tahun 2024, namun masih dibawah angka IPM Provinsi NTT yang sebesar 69,14 dan IPM Nasional sebesar 75,02.

Akar permasalahan pada IPM Kabupaten Alor, terletak pada aspek pengetahuan atau pendidikan dan standar hidup layak yang masih rendah. Kabupaten Alor masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan di bidang pendidikan, seperti : pemerataan pendidikan di semua wilayah Kabupaten Alor baik terhadap tenaga pendidik, dan sarana prasarana pendidikan, secara khusus pada wilayah-wilayah pedalaman dan terpencil; angka putus sekolah karena sulitnya anak usia sekolah terhadap akses pendidikan, masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antar wilayah dan antar jenis kelamin dan juga masih kurangnya jumlah guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sektor Pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Alor.

Pada sektor Kesehatan yang juga memberikan kontribusi pada kualitas SDM, sejumlah persoalan mendasar masih dihadapi daerah dalam pengelolaan sektor Kesehatan; seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir, balita dengan status gizi buruk, angka prevalensi stunting, tingginya kasus penyakit menular diantaranya Malaria, TBC dan HIV/AIDS; Tingginya angka kesakitan akibat penyakit, rendahnya rasio ketersediaan dokter dan dokter spesialis terhadap jumlah penduduk. Selain itu ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar, jaminan kesehatan masyarakat belum menyeluruh, posyandu tangguh, kemampuan pengelolaan puskesmas belum optimal, fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna masih rendah dan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan berkualitas.

b) Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Secara global dan dalam RPJPN Nasional 2025-2045 menetapkan kemiskinan sebagai salah satu isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Penduduk miskin di Kabupaten Alor pada tahun 2019

berjumlah 44.320 orang atau 21,59 persen dari total penduduk Kabupaten Alor. Jumlah penduduk miskin fluktuatif selama empat tahun terakhir, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 sejumlah 42.300 orang atau 20,25 persen dan terus menurun hingga 19,87 persen pada tahun 2024. Persoalan kemiskinan yang dihadapi Masyarakat juga disebabkan oleh sejumlah permasalahan sosial lainnya, seperti tingginya PMKS, masih adanya pengangguran terbuka karena keterbatasan lapangan kerja, kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan kaum disabilitas dan lansia.

c) **Pengarusutamaan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion* (GEDSI) dalam Pembangunan**

Pendekatan GEDSI sebagai prinsip fundamental dalam seluruh tahapan pembangunan. Pengarusutamaan GEDSI dalam pembangunan diartikan bahwa GEDSI tidak hanya diperlakukan sebagai komponen pelengkap tetapi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan secara sistematis responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan dan marjinal lainnya. Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang masih sering terjadi merupakan salah satu indikator bahwa perempuan, anak dan kaum marginal lainnya sebagai persoalan serius dalam pembangunan sehingga perlu sejumlah kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

d) **Kualitas dan daya saing sektor ekonomi unggulan daerah yang masih terbatas**

Kabupaten Alor memiliki potensi ekonomi yang cukup besar pada sejumlah sektor potensial. Untuk sektor pertanian yang meliputi pertanian, kehutanan dan perikanan/kelautan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten, namun demikian, pengelolaan sektor pertanian dan perikanan masih sangat minim dalam pemanfaatan teknologi dan cenderung hanya bersifat tradisional tanpa adanya pengolahan lebih lanjut untuk menciptakan nilai tambah. Sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan belum memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Ketersediaan infrastruktur pariwisata dan model pengelolaan pariwisata yang belum optimal ditambah lemahnya promosi wisata menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi pengembangan sektor pariwisata secara umum. Pengelolaan usaha kecil menengah di sektor industri

belum juga memberikan nilai tambah pada ekonomi daerah. Usaha-usaha UMKM yang masih sangat sederhana dengan modal usaha yang terbatas menjadi alasan rendahnya pengembangan sektor industri/manufaktur, hal ini dibuktikan dengan kontribusi sektor industri pada PDRB yang masih sangat kecil.

Untuk pengelolaan koperasi juga masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan, bahkan koperasi-koperasi primer cenderung tidak berkembang dan sejumlah koperasi tidak lagi berfungsi secara baik. Koperasi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah koperasi milik swasta yang cenderung menjerat anggota koperasi karena membebani kreditor dengan bunga yang sangat tinggi.

Selain itu, untuk membangun daerah, dibutuhkan ketersediaan investasi, namun disisi penanaman modal daerah sulit didapati kemauan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Alor. Sedangkan untuk sejumlah sektor lainnya, seperti perdagangan juga belum terkelola secara baik.

e) **Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Kabupaten Alor saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik ditunjukkan dengan standar pelayanan yang belum diterapkan secara merata sehingga masih ditemukan kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih adanya praktik pungutan liar. Pencapaian SPM yang belum optimal ditunjukkan dengan Indeks Pelayanan Publik yang masuk dalam kategori Cukup. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya pembangunan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, belum terbangunnya interoperabilitas data dan layanan. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan, ditandai dengan belum optimalnya partisipasi masyarakat, terutama dalam tahap pelaksanaan kebijakan. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima.

Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat, maka pengembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting sebagai instrumen komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan. Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Alor dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Kontribusi PAD Kabupaten Alor terhadap Pendapatan Daerah sangat rendah dan lebih banyak bergantung pada Dana Transfer dari pusat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber- sumber PAD. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

f) **Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Yang Terbatas**

Terbatasnya infrastuktur wilayah menjadi sebab tidak berkembangnya daerah, disamping pembangunan ekonomi daerah yang tidak berkembang. Kondisi konfigurasi wilayah Kabupaten Alor yang berbukit dan terjal disamping memiliki pulau-pulau kecil yang banyak, memberikan kesulitan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur wilayah. Ketersediaan jalan dan jembatan dengan kualitas baik sangat rendah; hampir keseluruhan jalan dan jembatan yang tersedia lebih

banyak memiliki kualitas yang buruk, bahkan pada wilayah pedalaman dan terpencil, akses jalan dan jembatan belum tersedia. Di sektor perhubungan juga belum memberikan kontribusi besar bagi pengembangan moda transportasi yang baik; sedangkan ketersediaan perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat, juga menjadi persoalan tersendiri. Tingginya angka kemiskinan dan sejumlah permasalahan di bidang pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh ketersediaan infrastuktur yang masih sangat terbatas yang perlu untuk diselesaikan.

g) **Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, menetapkan Pulau Alor sebagai salah satu Pulau Kecil Terluar, Daerah Perbatasan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); selain itu, Kabupaten Alor juga merupakan salah satu Kabupaten Perbatasan di Provinsi NTT yang berbatasan laut langsung dengan Negara RDTL. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada bagian kedua tentang Cakupan Kawasan Perbatasan Negara, Pasal 5, ayat (5) menyatakan bahwa kawasan perbatasan di darat dan kawasan perbatasan di laut meliputi 17 Kecamatan di Kabupaten Alor.

Berdasarkan Perpres 179 tahun 2014 dimaksud, maka telah ditetapkan beberapa hal, antara lain : Kabupaten Alor ditetapkan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Pulau-pulau Kecil Terluar dengan batas yurisdiksi pada batas ZEE di selat Ombay. Selain itu, rencana system pusat permukiman perbatasan negara termasuk Pusat Pelayanan Utama ditetapkan di PKSN Kalabahi Kabupaten Alor yang memiliki fungsi sebagai: Pusat pelayanan kepabeanean, Imigrasi, Karantina, Keamanan; Hankam, Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan jasa, Industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, Pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya, Promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal, Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, Sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang, Pusat pelayanan transportasi laut dan udara. Hal lainnya yang ditegaskan meliputi : Pusat Pelayanan pintu gerbang yang sekaligus sebagai pelabuhan penyeberangan lintas antarnegara, ditetapkan di Maritaing, Kecamatan Alor Timur yang memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kepabeanean, Imigrasi, Karantina, Keamanan,



Pusat kegiatan Hankam Negara.

Berdasarkan sejumlah ketentuan dimaksud, maka oleh Pemerintah Daerah telah ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dalam RTRW yang antara lain meliputi Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan Pulau Alor, Kebijakan Pengelolaan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan Pulau Alor, dan Rencana Pembangunan Ruang Kawasan Pertahanan di Perbatasan di Pulau Alor. Diharapkan melalui pengelolaan kawasan perbatasan ini, selain untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara, juga memberikan dampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik pada semua sektor.

h) **Dampak Perubahan Iklim Global Terhadap Ketersediaan Pangan, Energi Dan Air**

Bumi yang semakin panas saat ini telah masuk pada kategori “Kode Merah Bagi Manusia”. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga Tahun 2022, kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur global tersebut disebabkan oleh peningkatan GRK yang signifikan di atmosfer dan berbagai aktivitas manusia.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan bagi daerah yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Isu yang juga menjadi perhatian serius bagi Kabupaten Alor yang merupakan bagian dari Provinsi NTT adalah masalah ketahanan pangan, dimana Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di NTT sebesar 13,74 persen, lebih tinggi dari Nasional dan wilayah Nusa Tenggara (Bali dan NTB). Tantangan utama ketahanan pangan di Kabupaten Alor adalah Pemerintah Daerah harus memenuhi permintaan pangan bagi penduduk Kabupaten Alor yang terus mengalami peningkatan.

Perubahan iklim berpengaruh terhadap ketahanan pangan, energi dan juga ketersediaan air bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman pangan. Perubahan iklim ditandai dengan suhu yang semakin tinggi dan curah hujan yang

semakin berkurang dan tidak menentu. Perubahan iklim dipicu oleh aktivitas manusia (*antrophogenik*) yang menghasilkan “Emisi Gas Rumah Kaca”. di atmosfer menghasilkan pemanasan global yang mengakibatkan terjadinya El Nino.

El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang mengakibatkan terjadinya penurunan curah hujan dan berpotensi mengakibatkan penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya kasus kelaparan pangan ekstrim. Selain itu resiko bencana dapat mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan menimbulkan terjadinya kelaparan karena tidak mampu memenuhi konsumsi masyarakat yang jumlahnya terus bertambah.

i) **Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi Lingkungan**

Kabupaten Alor merupakan salah satu dari 136 kabupaten/kota di Indonesia dengan risiko bencana (*sering dilanda bencana*) tertinggi. Berdasarkan publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022-2023 dari BNPB, Kabupaten Alor memiliki indeks risiko bencana Sedang dengan skor 138,81. Indeks risiko ini sedikit mengalami penurunan dari Tahun 2021 yakni 137,78. Ancaman bencana tertinggi adalah gempa bumi kemudian disusul oleh bencana alam lainnya yakni tsunami, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan, letusan gunung api, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrim serta Kecelakaan Laut. Tingginya ancaman Gempa bumi disebabkan Letak Kabupaten Alor termasuk dalam jalur Gempa Tektonik di Indonesia sehingga memiliki resiko terjadinya gempa tektonik secara periodik. Wilayah Kabupaten Alor merupakan wilayah rawan gempa bumi yang bersumber dari “Sistem Patahan Naik Busur Belakang Laut Flores membentang di sebelah Utara Pulau Alor ke arah Barat Timur”. Dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Alor merupakan kawasan rawan bencana alam gempa bumi. Kabupaten Alor merupakan bagian dari jalur gempa bumi yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Sebagai wilayah yang terletak di jalur gempa bumi, kondisi fisiografi Kabupaten Alor sangat dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Kondisi ini

menjadikan Kabupaten Alor sebagai salah satu kawasan dengan tingkat aktivitas seismik yang tinggi di Indonesia.

Kejadian bencana lain yang sering muncul adalah tanah longsor. Morfologi Kabupaten Alor berupa dataran pantai, dataran aluvial, dataran rambahan bantar gunung api. Morfologi ini tersusun oleh batuan lunak yang bersifat lepas, urai dan belum padat sehingga rentan terhadap guncangan gempa bumi yang dapat memicu terjadinya longsor. Disamping itu, pemicu longsor juga karena pola penggunaan lahan oleh masyarakat yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konsolidasi tanah dan tata ruang. Hampir seluruh wilayah rawan terjadinya longsor, namun beberapa desa dalam kecamatan yang sangat rawan yakni Mataru, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pulau Pura, Pantar Timur dan Pureman.

Bencana banjir juga memiliki kerawanan tinggi di Kabupaten Alor. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, kondisi ini dapat terjadi akibat penggundulan hutan tanpa reboisasi kembali, tebas bakar untuk pembukaan lahan perkebunan, konsep Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak terpadu, tidak ada masterplan konservasi sumber daya alam ditingkat desa, pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kawasan rawan bencana banjir yang kedepan perlu mendapat penanganan serius adalah Kota Kalabahi dan sekitarnya. Wilayah Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan, maka akses masyarakat antar wilayah sebagian menggunakan perahu motor sebagai alat transportasi. Secara umum perahu kadang tidak dilengkapi dengan alat-alat keselamatan, alat navigasi, dan kurang memperhatikan kapasitas daya angkut. Kecelakaan laut hampir terjadi sepanjang tahun yang menyebabkan kerusakan perahu motor dan menelan korban jiwa. Bencana ini biasanya terjadi karena cuaca dan gelombang laut yang tinggi.

Hubungan keterkaitan Isu-Isu Strategis Global, Nasional, Provinsi NTT, Isu Strategis Kabupaten Alor dan kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2 135 Gambaran Isu Strategis Global, Nasional, Regional dan Kabupaten Alor

No	Agenda Reformasi	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
					Global	Nasional	Regional	
1	TRANSFORMASI SOSIAL	Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya Pelayanan pada sektor Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya	Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan;		Terbatasnya kualitas SDM	Terbatasnya kualitas dan daya saing SDM serta kemerosotan nilai-nilai budaya	Terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM
				Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;	krisis kesehatan global			
				Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;		Tingginya angka kemiskinan	Kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial
				Tingginya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak				
2	TRANSFORMASI EKONOMI	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata	Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah;	ketimpangan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau	Kualitas dan daya saing sektor ekonomi unggulan daerah yang terbatas

No	Agenda Reformasi	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
					Global	Nasional	Regional	
			Masih terbatasnya Daya Saing Daerah		revolusi teknologi dan etika		Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta rendahnya pemanfaatan teknologi (hilirisasi)	
							Belum optimalnya pengembangan pariwisata	
				Belum optimalnya kecukupan dan kualitas pangan;	keamanan pangan	Ketahanan pangan		
			Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Belum optimalnya akses infrastruktur kewilayahan;		Adanya kesenjangan antar wilayah	Kesenjangan dan ketertinggalan daerah (masih banyaknya daerah tertinggal)	Ketersediaan infrastruktur wilayah yang terbatas
						Tingkat pengangguran Terbuka		
3	TRANSFORMASI TATA KELOLA	Tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya Pelayanan Publik				Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
			Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Belum optimalnya akses infrastruktur kewilayahan;		Adanya kesenjangan antar wilayah	Kesenjangan dan ketertinggalan daerah (masih banyaknya daerah tertinggal)	Pengembangan kawasan perbatasan negara

No	Agenda Reformasi	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
					Global	Nasional	Regional	
4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KETANGGUHAN DIPLOMASI			Tata kelola hukum yang belum optimal.	geopolitik dan keamanan internasional		Belum optimalnya supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum	
				Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;	Perubahan iklim dan pemanasan global	Pengembangan potensi sumber daya alam	Perubahan iklim, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana	Dampak perubahan iklim global terhadap ketersediaan pangan, energi dan air
5	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Energi Baru dan Terbarukan		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap air minum dan akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan;				
				Belum optimalnya pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim;	krisis lingkungan	Konservasi lingkungan dan pengendalian Bencana		Penanggulangan bencana dan adaptasi lingkungan

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025



2.6.2.5. Keterkaitan Isu Strategis daerah dengan Permasalahan Daerah.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah dan dengan mempertimbangkan isu-isu Strategis baik Global, Nasional, Provinsi NTT, isu Strategis daerah dan isu strategis pada KLHS, maka secara ringkas gambaran keterkaitan permasalahan pokok dan isu strategis Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 136 Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Alor Tahun 2025-2029

Masalah Pokok	Isu Strategis Daerah
1. Belum Optimalnya Pelayanan di sektor SDM dan Sosial Budaya a. Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pendidikan. b. Pelayanan di sektor Kesehatan yang belum Optimal. c. Belum optimalnya kondisi ketentraman dan Ketertiban Umum. d. Pelaksanaan Penanganan sosial yang belum Optimal. e. Penanganan terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang belum Optimal. f. Belum Optimalnya Pengelolaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. g. Upaya Pengendalian Penduduk dan KB yang belum Optimal. h. Belum Optimalnya pengelolaan urusan Kepemudaan dan Olahraga. i. Belum Optimalnya pengelolaan data Statistik. j. Belum Optimalnya pengelolaan Kebudayaan Daerah. k. Belum Optimalnya pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan. 1. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	1. Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial. 2. Terbatasnya Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2. Belum Optimalnya Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. a. Pengelolaan sektor Pangan yang belum Optimal. b. Pengelolaan Koperasi dan UKM yang belum Optimal. c. Belum Optimalnya pengelolaan Penanaman Modal. d. Potensi Kelautan dan Perikanan yang belum dikelola secara optimal. e. Belum Optimalnya Pengelolaan sektor Pariwisata. f. Belum Optimalnnya Pengelolaan sektor Pertanian. g. Pengelolaan sektor Perdagangan yang belum Optimal. h. Pengelolaan Sektor Industri yang Belum Optimal. i. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum Optimal.	3. Terbatasnya Kualitas dan Daya Saing Sektor Ekonomi Unggulan Daerah. 4. Dampak Perubahan Iklim Global terhadap Ketersediaan Pangan, Energi dan Air. 5. Penanganan Bencana dan Adaptasi Lingkungan.



Masalah Pokok	Isu Strategis Daerah
j. Pengelolaan Sumber Daya Energi yang belum optimal.	
k. Penanganan Kebencanaan yang belum Optimal.	
3. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	6. Ketersediaan Infrastruktur Wilayah yang Terbatas.
a. Belum Optimalnya Pembangunan di Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.	
b. Belum Optimalnya Pembangunan Perumahan dan Penataan Kawasan permukiman.	
c. Belum Optimalnya Pembangunan Perhubungan.	
d. Pengelolaan Bidang Pertanahan yang Belum Optimal.	
4. Belum Optimalnya Pelayanan Publik	7. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
a. Belum Optimalnya Penerapan Digitalisasi Pemerintahan.	8. Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
b. Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.	
c. Masih Lemahnya Implementasi Reformasi Birokrasi.	
5. Masih rendahnya Daya Saing Daerah.	
a. Belum optimalnya sektor pertanian terhadap nilai tambah Pembangunan ekonomi daerah.	
b. Rendahnya kontribusi sektor Industri Pengolahan (manufactur).	
c. Rendahnya kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum.	
d. Rendahnya PDRB Perkapita.	
e. Tingginya ketergantungan Pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat.	
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1. Visi

3.1.1.1. Latar Belakang Perumusan Visi Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045, yang disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Alor tahun 2025-2029.

Visi pembangunan daerah merupakan rumusan strategis jangka menengah yang menggambarkan arah dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah selama periode lima tahun. Rumusan Visi menjadi dasar bagi seluruh penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, serta menjadi pedoman bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kabupaten Alor sebagai daerah kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki karakteristik wilayah yang unik dan tantangan yang khas: keterisolasian wilayah, ketimpangan akses layanan dasar, ekonomi berbasis sumber daya alam yang belum optimal, serta kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Namun, di sisi lain, Alor juga menyimpan potensi luar biasa di sektor pariwisata bahari, budaya, pertanian, dan energi terbarukan.

Dalam konteks pembangunan nasional dan dinamika lokal yang cepat berubah, Kabupaten Alor memerlukan arah pembangunan yang komprehensif, inklusif, dan berorientasi jangka panjang, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan sosial, stabilitas politik, dan keberlanjutan perencanaan yang matang dan terukur.

3.1.1.2. Tinjauan Visi RPJPD, RPJMN dan RPJPD Provinsi NTT

a) RPJPD Kabupaten Alor 2025-2045

Untuk periodisasi Perencanaan 20 Tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Alor Tahun 2025-2045, Visi Kabupaten Alor adalah :

“Alor Sebagai Kabupaten Di Kawasan Pulau- Pulau Kecil Yang Mandiri, Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”.

Rumusan Visi RPJPD tersebut menegaskan bahwa sebagai kabupaten yang memiliki pulau-pulau kecil, Kabupaten Alor pada Tahun 2045



diharapkan akan menjadi mandiri, sejahtera, maju dan berkelanjutan yang dapat menjamin keberadaan, ketersediaan, konektivitas, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan berbagai potensi yang dimilikinya.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) termasuk Kabupaten Alor merupakan suatu proses yang kedepan diharapkan akan membawa perubahan pada ekosistem dan lingkungannya, termasuk pengembangan berbagai sektor potensial yang dimiliki untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Untuk mengukur capaian Visi RPJPD Kabupaten Alor Tahun 2025–2045, telah dirumuskan sejumlah indikator utama yang mencerminkan arah transformasi jangka panjang daerah. Indikator-indikator tersebut disusun secara terukur, relevan, dan konsisten dengan arah pembangunan nasional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), sehingga mampu menjadi alat kendali dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Indikator visi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Indikator Sasaran Visi Daerah

No	Sasaran Utama	Indikator	Target	
			Base Line 2025	Target 2045
1	Meningkatnya pendapatan Per Kapita	PDRB per Kapita	Rp. 15,55 Juta	Rp. 34,61 Juta
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	1,52%	2,76 - 2,80%
2	Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan daerah	Tingkat Kemiskinan	19,97%	4,32-4,98%
		Rasio Gini	0,324 Poin	0,248 Poin
3	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	-	3,42 Poin
4	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	66,82 Poin	73,71 Poin
5	Menurunnya Emisi GRK menuju <i>Net Zero Emission</i>	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,40 Poin	73,90 Poin

Sumber: RPJPD Kab. Alor 2025-2045

Visi RPJPD Kabupaten Alor tersebut didukung oleh 8 Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing tinggi : Meliputi Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan anak dan Perempuan, dan perlindungan sosial.
2. Mewujudkan Perekonomian daerah yang kokoh melalui pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan berbasis IPTEK : Meliputi pemanfaatan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien: Mencakup Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.

4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah: Meliputi : Hukum yang Berkeadilan, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Stabilitas Ekonomi Makro.
5. Mewujudkan dan Melestarikan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, mencakup : Kehidupan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif, serta Lingkungan Hidup Berkualitas.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan: Misi ini meliputi : kuitas perencanaan, penataan dan pengendalian pembangunan infrastruktur secara adil, merata berorientasi pada keseimbangan sosial dan kelestarian ekologi yang berkelanjutan.
7. Mewujudkan Keterpaduan penataan ruang serta pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan. Pembangunan sarana prasarana diprioritaskan pada sarana prasarana untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi masyarakat desa Misi ini difokuskan pada Penataan ruang dan pertanahan yang berkeadilan.
8. Mewujudkan Akselerasi dan Kestinambungan Pembangunan. Misi ini dicapai melalui adanya kaidah pelaksanaan rencana pembangunan meliputi konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, komunikasi publik dalam rangka mendukung sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif.

b) RPJMN 2025-2029

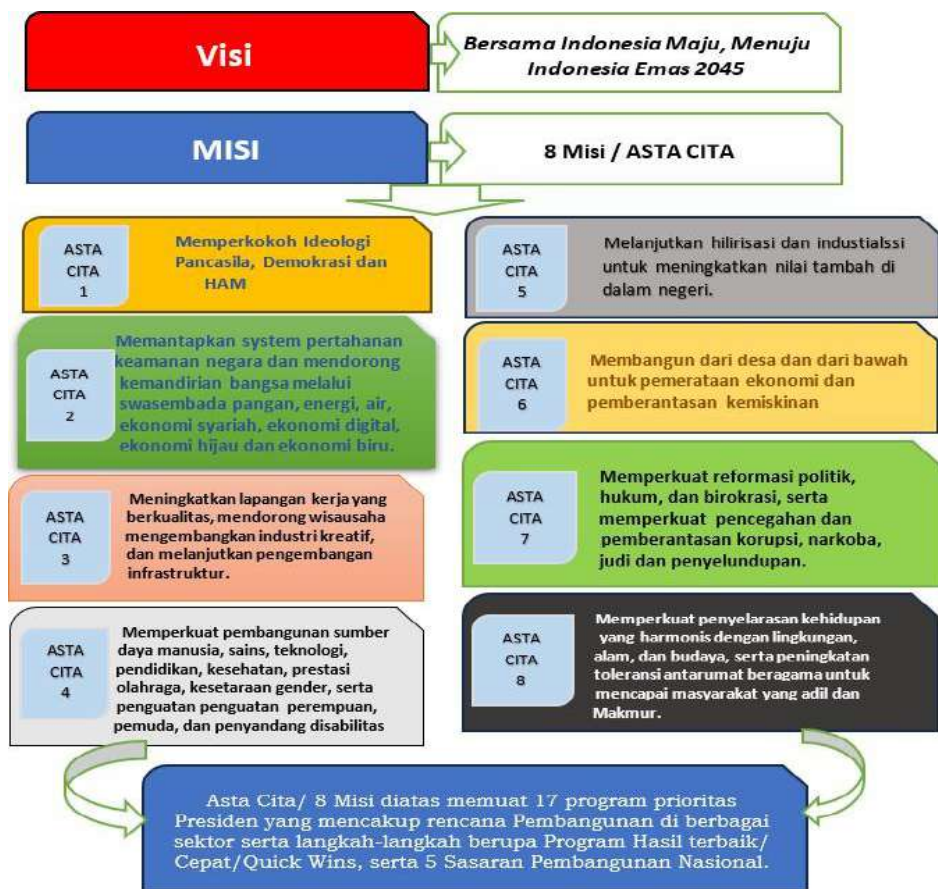
Untuk keberlangsungan Pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden RI nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 pemerintah telah merumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan tahap perkuatan fondasi transformasi tahun 2025-2029 menekankan pada 7 aspek yakni : (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) supremasi

hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; (5) Ketahanan sosial budaya dan ekololgi; (6) Pembangunan wilayah dan sarana prasarana; (7) Kestinambungan Pembangunan. Dalam rumusan RPJMN 2025-2029, Visi Nasional yang merupakan visi Presiden RI adalah :

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3. 1 Visi, Misi RPJMN 2025-2029

c) LOKASI PRIORITAS RPJMN 2025-2029

Sebagai implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, RPJMN 2025-2029, telah menetapkan arah pembangunan wilayah serta Lokasi prioritas, yang difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi, tantangan besar, atau memiliki peran strategis dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045 untuk intervensi pelaksanaan kebijakan 2025-2029. Penetapan lokasi prioritas dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan dan mencapai sasaran

pembangunan nasional secara lebih efektif dan efisien, sekaligus berkontribusi untuk percepatan Pembangunan wilayah.

Berdasarkan penetapan Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang meliputi 7 sektor pengembangan, maka Kabupaten Alor ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas untuk :

1. Sentra Penguatan Pangan untuk Pangan Lokal.
2. Kawasan perbatasan dan Transmigrasi, sebagai PKSN Kalabahi, Kecamatan Pantar Timur.
3. Sentra Pemerataan ekonomi rintisan, Kawasan terintegrasi berbasis Perikanan, khusus untuk ekosistem produksi industry dan riset inovasi komoditas Rumput Laut.
4. Infrastruktur Pelayanan Dasar, meliputi infrastruktur konektivitas, penanganan stunting dan pengendalian penyakit malaria.

Penetapan Lokasi Prioritas oleh Pemerintah pusat, perlu didukung dengan strategi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah sehingga mempermudah dalam implementasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.

d) RPJMD PROVINSI NTT 2025-2029

Rancangan awal RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 memberikan arah Pembangunan NTT 5 tahun kedepan, dengan mempedomani sejumlah dokumen Perencanaan, baik itu RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT 2025-2040, dan juga RPJMN 2025-2029. RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dibangun dengan Spririt “Ayo Bangun NTT” dengan visi :

“NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANUTAN”.

Rumusan visi NTT ini didukung dengan 5 Misi, yakni :

1. Memastikan infrastuktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing.
2. Memperluas pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau, dan mudah diakses.
3. Menghadirkan Pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran.
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat.
5. Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak, serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif.

Untuk percepatan pencapaian visi dan misi sebagaimana rumusan

diasas, maka telah ditetapkan pula 7 (tujuh) Pilar Pembangunan dan 10 (sepuluh) Program Prioritas yang disebut Dasa Cita. 7 Pilar dimaksud meliputi :

1. Pilar Ekonomi berkelanjutan;
2. Pilar Pemberdayaan Prioritas
3. Pilar Pemerataan Infrastruktur berkelanjutan;
4. Pilar Kesehatan;
5. Pilar Pendidikan;
6. Pilar Reformasi Birokrasi dan HAM, serta
7. Pilar Kolaborasi.

Sedangkan 10 program Prioritas NTT 2025-2029 (DASA CITA) meliputi:

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman.
2. Milenial dan Perempuan motor kreatifitas lokal.
3. Wisata NTT penggerak ekonomi lokal.
4. Kesejahteraan Bersama; jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan untuk Masyarakat;
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat sehat dan bebas Stunting;
6. Sekolah vokasi unggulan berbasis potensi unggulan;
7. Jalan, air, Listrik, rumah layak huni: Mewujudkan NTT yang Sejahtera;
8. Pendapatan daerah naik, pelayanan publik dan kesejahteraan ASN terjamin;
9. Membangun NTT digital : Akses merata, komunikasi lancar.
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

3.1.1.3. Visi Kabupaten Alor 2025-2029

Dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Alor Tahun 2025-2045, serta mengacu pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT; dirumuskan visi Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 sebagai komitmen moral dan politik Pemerintah Daerah untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, merata, dan bermartabat dalam bingkai kemajemukan dan kedaulatan daerah, sebagai berikut :

**“KABUPATEN ALOR YANG AMAN, DAMAI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, MAJU
DAN BERKELANJUTAN”**

Rumusan visi ini sesungguhnya memiliki makna filosofis, bahwa Pembangunan harus tetap berpusat pada manusia (*human-centered development*), bukan hanya pada angka pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tersirat pengakuan terhadap keberagaman masyarakat Alor, baik dari aspek budaya, etnis, maupun agama, yang membutuhkan pendekatan sosial yang



damai dan inklusif. Keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan, agar pembangunan saat ini tidak mengorbankan masa depan generasi berikutnya. Penguatan demokrasi dan supremasi hukum, sebagai fondasi dari pemerintahan yang sah, akuntabel, dan berkeadilan, serta konsistensi terhadap Arah kebijakan nasional dan provinsi, yang menekankan transformasi ekonomi hijau, pembangunan wilayah terpencil, serta penguatan SDM unggul.

Rumusan visi diatas mengandung 5 (lima) Elemen Visi yang menggambarkan harapan Masyarakat Kabupaten Alor kedepan, yakni :

1. Aman

Keamanan adalah syarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan. Aman dalam konteks ini mencakup keamanan fisik, sosial, dan kultural yang memungkinkan masyarakat hidup tanpa rasa takut akan konflik, kekerasan, kriminalitas, ataupun bencana.

Dalam konteks daerah kepulauan seperti Alor, keamanan juga menyangkut stabilitas wilayah perbatasan, pengawasan laut, serta mitigasi terhadap ancaman bencana alam.

2. Damai Sejahtera

Dimanifestasikan pada kondisi masyarakat yang hidup dalam harmoni, menjunjung tinggi toleransi, dan memiliki kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Kedamaian merupakan hasil dari hubungan sosial yang inklusif dan berkeadilan, sementara kesejahteraan mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.

3. Demokratis

Menekankan pentingnya tata kelola daerah yang partisipatif, akuntabel, menghormati hak asasi manusia, dan menjamin kebebasan warga dalam berpendapat, memilih, dan mengawasi Pembangunan.

Demokratis juga menunjuk pada landasan filosofif berbangsa dan bernegara yang berdasarkan prinsip pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat; maksudnya menempatkan partisipasi aktif rakyat sebagai elemen penting. Terutama dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ada komitmen memelihara prinsip ini untuk menjaga hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan.

4. Maju

Kemajuan daerah mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, produktivitas ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Maju juga berarti bahwa Kabupaten Alor



mampu bertransformasi menjadi wilayah yang adaptif terhadap perkembangan zaman, berdaya saing tinggi, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan.

5. Berkelanjutan.

Berkelanjutan atau *sustainability* menunjuk pada upaya memaksimalkan sumber daya melalui pembangunan yang efektif dengan berwawasan lingkungan. Pembangunan daerah dilaksanakan dengan serasi dan seimbang antara faktor seperti pelestarian lingkungan, keseimbangan, serta penguatan daya tahan sosial dan budaya Masyarakat, sehingga hasil akhir pembangunan tidak hanya dirasakan generasi saat ini tapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang terutama generasi emas Kabupaten Alor tahun 2045.

Visi menunjuk pada arah strategis kedepan yang tidak hanya menunjuk pada level Kabupaten, tetapi mengarah pada upaya bersama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Nasional. Rumusan Visi Kabupaten Alor tahun 2025-2029 sesungguhnya telah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi NTT dan pencapaian Visi Indonesia, sebagai fondasi awal untuk pencapaian Indonesia emas 2045.

Indikator Sasaran visi Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 3. Indikator Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Alor

No	Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB per Kapita	Rp.Juta	10,16	10,48	10,66	10,82	11,08	11,27
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,56	1,58	1,60	1,63	1,68	1,71
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	19,87	19,57	18,96	18,31	17,57	16,82
4	Rasio Gini	Poin	0,320	0,315	0,310	0,306	0,318	0,303
5	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	-	2,53	2,59	2,68	2,8	2,95
6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,70	68,79	69,37	69,98	70,61	71,27
7	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	70,71	72,91	73,03	73,16	73,28	73,42

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH 2025-2029

Misi merupakan penjabaran teknokratis dan operasional dari Visi Kabupaten Alor tahun 2025-2029. Visi memberikan arah tujuan jangka menengah yang mencerminkan kondisi ideal, sementara Misi menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program dan kebijakan sektoral yang sinergis dan terukur. Adapun Misi Daerah Kabupaten Alor tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berkualitas.

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus terus menerus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia meliputi pembangunan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial lainnya, yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan anak didik yang berintelektual, mampu memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjelma dalam diri lulusan yang memiliki iman dan takwa dan berbudaya dan berkarakter menuju kemandirian. Artinya bahwa kemampuan intelektual yang diperoleh dari sistem pendidikan yang terselenggara digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak saja untuk masa sekarang, juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Pendidikan yang berkualitas juga dimaksudkan untuk menciptakan lulusan yang mampu bersaing di era global.

Pendidikan yang berkualitas harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai dan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik dari segi geografis terlebih dari segi ekonomis. Pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun ke depan menjamin bahwa pelayanan pendidikan akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. ke depan tidak ada alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibilitas maupun alasan ekonomis. Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas mutu lulusan.

Sejumlah indikator di sektor Pendidikan yang harus dicapai, antara lain meningkatnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun), Harapan Lama Sekolah, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat yang

secara umum ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, pencapaian target di sektor Kesehatan, meliputi : pencapaian usia harapan hidup; Kesehatan ibu dan anak: Menurunnya Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup), Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita; Penanganan Tuberkulosis berlangsung dengan baik, di mana cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*), angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*); dan penanganan HIV/AIDS. Sedangkan urusan sosial lainnya meliputi Perlindungan anak dan Perempuan, meliputi : indeks pemberdayaan dan pembangunan gender serta indeks pembangunan keluarga. Perlindungan sosial, mencakup : Angka kemiskinan yang semakin berkurang, penanganan terhadap PMKS, dan Cakupan Kepesertaan JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal.

3.2.2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Alam.

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses pengelolaan sumber daya yang tersedia di daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi Pemerintah daerah adalah proteksi dan fasilitasi. Peran utama yang dimaksud adalah dukungan kebijakan yang terkait dengan penguatan kelembagaan, regulasi dan fasilitasi dalam mendorong iklim investasi, peningkatan produktivitas dan peningkatan keterampilan Masyarakat untuk pembangunan ekonomi Kabupaten Alor 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan ekonomi ditujukan kepada pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Daya saing dimaksudkan sebagai kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta pengembangan ekonomi kreatif.

Kunci keberhasilan peningkatan daya saing adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangan industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif. Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang produktif, perekonomian

daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia, infrastruktur sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan keuangan/bantuan permodalan.

3.2.3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah Berwawasan Lingkungan.

Ketersediaan infrastruktur di daerah sebagai pendukung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial sangat dibutuhkan keberadaannya. Pembangunan infrastruktur dewasa ini menghadapi tantangan yang sangat berat terutama terkait rendahnya kualitas yang selalu menjadi sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang baik harus memperhatikan dan memperhitungkan dinamika perkembangan dan persebaran permukiman penduduk dan lingkungannya, luas wilayah, kondisi geografis wilayah dan diperlukan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar satu wilayah dengan wilayah di daerah lainnya serta harus memperhatikan atau mengakomodir keberlanjutan program.

Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang sangat besar, dan karena itu, harus menjadi tanggung jawab bersama antar tingkatan pemerintahan dan juga masyarakat. Karena itu diperlukan komunikasi, membangun jejaring kerjasama baik ke tingkat Nasional, ke Provinsi dan ke masyarakat. Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kabupaten Alor akan dapat terwujud secara bertahap.

Secara umum, fokus Pembangunan infrastruktur di arahkan pada ketersediaan infrastruktur dasar seperti : infrastruktur jalan, jembatan, Listrik, perumahan, sarana perhubungan antar wilayah kepulauan, air minum. Disamping itu, ketersediaan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa, teknologi informasi dan komunikasi; serta Lingkungan Hidup berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim.

3.2.4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar hidupnya sebagai warga negara. Untuk tujuan tersebut diperlukan suatu sistem pemerintahan yang baik yang dapat menumbuhkan nilai kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah. Penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan harus mampu menciptakan keberpihakan kepada masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan dasar, izin berusaha dan izin lainnya.

Secara umum, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik, yakni : Transparansi, Akuntabilitas, Penegakan hukum dan Partisipasi publik. Transparansi menunjuk pada kemudahan publik/masyarakat dalam mengakses berbagai program pemerintah, mulai dari tahapan proses, pelaksanaan, kelembagaan dan informasi pembangunan. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan. Penegakan Hukum menunjuk pada jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada Masyarakat; sedangkan partisipasi publik adalah ruang yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah.

Perwujudan efektifitas tata Kelola pemerintahan ini diarahkan pada ketersediaan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, yang meliputi pencapaian Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Pelayanan Publik.

3.2.5. Memperkuat stabilitas keamanan gatra wilayah, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan tatanan kehidupan kemasyarakatan.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, adil, dan harmonis, yang menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, antara lain : Menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial, kejahatan, dan ancaman keamanan lainnya; Memperkuat koordinasi antar lembaga keamanan (Polri, TNI, Satpol PP, dan masyarakat) untuk menjaga kedaulatan wilayah Kabupaten Alor sebagai wilayah perbatasan; Memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan menjangkau seluruh lapisan Masyarakat, serta Mendorong kerukunan antarumat beragama, toleransi, dan solidaritas sosial.

Terhadap sejumlah penjelasan diatas, maka terbentuk keselarasan Visi, Misi Daerah dengan Visi, Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT, sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3. 1 Keselarasan Visi, Misi Daerah dengan Visi, Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

No	RPJMN	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMD KAB.ALOR
	VISI :		
	BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045	NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANUTAN	KABUPATEN ALOR YANG AMAN, DAMAI EJAHTERA, DEMOKRATIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN.
	SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1	Meningkatkan Pendapatan Perkapita Menuju Setara Negara Maju.	Ekonomi Berkelanjutan (1)	Percepatan Transformasi ekonomi (2)
2	Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat.	Reformasi Birokrasi dan Hak Asasi Manusia (6)	Percepatan Reformasi Birokrasi, Stabilitas Keamanan dan Hak Asasi Manusia (4).
3	Kemiskinan menurun dan Ketimpangan berkurang.	Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan (3)	Percepatan Penyediaan Infrastruktur yang berkeadilan (3)
		Pemberdayaan Komunitas (2)	
		Kolaborasi (7)	
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat.	Kesehatan (4)	Percepatan Peningkatan Kualitas SDM (1)
		Pendidikan (5)	
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i> .		Percepatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Ramah dan perwujudan Harmoni Sosial (5).
	MISI :		
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM (1).	Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang bijak, serta Pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (5).	Memperkuat stabilitas keamanan gatra wilayah, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan tatanan kehidupan kemasyarakatan (5).
2	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan (7).		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel (4)
3	Memantapkan sistem pertahanan Keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (2).		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Alam (2).
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri (5).		
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan (6)		
6	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong wisausaha mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur (3).	Memastikan Infrastruktur berkelanjutan, demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (1).	Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah Berwawasan Lingkungan (3).

No	RPJMN	RPJMD PROVINSI NTT	RPJMD KAB.ALOR
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan penguatan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas (4).	Memperkuat pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (2).	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Berkualitas (1).
		Menghadirkan Pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan Tepat Sasaran (3).	
8	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur (8).	Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (4).	Memperkuat stabilitas keamanan gatra wilayah, demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memperkuat tatanan kehidupan kemasyarakatan (5).

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebuah misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan penetapan tujuan. Selanjutnya sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik. Mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

3.3.1. Tujuan

Tujuan daerah menjelaskan rangkaian kinerja yang menggambarkan Upaya pencapaian visi dan misi selama 5 tahun kedepan. Tujuan yang dirumuskan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah Kabupaten Alor tahun 2025-2029 mencakup sejumlah prioritas Pembangunan, sekaligus untuk mendukung pencapaian Asta Cita/ Misi Pembangunan Indonesia 2025-2029. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
3. Mewujudkan pembangunan kawasan berkelanjutan.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.
5. Mewujudkan stabilitas wilayah yang kondusif untuk pembangunan daerah.

3.3.2. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah adalah hasil yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Sasaran juga menunjukkan gambaran spesifik dan terukur dari apa yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun kedepan, yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan daerah dan mencakup berbagai aspek Pembangunan di daerah.

Rumusan sejumlah sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Alor tahun 2025-2029 telah selaras dengan visi dan misi kepala daerah, dan telah memperhatikan isu-isu strategis daerah, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Sasaran Pembangunan Kabupaten Alor tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan untuk semua.
2. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan merata.
3. Meningkatnya kelestarian budaya daerah.
4. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Meningkatnya Prestasi Generasi Muda.
6. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
8. Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi dalam peningkatan ekonomi Masyarakat.
9. Meningkatnya investasi dan peluang usaha.
10. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan.
11. Meningkatnya kemandirian desa.
12. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah.
13. Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup.
14. Meningkatnya pengelolaan risiko bencana dengan dukungan Masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim.
15. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan inovasi daerah.
16. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kualitas pelayanan publik.
17. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Memperkuat Transformasi Digital.
19. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan Masyarakat.
20. Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perbatasan.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Alor

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun			2027	2028	2029	2030	Bidang Urusan
KABUPATEN ALOR YANG AMAN, DAMAI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN																
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	BPS	67,7	68,21	68,79	69,37	69,98	70,61	71,27	Lintas Urusan			
		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	BPS	70,88	71,12	71,37	71,62	71,88	72,14	72,4	Kesehatan			
			Prevalensi Stunting	Persen	Survey Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan	39,3	34,8	33,6	32,3	31	29,8	28,25	Kesehatan			
		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan merata	Harapan Lama sekolah	Tahun	BPS	12,48	12,53	12,59	12,65	12,72	12,79	12,86	Pendidikan			
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	BPS	8,61	8,64	8,68	8,72	8,77	8,81	8,85	Pendidikan			
			Indeks Literasi	Poin	Kementerian Pendidikan	62,69	64,79	67,29	70,39	74,09	77,99	82,09	Pendidikan			
			Indeks Numerasi	Poin	Kementerian Pendidikan	63,81	65,86	67,3	67,75	68,29	69,74	71,18	Pendidikan			
			Persentase satuan PAUD yang melaksanakan PAUD-HI	Persen	Jumlah PAUD yang HI / Total Jumlah PAUD X 100%	73,68	76,18	78,68	82,18	86,68	89,18	100	Pendidikan			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	BPS	29,48	32,98	37,48	39,98	43,48	46,98	50,48	Perpustakaan			

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun				Bidang Urusan
		Meningkatnya kelestarian budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persen	Jumlah desa budaya dan rintisan desa budaya / Jumlah desa x 100%) + (Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang ber SK / Jumlah cagar budaya dan warisan yang terdaftar x 100%)) /2	52,5	53,7	54,9	56,1	57,3	58,5	59,7	Kebudayaan
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	BPS	92,75	92,77	92,8	92,82	92,85	92,89	92,92	P3A
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	48,03	48,48	48,73	49,18	49,63	50,08	50,53	P3A
		Meningkatnya Prestasi Generasi Muda	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Persen	Jumlah Pemuda dan Atlit Berprestasi di Tingkat Regional dan Nasional / Total Jumlah Pemuda dan Atlit yang dibina X 100%	51,5	52	52,75	53,95	54,45	55,35	56,55	Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	Jumlah Peserta Jamsostek / Jumlah Tenaga Kerja yang Terdata X 100%	22,85	25,35	27,85	30,35	32,85	35,35	37,85	Tenaga Kerja
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis Sumber daya alam	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	BPS	4,24	4,47	4,74	5,07	5,45	5,83	6,16	Lintas Urusan
			Indeks Gini	Poin	BPS	0,32	0,317	0,315	0,31	0,306	0,318	0,303	Lintas Urusan

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun				Bidang Urusan
			Persentase Penduduk Miskin	Persen	BPS	19,87	19,57	18,96	18,31	17,57	16,82	15,98	Lintas Urusan
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	BPS	62,69	64,79	67,29	70,39	74,09	77,99	82,09	Lintas Urusan
			Nilai PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Rp. Miliar	BPS	1.278,99	1.284,82	1.290,65	1.296,98	1.303,81	1.309,94	1.315,77	Pertanian, Perikanan
			Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp. Miliar	BPS	529,66	568,34	607,01	645,69	684,36	723,04	761,71	Perdagangan
			Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp. Miliar	BPS	19,64	21,49	23,74	26,59	29,84	33,69	37,94	Pariwisata
		Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat	Persentase UMKM dan Koperasi Berkinerja Baik	Persen	Jumlah UKM dan Koperasi berkinerja Baik / Jumlah UMKM dan Koperasi X 100%	52,08	53,19	55,3	57,41	59,52	61,63	63,74	Koperasi, UKM
		Meningkatnya investasi dan peluang Kerja	Realisasi Nilai investasi	Rp. Miliar	Nilai Investasi PMDN dan PMA Tahun ke-n	514,821	534,744	554,667	574,59	594,513	614,436	634,359	Penanaman Modal
			Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	BPS	2,27	2,23	2,22	2,21	2,19	2,17	2,16	Naker
		Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	(Indeks Ketersediaan + Indeks Akses + Indeks Pemanfaatan) / 3	63,81	65,86	67,3	67,75	68,29	69,74	71,18	Pangan
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Persen	Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa X 100%	1,27	2,77	4,52	6,27	7,99	9,49	10,99	DPMD

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun					Bidang Urusan
						2027	2028	2029	2030					
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah berwawasan lingkungan	Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Poin	(% Jalan Mantap + % Akses Air minum Layak + % Akses Sanitasi Layak + Rasio Elektrifikasi + % Rumah Layak Huni + % Desa akses internet) / 6	63,5	64	64,35	64,7	65,1	65,55	65,85	Lintas Urusan	
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik dan Sedang / Total Panjang Jalan Kabupaten X 100%	44,16	44,21	44,86	45,71	46,46	47,32	48,82	PUPR	
			Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak	Persen	Jumlah RT Akses Air Minum Layak X Total RT X 100	87,28	87,63	87,98	88,48	89,13	89,63	90,13	PUPR; Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Persentase rumah layak huni	Persen	Jumlah rumah layak huni / Total jumlah rumah X 100	58,78	59,53	60,38	61,43	62,78	64,13	65,48	Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	(Indeks Kualitas Air × 0,30) + (Indeks Kualitas Udara × 0,30) + (Indeks Kualitas Tutupan Lahan × 0,40)	70,81	72,78	72,91	73,03	73,16	73,28	73,42	Lingkungan Hidup, Energi dan sumber daya alam,	
		Meningkatnya pengelolaan risiko bencana dengan dukungan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	Poin	BNPB	128,21	123,71	120,21	113,71	109,21	103,71	99,21	Trantibumlinmas	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun		2027	2028	2029	2030	Bidang Urusan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Kementerian PAN Reformasi Birokrasi	60,66	61,16	61,81	62,56	63,06	63,56	64,06	Lintas Urusan		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	Poin	Kementerian PAN Reformasi Birokrasi	60,11	60,46	61,06	62,26	63,51	64,76	66,01	Lintas Urusan		
			Nilai Maturitas SPIP	Poin	$\sum(\text{Skor Indikator pada 5 Unsur SPIP})/\text{Jumlah Indikator}$	2,855	2,872	2,88	2,886	2,894	2,899	2,904	Pengawasan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Survey Kepuasan Masyarakat	81,95	82,59	83,34	84,14	85,04	86,14	87,64	Lintas Urusan		
			Indeks Pelayanan Publik	Poin	Kementerian PAN Reformasi Birokrasi	2,21	2,26	2,41	2,76	2,91	3,16	3,21	Lintas Urusan		
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	Indeks Kualifikasi $\times$ 0,20) + (Indeks Kompetensi $\times$ 0,40) + (Indeks Kinerja $\times$ 0,30) + (Indeks Disiplin $\times$ 0,10)	65,15	67,65	70,15	72,65	75,15	77,65	80,15	Kepegawaian		
			Persentase target jangka menengah daerah yang tercapai	Persen	Realisasi capaian target kinerja Outcome RPJMD / Target Kinerja Outcome X 100%	73,68	76,18	78,68	82,18	86,68	89,18	91,68	Perencanaan		
			Indeks Inovasi Daerah	Poin	Kementerian Dalam Negeri	15	17,5	21	26,5	33	38,5	44	Penelitian dan Pengembangan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun				Bidang Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Poin	Jumlah skor dimensi pengukuran IPKD / Jumlah Dimensi	70	71,1	72	73,1	74,3	75,4	76,5	Keuangan
			Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Keuangan
			Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Jumlah PAD / Total Pendapatan Daerah X 100	5,62	5,03	5,05	5,09	5,13	5,23	5,31	Pendapatan
		Memperkuat Transformasi Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	Kementerian PAN Reformasi Birokrasi	2,19	2,44	2,69	2,72	2,97	3,22	3,52	Komunikasi dan Informatika
			Indeks Masyarakat Digital	Poin	Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi	39,64	40,39	40,89	42,64	44,14	46,14	46,64	Komunikasi dan Informatika
5. Memperkuat Stabilitas Keamanan gatra wilayah, Demokrasi, Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan tatanan kehidupan kemasyarakatan .	Mewujudkan stabilitas wilayah yang kondusif untuk pembangunan Daerah		Indeks Reformasi Hukum	Poin	Kementerian Hukum	67,88	68,38	68,88	69,38	69,88	70,38	70,88	Sekretariat Daerah; Trantibumlinmas
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	$IKK = (Indeks\ Keamanan \times 0,3 + (IK\_Ketertiban \times 0,3) + (IK\_Perlindungan \times 0,4)$	93,83	93,98	94,13	94,28	94,43	94,58	94,73	Tratibumlinmas



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Sumber Data / Formula Pengukuran	Baseline 2024	2025	2026	Target Tahun				Bidang Urusan
		Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perbatasan	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Poin	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	NA	52,65	53,9	55,3	56,8	58,5	60,5	Perbatasan
			Persentase penyelesaian batas wilayah	Persen	Jumlah Desa dan Kelurahan yang telah ada	14,29	15,79	17,29	18,29	19,59	20,09	20,59	Perbatasan; Sekretariat Daerah

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

3.4. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD

3.4.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah, melalui upaya pencapaian visi dan misi daerah. Strategi adalah cara/upaya untuk mencapai tujuan dan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan didukung oleh arah kebijakan yang jelas untuk pelaksanaan program Pembangunan daerah secara operasional.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Alor dalam RPJPD tahun 2025 – 2045, telah dipilah dalam 4 tahapan, dimulai dari periode 2025-2029, yang disebutkan dengan milestone, yakni tonggak- tonggak perubahan yang diharapkan tercapai dalam setiap periode pembangunan. Masing-masing *milestone* diharapkan memperlihatkan target-target capaian yang bersifat progresif, di mana antara satu periode dengan periode berikutnya terjadi peningkatan atau optimalisasi capaian- capaian kebijakan dan program Pembangunan. Dengan demikian, penetapan strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2025-2029, menjadi tolok ukur pencapaian Visi dan misi daerah periode I, untuk kehidupan Masyarakat yang lebih baik.

3.4.1.1. Strategi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah 2025-2029 sebagai tonggak awal Pencapaian target Pembangunan 20 tahun kedepan untuk mencapai Indonesia emas, menjadi dasar bagi rumusan Strategi Pembangunan Daerah.

Penetapan Strategi Pembangunan daerah, dimaksudkan untuk menyatukan konsep berpikir dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah melalui pernyataan Strategis dalam sebuah Gerakan Bersama yang disebut :

“Gerakan Membangun Dengan Hati, Tenaga, Ilmu Pengetahuan, Inovasi Dan Teknologi Untuk Kemakmuran Masyarakat Alor. (GERBANG TIMUR)”.

Kata Gerbang memiliki filosofi yang dalam, “Pintu besar” untuk menuju era baru, menuju Indonesia dan masyarakat yang Sejahtera, sebagaimana Konsep Pintu Gerbang Kemerdekaan yang diungkapkan oleh Ir. Sukarno pada masa awal Pemerintahan Indonesia.

Strategi Gerbang Timur, dilaksanakan melalui 5 (lima) Pilar Percepatan Pembangunan, yakni :

1. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Percepatan Transformasi Ekonomi Daerah;
3. Percepatan Penyediaan Infrastruktur berkeadilan;
4. Percepatan Reformasi Birokrasi, dan



5. Percepatan Perwujudan Stabilitas Keamanan, Hak Asasi Manusia dan Harmoni sosial.

Adapun semangat untuk mengimplementasikan pencapaian visi, misi, dalam seluruh tahapan Pembangunan daerah 2025-2029 diletakkan pada Spirit : **“ALOR BERKEMAS”**.

Penggunaan istilah berkemas mengandung beberapa pengertian, antara lain: Kalimat kata kerja aktif, yang menunjuk pada Kesiapan diri untuk bersiap keluar menuju tujuan yang telah direncanakan dengan harapan baru. Dengan demikian, Alor Berkemas menunjuk pada Semangat membangun Kabupaten Alor untuk keluar dari berbagai permasalahan daerah, menuju kehidupan Masyarakat yang lebih baik.

Berkemas juga merupakan pemenggalan kalimat, yaitu semangat untuk menata dan mengelola Kembali Kabupaten Alor kearah yang lebih baik, dengan BERiman, untuk menghadirkan Keadilan, kEMandirian, keaMAnan dan keSejahteraan bagi masyarakat Alor.

Dalam RPJMN 2025-2029, Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah Lokasi Prioritas Pembangunan berdasarkan potensi pengembangan untuk mempercepat pertumbuhan dan kemajuan daerah. Untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tergambar potensi yang menjadi lokus perhatian Pemerintah pusat untuk dikembangkan, sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3. 2 Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Kabupaten Alor

Data Lokasi prioritas sebagaimana gambar diatas, menunjukkan Kabupaten Alor ditetapkan Pemerintah pusat sebagai : (1) Sentra Penguatan Pangan untuk Pangan Lokal, (2) Sentra Pemerataan ekonomi rintisan, Kawasan terintegrasi berbasis Perikanan, khusus untuk ekosistem produksi industri

dan riset inovasi komoditas Rumput Laut, (3) Kawasan perbatasan dan Transmigrasi, sebagai PKSN Kalabahi di Kecamatan Pantar Timur, dan (4) penyediaan infrastruktur pelayanan dasar, meliputi infrastruktur konektivitas, penanganan stunting dan pengendalian penyakit malaria.

Dengan mempertimbangkan penetapan Lokasi prioritas dimaksud, maka khusus pada sektor Ekonomi (pertanian, Kelautan dan Pariwisata) menjadi prioritas pengembangan tahun 2025-2029, walaupun untuk sektor Pariwisata, Kabupaten Alor tidak termasuk Lokasi prioritas pengembangan dalam RPJMN.

Strategi pengembangan 3 sektor dimaksud dikemas dalam **“TRI PALAWA” atau tiga sektor unggulan Ekonomi Daerah (Pertanian, Kelautan dan Pariwisata)**. Sejumlah hal yang perlu dilakukan sebagai intervensi kebijakan akan dilakukan untuk mendukung pencapaian Tata Pola Percepatan Peningkatan Produktifitas pertanian dan perikanan dan Wismaraya (Wisata Maju rakyat Sejahtera).

Merespons penetapan lokasi prioritas oleh pemerintah pusat tersebut, Pemerintah Kabupaten Alor turut menetapkan lokasi prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029 untuk memastikan sinergi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Khususnya dalam sektor ekonomi, Pemerintah Daerah menempatkan tiga sektor utama yaitu pertanian, kelautan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah yang akan menjadi pilar penggerak ekonomi lima tahun ke depan, walaupun secara nasional sektor pariwisata di Alor belum termasuk dalam daftar lokasi prioritas RPJMN.

Strategi pengembangan “TRI PALAWA” diarahkan untuk mendorong percepatan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan melalui tata pola produksi yang efisien, adaptif terhadap iklim, serta terintegrasi dengan riset dan pasar. Sementara itu, sektor pariwisata akan dikembangkan melalui pendekatan Wismaraya (Wisata Maju Rakyat Sejahtera), dengan fokus pada pengembangan destinasi unggulan berbasis komunitas, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan konektivitas dan amenities wisata.

Selain itu RPJMN 2025-2029 menetapkan pula sejumlah lokasi prioritas di Kabupaten Alor antara lain penetapan PKSN Pantar Timur di Kabupaten Alor untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan, penanganan masalah kesehatan khusus pada penyelesaian prevalensi stunting dan pemberantasan penyakit malaria serta konektivitas wilayah.

Untuk mewujudkan strategi tersebut secara terukur dan terarah, Pemerintah Daerah telah menetapkan lokasi prioritas pengembangan TRI PALAWA yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi sumber daya alam, kesiapan infrastruktur, keterjangkauan wilayah, dan dukungan sosial kelembagaan masyarakat, sebagaimana tampilan tabel berikut.

Tabel 3.3. Lokasi Prioritas Pengembangan Strategi Tri Palawa dan Lokasi Prioritas Lainnya
sesuai RPJMN 2025-2029

No	Sektor Prioritas		Lokasi Prioritas	Lokasi Pendukung	Kebijakan Prioritas
1	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Melalui Tri Palawa				
a.	Bidang Pertanian Melalui Program Prioritas "Tata Pola (Percepatan Peningkatan Produktifitas Lahan untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan Negara"				
	Komoditi Unggulan Pertanian	Padi (Sawah)	Tanglapui (Lantoka), Tanglapui Timur, Padang Panjang, Maukuru (Kopa) Kec. Alor Timur	Kolana Selatan	Pembangunan Bendung Lantoka 2 Unit (Wila dan Mumu) Cetak Sawah Rakyat 500 Ha Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Benlelang (Sub DI Lantoka, Sub DI Padang Panjang dan Sub DI Maukuru) dan DI Naumang Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Penyediaan sarana produksi pertanian Penyediaan Alat Mesin Pertanian Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Waisika, DI Kelaisi, DI Lembur, DI Bukapiting, DI Mainang dan DI Aimoli Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Muriabang Pembangunan Jalan Usaha Tani
			Nailang, Air Mancur, Waisika, Kamot Kec. Alor Timur Laut	Tuleng Kec. Lembur	
			Kelaisi Tengah, Kelaisi Timur, Subo, Kelaisi Barat, Silaipui, Malaipea Kec. Alor Selatan	Pailelang Kec. Alor Barat Daya	
				Aimoli, Alaang, Adang Kec. Alor Barat Laut	
				Mataru Selatan Kec. Mataru	
				Langkuru Utara, Langkuru, Kailesa Kec. Pureman	
				Bagang Kec. Pantar Tengah	
				Welai Selatan, Tominuku Kec. Alor Tengah Utara	
		Padi Ladang dan Jagung	Mauta, Aramaba, Ekajaya, Muriabang, Bagang, Tude, Tubbe, Delaki Kec. Pantar Tengah	Alumang, Kalondama Barat,Kalondama Tengah Kec. Pantar Barat Laut	Penyediaan Alat Mesin Pertanian Pembangunan Sumur Bor Air Tanah Penyediaan Embung di Desa Bagang Pembangunan Embung di Kel. Kabola, Pantedeere Penyediaan sarana produksi pertanian Pembangunan jalan produksi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kalondama Pengembangan ekosistem produksi untuk industri
				Illu, Kalondama Kec. Pantar Barat	
				Kabola, Pante Deere Kec. Kabola	
		Holtikulura	Welai Selatan (Mainang), Tominuku, Petleng, Alimmebung, Nurbenlelang Kec. Alor Tengah Utara	Welai Barat, Fanating, Welai Timur Kec. Teluk Mutiara	Penyediaan green house Penyediaan bibit dan pupuk
			Aimoli, Alaang, Adang Kec. Alor Barat Laut	Nailang, Air Mancur, Waisika Kec. Alor Timur Laut	
			Kelaisi Timur, Subo, Lella, Kelaisi Barat Kec. Alor Selatan		
	Komoditi Unggulan Perkebunan	Vanili	Kelaisi Timur,Kelaisi Tengah, Subo, Kelaisi Barat, Silaipui, Tamanapui, Lella, Manmas, Sidabui Kec. Alor Selatan	Welai Selatan, Tominuku, Manetwati, Kafakbeka, Dapitau, Lembur Tengah Kec. Alor Tengah Utara	Peningkatan akses jalan : Ruas Bukapiting - Apui, Ruas Apui -Mainang, dan Ruas Mainang - Mebung; Ruas Subo - Manmas, Ruas Manmas - Lella, Ruas Lella - Kiraman Penyediaan Mesin Pengolahan hasil, sarana produksi pertanian Penyediaan dukungan pendampingan oleh Penyuluh
			Waimi, Talwai, Luba, Tasi Kec. Lembur	Pido, Lipang, Kenarimbala Kec. Alor Timur Laut	

No	Sektor Prioritas		Lokasi Prioritas	Lokasi Pendukung	Kebijakan Prioritas
				Taman Mataru, Kamaifui Kec. Mataru	
				Kaera dan Lekom Kec. Pantar Timur	
				Kafelulang, Pintu Mas Kec. Alor Barat Daya	
		Cengkeh	Otvai Kec. Alor Barat Laut	Kelaisi Barat (Masape) Kec. Alor Selatan	Peningkatan akses jalan : Ruas Alor Kecil - Sp. Otvai
			Lekom, Kaera Kec. Pantar Timur	Oamate, Dulolong, Dulolong Barat Kec. Alor Barat Laut	Peningkatan akses jalan Kabir - Kaera, Nulle - Lekom
			Fuisama, Tominuku, Welai Selatan Kec. Alor Tengah Utara		Peningkatan akses ruas jalan Lelahomi - Mainang; Rehabilitasi Jembatan Tominuku
		Kenari	Waisika, Nailang, Air Mancur		
		Kelapa	Maukuru, Mausamang, Elok Kec. Alor Timur	Kayang, Alumang, Kec. Pantar Barat Laut	
			Muriabang, Bagang, Eka Jaya, Delaki Kec Pantar Tengah		
		Kakao	Maukuru, Mausamang, Elok Kec. Alor Timur		
			Muriabang, Bagang, Eka Jaya, Delaki Kec Pantar Tengah	Kayang, Alumang, Kec. Pantar Barat Laut	
		Kopi	Lembur Tengah, Fuisama, Lakwati, Dapitau Kec. Alor Tengah Utara		Peningkatan ruas jalan Sp. Likwatang - Atengmelang
		Mente	Muriabang, Bagang, Eka Jaya, Mauta, Delaki, Tude, Tamakh, Tubbe Kec Pantar Tengah	Kalondama, Leer, Illu Kec. Pantar Barat	
b.	Bidang Kelautan Melalui riset dan inovasi komoditas rumput laut				
	Komoditas Unggulan	Rumput Laut	Alumang (Wolu) Kec. Pantar Barat Laut	Alaang, Aimoli Kec. Alor Barat Laut	Pengembangan Budidaya Rumput Laut melalui: - Pendampingan kelompok pembudidaya rumput laut - Penyediaan sarana pokok budidaya : bibit dan tali - Penyediaan sarana penunjang budidaya : armada angkut, tempat penjemuran dan gudang penyimpanan - Penyediaan jalan produksi di P. Lapang - Fasilitasi kelompok pembudidaya - Peningkatan kapasitas pembudidaya rumput laut - Pengembangan ekosistem produksi untuk industri
			Bana Kec. Pantar	Pandai, Wailawar, Munaseli (Lamalu)	
			Blangmerang (P. Lapang) Kec. Pantar Barat	Marisa (Kangge), Kalondama Barat Pantar Barat Laut	
				Pantedeere, Kec. Kabola	
c.	Bidang Pariwisata, Melalui Program Prioritas Pengembangan sektor pariwisata melalui Wismaraya (Wisata Maju, rakyat sejahtera) dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal				
		Pariwisata Alam	Pantai pada Desa Yang mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Perairan Kepulauan Alor yang meliputi: - Pantai Sebanjar Desa Alor Besar - Pantai Ling'Al Desa Halerman - Pantai Delaki Desa Delaki; - Pantai Pulau Kangge Desa Marissa - Pantai Biatabang Kel. Pura - Pantai Batu Putih Desa Alila Timur - Pantai Weilolo Desa Mausamang - Pantai Wisata Mali, Kel. Kabola		- Peningkatan Ruas Jalan: Jalan Provinsi Ruas Kalabahi - Kokar; Ruas Puntaru - Delaki; Ruas Sp. Lola - Tanjung gereja - Halmin - Margeta; Ruas Baranusa - Beangonong; Ruas Kolana - Takala. - Kerjasama Pemerintah Kabupaten Alor dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pihak Ketiga dalam tata kelola pengelolaan Pariwisata berupa Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Perairan Kepulauan Alor yang mencakup Penataan regulasi, penyediaan sarana prasarana labuh tambat perahu diving, penyediaan pelabuhan wisata. - Perencanaan pengembangan destinasi

No	Sektor Prioritas	Lokasi Prioritas	Lokasi Pendukung	Kebijakan Prioritas
				Pantai Wisata Mali (Mali Park) - Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Alor dan Master Plan Kepariwisataaan - Penataan regulasi kepariwisataaan
		Pengembangan destinasi wisata alam lainnya : Air Terjun Biental Desa Mataru Pengembangan destinasi wisata alam air panas Tuti Adagae, Desa Air Mancur		Peningkatan Ruas Jalan menuju lokasi air Panas Tuti Adagae
	Pariwisata Budaya	Kampung Budaya Takpala, Kampung Budaya Matalafang, Kampung Budaya Bampalola, Kampung Budaya Monbang		- Peningkatan Jalan akses ke Kampung Takpala, Jalan akses ke Kampung Matalafang, Jalan akses Kampung Lama Bampalola - Peningkatan jalan Ruas Alor Kecil - Sp. Otvai
	Pariwisata Minat Khusus	Pengembangan wisata Paralayang di Hulnani dan Alor Besar Pengembangan Sport Tourism di Kalabahi dan destinasi wisata tertentu meliputi: - Road Race dan Balap Sepeda- Alor Exotic Run 10 Km- Lomba Pelahu Layar Tradisional; Tarik Tambang Perahu- Mancing Mania- Car Free Day- Pelaksanaan Even Olah raga skala regional dan nasional		Peningkatan akses jalan ke lokasi <i>take off</i> Paralayang di Hulnani dan Alor Besar; Penyediaan Sarana prasaranana pendukung wisata paralayang Penyediaan sarana prasana pendukung pelaksanaan kegiatan Sport Tourism
		Pariwisata Religi : Masjid Tua Lerebain di Desa Wakapsir; Alqur'an Tua di Desa Alor Besar; Gereja Ismail dan Masjid Isak		Peningkatan Jalan Ruas Kui - Buraga, Ruas Wakapsir - Wakapsir Timur, Ruas jalan Provinsi Kokar - Tulta - Mali;
	Agro Wisata	Pengembangan Agrowisata Cengkeh di Otvai		Peningkatan Ruas Jalan Kalabahi - Sp. Awalaha; Penyediaan Sarana prasarana pendukung destinasi agrowisata listrik, air
		Pengembangan Destinasi wisata premium ekowisata persawahan di Desa Tanglapui Kec. Alor Timur; Desa Pailalang Kec. Alor Barat Daya; Desa Air Mancur Kec. Alor Timur Laut		Penyediaan Sarana prasarana pendukung destinasi berupa Plaza kuliner, MCK, Homestay, Rest area, rumah makan
	Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan peningkatan kualitas sumber daya kepariwisataaan di Kab. Alor		Sosialisasi sadar wisata; Pelatihan Diving, Pelatihan Pokdarwis, Pelatihan Pemandu Wisata, Pelatihan Pemandu Wisata Tirta, Pelatihan Kuliner, Pelatihan digitalisasi produk UKM dan Pelatihan Pengelola Jasa Akomodasi
		Pelaksanaan Night Market di Kalabahi		Penyediaan lokasi Night Market
	Pemasaran dan Promosi Pariwisata	Pelaksanaan Event Daerah: - Pekan Wismaraya di Kalabahi - Festival Olamangsari di Pulau Pura - Festival Tenun Ikat di Pulau Ternate - Festival Alquran Tua di Alor Besar - Festival Dugong di Mali Kabola	- Festival Alabaloe di Bampalola - Festival Tifoltol (Potong Bambu) di Takpala Lembur Barat - Festival Balai Hatel (Bakar Pisang) di Matalafang	Penyediaan sarana prasana pendukung pelaksanaan Event Daerah Pemanfaatan Teknologi informasi digitalisasi pariwisata Penyediaan sarana prasarana pendukung pemasaran digitalisasi pariwisata Kerjasama pemasaran pariwisata dengan pihak ketiga
2	Pengembangan Wilayah Perbatasan, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Wilayah Pendukung			
a.	Kawasan Perbatasan Negara	PKSN Kalabahi, Kec. Alor Timur dan Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kec. Pantar Timur		- Pembangunan PLBN Maritaing - Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Maritaing - Pengalihan Status Jalan Lingkar Selatan Pulau Alor menjadi Jalan Strategis Nasional. Ruas Jalan Maritaing - Erana - Pureman - Peitoko - Mademang - Kiraman - Eibiki - Bagalbui - Bunggeta - Kui - Buraga - Mataraben - Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Pulau Alor Dari Maritaing hingga Mataraben

No		Sektor Prioritas	Lokasi Prioritas	Lokasi Pendukung	Kebijakan Prioritas
b.		Pengembangan Daerah Otonomi Baru	DOB Pantar		- Rancangan RTRW Pantar - Pengalihan Status Jalan Kabupaten menjadi Jalan Strategis Nasional, meliputi Ruas Jalan Kabir - Pandai - Bakalang - Nuhawala - Kakamauta - Puntaru - Baranusa - Peningkatan Jalan Ruas Kabir - Pandai - Bakalang - Nuhawala - Kakamauta - Puntaru - Baranusa - Pembangunan Pelabuhan Kabir; Peningkatan Pelabuhan Baranusa - Peningkatan SPAM IKK Pantar Tengah
3 Penanganan Stunting dan Pengendalian Penyakit Malaria					
a		Penanganan Stunting	Pengurangan angka Prevelensi Stunting.	Kecamatan-kecamatan dengan angka prevelensi tinggi.	Optimalisasi strategi pennggulangan melalui intervensi Spesifik dan sensitive; Koordinasi lintas sektor dengan seluruh <i>stake holders</i> di daerah; Monitoring dan evaluasi terpadu di tingkat desa dan kecamatan; Menciptakan program-program unggulan, seperti : orang tua asuh, monev terpadu penimbangan, dll.
b		Pengendalian Penyakit Malaria dan TB	Pengurangan Angka Kesakitan Penyakit Malaria dan TB	Kecamatan-kecamatan dengan angka kesakitan akibat malaria TB yang tinggi.	Percepatan pelaksanaan Strategi Pengendalian & Eliminasi Malaria dan TB, melalui: Deteksi Dini & Pengobatan; Pengendalian Vektor dan Faktor Risiko melalui penyemprotan, penggunaan kelambu, eliminasi tempat perindukan nyamuk, perbaikan ventilasi serta pencegahan penularan di masyarakat; Edukasi dan Promosi Kesehatan melalui kampanye perilaku hidup sehat, sosialisasi di lingkungan sekolah dan tempat kerja dengan melibatkan berbagai tokoh di daerah; Perkuatan sistem Surveilans, melalui pelaporan kasus secara <i>real time</i> , investigasi kasus secara menyeluruh, serta penelusuran kontak erat TB; Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh <i>stakeholders</i> di daerah.
4 Konektifitas Infrastruktur					
		Penguatan konektivitas infrastruktur	Memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pengembangan kawasan prioritas	Kawasan lokpri	Membangun konektivitas untuk menyatukan wilayah, memperkuat ekonomi lokal Masyarakat dan menjaga kedaulatan melalui : Perkuatan data awal melalui analisis studi (pemetaan wilayah, penetapan titik kritis, dan ketersediaan data sosial ekonomi Masyarakat); Perkuatan strategi konektivitas fisik: transportasi dan infrastuktur; Perkuatan konektivitas sosial ekonomi (ekonomi antar pulau, koperasi, UMKM, digitalisasi dan informasi); Perkuatan strategi pertahanan dan kedaulatan serta Kerjasama (percpatan Pembangunan PLBN Maritaing, patrol laut terpadu dan Latihan bela negara/ nelayan perbatasan.

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

3.4.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan Pembangunan daerah merupakan rangkaian kerja yang menjabarkan Misi daerah yang selaras dengan Strategi daerah, dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Untuk periode Pemerintahan 2025-2029, sejumlah arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Misi daerah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi Daerah 2025-2029

MISI		ARAH KEBIJAKAN	
I	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas.	1	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas dan pemenuhan tenaga medis.
		2	Perluasan upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.
		3	Penurunan prevalensi stunting melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu.
		4	Perluasan akses pendidikan 13 tahun dengan meningkatkan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah.
		5	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
		6	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk masyarakat miskin dan wilayah terisolir yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan system pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK.
		7	Penguatan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.
		8	Meningkatkan integrasi perspektif gender melalui penguatan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak dalam program lintas sektor.
		9	Meningkatkan peran strategis pemuda dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan serta prestasi dalam bidang olahraga.
II	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis Sumber daya alam.	10	Melakukan pembinaan kewirausahaan generasi muda dalam berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.
		11	Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah untuk menjangir atlit muda berprestasi melalui even pertandingan.
		12	Peningkatan keterjangkauan layanan sosial bagi masyarakat serta pemberian bantuan sosial bagi PMKS.
		13	Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui pemberian perlindungan terhadap anak dan lansia serta pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
		1	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah
		2	Meningkatkan produksi padi sawah, padi ladang dan jagung melalui pembukaan lahan pertanian dan pemanfaatan teknologi.
		3	Mewujudkan kedaulatan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, penyediaan sarana prasarana produksi yang memadai serta peningkatan kapasitas petani.
		4	Meningkatkan produksi dan daya saing sektor perikanan melalui pengembangan budidaya, pengelolaan sumber daya berkelanjutan dan penguatan kelembagaan.
		5	Melakukan pendampingan kelompok nelayan dan pembudidaya rumput laut serta penyediaan sarana prasarana untuk medukung peningkatan produksi.
		6	Meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor perdagangan melalui revitalisasi infrastrukrus pasar, optimalisasi pengelolaan retribusi dan penguatan pelaku UMKM.
		7	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru pada kawasan pariwisata unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif.
		8	Menyediakan paket wisata unggulan yang terintegrasi dengan agen dan pelaku wisata.
		9	Memperkuat peran wirausaha dan koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah melalui pembinaan, transformasi
			kelembagaan berbasis digital serta peningkatan kapasitas usaha yang berdaya saing dan berpihak kepada anggota.
		10	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan inklusif melalui kemudahan perijinan, promosi potensi serta dukungan terhadap investasi PMA dan PMDN yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
		11	Penyederhanaan dan perbaikan proses regulasi investasi melalui perizinan investasi yang mudah dan cepat, penyusunan kebijakan yang mendukung investasi dalam sektor-sektor unggulan dan pemberian berbagai insentif bagi investor.
		12	Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan dan distribusi pangan, diversifikasi koomsumsi serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan.
		13	Meningkatkan kemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan desa sekaligus dalam mengembangkan produk unggulan desa (1 desa 1 produk).

MISI		ARAH KEBIJAKAN	
		14	Optimalisasi peran Bumdes dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat desa.
III	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah berwawasan lingkungan.	1	Peningkatan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah.
		2	Mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berbasis potensi wilayah dan daya dukung lingkungan.
		3	Menyediakan rumah layak huni dengan prasarana sarana utilitas termasuk air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan
		4	Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan transformasi digital melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi yang merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan inklusif
		5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengurangan produksi sampah plastik, peningkatan kapasitas daur ulang sampah, rehabilitasi lahan kritis dan penerapan kebijakan pengendalian, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
		6	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta perubahan iklim melalui pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
IV.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel.	1	Mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel dan efisien melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
		2	Memperkuat inovasi daerah yang adaptif dan berdaya saing
V	Memperkuat Stabilitas Keamanan gatra wilayah, Demokrasi, Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan tatanan kehidupan kemasyarakatan.	1	Peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
		2	Mewujudkan masyarakat yang aman, harmonis dan inklusif melalui penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan kerukunan antar umat beragama.
		3	Mendorong pembangunan wilayah perbatasan negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penegasan batas wilayah administrasi desa/Kecamatan melalui koordinasi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan.

3.5. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Program prioritas daerah adalah program yang diutamakan dan menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Alor untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Berdasarkan hasil analisis, dan dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka telah ditetapkan 14 program Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Kesehatan untuk semua melalui GESIT (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
2. Percepatan penurunan angka prevalensi Stunting dan penyakit kronis.
3. Pendidikan Bermutu dan Ramah untuk Semua.
4. Pengarusutamaan *Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)* dan perlindungan sosial terintegrasi.
5. Pengembangan Industri dan UMKM melalui penerapan teknologi untuk nilai tambah ekonomi Masyarakat.
6. Tata Pola percepatan peningkatan produktifitas pertanian dan perikanan untuk mendukung upaya pencapaian kedaulatan pangan Negara.

7. Pengembangan sektor pariwisata melalui Wismaraya (Wisata Maju, rakyat sejahtera) dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal.
8. Pengurangan angka Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui kolaborasi seluruh sektor di daerah.
9. Pemenuhan kebutuhan jalan, listrik, transportasi, air minum dan permukiman untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat.
10. Kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan Harmoni sosial untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lestari.
11. Birokrasi yang melayani dan inovatif untuk mendukung optimalisasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan terhadap publik yang semakin baik.
12. PAD, investasi Daerah dan pengelolaan keuangan sebagai pilar utama perwujudan kemandirian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
13. Pemuda, Perguruan tinggi, riset dan masa depan daerah.
14. Pengembangan wilayah administratif dan Daerah Otonomi Baru, serta Pembangunan Wilayah Perbatasan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan NKRI.

Secara umum, Gambaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk RPJMD Kabupaten Alor 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
KABUPATEN ALOR YANG AMAN, DAMAI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, MAJU DAN BERKELANJUTAN					
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak dan berkualitas.	Mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas.			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
		Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan untuk semua		Umur Harapan Hidup	
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Angka kematian Ibu	1. Kesehatan untuk semua melalui GESIT (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
				Angka kematian Anak	
			Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase capaian SPM Bidang Kesehatan	
				Prevalansi Stunting	2. Percepatan penurunan angka prefelensi Stunting dan penyakit kronis.
		Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan merata.		Harapan Lama sekolah	
				Rata-rata Lama Sekolah	
			Meningkatnya akses pendidikan dasar serta sarana dan prasarana pendidikan.	Angka Partisipasi PAUD	3. Pendidikan Bermutu dan Ramah untuk Semua.
				Angka Partisipasi SD	
				Angka Partisipasi SMP	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa SD berdasarkan hasil asesment nasional	
				Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi Siswa SMP berdasarkan hasil asesment nasional	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
				Persentase Sarana Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	
		Meningkatnya kelestarian budaya daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan	
			Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	3. Pendidikan Bermutu dan Ramah untuk Semua
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Cakupan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak	4. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan sosial terintegrasi dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
		Meningkatnya Prestasi Generasi Muda		Persentase Pemuda berprestasi dan Atlit Berprestasi	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pemberdayaan pemuda dan prestasi olahraga unggulan daerah	Persentase wirausaha muda yang dibina	13. Pemuda, Perguruan tinggi, riset dan masa depan daerah.
				Persentase Atlit Berprestasi	
		Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	
			Meningkatnya pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat	
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis Sumber daya alam	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif			Laju Pertumbuhan ekonomi PDRB ADHK	
				Indeks Gini	
				Persentase Penduduk Miskin	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	
			Meningkatnya nilai usaha industri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	5. Pengembangan Industri dan UMKM melalui penerapan teknologi untuk nilai tambah ekonomi Masyarakat.
				Nilai PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
			Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi pertanian dan perkebunan	6. Tata Pola (Percepatan Peningkatan Produktifitas Lahan) untuk mendukung
				Jumlah produksi daging dan telur	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	upaya pencapaian kedaulatan pangan Negara.
				Nilai Produk olahan perikanan	
				Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	
			Meningkatnya daya tarik destinasi wisata unggulan daerah	Jumlah kunjungan wisatawan	7. Pengembangan sektor pariwisata melalui Wismaraya (Wisata Maju, rakyat sejahtera) dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal.
		Meningkatnya daya saing UMKM, koperasi dalam peningkatan ekonomi masyarakat		Persentase Kewirausahaan Daerah	
			Meningkatnya kelembagaan koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	5. Pengembangan Industri dan UMKM melalui penerapan teknologi untuk nilai tambah ekonomi Masyarakat.
		Meningkatnya investasi dan peluang usaha		Realisasi investasi PMA	
				Realisasi investasi PMDN	
				Tingkat Pengangguran terbuka	
			Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi	8. Pengurangan angka Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui kolaborasi seluruh sektor di daerah.
			Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
		Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan		Skor Pola Pangan Harapan	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terpenuhinya sistem pangan daerah yang mandiri	Skor indeks ketahanan pangan	
				Rasio kemandirian pangan	
		Meningkatnya kemandirian desa		Indeks Desa Membangun	
			Terwujudnya pengembangan produk unggulan desa	Persentase pengembangan produk unggulan desa (1 desa 1 produk)	
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah berwawasan lingkungan.	Mewujudkan pembangunan kawasan berkelanjutan			Indeks Pembangunan Berkelanjutan	
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah		Indeks Pembangunan Infrastruktur	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	9. Pemenuhan Kebutuhan Jalan, listrik, transportasi, air bersih dan permukiman untuk kehidupan yang layak bagi Masyarakat.
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap	
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	
				Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak	
				Persentase akses sanitasi layak	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Rumah layak huni	
				Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	
				Rasio Elektrifikasi	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks layanan infrastruktur perhubungan	
		Meningkatnya kelestarian lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya perlindungan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan sampah secara berkelanjutan	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	10. Kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan Harmoni sosial untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lestari.
				Persentase penanganan sampah	
		Meningkatnya pengelolaan risiko bencana dengan dukungan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan iklim.		Indeks Risiko Bencana	
			Meningkatnya kapasitas daerah dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi rekonstruksi bencana secara berkelanjutan	Persentase penanggulangan bencana	
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan dan inovasi daerah.		Persentase target jangka menengah daerah yang tercapai	
				Indeks Inovasi Daerah	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kualitas baik	13. Pemuda, Perguruan tinggi dan riset untuk masa depan daerah.
				Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah yang mencapai target	
			Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil riset	Persentase produk inovasi daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil riset	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kualitas pelayanan publik.		Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Daerah	
				Nilai Maturitas SPIP	
				Indeks Pelayanan Publik	
				Indeks Profesionalitas ASN	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi standar akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	11. Birokrasi yang melayani dan Inovatif untuk mendukung optimalisasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan terhadap Publik yang semakin baik.
				Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini BPK terhadap LKPD	
				Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi standar akuntabilitas	Realisasi capaian pengelolaan keuangan daerah	12. PAD, investasi Daerah dan pengelolaan keuangan sebagai pilar utama perwujudan kemandirian daerah untuk kesejahteraan masyarakat
		Memperkuat Transformasi Digital		Indeks Masyarakat Digital Indonesia	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah	11. Birokrasi yang melayani dan Inovatif untuk mendukung optimalisasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan terhadap Publik yang semakin baik.
5. Memperkuat Stabilitas Keamanan gatra wilayah, Demokrasi, Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan tatanan kehidupan masyarakat.	Mewujudkan stabilitas wilayah yang kondusif untuk pembangunan Daerah			Indeks Reformasi Hukum	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase penegakan Perda dan Perkada	10. Kelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan Harmoni sosial untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lestari.
			Terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan kondusif	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Pembangunan Wilayah Perbatasan		Indeks Pembangunan wilayah perbatasan	
			Meningkatnya kesejahteraan dan konektivitas wilayah perbatasan melalui penguatan infrastruktur layanan dasar dan aktivitas ekonomi	Cakupan pembangunan wilayah perbatasan sesuai dengan rencana aksi.	14. Pengembangan wilayah administratif dan Daerah Otonomi Baru, serta Pembangunan Wilayah Perbatasan, untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan NKRI.
				Persentase penyelesaian batas wilayah	

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025



3.6. **TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD**

Tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Alor tahun 2025 – 2029 dicapai melalui pelaksanaan 5 tahunan, dimulai dari tahun 2026, hingga tahun 2030. Melalui tahapan tahunan ini diharapkan memperlihatkan target-target capaian yang bersifat progresif, di mana antara satu tahun dengan tahun berikutnya terjadi peningkatan atau optimalisasi capaian- capaian kebijakan dan program pembangunan. Tema dan tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025- 2029 sebagaimana gambar berikut :



Gambar 3. 3 Tema dan Tahapan Pembangunan RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tema tahapan sebagaimana diatas, diformulasikan pula arah kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan tahun pelaksanaan. Adapun Arah Kebijakan petahapan Pembangunan RPJMD kabupaten Alor tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Tahapan dan Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029

No	TAHAP / TAHUN	TEMA		ARAH KEBIJAKAN
1	I / 2026	Peletakan Pondasi Transformasi Sosial dan Kelembagaan Menuju Pelayanan Publik Inklusif.	1	Penguatan infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah tertinggal dan kepulauan
			2	Reformasi tata kelola pelayanan publik dengan basis digital.
			3	Penguatan kapasitas SDM ASN dan tenaga pendidik, Tenaga Kesehatan.
			4	Revitalisasi dan perlindungan nilai-nilai kearifan lokal untuk harmoni sosial.
			5	Penyediaan lapangan kerja yang inklusif dan pemenuhan jaminan sosial bagi Masyarakat.
2	II / 2027	Akselerasi Transformasi Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Kawasan Kepulauan.	1	Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata Bahari.
			2	Penguatan UMKM dan koperasi melalui akses modal, pelatihan, dan pasar digital.
			3	Peningkatan konektivitas antar pulau dan antar desa melalui infrastruktur jalan, Pelabuhan.

No	TAHAP / TAHUN	TEMA		ARAH KEBIJAKAN
			4	Pembangunan sentra logistik daerah dan gudang komoditas strategis.
			5	Insentif investasi daerah berbasis keberlanjutan dan potensi lokal.
3	III / 2028	Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Kemandirian Daerah.	1	Pengembangan layanan kesehatan preventif dan promotif berbasis komunitas.
			2	Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia usaha lokal dan regional.
			3	Peningkatan ketahanan pangan berbasis komunitas dan inovasi teknologi pertanian.
			4	Ekspansi program perlindungan sosial untuk kelompok rentan (anak, lansia, penyandang disabilitas).
			5	Penguatan BUMDes /Koperasi dan lembaga ekonomi desa sebagai motor kemandirian.
4	IV / 2029	Pemantapan Inovasi dan Ekosistem Digital untuk Daya Saing Daerah.	1	Pembangunan ekosistem inovasi desa dan kabupaten.
			2	Integrasi sistem informasi lintas sektor pemerintahan dan pelayanan publiK.
			3	Kolaborasi riset dan inovasi dengan perguruan tinggi/lembaga riset lokal.
			4	Promosi digitalisasi sektor ekonomi lokal.
			5	Literasi digital masyarakat dan pelajar di seluruh wilayah.
5	V / 2030	Konsolidasi Pembangunan Berkelanjutan untuk Alor Emas 2045.	1	Evaluasi capaian pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah dengan prinsip berkelanjutan dalam seluruh kebijakan.
			2	Pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim (perlindungan laut, hutan dan air).
			3	Integrasi tata ruang wilayah berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
			4	Reformasi kelembagaan daerah menuju pemerintahan kolaboratif dan berbasis data.
			5	Penguatan jejaring regional, nasional, dan internasional untuk kemitraan Pembangunan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sebagai manifestasi operasional dari misi pembangunan daerah, seluruh program Perangkat Daerah mengacu pada struktur perencanaan yang bersifat holistik dan berkelanjutan, dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Alor berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Alor, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang mencakup Urusan Wajib dan Urusan Penunjang. Program-program prioritas tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif yang disusun berdasarkan analisis anggaran berbasis kinerja sesuai dengan indikator kinerja program yang ditetapkan.

Penetapan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.



Proyeksi kerangka pendanaan untuk periode RPJMD 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

URAIAN	BASELINE			PROYEKSI TAHUN			
	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN DAERAH	1.031.272.089.730,43	1.206.470.777.931	1.229.295.521.650	1.258.330.066.842	1.287.370.399.909	1.318.630.019.109	1.342.669.724.523
PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.922.250.516	69.326.954.440	65.036.984.250	68.863.676.860	72.306.860.703	77.572.248.105	82.801.138.666
Pajak Daerah	15.740.661.179,00	19.488.056.497	20.936.984.250	23.083.025.135	24.237.176.393	26.054.964.622	27.878.812.145
Retribusi Daerah	34.833.904.136,00	42.550.497.943	36.575.599.343	38.404.379.310	40.324.598.275	43.384.943.146	46.383.369.166
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.102.159.500,00	1.500.000.000	1.575.000.000	1.736.437.500	1.823.259.375	1.914.422.344	2.010.143.462
Lain-lain PAD yang Sah	6.245.525.701,43	5.788.400.000	5.949.400.657	5.639.834.915	5.921.826.660	6.217.917.993	6.528.813.893
PENDAPATAN TRANSFER	1.049.772.287.331	1.125.943.823.491	1.151.058.537.400	1.176.266.389.982	1.201.863.539.206	1.227.857.771.004	1.246.668.585.857
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.027.346.419.840	1.103.517.956.000	1.132.487.676.600	1.157.795.529.182	1.183.492.678.406	1.209.586.910.204	1.228.497.725.057
Dana Alokasi Umum	658.115.503.300,00	688.871.926.000	715.075.760.000	729.377.275.200	743.964.820.704	758.844.117.118	766.432.558.289
Dana Bagi Hasil	6.489.893.000,00	5.745.565.000	5.757.791.000	5.872.946.820	5.990.405.756	6.110.213.872	6.232.418.149
Dana Alokasi Khusus	223.246.950.540,00	255.497.413.000	252.408.053.100	257.456.214.162	262.605.338.445	267.857.445.214	273.214.594.118
Dana Insentif Fiskal	7.425.593.000,00	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000	21.842.026.000
Dana Desa	132.068.480.000,00	131.561.026.000	137.404.046.500	143.247.067.000	149.090.087.500	154.933.108.000	160.776.128.500
Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.425.867.491,00	22.425.867.491	18.570.860.800	18.470.860.800	18.370.860.800	18.270.860.800	18.170.860.800
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.402.865.420,00	11.200.000.000	13.200.000.000,00	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000	13.200.000.000
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0

URAIAN	BASELINE		PROYEKSI TAHUN				
	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.402.865.420,00	11.200.000.000	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00	13.200.000.000,00
BELANJA	1.022.266.043.746	1.206.470.777.931	1.229.295.521.650	1.258.330.066.842	1.287.370.399.909	1.318.630.019.108	1.342.669.724.522
BELANJA OPERASI	701.992.772.536	869.972.208.834	912.087.106.189	934.174.741.172	954.328.414.709	980.349.323.117	982.566.414.911
Belanja Pegawai	341.472.276.922,00	577.551.422.422	648.660.286.316	664.876.793.473	668.201.177.441	670.205.780.973	693.662.983.307
Belanja Barang dan Jasa	305.590.753.609,00	236.139.744.312	227.711.512.873	232.135.743.130	248.435.977.586	271.510.000.970	240.985.501.019
Belanja Hibah	45.501.398.500,00	54.163.873.000	20.448.236.000	21.131.780.018	21.260.074.518	21.791.576.381	26.643.860.374
Belanja Bantuan Sosial	9.428.343.505,00	2.117.169.100	15.267.071.000	16.030.424.550	16.431.185.164	16.841.964.793	21.274.070.211
BELANJA MODAL	111.221.835.832	110.603.767.997	88.595.244.000	93.317.506.200	99.979.517.719	102.993.580.499	120.751.546.108
Belanja Modal Tanah	-	2.514.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000	3.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.819.473.958,00	27.932.596.370	18.689.370.000	19.623.838.500	20.410.262.619	20.196.686.738	22.940.104.253
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.663.479.231,00	25.752.747.007	30.441.252.000	31.963.314.600	34.657.439.800	35.765.533.700	42.090.293.391
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.708.882.643,00	54.111.443.620	35.314.622.000	37.080.353.100	39.761.815.300	41.381.360.061	52.071.148.465
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	30.000.000,00	292.981.000,00	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	184.033.625	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	184.033.625,00	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
BELANJA TRANSFER	208.867.401.753	223.394.801.100	225.613.171.461	227.837.819.470	230.062.467.481	232.287.115.492	236.351.763.503
Belanja Bagi Hasil	923.722.348,00	930.000.000	923.722.350	923.722.348,00	923.722.348,00	923.722.348,00	923.722.348,00
Belanja Bantuan Keuangan	198.523.833.372,00	222.464.801.100	224.689.449.111	226.914.097.122	229.138.745.133	231.363.393.144	235.428.041.155
Surplus/(Defisit)		0	0	0	0	0	0



URAIAN	BASELINE		PROYEKSI TAHUN				
	TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN	71.356.991.670,20	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.356.991.670,20		0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	0	4.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000	42.000.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0
Dana Cadangan	0	0	0		16.000.000.000	38.000.000.000	0
Pembiayaan Netto	71.356.991.670,20	0	0	0	0	0	0
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan			0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kabupaten Alor, 2025



Secara keseluruhan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	-	
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						263.447.440.347		258.607.696.203		261.193.773.165		263.805.710.897		266.443.768.006		269.108.205.686	-	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Anak Usia 5-6 Tahun dan 7-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	Persen	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun dan 7-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar / Jumlah Anak usia 5-6 tahun dan 7-15 tahun X 100%	67,21	67,46	79.524.794.950	67,71	79.674.794.950	68,06	80.471.542.900	68,46	81.276.258.328	68,86	82.089.020.912	69,31	82.909.911.121	69,31	Dinas Pendidikan
	2. Persentase sarana pendidikan dasar dalam kondisi baik.	Persen	Jumlah sarana pendidikan dasar dalam kondisi baik / Total jumlah sarana pendidikan dasar X 100%	28,76	29,01		29,26		29,51	0	29,76	0	30,01	0	30,26	0	30,26	Dinas Pendidikan
	3. Persentase satuan PAUD yang melaksanakan Holistik Integratif (HI)	Persen	Jumlah Satuan PAUD HI / Total Jumlah PAUD X 100%	73,13	74,69		76,56		76,56	0	78,13	0	81,25	0	84,38	0	84,38	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Persentase tenaga pendidik bersertifikat - SD	Persen	Jumlah Tenaga pendidik bersertifikat / Total jumlah tenaga pendidik X 100%			14.889.455.300		14.889.455.300		15.038.349.853		15.188.733.352		15.340.620.685		15.494.026.892	-	Dinas Pendidikan
	- SMP									0		0		0		0		0
	2. Rasio guru terhadap siswa - SD	Rasio	Jumlah Guru TK + SD + SMP / Jumlah Siswa TK + SD + SMP X 100%	- 1 : 9	- 1 : 9		- 1 : 9		- 1 : 9	0	- 1 : 9	0	- 1 : 9	0	- 1 : 9	0	- 1 : 9	Dinas Pendidikan
	- SMP			- 1 : 6	- 1 : 6		- 1 : 6		- 1 : 6	0	- 1 : 6	0	- 1 : 6	0	- 1 : 6	0	- 1 : 6	0
	3. Cakupan tenaga pendidik yang berkualifikasi pendidikan S1 dan S2 - SD	Persen	Jumlah Tenaga Pendidik Berkualifikasi S1 dan S2 / Total Jumlah Tenaga Pendidik X 100%	78,38	78,63		78,88		79,13	0	79,38	0	79,63	0	79,88	0	79,88	Dinas Pendidikan
	- SMP			97,49	97,51		97,53		97,55	0	97,57	0	97,59	0	97,61	0	97,61	0
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah/lembaga pendidikan yang telah memiliki izin	Sekolah	Sekolah Yang Memiliki Izin / Jumlah Sekolah x 100%	100,00	100,00	79524794950	100,00	50.000.000	100,00	50.500.000	100,00	51.005.000	100,00	51.515.050	100,00	52.030.201	100,00	Dinas Pendidikan



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Angka Literasi	Persen	Rata rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional + Rata rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional / 2	35,21	40,09	20.000.000	48,19	20.000.000	56,29	20.200.000	64,40	20.402.000	72,50	20.606.020	80,60	20.812.080		
	Angka Numerasi	Persen	Rata rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional + Rata rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional / 2	32,91	39,11		47,46		55,81		64,15		72,50		80,85			
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						83.033.761.575		4.286.398.566		4.329.262.552		4.372.555.177		4.416.280.729		4.460.443.536	-	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Jumlah kasus kematian bayi	Kasus	Jumlah kasus kematian bayi dalam satu tahun	59,00	53,00	138.599.732.362	48,00	137.471.241.654	40,00	138.845.954.071	35,00	140.234.413.611	29,00	141.636.757.747	25,00	143.053.125.325	25,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
	2. Jumlah kasus kematian balita	Kasus	Jumlah kasus kematian balita dalam satu tahun	59,00	50,00		40,00		30,00	0	20,00	0	10,00	0	5,00	0	5,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
	3. Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	Jumlah kasus kematian ibu dalam satu tahun	7,00	6,00		5,00		4,00	0	3,00	0	2,00	0	1,00	0	1,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
	4. Prevalensi Stunting	Persen	Jumlah balita stunting menurut Survey Kesehatan Indonesia (SKI)	37,40	36,20		33,90		31,70	0	29,60	0	27,70	0	25,90	0	25,90	
	5. Persentase Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	Jumlah Penduduk Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis / Jumlah Penduduk X 100%	na	36,00		46,00		55,00	0	61,00	0	70,00	0	75,00	0	75,00	
	6. Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	Jumlah Bayi penerima imunisasi lengkap / Total Jumlah Bayi X 100%	52,60	80,00		85,00		90,00	0	93,00	0	95,00	0	95,00	0	95,00	
	7. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	Jumlah peserta aktif JKN / Total Jumlah Penduduk X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	8. Angka keberhasilan Pengobatan TBC	Persen	Jumlah pasien TBC yang sembuh + pengobatan lengkap / Total Jumlah pasien TBC yang memulai pengobatan X 100%	67,70	90,00		90,00		90,00	0	90,00	0	90,00	0	90,00	0	90,00	
	9. Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persen	Jumlah pasien hipertensi dengan tekanan darah terkendali / Jumlah seluruh pasien hipertensi yang dipantau X 100%	na	20,00		25,00		30,00	0	35,00	0	40,00	0	45,00	0	45,00	
	10. Proporsi Penduduk dengan Aktifitas Fisik Cukup	Persen	Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik cukup / Jumlah penduduk usia ≥ 10 tahun yang disurvei X 100%	na	65,00		68,00		71,00	0	75,00	0	80,00	0	85,00	0	85,00	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
	11. Angka Kesakitan	Orang	Jumlah penduduk yang menderita sakit dalam periode tertentu / Total Jumlah Penduduk X 100 %	30.555,00	29.855,00		29.605,00		29.505,00	0	29.405,00	0	29.305,00	0	29.205,00	0	29.205,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
	12.Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	Persen	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna / Total Jumlah Puskesmas X 100%	na	3,57		3,57		7,14	300.000.000	7,14	303.000.000	14,29	306.030.000	17,86	309.090.300	17,86	Dinkes, RSD RS Kelas D Mola
	13. Persentase RS terakreditasi paripurna	Persen	Jumlah RS terakreditasi paripurna / Total Jumlah RS X 100%	na	-		-		-	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi SDM Kesehatan sesuai standar	Persen	Jumlah Faskes Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar / Total Puskesmas X 100%	na	3,57	13.102.427.172	3,57	12.704.869.010	3,57	12.831.917.700	7,14	12.960.236.877	7,14	13.089.839.246	14,29	13.220.737.638	14,29	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
	2. Persentase Pemenuhan dokter spesialis sesuai standar pada RS Pemerintah - RSD Kalabahi	Persen	Jumlah ketersediaan dokter spesialis / Jumlah dokter spesialis sesuai standar X 100%	50,00	50,00		64,29		78,57	0	78,57	0	78,57	0	78,57	0	78,57	RSD, RS Kelas D Mola
	- RSU Pratama Mola	Persen		-	-		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	3. Rasio Tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	per 100.000	Jumlah Tenaga Kesehatan / Jumlah Penduduk X 100.000							0		0		0		0		
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan Pangan dan Sediaan Farmasi yang aman	Persen	Jumlah pemenuhan pangan dan sediaan farmasi yang aman / Jumlah pangan dan farmasi X 100 %	100,00	100,00	0	100,00	419.982.305	100,00	424.182.128	100,00	428.423.949	100,00	432.708.189	100,00	437.035.271	100,00	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	Jumlah rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) / Jumlah Total Rumah Tangga X 100%	82,10	83,30	939.369.150	85,40	1.405.635.000	87,50	1.419.691.350	88,30	1.433.888.264	89,20	1.448.227.146	90,30	1.462.709.418	90,30	Dinkes, RSD, RS Kelas D Mola
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.040.356.437		3.862.238.726		3.900.861.113		3.939.869.724		3.979.268.422		4.019.061.106	-	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik / Total panjang jaringan irigasi X 100%	33,69	33,74	6.468.728.449	35,24	6.564.928.449	37,74	6.630.577.733	38,24	6.696.883.511	38,74	6.763.852.346	39,24	6.831.490.869	39,24	Dinas PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum Layak	Persen	Jumlah RT akses air minum layak / Total Jumlah RT X 100%	87,28	87,63	13.377.872.779	87,98	8.683.920.000	88,48	8.770.759.200	89,13	8.858.466.792	89,63	8.947.051.460	90,13	9.036.521.975	90,13	Dinas PUPR Dinas Perumahan KPP



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga Akses sanitasi layak	Persen	Jumlah RT akses sanitasi layak / Total Jumlah RT X 100%	85,83	87,08	5.564.099.114	88,08	8.500.000.000	88,33	8.585.000.000	88,58	8.670.850.000	88,83	8.757.558.500	89,08	8.845.134.085	89,08	Dinas PUPR Dinas Perumahan KPP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam kota dengan Kondisi Baik	Persen	Panjang Jaringan Drainase dalam Kota dengan kondisi Baik / Total Panjang Jaringan Drainase dalam kota X 100%	na	40,55	250.000.000	41,05	1.300.000.000	41,55	1.313.000.000	42,05	1.326.130.000	42,55	1.339.391.300	43,05	1.352.785.213	43,05	Dinas PUPR Dinas Perumahan KPP
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik / Total jumlah bangunan gedung X 100%			539.726.000		489.726.000		494.623.260		499.569.493		504.565.188		509.610.839	-	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	Panjang jalan dalam kondisi mantap / Total panjang jalan X 100%	44,16	44,21	48.649.369.550	44,86	48.603.169.551	45,71	49.089.201.247	46,46	49.580.093.259	47,32	50.075.894.192	48,82	50.576.653.133	48,82	Dinas PUPR
	2. Persentase jembatan dalam kondisi mantap	Persen	Panjang jembatan dalam kondisi mantap / Total panjang jembatan X 100%	79,12	79,27		79,38		79,53	0	79,78	0	79,93	0	80,10	0	80,10	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi terlatih	Persen	Jumlah Tenaga Kerja konstruksi terlatih / Total Jumlah tenaga kerja X 100%	46,74	48,24	31650000	49,49	31.650.000	50,74	31.966.500	51,99	32.286.165	53,24	32.609.027	54,49	32.935.117	54,49	Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Persentase perencanaan penataan ruang	Persen	(Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang + persentase ketersediaan dokumen RTBL + Persentase pelaksanaan sosialisasi kebijakan penataan ruang) / 3	65,40	67,90	700.000.000	69,40	550.000.000	71,15	555.500.000	72,65	561.055.000	74,15	566.665.550	75,15	572.332.206	75,15	Dinas PUPR
	2. Persentase pengendalian dan pemanfaatan ruang	Persen	(Persentase penerbitan rekomendasi KKPR dan KRK + Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang + Persentase pengelolaan database pertanahan dan tata ruang + Persentase penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang) / 4	61,40	62,90		64,40		65,90	0	67,40	0	68,90	0	70,40	0	70,40	
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.852.608.100		3.267.454.828		3.300.129.376		3.333.130.670		3.366.461.977		3.400.126.597	-	Dinas Perumahan KPP
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni / Jumlah warga negara korban bencana Kerusakan Rumah X 100%	100,00	100,00	10.000.000	100,00	208.000.000	100,00	210.080.000	100,00	212.180.800	100,00	214.302.608	100,00	216.445.634	100,00	Dinas Perumahan KPP, BPBD



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni / Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	3. Persentase rumah tidak layak huni	Persen	Jumlah rumah tidak layak huni / Total Jumlah Rumah X 100%	41,22	41,07		40,81		40,55	0	40,29	0	40,13	0	40,03	0	40,03	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan permukiman yang tertata	Persen	Luas kawasan permukiman yang tertata / Total Luasan Kawasan Permukiman X 100%	65,20	66,70	480.000.000	67,80	75.000.000	69,05	75.750.000	69,30	76.507.500	69,65	77.272.575	69,90	78.045.301	69,90	Dinas Perumahan KPP
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	Persen	Luas Kawasan kumuh yang ditangani / Total Luas Kawasan Kumuh X 100%	75,20	77,70		80,20	490.000.000	82,70	494.900.000	85,20	499.849.000	87,70	504.847.490	90,20	509.895.965	90,20	Dinas Perumahan KPP
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) / Total Luas permukiman X 100%	Persen		65,20	67,70	306.500.000	68,95	550.000.000	70,20	555.500.000	71,45	561.055.000	72,70	566.665.550	73,95	572.332.206	73,95	Dinas Perumahan KPP
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.239.916.669		5.309.892.588		5.362.991.514		5.416.621.429		5.470.787.643		5.525.495.520	-	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan / Jumlah Perda dan Perkada X 100%	100,00	100,00	290.036.000	100,00	460.580.000	100,00	465.185.800	100,00	469.837.658	100,00	474.536.035	100,00	479.281.395	100,00	Satpol. PP, BPBD
	2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	Jumlah wilayah yang memiliki penyelenggaraan Tibumtranmas aktif / total wilayah desa kelurahan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	Jumlah Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana X Total Jumlah Potensi Bencana X 100%	100,00	100,00	929.898.300	100,00	839.000.000	100,00	847.390.000	100,00	855.863.900	100,00	864.422.539	100,00	873.066.764	100,00	BPBD
	2. Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana x Total jumlah Potensi Bencana X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	3. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	Jumlah Penanganan Tanggap Darurat Bencana / Total jumlah kejadian bencana X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
	4. Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	Jumlah Penanganan Pasca Bencana / Total jumlah kejadian bencana X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran X Total Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran X 100%	100,00	100,00	795.261.200	100,00	189.120.000	100,00	191.011.200	100,00	192.921.312	100,00	194.850.525	100,00	196.799.030	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	2. Persentase penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persen	Jumlah penanganan dan penyelesaian laporan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran / Jumlah laporan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.372.031.259		2.313.616.885		2.336.753.054		2.360.120.584		2.383.721.790		2.407.559.008	-	Dinas Sosial
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase PMKS Mandiri	Persen	Jumlah PMKS yang telah mandiri / Total PMKS yang mendapat intervensi Pembinaan X 100%	62,11	63,61	95.992.150	65,11	300.000.000	66,36	303.000.000	67,61	306.030.000	68,86	309.090.300	70,11	312.181.203	70,11	Dinas Sosial
	2. Persentase Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial	Persen	Jumlah Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial / Total Jumlah Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial X 100%	65,00	66,50		68,75		71,00	0	73,25	0	75,50	0	77,75	0	77,75	
	3. Persentase KAT yang terberdayakan	Persen	Jumlah Komunitas KAT yang telah diberdayakan / Jumlah total komunitas yang menjadi sasaran program X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persen	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya + Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya + Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya + Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya + Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / Total Jumlah PMKS X 100%	100,00	100,00	1.070.807.850	100,00	431.750.000	100,00	436.067.500	100,00	440.428.175	100,00	444.832.457	100,00	449.280.781	100,00	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Total jumlah penerima manfaat X 100%	100,00	100,00	0	100,00	305.000.000	100,00	308.050.000	100,00	311.130.500	100,00	314.241.805	100,00	317.384.223	100,00	Dinas Sosial



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi / Total jumlah penerima manfaat X 100%	75,82	78,32		80,82		83,32	0	85,82	0	88,32	0	90,82	0	90,82	
	3. Persentase keluarga prasejahtera yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	Jumlah keluarga prasejahtera yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial / Jumlah keluarga prasejahtera X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar / Jumlah total korban X 100%	100,00	100,00	0	100,00	130.050.000	100,00	131.350.500	100,00	132.664.005	100,00	133.990.645	100,00	135.330.552	100,00	Dinas Sosial
	2. Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen	Jumlah Korban yang mendapat layanan pemulihan sosial / Jumlah total korban X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persen	Jumlah Layanan Taman Makam Pahlawan / Jumlah Taman Makam Pahlawan X 100%	100,00	100,00	56.470.840	100,00	56.470.840		57.035.548		57.605.904		58.181.963		58.763.783	-	
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										0		0		0		0	-	
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.616.585.800		2.469.291.065		2.493.983.976		2.518.923.815		2.544.113.054		2.569.554.184	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase capaian rencana tenaga kerja	Persen	Jumlah tenaga kerja yang terealisasi / Jumlah tenag kerja yang direncanakan X 100%	67,42	68,92	6.783.350	69,92	6.783.350	71,42	6.851.184	72,92	6.919.695	74,42	6.988.892	75,92	7.058.781	75,92	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja terlatih yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	Jumlah Tenaga Kerja terlatih yang Meningkatkan Produktivitasnya / Jumlah Tenaga kerja terlatih X 100%	82,50	84,00	764.192.240	84,50	764.192.240	84,75	771.834.162	85,10	779.552.504	85,45	787.348.029	85,80	795.221.509	85,80	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat yang bekerja	Persen	Jumlah tenaga kerja bersertifikat yang bekerja / Total Jumlah tenaga kerja bersertifikat X 100%	86,71	88,21	21.172.750	88,71	21.172.750	88,96	21.384.478	89,31	21.598.322	89,66	21.814.305	90,01	22.032.449	90,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial / Total Jumlah pekerja pada perusahaan X 100%	76,71	78,21	26.339.500	78,71	26.339.500	78,96	26.602.895	79,31	26.868.924	79,66	27.137.613	80,01	27.408.989	80,01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.031.905.699		1.981.677.197		2.001.493.969		2.021.508.909		2.041.723.998		2.062.141.238	-	Dinas P3A
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	Jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja / Total angkatan kerja perempuan X 100%	97,23	97,26	221.881.237	97,28	162.000.000	97,31	163.620.000	97,34	165.256.200	97,37	166.908.762	97,40	168.577.850	97,40	Dinas P3A
	2. Persentase lembaga pemerintah/swasta yang responsif gender	Persen	Jumlah lembaga pemerintah/swasta yang responsif gender / Total jumlah lembaga pemerintah/swasta X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO X 100%	85,71	88,21	63.220.200	90,71	60.000.000	92,21	60.600.000	93,71	61.206.000	95,21	61.818.060	96,71	62.436.241	96,71	Dinas P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	Jumlah keluarga yang mendapat layanan Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar / Jumlah keluarga yang mendapat layanan Pembelajaran X 100%	82,61	83,51	173.032.213	85,11	96.224.699	86,21	97.186.946	87,61	98.158.815	89,71	99.140.404	90,71	100.131.808	90,71	Dinas P3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Poin	Indeks Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian PPPA	65,23	66,48	161.833.400	67,68	160.000.000	68,88	161.600.000	69,98	163.216.000	71,18	164.848.160	72,28	166.496.642	72,28	Dinas P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif / Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus X 100%	100,00	100,00	116.032.950	100,00	110.000.000	100,00	111.100.000	100,00	112.211.000	100,00	113.333.110	100,00	114.466.441	100,00	Dinas P3A
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	Indeks Perlindungan Anak (IPA) dari Kementerian PPPA	48,00	49,50		51,00		52,50	0	54,00	0	55,50	0	57,00	0	57,00	Dinas P3A
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.499.773.317		2.211.529.428		2.233.644.722		2.255.981.170		2.278.540.981		2.301.326.391	-	Dinas Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	Jumlah Cadangan Pangan / Total Kebutuhan Pangan X 100%			-		20.000.000		20.200.000		20.402.000		20.606.020		20.812.080	-	Dinas Pangan



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	Skor Pola Pangan Harapan	81,05	81,59	0	82,44	135.000.000	82,89	136.350.000	83,43	137.713.500	84,37	139.090.635	85,81	140.481.541	85,81	Dinas Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase desa/kel rawan pangan	Persen	Jumlah Desa dan Kel Rawan Pangan / Total Jumlah Desa dan Kelurahan X 100%	52,00	50,50	0	49,25	33.000.000	48,00	33.330.000	46,75	33.663.300	45,75	33.999.933	45,00	34.339.932	45,00	Dinas Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	Jumlah Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan / Total Pangan segar X 100%	73,47	74,97	0	75,47	135.000.000	75,97	136.350.000	76,47	137.713.500	76,97	139.090.635	77,47	140.481.541	77,47	Dinas Pangan
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	Jumlah penggantian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang dibayarkan / Total Besar ganti rugi X 100%	65,20	67,70	2.655.000.000	70,20	2.200.000.000	72,70	2.222.000.000	75,20	2.244.220.000	77,70	2.266.662.200	80,20	2.289.328.822	80,20	Dinas Perumahan KPP
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.308.463.059		3.234.292.478		3.266.635.403		3.299.301.757		3.332.294.774		3.365.617.722	-	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Rekomendasi Kajian LH yang ditindaklanjuti / Total jumlah rekomendasi kajian LH X 100%	100,00	100,00	249.991.590	100,00					300.000.000		0		300.000.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air	Poin	Hasil Pengukuran Kualitas Air	50,00	52,73	29.364.050	55,73	60.000.000	57,93	60.600.000	58,03	61.206.000	58,13	61.818.060	58,23	62.436.241	58,23	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Indeks Kualitas Udara	Poin	Hasil Pengukuran Kualitas Udara	91,10	91,19		91,29		91,35	0	91,46	0	91,51	0	91,62	0		
	3. Indeks tutupan lahan	Poin	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	69,01	69,56		69,92		70,05	0	70,25	0	70,32	0	70,45	0	70,45	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	Jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau / Total Luas lahan X 100%	32,59	32,64	4.384.200	32,94	57.000.000	33,25	57.570.000	34,39	58.145.700	35,25	58.727.157	36,31	59.314.429	36,31	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	Persen	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH / Total jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memerlukan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH X 100%	40,00	45,00	0	50,00	20.000.000	55,00	20.200.000	60,00	20.402.000	65,00	20.606.020	70,00	20.812.080	70,00	Dinas Lingkungan Hidup



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkunan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya / Total jumlah penyuluh lingkungan hidup X 100%	56,25	56,50	6.030.000	56,80	0	57,10	0	57,40	0	57,70	0	58,00	0	58,00	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah tertangani	Persen	Volume sampah perkotaan yang tertangani / Total Volume sampah perkotaan X 100%	38,02	39,27	1.508.240.000	40,42	1.500.000.000	41,57	1.515.000.000	42,72	1.530.150.000	43,87	1.545.451.500	45,02	1.560.906.015	45,02	Dinas Lingkungan Hidup
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.873.030.457		2.661.476.344		2.688.091.107		2.714.972.019		2.742.121.739		2.769.542.956	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	Jumlah Pemilik Identitas kependudukan Digital / Total Jumlah Penduduk X 100%	78,28	81,38	0	82,48		84,98	50.000.000	87,08	50.500.000	89,58	51.005.000	92,28	51.515.050	92,28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	Jumlah Anak yang memiliki Kartu Identitas / Total Jumlah Penduduk Anak X 100%							0		0		0		0		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan / Jumlah Laporan Kematian X 100%	100,00	100,00	442.000.000	100,00	442.000.000	100,00	446.420.000	100,00	450.884.200	100,00	455.393.042	100,00	459.946.972	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan / Jumlah laporan kelahiran X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Jumlah Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan / Jumlah Laporan perkawinan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	Jumlah Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan / Jumlah kasus perceraian X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	Jumlah Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan / Total jumlah informasi kependudukan X 100%	100,00	100,00	0	100,00		100,00	50.000.000	100,00	50.500.000	100,00	51.005.000	100,00	51.515.050	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	Jumlah Profil Kependudukan yang dikelola / total jumlah profil kependudukan X 100%	100,00	100,00	0	100,00		100,00	50.000.000	100,00	50.500.000	100,00	51.005.000	100,00	51.515.050	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.173.270.165		3.913.237.325		3.952.369.698		3.991.893.395		4.031.812.329		4.072.130.452	-	Dinas PMD
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	Jumlah penataan Desa yang difasilitasi / Total jumlah Desa X 100%	100,00	100,00	0	100,00	450.270.400	100,00	454.773.104	100,00	459.320.835	100,00	463.914.043	100,00	468.553.184	100,00	Dinas PMD
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi / Total jumlah Desa X 100%	100,00	100,00		100,00	50.000.000	100,00	50.500.000	100,00	51.005.000	100,00	51.515.050	100,00	52.030.201	100,00	Dinas PMD
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya / Total jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD X 100%	58,65	61,15	1.300.000.000	62,65	350.000.000	64,15	353.500.000	65,65	357.035.000	67,15	360.605.350	68,65	364.211.404	68,65	Dinas PMD
	2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	Jumlah Desa yang difasilitasi tata kelolanya / Total Jumlah Desa X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) / Total Jumlah Desa X 100%	Persen	Jumlah Desa yang difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) / Total Jumlah Desa X 100%	45,00	47,50	1.494.000.000	50,00	1.220.000.000	52,50	1.232.200.000	55,00	1.244.522.000	57,50	1.256.967.220	60,00	1.269.536.892	60,00	Dinas PMD
	2.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	Jumlah Desa yang difasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat / Total Jumlah Desa X 100%	35,20	37,70		40,20		42,70	0	45,20	0	47,70	0	50,20	0	50,20	
8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.655.981.752		2.730.420.333		2.757.724.536		2.785.301.782		2.813.154.800		2.841.286.348	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Persen	Jumlah kelahiran / Populasi rata-rata X 1000	2,68	2,12	422.335.500	2,12	434.600.000	2,11	438.946.000	2,11	443.335.460	2,10	447.768.815	2,10	452.246.503	2,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
	2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15-19)	Persen	Jumlah kelahiran hidup usia 15-19 tahun / Jumlah perempuan usia 15-19 tahun X 1000	32,70	32,67		32,64		32,61	0	32,58	0	32,55	0	32,52	0	32,52	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive</i> (mCPR)	Persen	Jumlah wanita 15-49 tahun yang memakai kontrasepsi modern / Total Pasangan Usia Subur X 100%	45,63	47,13	4.616.127.000	49,63	4.411.145.623	52,13	4.455.257.079	54,63	4.499.809.650	57,13	4.544.807.747	59,63	4.590.255.824	59,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Persen	Jumlah wanita (PUS) dengan <i>Unmet Need</i> / Total Wanita usia subur X 100%	63,21	63,73		64,25		64,77	0	65,29	0	65,81	0	66,33	0	66,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga / Total jumlah keluarga X 100%	62,65	65,15	1.216.600.000	67,65	1.276.600.000	70,15	1.289.366.000	72,65	1.302.259.660	75,15	1.315.282.257	77,65	1.328.435.079	77,65	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.610.861.338		3.331.704.444		3.365.021.488		3.398.671.703		3.432.658.420		3.466.985.005	-	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Cakupan layanan transportasi darat	Persen	Jumlah Desa Kelurahan yang terlayani transportasi darat / Total Jumlah Desa X 100 %	82,50	83,25	270.040.000	84,35	400.961.000	84,85	404.970.610	85,60	409.020.316	85,95	413.110.519	86,30	417.241.624	86,30	Dinas Perhubungan
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	Panjang Jalan yang telah Terpasang kelengkapan jalan / Panjang jalan ideal yang dibutuhkan X 100%	38,56	38,76		39,51		40,26	0	41,26	0	42,51	0	44,26	0	44,26	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1. Persentase angkutan laut yang memenuhi standar keselamatan	Persen	Jumlah angkutan laut yang memenuhi standar keselamatan / Total jumlah angkutan laut X 100%	47,38	49,88	62.561.300	52,38	0	54,88	0	57,38	0	59,88	0	62,38	0	62,38	Dinas Perhubungan
	2. Persentase Pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik	Persen	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik / Total jumlah Pelabuhan pengumpan lokal X 100%	68,42	68,42		68,67		68,92	0	69,17	0	69,42	0	69,67	0	69,67	Dinas Perhubungan
10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.960.365.974		2.909.270.941		2.938.363.650		2.967.747.287		2.997.424.760		3.027.399.007	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	Hasil Survey Tingkat Kepuasan masyarakat	68,50	71,00	106.923.529	73,50	127.000.000	76,00	128.270.000	78,50	129.552.700	81,00	130.848.227	83,50	132.156.709	83,50	Dinas Komunikasi dan Informatika



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Indeks dari Kementerian PAN dan RB	2,19	2,28	0	2,43	75.000.000	2,48	75.750.000	2,57	76.507.500	2,72	77.272.575	2,82	78.045.301	2,82	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2. Persentase OPD yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>e government</i>)	Persen	Jumlah OPD yang menerapkan aplikasi dalam pelaksanaan bidang urusan / Total Jumlah OPD X 100%	55,30	57,80		60,30		62,80	0	65,30	0	67,80	0	70,30	0	70,30	Dinas Komunikasi dan Informatika
11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.948.294.477		1.948.576.254		1.968.062.017		1.987.742.637		2.007.620.063		2.027.696.264	-	Dinas Koperasi UKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	Jumlah Koperasi yang dilakukanPengawasan dan Pemeriksaan / Total Jumlah koperasi X 100%	42,04	42,94	56.436.150	48,44	25.000.000	53,94	25.250.000	59,44	25.502.500	64,64	25.757.525	68,14	26.015.100	68,14	Dinas Koperasi UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPI/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	Jumlah Koperasi Aktif / Total Jumlah Koperasi X 100%	100,00	100,00	1.600.000	100,00	25.000.000	100,00	25.250.000	100,00	25.502.500	100,00	25.757.525	100,00	26.015.100	100,00	Dinas Koperasi UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan / Total Jumlah Koperasi X 100%	100,00	100,00	3.200.000	100,00	25.000.000	100,00	25.250.000	100,00	25.502.500	100,00	25.757.525	100,00	26.015.100	100,00	Dinas Koperasi UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	Jumlah koperasi yang berkualitas tahun ini - Jumlah koperasi yang berkualitas tahun sebelumnya / Jumlah koperasi yang berkualitas tahun sebelumnya X 100%	42,65	45,15	26.003.650	47,65	25.000.000	50,15	25.250.000	52,65	25.502.500	55,15	25.757.525	57,65	26.015.100	57,65	Dinas Koperasi UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	Jumlah Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal / Total Jumlah usaha kecil X 100%	35,60	38,10	58.187.550	40,60	30.000.000	43,10	30.300.000	45,60	30.603.000	48,10	30.909.030	50,60	31.218.120	50,60	Dinas Koperasi UKM
	2.Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	Jumlah Wirausaha tahun ini - Jumlah wirausaha tahun sebelumnya / Jumlah wirausaha tahun sebelumnya X 100%	45,50	48,00		50,50		53,00	0	55,50	0	58,00	0	60,50	0	60,50	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	Jumlah UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor / Total Jumlah UMKM X 100%	57,60	60,10		62,60	30.000.000	65,10	30.300.000	67,60	30.603.000	70,10	30.909.030	72,60	31.218.120	72,60	Dinas Koperasi UKM
12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.993.787.749		1.771.023.682		1.788.733.919		1.806.621.258		1.824.687.471		1.842.934.345	-	Dinas PMPTSP



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Investasi terhadap Target Investasi	Rp. Milyar	Realisasi Total Invastasi Tahun ke-n	514,82	519,97	0	525,17		530,42	20.000.000	541,03	20.200.000	557,26	20.402.000	573,98	20.606.020	573,98	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	Jumlah Investor yang berinvestasi tahun ini - Jumlah Investor yang berinvestasi tahun sebelumnya / Jumlah Investor yang berinvestasi tahun sebelumnya X 100%	50,00	52,50	23.016.500	55,00	1.268.421.069.606	57,50	1.281.105.280.302	60,00	1.293.916.333.105	62,50	1.306.855.496.436	65,00	1.319.924.051.400	65,00	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengajukan Permohonan Perizinan / Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin X 100%	100,00	100,00	48.734.700	100,00	48.734.700	100,00	49.222.047	100,00	49.714.267	100,00	50.211.410	100,00	50.713.524	100,00	Dinas PMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	Jumlah Permasalahan yang sudah diselesaikan / Total Jumlah Permasalahan yang dihadapi X 100%	75,60	79,10	35.276.975	81,60	35.275.975	84,10	35.628.735	86,60	35.985.022	89,10	36.344.872	91,60	36.708.321	91,60	Dinas PMPTSP
13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.517.990.517		1.545.448.238		1.560.902.720		1.576.511.748		1.592.276.865		1.608.199.634	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda mandiri paska difasilitasi kemandiriannya	Persen	Jumlah pemuda mandiri setelah difasilitasi / Total jumlah pemuda yang difasilitasi X 100%	75,06	76,56	0	77,31	110.000.000	78,06	111.100.000	78,81	112.211.000	79,56	113.333.110	80,31	114.466.441	80,31	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	Persen	Jumlah Atlet Binaan yang berprestasi / Total Jumlah Atlet Binaan X 100%	62,07	62,37	899.612.100	62,72	700.000.000	63,37	707.000.000	64,02	714.070.000	64,67	721.210.700	65,32	728.422.807	65,32	Dinas Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Siswa dalam Kepramukaan	Persen	Jumlah Siswa SD dan SMP yang berpartisipasi dalam Kepramukaan / Total Jumlah Siswa SD dan SMP X 100%	39,62	42,12	100.000.000	44,62	65.000.000	46,12	65.650.000	47,62	66.306.500	49,12	66.969.565	50,62	67.639.261	50,62	
14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Indeks yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik	2,05	2,15	0	2,20	25.000.000	2,26	25.250.000	2,36	25.502.500	2,51	25.757.525	2,66	26.015.100	2,66	Dinas Komunikasi dan Informatika
15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	Jumlah aspek pengamanan yang siap / Jumlah total aspek pengamanan yang harus dipenuhi X 100%	45,60	47,10	93.422.000	48,90	30.000.000	50,70	30.300.000	52,50	30.603.000	54,30	30.909.030	56,10	31.218.120	56,10	Dinas Komunikasi dan Informatika



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.936.256.901		1.947.599.255		1.967.075.248		1.986.746.000		2.006.613.460		2.026.679.595	-	Dinas Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen		68,72	70,22	414.966.305	71,72	414.966.305	73,22	419.115.968	74,72	423.307.128	76,22	427.540.199	77,72	431.815.601	77,72	Dinas Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan / Total Jumlah warisan budaya X 100%	65,35	66,60	444.244.350	67,85	444.243.350	69,10	448.685.784	70,35	453.172.641	71,60	457.704.368	72,85	462.281.411	72,85	Dinas Kebudayaan
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan / Total jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda X 100%	65,40	66,60		67,85		69,10	0	70,35	0	71,60	0	72,85	0	72,85	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	Jumlah wisatawan ke Museum / Total Jumlah wisatawan X 100%	35,26	36,51	640.624.535	39,01	630.624.535	41,51	636.930.780	44,01	643.300.088	46,51	649.733.089	49,01	656.230.420	49,01	
17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.029.388.667		1.885.976.098		1.904.835.859		1.923.884.218		1.943.123.060		1.962.554.290	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan Layanan Perpustakaan	Persen	((Jumlah kunjungan perpustakaan / Jumlah populasi yang harus dilayani) x 50 %) + ((Jumlah bahan pustaka / Jumlah target bahan pustaka) x 30%) + ((Jumlah perpustakaan terstandar / Jumlah perpustakaan seluruhnya)x 20%)	55,80	56,55	896.952.599	57,80	970.000.000	59,05	979.700.000	60,30	989.497.000	61,55	999.391.970	62,80	1.009.385.890	62,80	
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi dan Naskah Kuno yang Terlindungi/Terpelihara	Persen	Jumlah koleksi & naskah kuno yang terpelihara dengan baik / Total koleksi & naskah kuno yang teridentifikasi) x 100%	35,60	37,10	181.047.400	38,60	100.000.000	40,10	101.000.000	41,60	102.010.000	43,10	103.030.100	44,60	104.060.401	44,60	
18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang Mengelola Arsip Sesuai Standar Kearsipan	Persen	(Jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan / Total Jumlah OPD) X 100%	71,50	72,75	0	74,00		75,25	20.000.000	76,50	20.200.000	77,75	20.402.000	79,00	20.606.020	79,00	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan / Jumlah Total Arsip X 100%	75,60	77,10	0	78,35		78,85	20.000.000	79,35	20.200.000	79,85	20.402.000	80,35	20.606.020	80,35	
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										0		0		0		0	-	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.899.320.157		2.904.068.650		2.933.109.337		2.962.440.430		2.992.064.834		3.021.985.483	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Layang, Kakap, Tongkol, Cakalang, Tuna, Kerapu) pada Tahun ke-n	7.204,00	7.348,08	128.124.700	7.531,78	128.124.700	7.720,08	129.405.947	7.874,48	130.700.006	8.031,97	132.007.007	8.192,61	133.327.077	8.192,61	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Rumput Laut kering, Bandeng, Kulit Kerang Mutiara, Mutiara Biji, Garam) pada Tahun ke-n	713,19	720,32	657.875.300	727,52	592.873.300	734,80	598.802.033	742,15	604.790.053	749,57	610.837.954	757,06	616.946.333	757,06	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persen	Persentase temuan kasus pelanggaran penangkapan ikan di perairan umum + Persentase peningkatan Pokwasmas yang aktif) / 2	63,45	64,95		66,45		67,95	20.000.000	70,45	20.200.000	72,95	20.402.000	74,45	20.606.020	74,45	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasar ikan yang sesuai standar	Persen	((Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasar ikan yang melakukan usaha sesuai standar / Jumlah pelaku usaha pengolah dan pemasaran ikan) X 100%)	58,55	60,05	0	60,80	65.000.000	61,55	65.650.000	62,30	66.306.500	63,05	66.969.565	63,80	67.639.261	63,80	
2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.288.187.839		2.128.287.369		2.149.570.243		2.171.065.945		2.192.776.605		2.214.704.371	-	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persen	Jumlah Obyek Wisata dalam Kondisi baik / Jumlah Obyek Wisata X 100%	75,62	76,87	21.103.000	78,87	220.000.000	79,62	222.200.000	80,37	224.422.000	81,12	226.666.220	81,87	228.932.882	81,87	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Persen	Jumlah Kunjungan Wisata / Jumlah Target Kunjungan Wisata X 100%	67,58	68,83	9.892.000	70,58	113.000.000	72,33	114.130.000	74,08	115.271.300	75,83	116.424.013	77,58	117.588.253	77,58	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persen	((Jumlah Desa Wisata / Jumlah target desa wisata) x 25 %) + (Jumlah SDM terlatih / Jumlah Target SDM Terlatih) x 50%) + (Jumlah usaha ekonomi kreatif terfasilitasi / Jumlah target usaha ekonomi kreatif terfasilitasi x 25%)	61,57	63,32	571.000.000	64,57	260.000.000	65,82	262.600.000	67,07	265.226.000	68,32	267.878.260	69,57	270.557.043	69,57	
										0		0		0		0	-	
3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										0		0		0		0	-	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.118.317.926		14.977.839.234		15.127.617.626		15.278.893.803		15.431.682.741		15.585.999.568	-	Dinas Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	Jumlah Produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan) tahun ini - Jumlah produksi tanaman pangan tahun sebelumnya / Jumlah produksi tanaman pangan tahun sebelumnya X 100%	4,23	4,31	107.457.400	4,40	185.764.010	4,48	187.621.650	4,57	189.497.867	4,67	191.392.845	4,76	193.306.774	4,76	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan
	2. Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	Jumlah Produksi hortikultura tahun ini - Jumlah produksi hortikultura tahun sebelumnya / Jumlah produksi hortikultura tahun sebelumnya X 100%	5,16	5,37		5,63		5,86	0	6,09	0	6,34	0	6,59	0	6,59	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan
	3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	Jumlah Produksi komoditas peternakan tahun ini - Jumlah produksi komoditas peternakan tahun sebelumnya / Jumlah produksi komoditas peternakan tahun sebelumnya X 100%	3,35	3,48		3,66		3,84	0	4,03	0	4,23	0	4,45	0	4,45	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan
	4. Persentase kelompok dengan kelengkapan sarana pertanian dalam kondisi layak Pakai	Persen	Jumlah kelompok dengan kelengkapan sarana pertanian dalam kondisi layak Pakai / Total jumlah kelompok pertanian X 100%	73,44	74,19		75,39		76,59	0	77,79	0	78,99	0	80,19	0	80,19	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persen	(Persentase ketersediaan jaringan irigasi kondisi baik + persentase ketersediaan Jalan pertanian kondisi baik)/2	65,20	65,95	0	66,45	1.430.000.000	66,95	1.444.300.000	67,45	1.458.743.000	67,95	1.473.330.430	68,45	1.488.063.734	68,45	Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	Jumlah PMHS yang teratasi / Total Jumlah PMHS yang ditemukan X 100%	78,20	79,05	65.624.000	80,05	120.000.000	80,80	121.200.000	81,55	122.412.000	82,30	123.636.120	83,05	124.872.481	83,05	Dinas Peternakan
	2. Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persen	Jumlah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tertangani / Jumlah kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terjadi X 100%	85,05	86,30		88,05		89,80	0	91,55	0	93,30	0	95,05	0	95,05	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	Jumlah Bencana Pertanian yang tertangani / Total Jumlah Bencana Pertanian X 100%	80,50	81,70	449.145.000	84,20	200.000.000	86,70	202.000.000	89,20	204.020.000	91,70	206.060.200	94,20	208.120.802	94,20	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persen	Jumlah Penyuluh pertanian yang mengikuti peningkatan kapasitas / Total Jumlah Penyuluh Pertanian X 100%	82,60	83,85	3.120.000.000	85,08	489.378.991	86,31	494.272.781	87,54	499.215.509	88,77	504.207.664	90,00	509.249.740	90,00	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
	2. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas	Persen	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan peningkatan kompetensi / Total jumlah kelompok tani X 100%	86,25	87,45		88,20		89,45	0	90,70	0	91,95	0	93,20	0	93,20	
4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.909.526.013		2.542.981.875		2.568.411.694		2.594.095.811		2.620.036.769		2.646.237.136	-	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Persen	(Jumlah sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya / Jumlah total sarana perdagangan yang ada) x 100%	75,68	77,18	51.100.000	78,43	250.000.000	79,68	252.500.000	80,93	255.025.000	82,18	257.575.250	83,43	260.151.003	83,43	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	(Jumlah komoditas Bapokting yang harganya stabil / Jumlah total komoditas Bapokting yang dipantau) x 100%	85,61	87,71	69.965.000	89,46	55.000.000	91,21	55.550.000	92,96	56.105.500	94,71	56.666.555	96,46	57.233.221	96,46	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelaku usaha tertib ukur	Persen	Jumlah sarana pelaku usaha yang dilakukan tera ulang / Jumlah sarana pelaku usaha yang seharusnya ditera ulang X 100%	80,21	82,31	47.671.000	84,06	75.000.000	85,81	75.750.000	87,56	76.507.500	89,31	77.272.575	91,06	78.045.301	91,06	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	Jumlah Produk dalam negeri yang digunakan / Total penggunaan produk X 100%	85,60	86,85	30.200.851	88,95	50.000.000	91,05	50.500.000	92,30	51.005.000	93,40	51.515.050	94,50	52.030.201	94,50	
5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.269.515.362		2.192.869.218		2.214.797.910		2.236.945.889		2.259.315.348		2.281.908.502	-	Dinas Perindustrian
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	Persen	Jumlah Investasi sektor industri dalam Perencanaan / target investasi X 100%	82,25	83,50	209.682.350	84,80	209.682.350	86,10	211.779.174	87,40	213.896.965	88,50	216.035.935	89,60	218.196.294	89,60	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	Jumlah IUI yang diterbitkan / Jumlah permohonan IUI yang diterima X 100%	83,30	85,40	4.277.300	86,65	4.277.300	87,90	4.320.073	89,15	4.363.274	90,40	4.406.906	91,50	4.450.976	91,50	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang secara aktif dan rutin melaporkan datanya melalui SIINas sesuai ketentuan perundang-undangan.	Persen	Jumlah perusahaan industri yang melaporkan data / Jumlah perusahaan industri yang wajib lapor X 100%	85,21	86,41	11.834.481	86,99	11.834.481	87,12	11.952.826	87,97	12.072.354	88,82	12.193.078	89,67	12.315.008	89,67	
6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										0		0		0		0	-	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Memiliki Dokumen Perencanaan yang Terintegrasi dan Terverifikasi	Persen	(Jumlah kawasan transmigrasi dengan dokumen lengkap dan terverifikasi / Total kawasan transmigrasi yang direncanakan) x 100%	75,00	77,50		79,00		80,50	20.000.000	82,00	20.200.000	83,50	20.402.000	85,00	20.606.020	85,00	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	Persen	Lokasi kawasan transmigrasi yang difasilitasi / total lokasi kawasan transmigrasi X 100%	80,21	82,31	26.441.550	83,61	26.441.550	84,91	26.705.966	86,21	26.973.025	87,51	27.242.755	88,81	27.515.183	88,81	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persen	Luas kawasan transmigrasi yang berkembang / total luas kawasan transmigrasi X 100%	70,25	72,35	13.477.050	73,55	13.477.050	74,75	13.611.821	75,95	13.747.939	77,15	13.885.418	78,35	14.024.272	78,35	
										0		0		0		0		
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										0		0		0		0	-	
1. SEKRETARIAT DAERAH										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase pelayanan terhadap KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	Persen	Jumlah Permintaan yang Terlayani / Jumlah Permintaan Masuk X 100%	100,00	100,00	16.206.828.556	100,00	18.067.530.869	100,00	18.248.206.178	100,00	18.430.688.239	100,00	18.614.995.122	100,00	18.801.145.073	100,00	Bagian Umum
	3. Indeks Kematangan Organisasi	Poin	Jumlah nilai aktual komponen IKO / Nilai maksimum yang mungkin X 100%	72,60	72,75		72,96		73,37	0	73,68	0	74,09	0	74,59	0	74,59	Bagian Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.117.797.202		2.408.634.960		2.432.721.310		2.457.048.523		2.481.619.008		2.506.435.198	-	Bagian Kesra
	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	Nlai Evaluasi LPPD dari Kementerian Dalam Negeri	2,95	3,03		3,08		3,16	0	3,28	0	3,40	0	3,52	0	3,52	Bagian Tatapem
	2. Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	Persen								0		0		0		0		
	3. Cakupan layanan dukungan pelaksanaan tugas KDH/WKDH	Persen	Jumlah layanan dukungan yang dibutuhkan / Jumlah layanan dukungan yang disediakan x100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bagian Protokol KP
	4. Indeks reformasi hukum	Poin	Indeks dari Kementerian Hukum	67,88	68,08		68,23		68,38	0	68,53	0	68,78	0	69,03	0	69,03	Bagian Hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						675.385.400		685.117.000		691.968.170		698.887.852		705.876.730		712.935.498	-	
	1. Capaian pelaksanaan program pembangunan fisik daerah	Persen	50% X (Total Realisasi Fisik / Total Target Fisik) + 50% X (Total Realisasi Keuangan / Total Anggaran)	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bagian Adm. Pembangunan
	2. Persentase cakupan kebijakan substansi bidang SDA yang terkonsolidasi dengan baik	Persen	Jumlah kebijakan Bidang SDA yang terkonsolidasi / Total kebijakan substansi bidang SDA yang relevan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bagian SDA



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
	4. Persentase cakupan kebijakan substansi bidang Perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	Persen	Jumlah kebijakan Bidang Perekonomian yang terkonsolidasi / Total kebijakan substansi bidang Perekonomian yang relevan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bagian Ekonomi
	5. Cakupan pengadaan barang dan jasa sesuai standar pengadaan	Persen	Nilai atau jumlah paket pengadaan sesuai standar / Total nilai atau jumlah seluruh pengadaan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bagian PBJ
2. SEKRETARIAT DPRD										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.060.771.647		19.149.565.140		19.341.060.791		19.534.471.399		19.729.816.113		19.927.114.274	-	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						7.210.694.628		4.247.694.628		4.290.171.574		4.333.073.290		4.376.404.023		4.420.168.063	-	
	1. Persentase ketepatan Penetapan Perda APBD	Persen	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu / Total Jumlah Perda APBD X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Sekretariat Daerah
	2. Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	Jumlah objek pengawasan yang telah diawasi / Jumlah seluruh objek pengawasan yang direncanakan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Sekretariat Daerah
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										0		0		0		0	-	
1. PERENCANAAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.852.661.381		2.899.110.949		2.928.102.058		2.957.383.079		2.986.956.910		3.016.826.479	-	Bappelitbang
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	Jumlah program/kegiatan RKPD yang selaras dengan RPJMD / Total Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD X 100%	100,00	100,00	1.188.016.000	100,00	927.090.400	100,00	936.361.304	100,00	945.724.917	100,00	955.182.166	100,00	964.733.988	100,00	Bappelitbang
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	Jumlah program/kegiatan Renstra yang selaras dengan RPJMD / Total Jumlah Program/Kegiatan dalam Renstra X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bappelitbang
	3. Persentase rekomendasi hasil evaluasi perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti / Total Jumlah rekomendasi hasil evaluasi perencanaan pembangunan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bappelitbang
	4. Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Persen	Jumlah dokumen perencanaan Daerah (RKPD dan RPJMD) yang disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD) X 100	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Bappelitbang



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						974.885.466		1.098.031.779		1.109.012.097		1.120.102.218		1.131.303.240		1.142.616.272	-	
	1. Persentase program kegiatan daerah yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi	Persen	Jumlah program kegiatan daerah dalam RKPD yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi / Total Jumlah Program Kegiatan dalam RKPD X 100%	na	79,30		80,00		84,00	0	88,00	0	92,00	0	96,00	0	96,00	
	2. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas baik	Persen	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah berkualitas baik / Jumlah Perangkat Daerah X 100%	na	79,30		80,00		84,00	0	88,00	0	92,00	0	96,00	0	96,00	
2. KEUANGAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						96.992.162.640		157.993.575.543		159.573.511.298		161.169.246.411		162.780.938.876		164.408.748.264	-	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	Jumlah Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD / Total Belanja Daerah X 100%			228.582.338.964		239.664.930.564		242.061.579.870		244.482.195.668		246.927.017.625		249.396.287.801	-	
	2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	Jumlah Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total Belanja Daerah X 100%							0		0		0		0		
	3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar / Target Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar X 100%	82,50	84,00		86,50		87,60	0	89,60	0	90,70	0	91,70	0	91,70	
	4. Persentase Penurunan SILPA	Persen	Silpa Tahun sebelumnya - Silpa Tahun Berjalan / Silpa tahun sebelumnya X 100%	14,90	11,40		8,40		6,40	0	4,90	0	3,40	0	1,30	0	1,30	
	5. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP		WTP		WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	0	WTP	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	Nilai aset tetap tahun berjalan – Nilai aset tetap tahun sebelumnya / Nilai aset tetap tahun berjalan X 100%			484.228.400		948.710.300		958.197.403		967.779.377		977.457.171		987.231.743	-	
	2. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan memiliki bukti kepemilikan yang sah	Persen	Jumlah BMD yang dalam kondisi baik dan memiliki bukti kepemilikan sah / Jumlah seluruh BMD yang tercatat X 100%	65,65	68,15		69,65		71,15	0	72,25	0	73,25	0	74,45	0	74,45	BKAD, Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	Jumlah Realisasi PAD / Total Realisasi Pendapatan Daerah X 100%	5,50	5,55	33.429.000	5,61	33.429.000	5,67	33.763.290	5,73	34.100.923	5,81	34.441.932	5,90	34.786.351	5,90	Badan Pendapatan Daerah



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
	2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	Jumlah unit pengelola pendapatan yang dibina dan diawasi / Jumlah seluruh unit pengelola pendapatan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
	3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis Digital	Persen	Jumlah unit kerja pengelola pendapatan yang telah menerapkan sistem informasi digital / Jumlah seluruh unit kerja yang mengelola pendapatan X100%	15,79	15,79		26,32		36,84	0	42,11	0	52,63	0	57,89	0	57,89	
3. KEPEGAWAIAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.129.625.780		3.198.972.599		3.230.962.325		3.263.271.948		3.295.904.668		3.328.863.714	-	BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	Jumlah jabatan yang terisi oleh pegawai sesuai kualifikasi dan kompetensi Jumlah seluruh jabatan yang ada X 100%	80,65	82,15	1.392.871.392	84,65	1.442.871.391	87,15	1.457.300.105	89,65	1.471.873.106	92,15	1.486.591.837	94,65	1.501.457.755	94,65	
	2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya / Total Jumlah ASN X 100%	52,60	54,10		55,20		56,70	0	58,20	0	59,70	0	61,20	0	61,20	
	3. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	Jumlah Pegawai dengan SKP Bernilai Baik / Total Jumlah Pegawai X 100%	85,20	86,40		87,20		88,00	0	89,10	0	90,60	0	91,70	0	91,70	
	4. Indeks Profesional Aparatur	Poin	$\frac{\sum(\text{Skor aspek profesionalisme} \times \text{Bobot aspek})}{\sum \text{Bobot Aspek}} \times 100$	88,80	89,80		90,30		91,80	0	93,30	0	94,80	0	96,30	0	96,30	BKPSDM
										0		0		0		0	-	
4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan dalam kebijakan daerah	Persen	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diimplementasikan dalam kebijakan daerah / Total Jumlah Penelitian dan Pengembangan X 100	80,00	83,33	501.594.200	85,71	50.000.000	87,50	50.500.000	87,50	51.005.000	87,50	51.515.050	87,50	52.030.201	87,50	Bappelitbang
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase inovasi daerah yang difasilitasi penerapannya	Persen	Jumlah Inovasi Daerah yang difasilitasi Pengembangan / Total Jumlah Inovasi Daerah X 100	Na	100,00	0	100,00	150.000.000	100,00	151.500.000	100,00	153.015.000	100,00	154.545.150	100,00	156.090.602	100,00	Bappelitbang
										0		0		0		0		
5. PENGELOLAAN PERBATASAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.790.876.824		1.840.206.501		1.858.608.566		1.877.194.652		1.895.966.598		1.914.926.264	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Persen	Jumlah kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi yang terlaksana / Jumlah Target kegiatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pengelolaan Perbatasan X 100%	85,00	86,50	51.734.400	88,00	73.000.000	89,20	73.730.000	90,30	74.467.300	91,40	75.211.973	92,50	75.964.093	92,50	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										0		0		0		0	-	
1. INSPEKTORAT DAERAH										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.285.262.938		3.222.774.370		3.255.002.114		3.287.552.135		3.320.427.656		3.353.631.933	-	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Jumlah rekomendasi BPK tahun N-1 yang telah ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh rekomendasi BPK tahun N-1 X 100%	92,00	95,00	1.132.789.684	100,00	1.297.561.123	100,00	1.310.536.734	100,00	1.323.642.102	100,00	1.336.878.523	100,00	1.350.247.308	100,00	
	2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1	Persen	Jumlah Rekomendasi APIP Tahun Anggaran N-1 yang telah ditindaklanjuti / Jumlah seluruh rekomendasi APIP tahun N-1 X 100%	86,15	88,65		90,95		93,15	0	95,25	0	97,35	0	100,00	0	100,00	Inspektorat Daerah
	3. Persentase Peningkatan Nilai AKIP Pemerintah daerah	Poin	Nilai AKIP periode berjalan–Nilai AKIP periode sebelumnya / Nilai AKIP periode sebelumnya X 100%	60,11	62,21		62,36		62,51	0	62,66	0	62,91	0	63,16	0	63,16	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	Jumlah (skor maturitas komponen penilaian ke-i X Bobot untuk komponen ke-i) / Jumlah Bobot komponen	2,855	2,870	247.008.500	2,895	302.000.000	2,960	305.020.000	3,020	308.070.200	3,085	311.150.902	3,147	314.262.411	3,147	Inspektorat Daerah
	2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Jumlah (skor Kapabilitas komponen penilaian ke-i X Bobot untuk komponen ke-i) / Jumlah Bobot komponen	2,00	3,00		3,00		3,00	0	3,00	0	3,00	0	3,00	0	3,00	Inspektorat Daerah
	3. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan reformasi birokrasi / Jumlah seluruh perangkat daerah X 100%	Persen	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan reformasi birokrasi / Jumlah seluruh perangkat daerah X 100%	36,17	44,17		54,17		66,17	0	81,17	0	96,17	0	100,00	0	100,00	Inspektorat Daerah
G. UNSUR KEWILAYAHAN										0		0		0		0	-	
1. KECAMATAN										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						34.865.857.553		33.696.967.409		34.033.937.083		34.374.276.454		34.718.019.218		35.065.199.411	-	18 Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						339.811.633		355.461.778		359.016.396		362.606.560		366.232.625		369.894.952	-	



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target			Anggaran (Rp)
	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	Jumlah urusan/layanan yang telah dilaksanakan / Jumlah urusan/layanan yang seharusnya dilaksanakan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	18 Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.484.897.800		3.484.284.500		3.519.127.345		3.554.318.618		3.589.861.805		3.625.760.423	-	
	Cakupan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	Persen	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan / Jumlah kegiatan pemberdayaan yang direncanakan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	18 Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						448.320.510		411.945.527		416.064.982		420.225.632		424.427.888		428.672.167	-	
	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	Jumlah kasus gangguan yang ditangani / Jumlah kasus gangguan yang terjadi X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	18 Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						202.966.951		213.626.870		215.763.139		217.920.770		220.099.978		222.300.978	-	18 Kecamatan
	Persentase wilayah yang aman dari kasus SARA, radikalisme, separatisme, terorisme/konflik sosial	Persen	Jumlah wilayah yang tidak mengalami kasus / Jumlah total wilayah yang dipantau X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						159.737.640		162.265.674		163.888.331		165.527.214		167.182.486		168.854.311	-	18 Kecamatan
	Persentase Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun	Persen	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun / Total jumlah Desa X 100%	40,51	37,01		33,51		29,01	0	25,51	0	22,01	0	18,51	0	18,51	
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										0		0		0		0	-	
I. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										0		0		0		0	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.503.928.031		3.204.509.216		3.236.554.308		3.268.919.851		3.301.609.050		3.334.625.140	-	Kesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						499.097.543		505.507.933		510.563.012		515.668.642		520.825.329		526.033.582	-	Kesbangpol
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	Jumlah program/kegiatan penguatan yang telah dilaksanakan / Jumlah program/kegiatan yang direncanakan X 100%	100,00	100,00		100,00		100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	0	100,00	Kesbangpol



Bidang Urusan/ Program	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						211.113.000		70.845.000		71.553.450		72.268.985		72.991.674		73.721.591	-	Kesbangpol
	Persentase Pendidikan politik pada Kader Partai Politik	Persen	Jumlah kader partai yang telah mengikut pendidikan politik / Jumlah kader partai yang menjadi sasaran X 100%	65,30	66,55		67,82		69,03	0	70,31	0	71,61	0	72,41	0	72,41	Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah total Ormas terdaftar X100%	86,60	86,85	26.176.500	87,60	31.177.000	88,45	31.488.770	89,20	31.803.658	90,30	32.121.694	91,40	32.442.911	91,40	Kesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase wilayah binaan yang tidak mengalami gangguan sosial (konflik, penyimpangan sosial, dll)	Persen	jumlah desa/kelurahan bebas konflik selama 1 tahun setelah dilakukan pembinaan sosial / Jumlah Desa yang telah dilakukan pembinaan sosial.	100,00	100,00	78.028.500	100,00	87.949.000	100,00	88.828.490	100,00	89.716.775	100,00	90.613.943	100,00	91.520.082	100,00	Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	Jumlah konflik sosial yang berhasil diselesaikan/ Jumlah total konflik sosial yang terjadi X 100%	100,00	100,00	306.618.300	100,00	290.427.000	100,00	293.331.270	100,00	296.264.583	100,00	299.227.229	100,00	302.219.501	100,00	Kesbangpol

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Alor, 2025

Gambaran program tahun 2030 secara eksplisit menggambarkan penyusunannya merupakan bagian dari mekanisme keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, yang sekaligus menjadi dasar pijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 sebagai masa transisi menuju periode kepemimpinan kepala daerah tahun 2030–2034.



4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Alor periode 2025–2029 secara terukur dan akuntabel, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi instrumen yang strategis dan krusial. IKU berperan sebagai alat ukur utama yang menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD. Penentuan IKU merupakan elemen strategis dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja. IKU berfungsi sebagai parameter utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus sebagai instrumen evaluatif dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

IKU yang disajikan merupakan indikator yang ditetapkan melalui proses yang sistematis dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria teknis, antara lain relevansi substansial terhadap tujuan dan sasaran strategis daerah, kesesuaian dengan kerangka logis pembangunan daerah, kesinambungan data, serta keterukuran dan ketercapaian target secara rasional dalam kerangka waktu perencanaan lima tahunan. Pemilihan indikator juga diselaraskan dengan indikator nasional dan indikator provinsi, guna menjamin konsistensi dan sinergitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Alor tahun 2025-2030 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama

No.	Idikator	Satuan	Baseline (2024)	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,70	68,21	68,79	69,37	69,98	70,61	71,27	
2	Persentase penduduk miskin	Persen	19,87	19,57	18,96	18,31	17,57	16,82	15,98	
3	Persentase penduduk miskin ekstrem	Persen	2,79	2,64	2,39	2,04	1,49	0,94	0	
4	Pertumbuhan PDRB ADHK	Persen	4,24	4,47	4,74	5,07	5,45	5,83	6,16	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,27	2,23	2,22	2,21	2,19	2,17	2,16	
6	Prevalensi stunting SKI	Persen	37,40	34,80	33,60	32,30	31,00	29,80	26,12	
7	Indeks Gini	Poin	0,320	0,317	0,315	0,310	0,306	0,318	0,303	
8	Nilai Evaluasi AKIP	Poin	60,11	60,46	61,06	62,26	63,51	64,76	66,01	
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	60,60	62,10	63,60	65,10	66,60	68,35	70,15	
10	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5,62	5,03	5,05	5,09	5,13	5,23	5,31	
11	Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,81	72,78	72,91	73,03	73,16	73,28	73,42	
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	128,21	125,71	122,21	117,71	114,21	109,71	105,21	
14	Indeks Pembangunan Infrastruktur Daerah	Poin	63,5	64	64,35	64,7	65,1	65,55	65,85	
15	Indeks Reformasi Hukum	Poin	67,88	69,13	70,38	71,63	72,88	74,13	75,38	

Sumber: Bappelitbang Kab. Alor, 2025

Penetapan target kinerja untuk setiap IKU dilakukan berdasarkan proyeksi capaian kinerja historis, baseline data tahun terakhir RPJMD periode sebelumnya, serta tren sektoral dan fiskal yang dihimpun dari berbagai sumber relevan, termasuk hasil kajian teknokratik. Penetapan target juga memperhitungkan faktor-faktor kontekstual, seperti dinamika sosial ekonomi daerah, kapasitas fiskal, dan risiko pembangunan, guna menghasilkan target yang bersifat realistis dan dapat diimplementasikan.

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Alor menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen utama pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berdaya saing, adaptif, dan akuntabel, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi komponen esensial dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan jangka menengah. IKD berfungsi sebagai parameter utama dalam mengukur kinerja institusional Pemerintah Daerah, khususnya dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, manajemen birokrasi, serta efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.



Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Alor tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
A	INDIKATOR KINERJA DAERAH					2027	2028			
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	63,81	65,855	67,3	67,745	68,29	69,735	71,18	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	13,46	14,21	13,71	13,21	12,56	11,96	11,31	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	81,05	81,11	81,57	82,13	82,39	82,74	82,9	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen RT	0	0	0	0	15,00	17,50	20,00	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persen RT	85,83	86,5	87,7	88,7	89,2	90,7	92,2	
6	Persentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum layak	Persen	60,16	60,51	60,86	61,36	62,01	62,51	63,01	
7	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	15,36	16,86	18,36	19,86	21,36	22,86	24,36	
8	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,13	98,18	98,34	98,48	98,64	98,81	98,93	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	70,81	72,78	72,91	73,03	73,16	73,28	73,42	
10	Volume sampah perkotaan tertangani	M3	12.480	14.352	16.224	18.096	19.968	21.840	23.712	
10	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,56	0,6	0,62	0,64	0,69	0,75	
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,57	1,57	1,55	1,53	1,53	1,51	1,50	
12	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	77	78	79	80	82	83	84	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,24	4,47	4,74	5,07	5,45	5,83	6,16	
2	Persentase penduduk miskin	Persen	19,87	19,57	18,96	18,31	17,57	16,82	15,98	
3	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	7,806	8.010	8.219	8.429	8.642	8.861	9.084	
4	PDRB Perkapita	Rp. Juta	10,16	10,34	10,48	10,66	10,82	11,08	11,27	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,27	2,23	2,22	2,21	2,19	2,17	2,16	
6	Indeks Gini	Poin	0,320	0,317	0,315	0,310	0,306	0,318	0,303	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	70,88	71,12	71,37	71,62	71,88	72,14	72,40	
8	Prevalensi Stunting SKI	Persen	37,40	36,20	33,90	31,70	29,60	27,70	25,90	
9	Angka Buta Huruf	Persen	2,75	2,71	2,66	2,61	2,56	2,51	2,46	
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,48	12,53	12,59	12,65	12,72	12,79	12,86	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,61	8,64	8,68	8,72	8,77	8,81	8,85	
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	29,48	32,98	37,48	39,98	43,48	46,98	50,48	
15	Indeks Masyarakat Digital	Poin	39,64	40,39	40,89	42,64	44,14	46,14	46,64	
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	21,92	24,42	26,92	29,42	31,92	34,42	36,92	
17	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	84,25	84,70	85	87	90	92	95	
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	53,40	54,39	55,38	56,37	57,36	58,35	59,34	
19	Indeks Perlindungan Anak	Poin	48,03	48,48	48,73	49,18	49,63	50,08	50,53	
20	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Poin	72,46	73,45	74,44	75,43	76,42	77,41	78,4	
21	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,543	0,563	0,593	0,663	0,703	0,723	0,753	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	54,33	55,32	56,31	57,30	58,29	59,28	60,27	
23	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6095	0,6395	0,6895	0,7095	0,7395	0,7795	0,8095	
24	Persentase Desa Mandiri	Persen	1,27	2,77	4,52	6,27	7,99	9,49	10,99	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Angka Ketergantungan	Persen	56,68	56,43	56,18	55,93	55,68	55,43	55,18	
2	Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	1,56	1,58	1,60	1,63	1,68	1,71	1,74	
3	Rasio PDRB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,45	0,47	0,50	0,53	0,58	0,62	0,65	
4	Rasio Kewirausahaan	Persen	52,08	53,19	55,3	57,41	59,52	61,63	63,74	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	85,23	97,77	97,78	97,79	97,81	97,83	97,84	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	Persen	97,23	97,26	97,29	97,32	97,39	97,43	97,46	
7	Indeks Inovasi Daerah	Poin	15,00	17,50	21,00	26,50	33,00	38,50	44,00	
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	58,78	59,53	60,38	61,43	62,78	64,13	65,48	
9	Tingkat Inflasi	Persen	2,12	2,07	1,99	2,00	2,12	2,18	2,00	
10	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap PDRB Provinsi	Persen	2,93	2,98	3,04	3,09	3,16	3,21	3,29	
11	Realisasi investasi PMA	Rp. Miliar	118,926	137,998	157,070	176,142	195,214	214,286	233,358	
12	Realisasi investasi PMDN	Rp. Miliar	395,895	396,746	397,597	398,448	399,299	400,150	401,001	
13	Angka Literasi	Persen	35,21	40,09	48,19	56,29	64,40	72,50	80,60	
14	Angka Numerasi	Persen	32,91	39,11	47,46	55,81	64,15	72,50	80,85	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	67,88	69,13	70,38	71,63	72,88	74,13	75,38	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	2,18	2,43	2,68	2,71	2,96	3,21	3,51	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,21	2,26	2,41	2,76	2,91	3,16	3,21	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	81,95	83,45	84,95	86,45	87,95	89,45	90,95	
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	90,00	90,75	91,50	92,35	93,20	94,05	94,90	
6	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	47,14	48,89	50,94	53,19	54,94	56,69	58,44	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2027	2028	2029	2030	Ket
7	Indeks Demokrasi Indonesia	Persen	77,39	78,14	78,89	79,64	80,39	81,14	81,89			
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Poin	93,83	93,98	94,13	94,28	94,43	94,58	94,73			
9	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	-	2,50	2,53	2,59	2,68	2,8	2,95			
10	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	100	100	100	100	100	100	100			
11	Nilai Maturitas SPIP	Poin	2,855	2,9005	2,946	3,0115	3,067	3,1325	3,198			
B	INDIKATOR KINERJA KUNCI											
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar											
A	Bidang Pendidikan											
1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 4-6 Tahun	Persen	37,36	39,66	42,36	45,18	48,17	50,47	52,77			
2	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun	Persen	90,22	90,52	91,22	92,44	93,43	95,73	98,03			
3	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun	Persen	74,05	74,35	75,05	76,27	77,26	79,56	81,86			
4	Angka Partisipasi Kasar PAUD	Persen	62,72	62,82	64,10	66,30	69,00	71,70	74,40			
5	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	Persen	90,77	91,49	92,21	92,93	93,65	94,37	95,09			
6	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	Persen	84,44	85,09	86,74	88,39	90,04	91,69	93,34			
7	Angka Partisipasi Murni PAUD/ sederajat	Persen	56,53	57,18	58,93	60,58	63,33	65,18	66,83			
8	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	Persen	82,16	82,81	84,56	86,21	87,96	92,89	100			
9	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	Persen	72,81	77,09	81,37	85,65	89,93	94,77	96,22			
B	Bidang Kesehatan											
1	Jumlah kematian bayi	kasus	59	53	48	40	35	29	25			



No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
2	Jumlah Kematian Balita	kasus	59	50	40	30	20	10	5	
3	Jumlah kematian ibu	kasus	7	6	5	4	3	2	1	
4	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	19,11	19,06	19,01	18,96	18,91	18,86	18,81	
5	Persentase Posyandu Purnama	Persen	20,44	19,8	19,16	18,52	17,88	17,24	16,6	
6	Persentase Posyandu Mandiri	Persen	4,89	5,74	6,59	7,44	8,29	9,14	10,00	
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	rasio	0,0133	0,0131	0,0130	0,0171	0,0168	0,0166	0,0203	
8	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,3066	0,3282	0,3417	0,3455	0,3577	0,3695	0,3704	
9	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	5,2 / 1000	5,3 / 1000	5,3 / 1000	5,4 / 1000	5,4 / 1000	5,5 / 1000	5,5 / 1000	
10	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC)	Persen	57,40	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00	
12	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	Persen	69,83	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	
13	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	Angka Kesakitan Malaria	Per 1.000 penduduk	3,5	2,50	<1	<1	<1	<1	<1	
15	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	Persen	0,1600	0,1520	0,1440	0,1370	0,1300	0,1230	0,0117	
16	Persentasi Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
17	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Persen	155,56	155,56	161,11	161,11	166,67	166,67	177,78	
18	Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	Persen	34,18	37,34	39,87	41,14	44,30	47,47	50,63	
19	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	35,00	36,00	46,00	55,00	61,00	70,00	75,00	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
20	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	52,60	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00	
21	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	65,00	65,00	68,00	71,00	75,00	80,00	85,00	
22	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
C	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	44,16	44,21	44,86	45,71	46,46	47,32	48,82	
2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,12	79,27	79,38	79,53	79,78	79,93	80,10	
3	Persentase Jalan Desa Strategis yang dalam kondisi mantap	Persen	6,93	11,93	16,93	21,93	26,93	31,93	36,93	
4	persentase Panjang Jaringan Irigasi kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	33,69	34,19	34,69	35,19	35,69	36,19	36,69	
5	Rasio Kepatuhan rencana tata ruang	Persen	98,90	99,08	99,27	99,45	99,63	99,82	100	
6	Panjang sempadan pantai yang dilindungi	Meter	587.087,74	587.487,74	587.887,74	588.287,74	588.687,74	589.087,74	589.487,74	
7	Persentase Rumah Tangga akses air minum layak	Persen	87,28	87,63	87,98	88,48	89,13	89,63	90,13	
8	Persentase rumah tangga Akses sanitasi layak	Persen	85,83	87,08	88,08	88,33	88,58	88,83	89,08	
9	Persentase perencanaan penataan ruang	Persen	65,4	67,9	69,4	71,15	72,65	74,15	75,15	
D.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni	Persen	58,78	59,53	60,38	61,43	62,78	64,13	65,48	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
2	Persentase Penurunan luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	0,55	0,52	0,51	0,5	0,49	0,48	0,47	
3	Persentase korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Rasio elektrifikasi	Persen	98,13	98,18	98,34	98,48	98,64	98,81	98,93	
E.	Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Tingkat penyelesaian kasus keamanan, ketertiban dan ketenteraman	Persen	68,80	73,80	100	100	100	100	100	
2	Angka kriminalitas tertangani (<i>Clearance rate</i>)	Persen	68,80	71,30	73,80	76,30	78,80	81,70	84,20	
3	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	180.000	189.000	192.780	196.636	200.568	204.580	208.671	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	orang	174.550	183.278	186.943	190.682	194.496	198.385	202.353	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi akibat bencana	orang	150	155	158	161	164	166	169	
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Risiko Bencana	Poin	128,21	123,71	120,21	113,71	109,21	103,71	99,21	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
F.	Bidang Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase keluarga prasejahtera yang memperoleh jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
A.	Bidang Tenaga Kerja									
1	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,27	2,23	2,18	2,13	2,08	2,03	1,00	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	5,00	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	5,60	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp juta	23,28	23,29	23,3	23,31	23,32	23,33	23,34	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56	66,67	77,78	
5	Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	Persen	21,92	24,42	26,92	29,42	31,92	34,42	36,92	
B.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender	Persen	92,75	92,77	92,8	92,82	92,85	92,89	92,92	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	51,52	52,02	52,52	53,02	53,52	54,02	54,52	
3	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
C.	Bidang Pangan									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	70,83	71,33	71,88	72,43	72,99	73,59	74,21	
2	Persentase Desa dan Kelurahan Rawan pangan	Persen	52	50,5	49,25	48,00	46,75	45,50	44,75	
D.	Bidang Pertanahan									
1	Persentase tanah pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	31,53	32,03	32,53	33,03	33,53	34,73	35,93	
E.	Bidang Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,81	72,78	72,91	73,03	73,16	73,28	73,42	
1	Volume sampah perkotaan tertangani	m ³	12.480	14.352	16.224	18.096	19.968	21.840	23.712	
2	Jumlah kegiatan pembangunan yang memiliki ijin lingkungan	Izin	87	105	123	141	159	177	195	
3	Indeks Kualitas Air	Poin	50	52,73	55,73	57,93	58,03	58,13	58,23	
4	Indeks Kualitas Udara	Poin	91,1	91,19	91,29	91,35	91,46	91,51	91,62	
5	Indeks Kualitas Lahan	Poin	69,01	69,56	69,92	70,05	70,25	70,32	70,45	
5	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	32,59	32,64	32,94	33,25	34,39	35,25	36,31	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
F.	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Persen	99,04	99,06	99,08	99,1	99,12	99,14	100	
2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran Balita	Persen	61,12	61,12	61,92	62,72	62,82	62,92	63,02	
3	Cakupan kepemilikan akta Nikah	Persen	72,12	72,92	73,72	74,52	75,32	76,12	76,92	
4	Cakupan kepemilikan akta cerai	Persen	70,23	70,41	70,59	70,77	70,95	71,13	71,31	
5	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	81,22	81,40	81,58	81,76	81,94	82,12	82,30	
6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	67,46	68,34	69,22	70,1	70,98	71,86	72,74	
G.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1	Persentase desa sangat tertinggal	Persen	1,90	1,14	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Persentase LPM Berprestasi	Persen	17,65	17,65	23,53	29,41	35,29	41,18	58,82	
3	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Bumdes Maju	Persen	0	0	0	0	0	1	1	
H.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	38,73	39,23	39,73	40,23	40,73	41,23	41,73	
2	Persentasi PUS yang mendapat pelayanan KB	Persen	3,98	17,18	28,19	39,19	50,19	61,20	70,00	
3	Angka kelahiran total (<i>Fertility rate</i>)	Persen	2,21	2,12	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	
4	<i>Age Spesific Fertility Rate (Age FR)</i> 15-19 thn	Persen	32,70	32,67	32,64	32,61	32,58	32,55	32,52	
5	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	Persen	63,21	63,73	64,25	64,77	65,29	65,81	66,33	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
I.	Bidang Perhubungan									
1	Persentase layanan angkutan darat	Persen	67,05	67,55	68,05	68,55	69,05	69,55	70,05	
2	Persentase tambatan perahu dalam kondisi baik	Persen	74,63	76,13	77,63	79,13	80,63	82,13	83,63	
3	Rasio Izin Trayek	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
J.	Bidang Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan layanan internet	Persen	75,20	76,70	78,20	79,70	81,20	82,70	84,20	
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	32,05	33,55	35,05	36,55	38,05	39,55	41,05	
3	Persentase OPD yang terkoneksi dengan domain Internet Pemda Alor	Persen	35,62	42,77	62,25	70,18	82,66	90,54	100	
K.	Bidang Koperasi UKM									
1	Persentase koperasi sehat	Persen	20,22	21,72	23,22	24,72	26,22	27,72	29,22	
2	Persentase UMKM Mandiri	Persen	15,00	16,50	18,00	19,50	21,00	22,50	24,00	
L.	Bidang Penanaman Modal									
1	Realisasi Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rp. Milyar	395,895	396,746	397,597	398,448	399,299	400,150	401,001	
2	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	jumlah	10	11	12	13	14	15	16	
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	Persen	1,98	2,48	2,58	2,68	2,78	2,88	2,98	
M.	Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	20,37	21,42	22,47	23,52	24,57	25,62	26,67	



No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
2	Jumlah atlet berprestasi tingkat regional dan nasional	Orang	105	110	115	120	125	130	135	
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	50,05	51,55	53,05	54,55	56,05	57,55	60,00	
N.	Bidang Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,05	2,17	2,39	2,54	2,66	2,81	2,93	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan sistem data dan statistik yang terintegrasi	Persen	31,25	42,19	100	100	100	100	100	
4	Jumlah OPD produsen data yang terintegrasi dalam sistem Alor Satu Data	Unit	20	27	64	64	64	64	64	
O	Bidang Kebudayaan									
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	even	1	1	1	1	2	2	2	
2	Jumlah komunitas budaya yang terorganisir (sanggar seni).	Komunitas	30	30	30	30	30	30	30	
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	27	28	29	30	31	32	33	
P	Bidang Perpustakaan									
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap perpustakaan.	Poin	77,29	80,59	83,89	87,19	90,49	93,79	97,09	
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun	Orang	6.694	6.704	6.734	6.809	6.889	6.964	7.000	



No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
Q	Bidang Kearsipan					2027	2028			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	10	13,33	16,67	20,00	23,33	26,67	30	
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan.	Orang	3	4	6	7	8	9	10	
III.	Urusan Pilihan									
A.	Bidang Pariwisata									
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Orang	21.479	22.553	23.627	24.701	25.775	26.849	27.923	
2	Nilai sektor Pariwisata terhadap PDRB	Rp. Miliar	19,64	21,49	23,74	26,59	29,84	33,69	37,94	
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	3	5	5	5	7	7	7	
B.	Bidang Pertanian									
1	Nilai Tukar Petani	Poin	91,54	93,21	96,72	98.34	98.34	98.34	99,05	
2	Laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (Persen)	Persen	2,48	2,98	3,48	3,98	4,48	4,98	5,48	
3	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Persen	31,91	32,41	32,91	33,41	33,91	34,41	34,91	
4	Produktivitas padi sawah per hektar	ton/ha	5,7	6,5	6,5	7	7	7	7	
5	Produktivitas padi ladang per hektar	ton/ha	4,5	5,2	5,5	6	7	7	7	
6	Produktivitas Jagung per hektar	ton/ha	3,5	3,6	4,2	4,8	5,3	5,7	6	
7	Kontribusi sektor peternakan	Rp Juta	465.615	474.927	484.426	494.114	503.997	514.077	524.358	
8	Persentase penanganan kasus penyakit ternak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
C.	Bidang Kelautan dan Perikanan									
1	Cakupan kelompok pengolah rumput laut berkembang	Persen	53,06	54,06	55,06	56,06	57,06	58,06	60,00	
2	Kontribusi sektor perikanan	Persen	31,84	32,34	32,84	33,34	33,84	34,34	34,84	
3	Cakupan bina kelompok nelayan yang berkembang	Persen	46,67	48,17	48,67	49,17	49,67	50,17	51,00	
D.	Bidang Perindustrian									
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	10,29	11,76	13,24	14,71	16,18	17,65	19,12	
2	Persentase pertambahan industri kecil dan menengah	Persen	1,47	2,94	4,41	5,88	7,35	8,82	10,29	
3	Cakupan sentra industri yang beroperasi	Persen	4	4	4	4	4	4	4	
E.	Bidang Perdagangan									
1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	Persen	35,05	35,55	36,95	38,25	38,85	40,05	42,00	
2	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	20,03	20,53	21,73	23,23	24,43	24,93	25,00	
3	Rasio PDRB Sektor Perdagangan	Persen	13,22	13,57	13,92	14,27	14,62	14,97	15,32	
F.	Bidang Transmigrasi									
1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitas pembinaannya	SPT	2	2	2	2	2	2	2	
2	Persentase transmigran swakarsa	Persen	0	0	0	1	1	1	1	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
IV	Pendukung Urusan Pemerintahan									
A.	Sekretariat Daerah									
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
B.	Sekretariat DPRD									
1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
V	Penunjang Urusan Pemerintahan									
A.	Bidang Perencanaan Pembangunan									
1	Tersedianya dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dok	5	3	1	1	2	1	1	
2	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penjabaran konsistensi program RKPD dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase target jangka menengah daerah yang tercapai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
B.	Bidang Keuangan									
1	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00	1,00	1,00	
2	Persentase Belanja Pendidikan	Persen	27,49	29,67	29,72	29,78	29,81	29,83	29,84	
3	Persentase Belanja Kesehatan	Persen	19,25	19,53	19,58	19,64	19,67	19,69	19,7	
4	Persentase Belanja Pegawai	Persen	33,40	47,87	52,77	52,84	51,90	50,83	50,75	
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Baseline (2024)	2025	2026	Target Tahun		2029	2030	Ket
						2027	2028			
C.	Bidang Kepegawaian									
1	Indeks Profesionalitas ASN	poin	65,15	67,65	70,15	72,65	75,15	77,65	80,15	
2	Jumlah pelanggaran disiplin ASN	kasus	11	5	3	0	0	0	0	
D.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM	Persen	12,35	12,35	12,85	13,35	13,85	14,35	14,85	
E.	Bidang Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan inovasi daerah	Persen	14,06	15,06	16,06	17,06	18,06	19,06	20,06	
F.	Bidang Pengelolaan Perbatasan									
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Poin	na	52,65	53,9	55,30	56,8	58,80	60,5	1
2	Persentase penyelesaian batas wilayah	%	14,29	15,79	17,29	18,29	19,59	20,09	20,59	2
VI.	Pengawasan Urusan Pemerintahan									
A.	Bidang Inspektorat Daerah									
1	Nilai Maturitas SPIP	Poin	2,855	2,872	2,880	2,886	2,894	2,899	2,904	
2	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	81,29	83,05	84,05	85,00	85,10	85,50	86,00	

IKD mencerminkan capaian kinerja pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi lokal, tata kelola birokrasi, serta peningkatan kualitas kelembagaan. Penentuan IKD dilakukan secara terukur.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 berlandaskan pada prinsip perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. RPJMD ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, diperlukan mekanisme transisi yang memastikan kesinambungan perencanaan tahunan saat RPJMD berakhir, serta strategi pembiayaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Alor bertanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Penyebarluasan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi dan partisipasi publik. Seluruh perangkat daerah wajib menjalankan program yang tertuang dalam RPJMD dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta sektor swasta dan masyarakat.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Penyusunan RKPD Kabupaten Alor Tahun 2026-2029 harus merujuk pada RPJMD ini, yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Alor memiliki peran strategis dalam mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan RPJMD untuk memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Alor dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengoptimalkan seluruh potensi daerah.
2. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan partisipasi publik.
3. Perangkat Daerah wajib menjalankan program yang tertuang dalam RPJMD dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta sektor swasta dan masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Alor Tahun 2026-2029 harus berpedoman pada RPJMD, yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
6. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Alor bertanggung jawab dalam mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan RPJMD.

5.2. PEDOMAN TRANSISI

Penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya RPJMD baru berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Alor 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2030, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Tahun 2030 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Alor Tahun 2030, yang dijalankan sesuai dengan jadwal peraturan perundang-undangan. Penyusunannya dilakukan dengan pendekatan perencanaan yang berkualitas, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan hingga Tahun 2030, isu-isu strategis daerah dan nasional, serta prioritas pembangunan Kabupaten Alor.



5.3. PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program prioritas yang membutuhkan pendanaan besar, sementara kapasitas keuangan daerah terbatas, maka kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang memiliki potensi pendapatan jangka panjang. Kemitraan dengan dunia usaha juga dioptimalkan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan guna mendukung kesejahteraan sosial, pemulihan lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkolaborasi dengan lembaga dalam negeri dan internasional untuk menjalankan program yang berbasis kearifan lokal serta meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi, BUMN/BUMD, LSM, perguruan tinggi, serta lembaga internasional, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dasar, serta memperbaiki layanan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya strategi pelaksanaan, pedoman transisi, dan pengembangan pembiayaan pembangunan yang terarah, diharapkan RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor.